Dilengkapi dengan Dokumen Rahasia:
Dubes AS Marshall Green, 1 Oktober 1965
Memorandum CIA, 6 Oktober 1965

BUNG KARNO MENGGUGAT!

Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30S

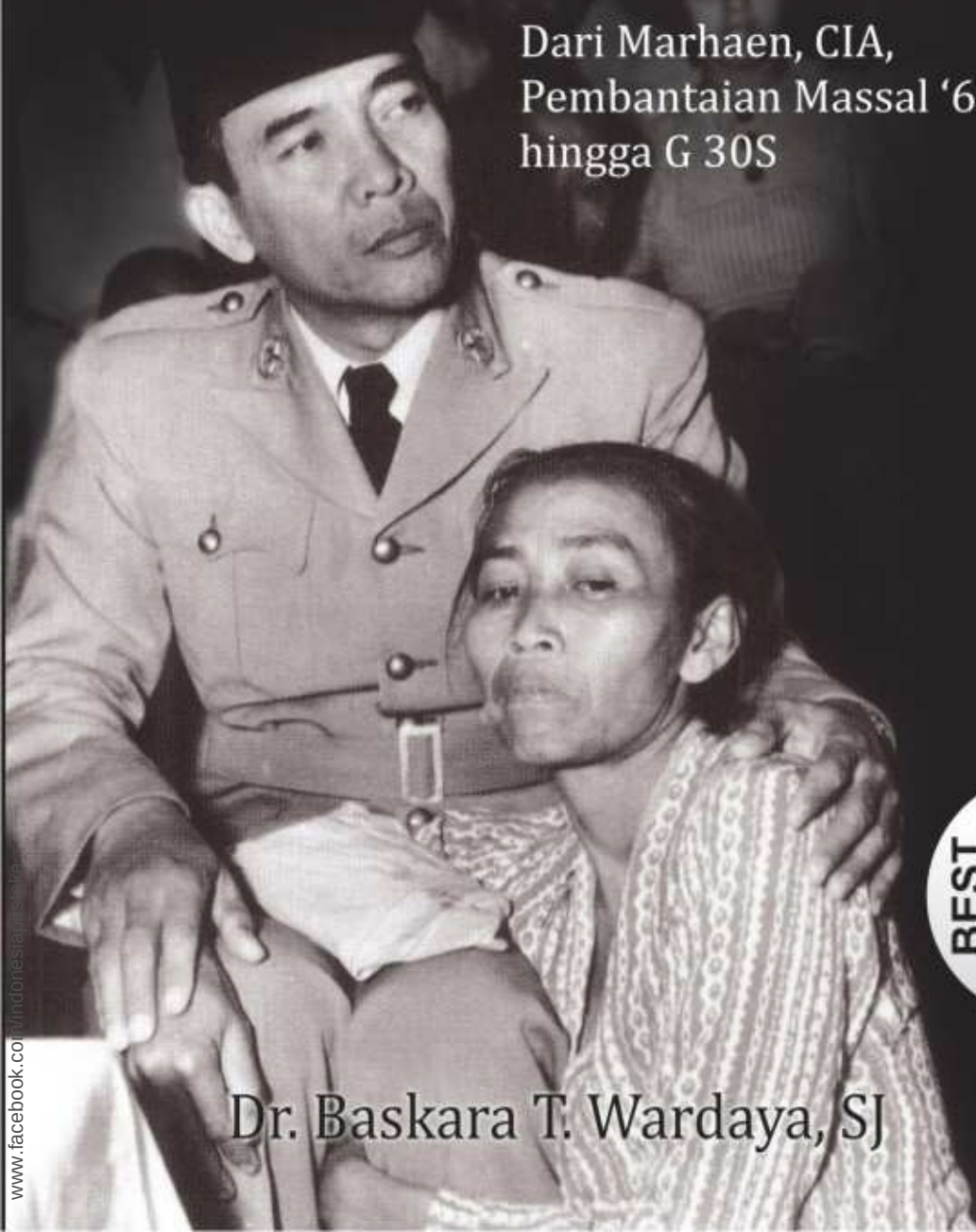

BEST SELLER
edisi revisi

Dr. Baskara T. Wardaya, SJ

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bung KARNO MENGGUGAT!

Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S

Baskara T Wardaya, SJ

GALANG PRESS

www.facebook.com/indonesiapustaka

BUNG KARNO MENGGUGAT!
Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30 S

Penulis: Baskara T Wardaya, SJ
Penyunting: Sunarwoto Dema, Islah Gusmian
Perancang Sampul: Teguh Prastowo
Penata Letak: Mas De-Em
Kredit foto: photo.indoindians.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, II, III (2006); IV, V (2007); VI (2008)

PENERBIT GALANGPRESS (Anggota Ikapi)
Jln. Anggrek 3/34 Baciro Baru Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 554985
email: redaksi@galangpress.com
www.galangpress.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Wardaya, Baskara T.,
BUNG KARNO MENGGUGAT! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30 S;
Yogyakarta: Galangpress;
Cet. VI, 2008; 288 Halaman; 150 x 210 mm
ISBN: 979 - 24 - 9902 - 4

I. Politik
I. judul II. Dema, Sunarwoto

Dicetak oleh:
PERCETAKAN GALANGPRESS
Jln. Anggrek 3/34 Baciro Baru Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 554985, 554986 Faks. (0274) 554985
email: percetakan@galangpress.com

Distributor tunggal:
PT BUKU KITA
Jln. Kelapa Hijau No.22, RT 006/03
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta 12620
Telp. (021) 7888 1850 Fax. (021) 7888 1860

www.facebook.com/indonesiapustaka

Untuk N.S. dan para pecinta sejarah Indonesia

www.facebook.com/indonesiapustaka

DAFTAR ISI

BELAJAR DARI BUNG KARNO:

Sekadar Pengantar — 9

BAGIAN I: MENGGUGAT KOLONIALISME

Memberontak Kemapanan — 27

Bertemu Marhaen, Menggugat Kolonialisme — 37

Sekadar Catatan untuk Bung Karno — 53

BAGIAN II: MENGGUGAT KETERLIBATAN AMERIKA

Keterlibatan Amerika di Indonesia — 75

CIA Bergerak — 97

CIA Gagal — 125

BAGIAN III: MENGGUGAT TRAGEDI 1965

Dalang Tragedi 1965 — 143

Washington dan Tragedi 1965 — 149

Menembus Politik Ingatan — 159

Menggugat Mitos-Mitos Orde Baru — 179

BAGIAN IV: MENGGUGAT KEPEMIMPINAN BANGSA

Bung Karno sebagai Guru Bangsa — 201

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sukarno, Soeharto dan Penguasa tunggal — 221
Politik Penguasa Tunggal dan Melemahnya Masyarakat — 241

PENUTUP — 265
DAFTAR PUSTAKA — 269
TENTANG PENULIS — 287

www.facebook.com/indonesiapustaka

BELAJAR DARI BUNG KARNO
Sekadar Pengantar

Para aktivis kadang-kadang meromantisir tokoh masa lalu, misalnya Bung Karno. Padahal banyak juga yang dapat kita pelajari dari kesalahan-kesalahan beliau saat itu.

Goenawan Mohamad (1999)

KETIKA harus menjawab pertanyaan apakah Sejarah memiliki arti, dengan tegas filsuf Karl Popper mengatakan tidak. "Saya jawab: *Sejarah tidak punya arti,"* ungkap Popper.[1] Alasannya? Karena, menurutnya, fakta masa lalu sebagai fakta masa lalu—atau peristiwa masa lalu sebagai peristiwa masa lalu—tidak pernah memiliki arti pada dirinya sendiri, khususnya bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Fakta itu baru memiliki arti bagi kita kalau kita memutuskan untuk memberinya arti. *"Facts as such have no meaning; they can gain it only through our decisions ..."* tandasnya.[2] Dengan kata lain, memiliki arti atau tidaknya suatu peristiwa—atau aktivitas seorang tokoh publik—di masa lalu, di mata Popper tergantung pada kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Semuanya terserah pada bagaimana kita mempelajari atau menelitinya untuk kemudian memberikan arti padanya. Bertolak dari arti atau makna yang kita berikan itulah kita belajar dari fakta masa lalu itu untuk hidup kita di masa kini dan selanjutnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Figur Publik

Hal itu kiranya berlaku juga bagi kita dalam melihat sejarah Bangsa Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan Bung Karno dan kiprah politisnya. Sebagai fakta sejarah, apa yang dilakukan oleh salah seorang pendiri *(founding father)* Republik Indonesia itu telah "selesai" ketika dia wafat, ketika dia secara fisik meninggalkan negeri yang amat dia cintai ini. Akan tetapi, sejauh mana berbagai keputusan yang dia ambil, bermacam tindakan yang dia lakukan, sekian banyak pidato yang dia ucapkan, serta segala cita-cita yang dia perjuangkan itu me-miliki arti, semuanya tergantung pada kita, yakni pada bagai-mana kita memaknai semua itu.

Lepas dari apakah seseorang senang atau tidak senang dengan Bung Karno, harus diakui bahwa dia merupakan tokoh penting—kalau tak mau dikatakan "sentral"—dalam dinamika sosial-politik di Indonesia modern, khususnya sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga pertengahan tahun 1960-an. Begitu luas dan mendalam pengaruh yang dia miliki pada perpolitikan Indonesia waktu itu, hingga kita nyaris tak mungkin berbicara mengenai kehidupan politik Indonesia periode itu tanpa menyebut namanya.

Itulah sebabnya, *pertama*, tak akan memadai kalau kita hanya melihat Bung Karno melulu sebagai seorang individu saja. Apalagi kalau sekadar memperdebatkan "baik" atau "buruk" kualitas dia secara pribadi. Sebagai seorang tokoh yang kuat dan luas pengaruhnya dalam masyarakat Indonesia dia perlu dilihat juga dalam kapasitasnya sebagai figur publik yang amat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial-politik pada zamannya. Kita tahu,

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sukarno muda

www.facebook.com/indonesiapustaka

pembahasan yang melulu berfokus pada pribadinya akan cenderung melahirkan sikap meremehkan atau mengkultuskannya. *Kedua*, tentu tidak akan *fair* juga jika kita menilai Bung Karno hanya secara hitam-putih, apalagi di luar konteks di mana dia berada dan bertindak. Lebih tidak *fair* lagi jika kita menilai dia melulu berdasarkan pada *satu* peristiwa tertentu saja. Guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang—dan dapat belajar dari—Presiden Pertama RI itu, diperlukan kesediaan untuk melihatnya dalam berbagai konteks yang melingkunginya saat dia harus menentukan suatu sikap, mengambil suatu keputusan, atau menyampaikan suatu pesan tertentu.

Sulit disangkal bahwa Bung Karno rela dikejar-kejar, bersedia dipenjara, tak keberatan disiksa secara fisik maupun batin, serta siap diasingkan oleh Belanda dan sebagainya, bukan terutama karena ia mau sekadar mencari keuntungan pribadi atau keluarganya. Ia sanggup menjalani semua itu lebih karena ada sebuah cita-cita yang luhur yang digenggamnya, yakni cita-cita menjadikan masyarakatnya bebas dari penjajahan dan tampil sebagai bangsa yang bermartabat.

Sulit disangkal pula bahwa sejak ia menjabat sebagai presiden, ada banyak tindakan dan perkataan dia yang dapat disetujui atau tak dapat disetujui, dapat didukung atau tak dapat didukung. Namun bahkan kalaupun ada suatu tindakan yang kita tidak disetujui, kita tahu bahwa ia melakukan tindakan itu bukan untuk sekadar mengeruk kekayaan negara bagi dirinya atau orang-orang dekatnya. Ada suatu gagasan atau cita-cita tertentu yang ada di baliknya. Oleh karena itu, sudah selayaknya bahwa dalam melihat Bung Karno kita tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

hanya befokus pada dirinya sebagai seorang pribadi, melainkan lebih pada apa yang sebenarnya ia cita-citakan dan bagaimana ia berusaha mewujudkan cita-cita itu.

Dalam kaitan dengan ini semua, kiranya penting untuk segera disadari bahwa kita tidak hanya ingin belajar dari segala keberhasilan Bung Karno. Kita juga ingin belajar dari segala kelemahan dan kegagalannya sebagai seorang tokoh publik. Sebagaimana dikatakan dalam kutipan di awal bab ini, dari kesalahan-kesalahan Bung Karno pun kita bisa belajar banyak. Sikap kritis terhadap dia tidak dimaksudkan untuk merendahkannya, melainkan justru untuk mengangkatnya sebagai sumber inspirasi bangsa. Pun sebagai bangsa yang semakin dewasa kita juga dituntut untuk semakin dewasa pula dalam memandang tokoh-tokoh kunci dalam sejarah kita. Kita tidak ingin bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Bung Karno dan para tokoh yang lain itu sekadar menjadi fakta masa silam yang mati dan tak memiliki arti sama sekali. Kita ingin memberi makna pada apa yang telah mereka lakukan sehingga semuanya menjadi "hidup kembali" dan memiliki arti bagi kita sekarang.

Dengan latar belakang itulah buku ini ditulis. Melalui buku ini, Anda akan diajak untuk sejenak menelusuri kembali jejak-jejak pemikiran dan berbagai keputusan politis Bung Karno. Anda akan diundang untuk melihat lagi bagaimana Bung Karno mencoba dengan setia mengolah dan mengembangkan gagasan-gagasannya sejak dia masih muda. Akan kita ikuti bagaimana dengan penuh semangat dia berjuang melawan berbagai bentuk ketidakadilan pada zamannya, karena dia menginginkan masyarakatnya merdeka dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

bermartabat seperti bangsa-bangsa lain. Pada saat yang sama, akan kita saksikan bahwa pada tataran kehidupan sosial-politik yang nyata *(real politik)*, ternyata tidak semua yang dia cita-citakan itu bisa dengan mulus terwujud. Alasannya, karena seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai hambatan dan tantangan, baik itu pada lingkup nasional maupun lingkup internasional. Pada lingkup nasional, misalnya, ketegangan antara Angkatan Darat dan PKI serta berbagai elemen lain yang ada dalam masyarakat, membuatnya tidak mudah untuk mengambil suatu keputusan politik. Sementara itu, pada lingkup internasional, ketegangan Perang Dingin terus menggedor gerbang Indonesia, bahkan sering masuk tanpa diundang. Di tengah semua itu, Sukarno sebagai presiden harus memilih dan mengambil keputusan, dan berdasarkan berbagai pilihan dan keputusan itulah kita akan mencoba menilai dan belajar dari Sang Proklamator ini.

Strongman

Beberapa tahap akan kita lalui dalam proses penilaian dan pembelajaran itu. Pada Bagian Pertama akan coba kita simak lagi bagaimana gagasan-gagasan Sukarno muda berawal dan diformulasikan, untuk kemudian dipakai olehnya dalam menentang bermacam praktik ketidakadilan waktu itu. Akan tampak bahwa sejak mudanya Sukarno memang memiliki kecenderungan untuk melawan kemapanan, terutama kolonialisme, imperialisme dan elitisme. Akan tampak pula bahwa Sukarno muda juga memiliki rasa solidaritas tinggi pada bangsanya. Pertemuannya dengan, dan refleksinya atas, petani "Marhaen", misalnya, merupakan salah satu momen

www.facebook.com/indonesiapustaka

Gaya pidato Bung Karno dihadapan rakyat Indonesia

www.facebook.com/indonesiapustaka

terpenting dalam mempertemukan teori-teori sosial dengan realitas konkret masyarakatnya—katakanlah mempertemukan "buku" dan "bumi". Ia pun berseru agar kaum nasionalis, agamawan dan komunis bahu-membahu menentang ketidak-adilan di masyarakat. Namun tentu saja Bung Karno bukan seorang politikus yang tanpa cacat. Ada sejumlah kelemahan di sana-sini yang kiranya perlu kita simak pula. Oleh karena itu, pada halaman-halaman terakhir dari bagian ini, akan kita sertakan sejumlah catatan kritis terhadap gagasan-gagasan Sukarno muda itu.

Pada Bagian Kedua akan kita amati bagaimana dinamika politik internasional ikut menentukan berbagai tindakan yang diambil oleh Presiden Sukarno baik di dalam negeri maupun di dalam politik internasional. Ketegangan Perang Dingin antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur pimpinan Uni Soviet dengan cepat menyeruak masuk ke dalam "rumah" Indonesia dan turut membuat dinamika politik di negeri ini menjadi centang-perentang karenanya. Takut bahwa Indonesia akan menjadi negara Komunis—entah karena kedekatannya dengan Blok Timur atau berkat pesatnya perkembangan PKI—Amerika memutuskan untuk ikut campur tangan secara langsung terhadap dinamika politik negeri ini. Kalau perlu dengan menyingkirkan Sukarno sebagai pemimpinnya. Sifat rahasia dari keterlibatan itu mendorong Washington untuk memanfaatkan CIA (dan bukan Kedubes AS di Jakarta) sebagai pelaksana lapangan. Melalui dukungan terhadap pemberontakan-daerah PRRI dan kemudian Permesta, CIA berusaha merobohkan kekuatan dan legitimasi Pemerintah Pusat di

www.facebook.com/indonesiapustaka

Jakarta. Meskipun melibatkan operasi-operasi militer besar-besaran, akhirnya usaha CIA itu pun kandas di jalan.

Pada Bagian Ketiga, secara khusus kita akan melihat kembali Bung Karno dalam kaitannya dengan Tragedi 1965. Selama ini, sejumlah pihak lebih suka bersibuk-ria untuk berdebat mengenai siapa sebenarnya yang menjadi "dalang" dari operasi militer "Gerakan Tigapuluh September" yang terkenal itu. Secara lebih spesifik, sejumlah pihak bahkan gemar menyibukkan diri dengan pertanyaan apakah Sukarno terlibat atau tidak terlibat dalam tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang sering dibubuhi tanda "garis-miring" dan kata "PKI" itu. Wacana demikian tentu menarik dan penting, namun jika tak hati-hati ada dua kerugian yang dapat muncul. *Pertama,* orang akan menjadi sibuk dengan berbagai macam "teori konspirasi" di seputar peristiwa tragis pada menit-menit pertama bulan Oktober 1965 itu. Dengan begitu, orang lantas lupa akan mereka yang telah menjadi korban peristiwa berdarah tersebut—baik para jenderal maupun ratusan ribu korban lain di negeri ini. *Kedua,* orang juga menjadi tidak ingat bahwa monopoli narasi atas apa yang terjadi pada tahun 1965 (baik pembunuhan para jenderal maupun pembantaian terhadap ratusan ribu penduduk Indonesia yang lain) telah dijadikan alat yang efektif untuk mengekang kehidupan sosial-politik-ekonomi di negeri ini sampai berpuluh tahun kemudian.

Guna mendapat inspirasi dari gagasan dan kepemimpinan Bung Karno, pada Bagian Keempat kita akan menelusuri kembali bagaimana Bung Karno dalam kapasitasnya sebagai salah seorang penggagas dan pendiri Republik ini memahami dan mengajarkan Pancasila sebagai dasar negara. Akan kita

www.facebook.com/indonesiapustaka

lihat pula bagaimana dia memahami dan melaksanakan kekuasaan yang diberikan padanya. Akan tampak bahwa pada masa mudanya Bung Karno adalah seorang aktivis politik yang terbuka, demokratis dan egaliter—sebagaimana misalnya tampak dalam panggilan "Bung" itu sendiri. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya akan kelihatan bahwa pada masa tuanya Bung Karno menjadi kurang demokratis, bahkan cenderung bersifat otoriter. Tanggal-nya Dwi-Tunggal Sukarno-Hatta mungkin merupakan salah satu tanda. Seiring dengan berjalannya waktu, Presiden Sukarno bahkan terkesan membawakan diri sebagai seorang *"strongman"* alias "penguasa-tunggal" atau semacam "orang-kuat". Model kepemimpinan semacam itu, sebagaimana akan kita lihat dalam bagian ini, juga tercermin dengan jelas dalam gaya kepemimpinan pengganti Bung Karno, yakni Soeharto. Berhadapan dengan model kepemimpinan nasional yang demikian dibutuhkan berbagai upaya untuk menciptakan "masyarakat kuat" sebagai *counter*-nya.

Perlu dicatat bahwa buku ini tidak dimaksudkan untuk membantah buku-buku dengan topik serupa yang telah lebih dahulu diterbitkan. Ia lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk sekadar menambah, syukur-syukur memperdalam, wacana yang sudah ada mengenai Bung Karno pada khususnya dan sejarah Republik ini pada umumnya. Jika ternyata ada sejumlah pandangan yang "berseberangan" dengan pandangan-pandangan sebelumnya, biarlah Anda, para pembaca, memberi penilaian. Penilaian yang sehat atas wacana mengenai Bung Karno akan membantu upaya untuk secara

www.facebook.com/indonesiapustaka

sehat memaknai dan belajar dari perjuangan dan gagasan-gagasan Presiden pertama RI itu.

Buku yang sedang Anda tekuni ini tentu saja adalah buah dari suatu proses yang melibatkan banyak orang. Dengan kata lain, banyak orang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan buku ini, dan kepada mereka penulis ingin berterima kasih.

Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Universitas Sanata Dharma (USD) dan Program Pascasarjana USD, karena telah memberikan kesempatan untuk menyusun buku ini di tengah berbagai tugas resmi. Kepada teman-teman di Program Ilmu Religi dan Budaya (IRB) seperti Dr. Budiawan, Dr. St. Sunardi dan Dr. G. Budi Subanar SJ, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Terima kasih serupa saya sampaikan kepada rekan-rekan staf PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik), khususnya Y. Tri Subagya MA, Dr. Nicolaas Warouw, Camelia Tri Lestari S.S. Hilmar Farid dan Fadjar I. Thufail. Diskusi dengan mereka serta rekan-rekan *fellows* PUSdEP amat membantu perumusan berbagai gagasan. Diskusi serupa juga saya lakukan dengan teman-teman dosen maupun mahasiswa Jurusan Sejarah USD, khususnya H. Purwanta MA, Lucia Juningsih MA, dan Silverio R.L. Aji Sampurno MA. Kepada mereka, saya sampaikan rasa terima kasih.

Kepada rekan-rekan Jesuit di Komunitas Bellarminus, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan berbagai sumbangan idenya, khususnya kepada Romo Dr. Hary Susanto SJ dan Romo P. Agung Wijayanto SJ, MA. Kepada Ayahnda V.S. Trisnasusiswa dan Ibunda M.M. Sutyasmie, saya juga ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kecintaan mereka pada Bung Karno membuat saya tertarik untuk terus belajar tentang dan dari Sang Proklamator ini. Terima kasih yang sama saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa yang skripsi atau tesisnya saya bantu, seperti Fransisca Romana, Iyus Yustina, Dyah P. Normalasari, Yuliana E. Sari, L. Caesaria Hartanto, A.F. Setiawati, Hananto Kusumo, Lailatul Fitri, Muchlis A.H, dan yang lain. Dalam berdiskusi dengan mereka, saya merasa diperkaya dan dipertajam pemahaman saya mengenai sejarah Indonesia.

Kepada Almamater saya, Marquette University di Milwaukee (AS), saya ingin mengucapkan terima kasih karena banyak ilmu yang telah saya timba di sana, khususnya melalui tiga orang mentor utama saya, yakni Dr. Athan Theoharis, Romo Dr. Stephen M. Avella dan Dr. Phillip C. Naylor. Kepada Dr. Richard Carhart dan seluruh Staf Fulbright/AMINEF di Jakarta, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih. Berkat beasiswa Fulbright, saya dapat melakukan penelitian *post-doctoral* di Amerika (2004-2005) dan mendapatkan berbagai bahan penting mengenai sejarah Indonesia tahun 1960-an. Bahan-bahan itu amat berguna dalam penulisan buku ini. Dalam mendapatkan bahan-bahan itu saya telah dibantu oleh rekan-rekan staf di Center for Southeast Asian Studies, Jurusan Sejarah dan Perpustakaan Pusat University of Wisconsin-Madison; staf Pepustakaan Lyndon Baines Johnson di Austin, Texas; serta staf Perpustakaan Congress di Washington D.C. Kepada mereka semua saya menyampaikan terima kasih. Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada Dr. Al McCoy, Mary-Jo Studenberg dan Shannon Jarrett atas bimbing-an dan bantuannya selama penelitian.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Tentu saja rasa terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Mas Julius Felicianus, Direktur Galangpress, yang "tega-teganya" menantang saya untuk menulis buku dan menyelesaikannya dalam waktu 3 (tiga) minggu. Semula saya amat ragu dalam menjawab tantangan *"edan"* itu, namun karena dukungan Mas Julius, saya menjadi berani. Untuk itu, saya amat berterima kasih. Kepada rekan Islah Gusmian dan staf Galangpress yang lain saya juga mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dalam berbagai urusan teknis penerbitan buku ini. Selanjutnya, harus diakui bahwa buku ini merupakan produk dari sebuah "kerja kilat", kurang dari sebulan, di tengah kesibukan rutin mengajar dan sebagainya. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa tak mungkin menulis naskah asli yang didukung penelitian yang memadai. Itulah sebabnya sebagian besar bahan yang ada dalam buku ini merupakan pengolahan kembali naskah-naskah yang pernah dipublikasikan sebelumnya, khususnya di harian *Kompas*. (Untuk itu kepada Bpk St. Sularto, saya ingin mengucapkan terima kasih atas penjelasannya perihal hak cipta.) Konsekuensi lain tentu saja adalah adanya banyak kekurangan di dalam buku ini, entah kesalahan teknis maupun substansial. Atas segala kekurangan yang ada penulis mohon maaf. Sekaligus penulis juga memohon komentar dan koreksi dari Anda, sehingga jika nanti ada kesempatan untuk menerbitkan kembali buku ini, edisi berikut akan tampil dengan lebih baik berkat masukan dari Anda.

Membangun Kembali

Kembali ke Karl Popper. Dia juga pernah mengatakan bahwa dua sisi antara fakta sejarah dan pemaknaan atas fakta itu

www.facebook.com/indonesiapustaka

juga menentukan pemahaman orang mengenai apa yang disebut sebagai kemajuan *(progress).* Kalau seseorang percaya bahwa kemajuan itu sudah merupakan keniscayaan sejarah—yang akan terjadi dengan sendirinya entah diusahakan atau tidak—orang itu akan cenderung menggantungkan diri pada sejarah supaya sejarah mengusahakan kemajuan baginya. Tetapi, menurut Popper, "sejarah tak akan bisa melakukan hal itu". Menurutnya, "Ya kita-kita ini, manusia-manusia yang konkret ini, yang bisa melakukannya."[3] Dengan kata lain, maju atau mundurnya umat manusia tidak terutama ditentukan oleh apa yang terjadi di masa lalu, melainkan bagaimana bertolak dari pemahaman atas masa lalu itu manusia membangun masa kini dan masa depannya. Kiranya refleksi demikian amat berguna bagi usaha kita bersama sebagai bangsa.

Pembaca yang budiman, akhir kata penulis ingin mengucapkan selamat meneruskan upaya untuk belajar dari Bung Karno dan zamannya melalui buku sederhana ini. Semoga apa yang Anda temukan dalam buku ini tidak hanya berguna untuk menambah pengetahuan pribadi, melainkan juga berguna untuk menambah semangat dan wawasan kita bersama dalam membangun kembali bangsa ini agar semakin menjadi bangsa yang benar-benar merdeka dan benar-benar bermartabat. Selamat membaca.[]

Yogyakarta, Awal 2006

Baskara T Wardaya SJ

www.facebook.com/indonesiapustaka

Catatan Akhir:

1 Karl Popper, "History Has No Meaning", dalam Hans Meyerhoff, *The Philosophy of History in Our Time* (Garden City, NY: Doubleday, 1959), h. 304.

2 Meyerhoff, h. 311.

3 Meyerhoff, h. 311.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bagian I
MENGGUGAT KOLONIALISME

www.facebook.com/indonesiapustaka

MEMBERONTAK KEMAPANAN[1]

Harus diingat salah satu ciptaan yang bagus sekali pada zaman revolusi, yaitu kata "Bung". Bung Karno tidak pernah menamakan diri (pada waktu itu) pemimpin besar revolusi. Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta, Bung Syahrir. Seolah-olah kata "Bung" menjadi paling tinggi. Itu cukup menunjukkan peranan dari anak muda.

Benedict Anderson (1999)

PADA suatu pagi di awal 1923, sebagai seorang mahasiswa Sukarno muda dipanggil untuk menghadap Rektor ITB waktu itu, yakni Profesor Ir. G. Klopper, M.E. Kepada mahasiswanya yang berusia duapuluh dua tahun itu, sang profesor berkata: "Kamu harus berjanji bahwa sejak sekarang kamu tak akan lagi ikut-ikutan dengan gerakan politik." "Tuan," jawab Sukarno, "Saya berjanji untuk tidak akan mengabaikan kuliah-kuliah yang Tuan berikan di sekolah." "Bukan itu yang saya minta," sanggah Sang Profesor. "Tetapi hanya itu yang bisa saya janjikan, Profesor," jawab Sukarno lagi.[2]

Bandel dan Pemberontak

Ketika pada 6 Juni 1901 Sukarno lahir, keluarganya mungkin berharap bahwa sang jabang bayi akan tumbuh sebagai "anak baik-baik", syukur penurut sebagaimana layaknya anak

www.facebook.com/indonesiapustaka

seorang Mantri Guru yang terhormat. Kalau memang demikian harapan yang ada, rupa-rupanya harapan itu dengan cepat meleset. Ketika menginjak remaja, ternyata Sukarno tumbuh menjadi anak muda yang "bandel" dan cenderung bersikap "pemberontak".

Ingat saja, misalnya, pada usia empatbelas Sukarno sudah berani berpacaran dengan Rika Meelhuysen, teman sekolahnya yang berdarah Belanda itu. Bagi kebanyakan masyarakat waktu itu, berpacaran dengan warga penjajah merupakan sesuatu yang terlarang, karena hal itu dipandang sebagai sebentuk "pengkhianatan" terhadap masyarakat terjajah. Meskipun demikian, remaja Sukarno melakukannya.

Ketika indekos di rumah HOS Cokroaminoto di Surabaya, dan sementara rekan-rekan sesama indekosan suka belajar baik-baik, Sukarno lebih menyukai kegiatan lain. Ia gemar sekali mengikuti pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh para aktivis pergerakan di rumah Cokro, kendati sebenarnya ia masih terlalu muda untuk itu. Tetapi dari upaya "nguping" ini, remaja Sukarno belajar mengenai paham kebangsaan dan kehendak untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Tak heran bahwa, sebagaimana ia kisahkan dalam otobiografinya, pada usia 16 ia memutuskan diri untuk berontak terhadap pemerintah kolonial dan berjuang demi bangsanya.[3] Sikap bandel dan pemberontak ini ternyata berlanjut, bahkan ketika ia telah menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB). Percakapan antara Sukarno muda dan Profesor Klopper di atas kiranya merupakan salah satu contoh yang jelas dari sikap demikian.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sukarno muda memang bandel, bahkan bersikap berani terhadap profesornya; tetapi sikap itu memiliki pendasaran yang luhur, yakni kehendak untuk ikut membebaskan bangsanya dari cengkeraman penjajah. Ketika berusia dua puluh, Sukarno sudah mulai secara lebih serius merealisasikan dorongan yang telah ia rasakan sejak usia 16, yakni memperjuangkan nasib bangsanya, khususnya mereka yang hidup dirundung kemiskinan.[4] Pada usia itu, kebandelan Sukarno antara lain terwujud dalam kegemarannya untuk bolos dari bangku kuliah. Tetapi pembolosan itu bukan didorong oleh keinginan untuk bermalas-malas, melainkan oleh hasrat untuk lebih mengenal bangsanya secara langssung. Ia biasanya lantas jalan-jalan di daerah Bandung Selatan. Pada salah satu kesempatan membolos inilah, menurutnya, ia bertemu dengan seorang petani bernama Marhaen.[5] Petani ini, katanya, memiliki "alat-alat produksi"-nya sendiri dan tidak berada di bawah kekuasaan pemilik pabrik yang represif, tetapi terus saja ia miskin. Sukarno melihat bahwa apa yang dialami oleh Marhaen ini—yang bukan buruh proletar negeri industrial-kapitalis namun miskin—adalah representasi mayoritas petani di negerinya. Mereka miskin karena mereka dijajah bangsa asing. Naluri bandel dan pemberontak mendorong Sukarno muda untuk berjuang mengubah "nasib" yang menimpa Marhaen dan jutaan rekan sebangsanya.

Ketika usianya mencapai 21, Sukarno memutuskan diri untuk tampil pertama kali di depan publik. Waktu itu, ada *rally* umum di Bandung yang diselenggarakan oleh kumpulan organisasi pergerakan nasional "Radicale Concentratie". Pada kesempatan itu, dia meminta waktu untuk ikut menyampaikan

www.facebook.com/indonesiapustaka

orasi politik. Pelototan mata agen-agen PID (dinas polisi rahasia Belanda) di antara para peserta *rally*, tidak membuatnya gentar. Ia justru merasa tertantang untuk bersikap bandel dan melawan kekuasaan kolonial. Kepada peserta *rally*, dia menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tak terbendung. Ia pun berseru: "Dengan ini saya menantang Pemerintah Kolonial." Terhadap pelototan para polisi rahasia itu ia justru menantang: "Kalau berani hentikan perjuangan kami ini."[6]

Desakan Kaum Muda

Ketika tahun 1945 tiba, di antara para aktivis pergerakan waktu itu, Sukarno sudah terhitung sebagai bagian dari "angkatan tua". Ia pun cenderung bersikap hati-hati dan konservatif. Ketika pada pertengahan Agustus tahun itu, muncul kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang terhadap Sekutu, dia sebenarnya ragu. Akan tetapi, untunglah, setelah melalui tarik-ulur yang menegangkan, Sukarno membuka diri terhadap angkatan muda (yang antara lain dipelopori oleh Sukarni, Sayuti Melik, dan lain-lain) dan mengikuti desakan mereka untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Maka pada 17 Agustus 1945, dia, bersama Hatta dan kawan-kawan, menyelesaikan dan mengumandangkan teks proklamasi yang bersejarah itu.

Pengalaman akan pentingnya desakan kaum muda ini, berikut pengalamannya sendiri sebagai bagian dari kaum muda aktivis zaman pergerakan, ternyata memiliki pengaruh yang kuat dan mendalam dalam diri Sukarno. Pada pertengahan 1950-an, ketika ia ingin memperbarui iklim politik Indonesia

www.facebook.com/indonesiapustaka

yang macet waktu itu, dia berpaling kepada kaum muda. Pada periode itu, Sukarno sebagai Presiden merasa bahwa sistem demokrasi liberal yang dijalankan para politisi kawakan tak pantas untuk dilanjutkan. Lepas dari apakah kita kini setuju atau tidak, waktu itu Bung Karno melihat bahwa demokrasi yang berprinsip "50 persen plus 1 selalu betul", terbukti semakin tidak menjamin terwujudnya cita-cita proklamasi. Para pejabat dan politisi tua saat itu banyak ditimpa isu korupsi (bahkan di tingkat menteri) serta tuduhan "mabuk kekuasaan dan jabatan". Banyak orang juga mengeluh bahwa para politisi semakin mengasingkan diri dari masyarakat yang mereka wakili dan seharusnya mereka layani. Partai-partai politik telah berubah menjadi kendaraan untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam keadaan demikian, Bung Karno mulai berpaling kepada kalangan muda untuk mengubah keadaan. Ia lantas banyak bicara tentang pentingnya peran politik kaum muda, khususnya generasi '45 yang pernah terlibat aktif dalam Revolusi.[7] Pada 28 Oktober 1956, dalam kesempatan bicara di hadapan wakil-wakil organisasi kepemudaan, Presiden Sukarno mengeluh tentang "penyakit partai-partai". Ia mengajak kawula muda untuk "bersama-sama mengubur partai-partai yang ada". Dalam kesempatan itu pula, ia berseru: "Wujudkan kemerdekaanmu sebagai orang-orang muda! Jangan hanya membebek partai-partai."

Sukarno sendiri mulai berpikir tentang suatu alternatif bagi demokrasi liberal, yakni "Demokrasi Terpimpin", suatu demokrasi dengan kepemimpinan tetapi tetap merupakan demokrasi.[8] Bagaimana bentuk nyata dari demokrasi itu, Bung

www.facebook.com/indonesiapustaka

Karno menyerahkannya kepada para pemimpin politik, tetapi ia punya konsepsinya sendiri. Pada 21 Februari 1957, dia menyampaikan isi dari "konsepsi"-nya tersebut, yang pada pokoknya mendorong dibentuknya sebuah kabinet gotong royong dan suatu Dewan Nasional.[9]

Sayang memang, bahwa upaya terobosan Sukarno itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu—baik dari kalangan sipil maupun militer—untuk kepentingan mereka sendiri. Maksud baik yang ingin ia wujudkan dalam bentuk Demokrasi Terpimpin berikut konsepsinya akhirnya dikecam oleh dunia Barat dan menjadi *bancakan* (rebutan) di antara berbagai kepentingan politik dalam negeri. Tetapi kehendak untuk mencari jalan keluar bagi kelembaman sosial-politik dengan berpaling kepada kaum muda kiranya perlu dikaji lebih jauh.

Sukarno waktu itu, antara lain, melihat bahwa ketika sistem politik yang dijalankan oleh kaum tua mulai keropos atau membusuk, alterntif harus dicari di kalangan orang muda yang mungkin sering bersikap bandel dan pemberontak, tetapi sering juga lebih kaya dengan imajinasi sosial-politik dan lincah dalam bergerak. Lain dengan para politisi kawakan, biasanya angkatan muda belum terlalu jauh terlilit oleh jerat-jerat *vested interests* alias berbagai kepentingan pribadi dan kelompok. Tentu patut disayangkan bahwa pada masa tuanya, Bung Karno juga cenderung bersikap seperti angkatan tua pada umumnya, yakni kurang bersifat fleksibel, sehingga pada akhir masa jabatannya banyak mahasiswa—yang usianya sebaya dengannya waktu belajar di bawah Profesor Klopper—memberontak dan menuntutnya turun.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Jawaharal Nehru, Ny. Indira Gandhi beserta anaknya Rajiv dan Sanjay berfoto bersama Presiden Soekarno beserta dua putra-putrinya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Harapan pada Kaum Muda

Meskipun demikian, baik dari riwayat awal Bung Karno maupun sejarah pergerakan Indonesia pada umumnya, tampak bahwa gagasan-gagasan segar upaya pembaruan politik cenderung datang dari kaum muda. Di tengah suasana politik yang kental diwarnai oleh macetnya proses reformasi, tetap merebaknya korupsi, semaraknya berbagai bentuk kongkalikong di antara elite politik, serta makin sayupnya rasa keadilan di masyarakat, masyarakat Indonesia ditawari untuk kembali berpaling kepada kaum muda. Dibutuhkan anak-anak muda yang bukan terutama "baik-baik" dan penurut, melainkan yang berani bersikap bandel dan pemberontak terhadap situasi kelembaman sosial-politik yang ada, dan mencoba mencari alternatif jalan keluar. Dalam sebuah wawancara saat ia untuk pertama kalinya dapat pergi ke luar negeri sejak pembebasannya dari penjara Orde Baru, sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah ditanya, seandainya ia diminta menulis satu halaman sejarah Orde Baru, apa yang akan ia tulis. Jawabnya: "Kalau diminta saya akan tampilkan Angkatan Muda, yang dengan hati tulus dan bersih memperjuangkan segala yang terbaik untuk tanah air dan *nasion*-nya dengan segala pengorbanannya."[10] Baik Bung Pram maupun Bung Karno mungkin benar, harapan akan pembaruan sosial-politik perlu diletakkan di tangan kaum muda, khususnya mereka yang memiliki visi dan dedikasi yang tinggi bagi bangsanya. Yah, seperti Sukarno muda dan teman-temannya waktu itu.[]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Catatan Akhir:

1 Sebelum ditulis kembali, bab ini pernah dimuat di Harian *Bernas*, Yogyakarta, 1 Juni 2002.

2 Sukarno, *An Autobiography As Told to Cindy Adams* (New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965), 65. Bernhard Dahm, *Sukarno and the Struggle for Indoensian Independence* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969), h. 49.

3 Sukarno, h. 42.

4 Sukarno, h. 61.

5 Besar kemungkinan Bung Karno memang bertemu dengan orang yang bernama "Marhen". Namun ada yang menduga bahwa istilah "Marhaen" merupakan salah satu upaya Bung Karno untuk melakukan indigenisasi atau "pemribumian" gagasan-gagasan Marx, Hegel dan Engels—khususnya berkaitan dengan pemikiran mengenai proletariat dan dialektika sejarah.

6 Sukarno, h. 63-64.

7 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1968), h. 515-516.

8 Feith, h. 518.

9 Feith, h. 542.

10 Pramoedya Ananta Toer, "Penindasan dan Perlawanan: Pramoedya Ananta Toer tentang Sejarah, Politik, Kebudayaan dan Delapan Ekor Ayam," dalam Baskara T. Wardaya (ed.), *Menuju Demokrasi: Sejarah Indonesia dalam Perspektif Historis* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 130.

www.facebook.com/indonesiapustaka

BERTEMU MARHAEN, MENGGUGAT KOLONIALISME[1]

Jangan lupa bahwa pada masa itu hampir semua orang yang ikut bergerak masih muda. Bung Karno pada waktu proklamasi sudah mulai dianggap orang tua, padahal usianya hanya 45.

Benedict Anderson (1999)

SIKAP "bandel" dan pemberontak yang dimiliki oleh Sukarno muda ternyata tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakannya yang *nyleneh* atau tidak biasa, melainkan juga dalam karya-karya tulisnya. Melalui tulisan-tulisan yang ia sebar di sejumlah media massa, ia menguraikan pikiran-pikirannya di sekitar ketidakadilan dan penderitaan yang timbul akibat penjajahan. Sekaligus ia juga menyatakan sikap yang kokoh dalam menentang kolonialisme dan imperialisme.

Anti-Kolonialisme

Salah satu tulisan utama yang biasanya diacu untuk menunjukkan sikap dan pemikiran Sukarno muda itu adalah tulisannya yang terkenal berjudul "Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Dalam tulisan yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal *Indonesia Muda* tahun 1926 dan diterbitkan kembali

www.facebook.com/indonesiapustaka

tahun 1927 dalam koran *Suluh Indonesia Muda* itu, sikap anti-kolonialisme dan imperialisme tersebut tampak jelas sekali.

Bertolak dari pengalamannya pada 1921—yakni dari keterlibatannya dalam Sarekat Islam—Sukarno sudah mulai berupaya memadukan ketiga gagasan yang berkembang waktu itu, yakni nasionalisme, sosialisme dan Islam. Perpaduan inilah yang kelak, menurut Dahm, akan dimatangkan oleh Sukarno dan akan merupakan "kunci sejati untuk memahaminya".[2] Sebagaimana diketahui, tahun 1926 adalah tahun "kaotik" dalam dunia pergerakan di Indonesia. Terjadi berbagai perpecahan di antara kelompok-kelompok itu yang terutama disebabkan oleh perbedaan pandangan dan orientasi para pemimpinnya.[3] Melihat situasi demikian, Sukarno tertantang untuk mempersatukan kelompok-kelompok tersebut dengan terutama menyatukan pandangan para pemimpinnya. Itulah yang melatar belakangi pemikirannya, sebagaimana ia tulis dalam "Nasionalisme, Islam dan Marxisme" itu.[4] Tahun-tahun itu tentu saja juga ditandai oleh bangkitnya semangat nasionalisme sebagaimana tercermin pada munculnya sejumlah "kelompok studi" yang menekankan pentingnya nasionalisme Indonesia dan strategi non-kooperasi. Gerakan itu muncul, antara lain, berkat pengaruh para mahasiswa Indonesia yang kembali dari studi mereka di Eropa.[5]

Dalam tulisan "Nasionalisme, Islam dan Marxisme", Sukarno menegaskan, yang pertama-tama perlu disadari adalah bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa datang ke Asia bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka datang terutama "untuk mengisi perutnya yang keroncong belaka".[6] Artinya, motivasi pokok dari

www.facebook.com/indonesiapustaka

kolonialisme itu adalah ekonomi. Sebagaimana ia tulis, ia setuju dengan pendapat sejarawan Jerman Dietrich Schafer (1845-1929) yang mengatakan bahwa "kolonialisme itu pertama-tama adalah akibat dari menurunnya jumlah barang-barang di negeri induk".[7] Karena alasan ekonomi itulah selama berabad-abad bangsa Eropa menjajah bangsa Asia.[8]

Sebagai sistem yang motivasi pokoknya adalah ekonomi, Sukarno percaya, kolonialisme erat terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem ekonomi yang dikelola oleh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan pokoknya adalah memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya memaksimalisasi keuntungan itulah kaum kapitalis tak segan-segan untuk mengeksploitasi orang atau bangsa-bangsa lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi keuntungan mereka. Melalui kolonialisme ini pulalah di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang dalam salah satu istilah kegemaran Sukarno disebut sebagai *"exploitation de l'homme par l'homme"* atau eksploitasi manusia oleh manusia lain.[9]

Anti-imperialisme

Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu mendorong praktik-praktik imperialis. Sebagaimana kita tahu, meskipun pada mulanya imperialisme lebih mengacu pada praksis ekspansi wilayah politis suatu negara, pada awal abad ke-20 pengertian itu diperluas, yakni sebagai sistem politik dan sebagai sistem ekonomi. Sebagai sistem politik, ia akan berakhir ketika sebuah wilayah yang dijajah menjadi merdeka. Tetapi sebagai sebuah sistem ekonomi, imperialisme bisa

www.facebook.com/indonesiapustaka

berlangsung terus bahkan ketika negara terjajah itu sudah merdeka secara politis.[10]

Sadar akan kedua sisi itu, Sukarno muda tak ingin menyamakan begitu saja imperialisme dengan pemerintah kolonial. Imperialisme, menurutnya, "bukanlah pegawai pemerintah; ia bukanlah suatu pemerintahan; ia bukan kekuasaan; ia bukanlah pribadi atau organisasi apa pun." Sebaliknya, ia adalah sebuah hasrat berkuasa, yang antara lain terwujud dalam sebuah sistem yang memerintah atau mengatur ekonomi dan negara orang lain.[11] Lebih dari sekadar suatu institusi, imperialisme merupakan "kumpulan dari kekuatan-kekuatan yang kelihatan maupun tak kelihatan."[12] Sukarno mengajak orang Indonesia melawan imperialisme itu, baik sebagai sistem politik maupun sebagai sistem ekonomi. Ia lantas menghimbau baik para pejuang Nasionalis, Islam maupun Marxis untuk bersama-sama melawan imperialisme. Mengutip dua pemikir besar Islam—Syekh Mohammad 'Abduh (1849-1905), Rektor Universitas Al-Azhar di Kairo serta Al-Sayyid Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897) filsuf dan politikus dari Afganistan—Sukarno menunjukkan bahwa Islam bertekad menyusun kekuatan guna menentang "bahaya imperialisme Barat".[13]

Sebenarnya, Sukarno sadar bahwa antara Nasionalisme, Sosialisme dan Agama terdapat perbedaan dan tekanannya masing-masing. Jika Nasionalisme menekankan pentingnya batas-batas dan kepentingan nasional, Agama (Islam) pada dasarnya bersifat universal dan menolak batas-batas nasionalitas tetapi juga menolak materialisme ala Marx. Sementara itu, Marxisme bersifat universal, serta menolak batas-batas na-

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bangkitlah Indonesia!

www.facebook.com/indonesiapustaka

sionalisme dan sekaligus juga menolak konsep-konsep religius Islam. Meskipun demikian, menurut Sukarno, di antara ketiga-nya juga terdapat berbagai persamaan yang dapat dijadikan titik tolak untuk perjuangan bersama melawan kolonialisme dan imperialisme.

Pada Kongres PPPKI akhir 1928, sekali lagi Sukarno mengajak para tokoh pergerakan untuk bersatu melawan penjajah. Perlawanan itu, menurutnya, merupakan "keniscaya-an sejarah" yang merupakan produk dari imperlialisme itu sendiri. Sukarno percaya bahwa baik imperialisme maupun kapitalisme merupakan "penggali kubur mereka sendiri".[14] Ia yakin bahwa suatu saat nanti akan terjadi perang besar di Pasifik, di mana kekuatan-kekuatan imperialis dan kapitalis akan berupaya menghancurkan satu sama lain.[15] Secara terang-terangan Sukarno menentang pemerintah kolonial ketika dia mengibaratkan imperialisme sebagai "Nyai Blorong" alias ular naga. Kepala naga itu, menurutnya, berada di Asia dan sibuk menyerap kekayaan alam negara-negara terjajah. Sementara itu, tubuh dan ekor naga itu ada di Eropa, menikmati hasil serapan tersebut.[16] Bersama kolonialisme dan kapitalisme, im-perialisme merupakan tantangan besar bagi setiap orang In-donesia yang menghendaki kemerdekaan. Dalam pidato di Semarang pada awal 1933, dia kembali menegaskan bahwa Partindo adalah "musuh kapitalisme dan imperialisme".[17]

Anti-elitisme

Selain imperialisme dan kolonialisme, di mata Sukarno muda tantangan besar yang tak kalah pentingnya untuk dilawan dalam perjuangan menuju kemerdekaan adalah elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki

www.facebook.com/indonesiapustaka

status sosial-politik yang lebih tinggi dari orang lain, terutama rakyat kebanyakan. Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Sukarno, karena melalui sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan sikap ini tidak hanya bisa memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang mau dilawan. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-sikap demokratis masyarakat modern yang dicita-citakan bagi Indonesia merdeka.

Sukarno muda melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin kuat dalam struktur bahasa Jawa yang dengan pola *"kromo"* dan *"ngoko"*-nya mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk menunjukkan ketidak setujuannya atas stratifikasi demikian itu, dalam rapat tahunan *Jong Java* di Surabaya pada bulan Februari 1921, Sukarno berpidato dalam bahasa Jawa *ngoko*, dengan akibat bahwa ia menimbulkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia.[18] Sebulan kemudian Sukarno kembali menimbulkan keributan di kalangan kepemimpinan Jong Java ketika ia mengusulkan supaya organisasi itu tidak hanya menerima calon anggota dari para pelajar sekolah menengah dan atas, melainkan juga dari siswa-siswi sekolah dasar. Ia juga menganjurkan kepada organisasi itu bahwa koran *Jong Java* tidak lagi diterbitkan dalam bahasa Belanda melainkan dalam bahasa Melayu.[19]

Salah satu upaya terbesar Sukarno dalam rangka menentang elitisme dan meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan Marhaenisme. Bertolak dari pertemuan pribadinya

www.facebook.com/indonesiapustaka

dengan pertani Marhaen, sebagaimana telah kita lihat dalam bab sebelumnya, Sukarno merasa terpanggil untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada kaum miskin di Indonesia. Ia juga merasa perlu untuk memberikan peranan kepada mereka dalam perjuangan melawan kolonialisme yang kapitalistik itu. Kaum Marhaen ini, sebagaimana kaum proletar dalam gagasan Karl Marx, diharapkan menjadi komponen utama dalam revolusi melawan kolonialisme dan dalam menciptakan suatu masyarakat baru yang lebih adil. Dalam perkembangan berikutnya, sebagaimana dikatakan oleh Sukarno sendiri, Mahaenisme akan berkembang dan menjadi "Sosialisme Indonesia dalam praktik."[20]

Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa Marhaenisme "menolak tiap tindak borjuisme" yang, menurut Sukarno, merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat.[21] Sukarno berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah terhadap rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh McVey, bagi Sukarno rakyat me-rupakan "padanan mesianik dari proletariat dalam pemikiran Marx". Artinya, mereka ini merupakan "kelompok yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya, ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia".[22]

Meskipun demikian, konsep Marhaen sebagaimana dipahami oleh Sukarno itu mirip tetapi sekaligus berbeda dengan konsep proletariat-nya Marx. Sebagaimana kaum proletar, Kaum Marhaen itu miskin, berada di lapisan bawah masyarakat, dan jutaan jumlahnya. Tetapi berbeda dengan kaum proletarnya Marx, Kaum Marhaen tidak bekerja untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berbincang-bincang dengan Perdana Menteri India Jawaharal Nehru

www.facebook.com/indonesiapustaka

orang lain dan mereka memiliki "alat produksi"-nya sendiri, seperti misalnya cangkul dan tanah garapan. Menurut Sukarno pengertian Kaum Marhaen itu lebih luas daripada kaum proletar, karena Kaum Marhaen mencakup tidak hanya kaum buruh, melainkan juga para petani dan setiap orang Indonesia yang miskin. Apa pun persamaan dan perbedaannya, yang bagi Sukarno perlu dipahami adalah bahwa Kaum Marhaen merupakan bagian penting dalam upaya "mengusir setiap bentuk kapitalisme dan imperialisme."[23]

Dalam arti tertentu kiranya sikap anti-elitisme ini juga membedakan Sukarno dengan para aktivis pergerakan lain pada waktu itu. Berbeda dengan para pelajar Indonesia yang pernah belajar di Belanda—seperti Hatta dan Syahrir—Sukarno menolak pendekatan elitis yang bergaya Eropa. Ia lebih suka untuk bertemu dan berbicara langsung dengan massa rakyat di mana pun ia berada.

Taktik Non-Kooperasi

Lantas, langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Sukarno dalam rangka melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia mengusulkan ditempuhnya jalan non-kooperasi. Sebenarnya sampai pada pertengahan tahun 1921 Sukarno masih mengharapkan adanya kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Saat itu ia masih bermimpi bahwa pemerintah kolonial Belanda mau membantu memper-baiki kondisi ekonomi Indonesia, sebelum negeri jajahan ini bisa benar-benar mandiri.[24] Tapi pada tahun 1923 Sukarno mulai meninggalkan posisi moderat

www.facebook.com/indonesiapustaka

itu dan mengambil langkah non-kooperasi, yakni sama sekali menolak kerjasama dengan pemerintah kolonial.[25] Dalam kaitan dengan ini, ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi. Oleh karena itu mereka tak akan dengan sukarela melepaskan koloninya. "Orang tak akan gampang-gampang melepaskan bakul nasinya," katanya, "jika pelepasan bakul itu mendatangkan matinya …" Oleh karena itu, pula ia yakin bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya ditunggu, melainkan harus diperjuangkan.[26]

Menggalang Persatuan

Langkah lain yang menurut Sukarno perlu segera diambil dalam menentang kolonialisme dan imperialisme itu adalah menggalang persatuan di antara para aktivis pergerakan. Dalam serial tulisan "Nasionalisme, Islam dan Marxisme", ia juga menyatakan bahwa sebagai bagian dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam perjuangan kemerdekaan di Indonesia—yakni para pejuang Nasionalis, Islam dan Marxis—hendaknya bersatu. Dalam persatuan itu, nanti, mereka akan mampu bekerjasama demi terciptanya kemerdekaan Indonesia. "Bahtera yang akan membawa kita kepada Indonesia Merdeka," ingat Sukarno, "adalah Bahtera Persatuan."[27]

Kepada para aktivis Nasionalis, Sukarno menegaskan bahwa tidak ada halangan bagi kaum Nasionalisme untuk bekerja sama dengan para aktivis Islam dan Marxis.[28] Kepada para aktivis Islam Sukarno mengimbau supaya mereka mau bahu-membahu dengan para aktivis Marxis untuk bersama-sama berjuang melawan kapitalisme. "Kaum Muslim tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

boleh lupa bahwa kapitalisme, musuhnya Marxisme, adalah juga musuhnya Islam," tulisnya.[29] Sementara itu kepada kaum Marxis, ia mengingatkan bahwa di Asia taktik-taktik baru Marxis menuntut kerjasama dengan para pejuang Nasionalis maupun Islam.[30]

Sukarno muda juga mendorong supaya kaum pergerakan mau belajar dari upaya bangsa-bangsa lain di Asia dalam hal kerja sama menentang kolonialisme Eropa. Ia misalnya menunjuk pada kerjasama antara kelompok Islam dan kelompok Hindu di India yang sebagaimana ditunjukkan oleh saling-mendukungnya Maulana Mohammed Ali dengan Mahatma Gandhi dalam melawan kolonialisme. Ia juga mengacu pada kerja sama antara kaum komunis dan kaum nasionalis (Kuomintang) di Cina dalam bersama-sama melawan militerisme, imperialisme, dan kapitalisme.[31] Sekarang ini, tegas Sukarno, bangsa Asia, termasuk Indonesia, telah menyadari penderitaan akibat penjajahan itu, dan siap untuk bangkit melawan kaum penjajah.[32]

Tidak Jera

Pada saat yang sama Sukarno juga mengingatkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme itu lebih kompleks daripada perjuangan antara kelompok pribumi melawan kelompok kulit putih. Pada satu sisi, perlu dibedakan antara "pihak Sini" yakni mereka yang mendukung, dan "pihak Sana" yakni mereka yang menentang perjuangan kemerdekaan.[33] Pada sisi lain perlu disadari pula bahwa kedua "pihak" itu ada baik di kalangan pribumi maupun di kalangan penguasa kolonial. Sukarno tahu bahwa tidak semua orang pribumi itu anti-

www.facebook.com/indonesiapustaka

kapitalisme dan anti-kolonialisme. Menurutnya, sejumlah orang pribumi juga mempraktikkan kapitalisme terhadap bangsa sendiri. Sama seperti kapitalisme asing, menurut Sukarno, kapitalisme pribumi ini juga sama-sama mempermiskin rakyat. Dalam tulisannya yang berjudul "Kapitalisme Bangsa Sendiri?" Sukarno menegaskan bahwa kapitalisme pribumi ini juga harus dilawan jika perlawanan terhadapnya membantu dalam menentang imperialisme. "Apa gunanya bisa memiliki pemerintahan sendiri," tanyanya di koran *Utusan Hindia* (1921), "kalau ternyata kita tetap dikuasai oleh para pendukung kapitalisme dan imperialisme?"[34] Pada saat yang sama, Sukarno juga tahu bahwa tidak semua orang Belanda itu mendukung kolonialisme. Pastor van Lith, misalnya. Kepada pemerintah kolonial, misionaris Belanda ini dengan tegas menyatakan bahwa kalau harus memilih antara Belanda dan Pribumi, ia dan para misionaris yang lain memilih untuk "berdiri di pihak anak-anak negeri."[35]

Seruan-seruan Sukarno itu pada 4 Juli 1927 diikuti oleh pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebagai tujuan utamanya dicanangkan untuk "mencapai kemerdekaan Indonesia".[36] Guna memberi semangat kepada para aktivis pergerakan, pada tahun 1928 ia menulis artikel berjudul "Jerit Kegemparan" (1928) di mana ia menunjukkan bahwa sekarang ini pemerintah kolonial mulai was-was dengan semakin kuatnya pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya.[37] Sepanjang tahun 1928 Sukarno penuh dengan keberhasilan dalam pidato-pidatonya. Pada bulan Mei tahun itu seorang wartawan *Pembrita Kemadjuan* menyatakan bahwa ia amat terbawa oleh pidato-pidato itu sehingga ia merasa bahwa

www.facebook.com/indonesiapustaka

kini ia telah benar-benar "merdeka." Di Jakarta, ketika Sukarno harus beristirahat di tengah pidatonya, ada sekitar 1.600 orang yang tak mau beranjak dari tempat mereka berdiri, di bawah terik matahari, karena takut tempatnya akan diambil orang lain.[38]

Ketika pada tanggal 29 Desember 1929 Sukarno ditangkap dan pada tanggal 29 Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Sukarno justru memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pledoinya yang terkenal yang berjudul *Indonesia Menggugat* dengan tegas ia menyatakan perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo) yakni partai berhaluan non-kooperasi yang dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah dibubarkan oleh pemerintah kolonial. Penjara tampaknya sama sekali tidak membuat Sukarno jera untuk berpolitik maupun untuk menentang ketidakadilan kolonialisme.[]

atatan Akhir:

1 Versi awal dari bab ini pernah dimuat di *Kompas* edisi khusus 1 Juni 2001 dan dalam buku St. Sularto, (ed.), *Dialog Dengan Sejarah*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2001.

2 Bernhard Dahm. *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence.* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969.), h. 43.

3 Dahm, h. 59-62.

4 Dahm, h. 63.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[5] Dahm, h. 54-56.

[6] Dahm, h. 103. Sumber: Pidato Sukarno di depan Kelompok Studi Indonesia di Surabaya, 15 Februari 1928.

[7] Sukarno, *Nationalism, Islam and Marxism* (selanjutnya *NIM*), h. 36.

[8] Sukarno, NIM, h. 36.

[9] Sukarno, *An Autobiography As Told to Cindy Adams* (New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965), h. 53.

[10] Raymond William, h. 159-160.

[11] Diterjemahkan dari kutipan Paul W. van der Veur, dalam review atas buku *Indonesia Menggugat*, Pacific Affairs Volume 49, Issue 2 (Summer, 1976), h. 377-379.

[12] Sukarno, *Autobiography*, h. 33.

[13] Sukarno, NIM, h. 44-45.

[14] Dahm, h. 106-107.

[15] Dahm, h. 116.

[16] Simbolon, *Menjadi Indonesia,* 342, 691. Sukarno menyampaikan itu pada kesempatan ulangtahun kedua PNI, 4 Juli 1929.

[17] Dahm, h. 163.

[18] Waktu itu, ketika mendapat kesempatan untuk tampil bicara, Sukarno menolak menggunakan bahasa Jawa *kromo*. Sebagai ganti ia menggunakan bahasa Jawa *ngoko*, yang ia sebut sebagai "bahasa para pembaharu", karena bahasa ini tidak mengenal pembedaan tingkat-tingkat sosial. Berkat "ulah" Sukarno ini terjadilah keributan dalam kongres, dan ketua panitia melarang Sukarno untuk meneruskan pidatonya dalam bahasa Jawa *ngoko*. Ketua itu lantas menuntutnya untuk memilih menggunakan berbahasa Belanda atau berhenti pidato saja. Dahm, h. 40.

[19] Dahm, h. 40-41.

[20] Sukarno, *Autobiography*, h. 63.

[21] Dahm, h. 148.

[22] McVey, Introduction, h. 4.

[23] Dahm, h. 151. Sumber: *Fikiran Rakyat*, Juli 1933.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[24] Dahm, h. 42. Sikap demikian mungkin diambil karena pengaruh tokoh-tokoh moderat seperti Cokroaminoto dan C. Hartogh, kedua guru Sukarno muda. Dahm, h. 46.

[25] Dahm, h. 49-50.

[26] Dahm, h. 63. Taktik non-kooperasi itu ia rasakan perlu terutama ketika ia menyadari bahwa perjuangan melawan penjajahan itu bukanlah perjuangan hak melawan hak, melainkan kekuasaan melawan kekuasaan. Dahm, h. 94. Sumber: Sukarno, "Djerit Kegemparan," (1928), *Di Bawah Bendera Revolusi*, h. 51.

[27] Sukarno, NIM, h. 36. Di satu pihak, ia menyadari adanya berbagai perbedaan pandangan di antara kelompok-kelompok aktivis pergerakan itu. Namun, di lain pihak, ia mengajak supaya sekarang ini perbedaan-perbedaan itu disingkirkan, dan dicari kesamaan-kesaaman yang akan menjadi landasan perjuangan bersama.

[28] Sukarno, NIM, h. 40-41.

[29] Sukarno, NIM, h. 50.

[30] Sukarno, NIM, 57. Kepada ketiganya ia mengingatkan bahwa "di negeri-negeri terjajah, konsep Nasionalisme, Islam dan Marxisme bersinggungan dalam sejumlah hal," dan oleh karena itu ketiganya harus bersatu dalam perjuangan melawan penjajah kapitalis. Sukarno, NIM, h. 61.

[31] Sukarno, NIM, h. 40-41.

[32] Sukarno, NIM, h. 36.

[33] Dahm, h. 50.

[34] Dahm, h. 42-43, *Utusan Hindia*, 6 Mei 1921.

[35] Simbolon, h. 671.

[36] Parakitri, h. 335; Dahm, h. 79, 85.

[37] Dahm, h. 93-94.

[38] Dahm, h. 104-105.

www.facebook.com/indonesiapustaka

SEKADAR CATATAN UNTUK BUNG KARNO[1]

Dewan Hindia Belanda … sepakat bahwa Sukarno orangnya begini: apa pun yang dia bilang dari penjara, sama sekali tidak bisa dipercaya. Karena begitu dia muncul di rapat besar, dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri karena dia "mabok". Lalu dia akan mengungkapkan apa yang merupakan suara orang yang datang ke rapat, yaitu suara rakyat.

Takashi Shiraishi (1999)

TELAH kita lihat bagaimana Sukarno muda amat berapi-api dalam melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme. Meskipun demikian, kalau kita cermati secara lebih teliti terdapat kesan bahwa perlawanan itu sepertinya tidak total. Artinya, terdapat kesan bahwa Sukarno muda tidak sepenuhnya bermaksud untuk mengngugat ketiga tantangan itu sampai tuntas. Hal ini tampak, misalnya, ketika dia mendirikan PNI (Partai Nasional Indonesia) pada tahun 1927. Di satu pihak, memang dengan jelas digariskan bahwa tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka.[2] Tetapi di lain pihak cita-cita kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem politik yang sama sekali baru. Meminjam istilahnya Benedict Anderson, bisa dikatakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

bahwa *"society"*-nya boleh baru, tetapi *"state"* (baca: elite)-nya tetap yang lama.[3]

Dilanjutkan

Alih-alih perubahan total terhadap sistem kolinial, Sukarno—sebagaimana banyak aktivis pergerakan waktu itu—memberi kesan, ia berkeinginan bahwa negeri yang merdeka itu nantinya akan ditopang oleh sistem yang sama dengan sistem yang menopangnya saat terjajah. Sukarno percaya bahwa Indonesia merdeka itu hanya akan tercapai melalui sekelompok kecil kaum elite, yang akan mewakili sekaligus menyatukan berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat demi cita-cita nasional.[4] Kepada mereka inilah sebenarnya tulisan "Nasionalisme, Islam dan Marxisme" ditujukan.[5] Sukarno mendukung terciptanya "kontra-elite" baru, yang akan menggantikan elite kolonial yang waktu itu ada. Kontra-elite ini di mata Sukarno haruslah merupakan kelompok yang "kohesif, representatif dan otoritatif."[6] Sistem administrasi politik kolonial sebagai sistem yang modern dirasakan oleh Sukarno sebagai tetap perlu untuk dilanjutkan dalam periode pasca-kolonial. Demikian pula tradisi kolonial untuk menjadikan Jawa sebagai pusat pemerintahan juga dilanjutkan. Lebih dari itu, posisi rakyat sebagai komponen massal yang "diatur" oleh sekelompok elite-metropolitan yang berada di pusat kekuasaan juga dipertahankan. Terkesan ia tak terlalu mementingkan suatu perubahan yang radikal terhadap tatanan kolonialistik yang ada. Ia hanya menekankan pentingnya pergantian elitenya saja, dari elite Belanda ke elite pribumi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pemakaian Sukarno atas gagasan-gagasan Marxis juga terkesan tidak mendalam dan pilih-pilih. Ia tertarik dengan pengertian proletariatnya Marx, tetapi ia memperluasnya menjadi Marhaenisme. Di satu pihak, perluasan itu membuat revolusi menjadi lebih jauh daripada sekadar pertarungan antara buruh pabrik melawan para kapitalis, tetapi di lain pihak, hal ini juga membuat fokus revolusi menjadi kabur. Kekaburan ini menjadi bertambah ketika disadari bahwa pemerintah kolonial, yakni pihak yang mau dilawan oleh Kaum Marhaen, melibatkan juga banyak sekali pejabat dan pegawai pribumi. Jika Marx lebih menekankan sikap antitesis terhadap sistem yang ada, Sukarno—mungkin karena pengaruh Jawanya—lebih menekankan sintesis.[7] Dalam kata-kata Dahm, "Singkatnya, Sukarno tidak terlalu tertarik pada analisis yang tepat. Ia lebih tertarik pada menemukan contoh-contoh untuk mendukung apa yang telah ia pikirkan sebelumnya."[8] Itu semua berakibat bahwa perlawanan terhadap sistem kapitalis yang dianut oleh pemerintah kolonial tidak total. Dan dalam hal ini, rupa-rupanya Sukarno memang tidak bermaksud mengubahnya secara total. "Kita berjuang bukan untuk melawan orang kaya," tulisnya di harian *Fikiran Rakyat* tahun 1932, "melainkan untuk melawan sistem."[9]

Berkaitan dengan contoh-contoh yang dia paparkan mengenai kerjasama antara para pejuang Nasionalis, Islam dan Marxis di luar negeri, bisa dikatakan bahwa terdapat unsur keberuntungan. Ketika artikel "Nasiolisme, Islam dan Marxisme" dia tulis, memang kelompok-kelompok yang dia sebut itu masih bekerja sama. Tetapi tak lama setelah tulisannya itu terbit, koalisi-koalisi yang diacu dalam tulisan itu

www.facebook.com/indonesiapustaka

mengalami perpecahan. Pada April 1927, misalnya, kerja sama antara kelompok komunis dan kelompok nasionalis di Cina berakhir dengan perpecahan. Demikian pula pada 1928, koalisi Hindu-Islam di India mengalami keretakan yang tak ter-sambungkan lagi.[10] Dalam tulisan yang sama, Sukarno memuji-muji gerakan kiri internasional sebagai salah satu pusat perlawanan terhadap kapitalisme. Tetapi dalam Kongres Internasional Kedua di Brussel 1928, kaum kiri dunia justru memandang Indonesia sebagai belum layak untuk merdeka.[11]

Literatur Barat

Betapapun "galak"-nya Sukarno muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme dengan menggunakan prinsip non-kooperasi, ternyata dia tidak selalu konsisten. Sekitar Agustus-September 1933, sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah kolonial, dia menyatakan mundur dari keanggota-an Partindo, memohon maaf, dan meninggalkan prinsip non-kooperasi. Dia bahkan dilaporkan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah Belanda.[12] Lepas dari benar atau tidaknya laporan pemerintah itu, berita ini mengagetkan dan mengecewakan para pendukung gerakan kemerdekaan waktu itu. Mereka kecewa karena tokoh perjuangan yang mereka agung-agungkan telah menyerah. Dalam koran *Daulat Ra'jat* edisi 30 November 1933, Mohammad Hatta bahkan menyebut peristiwa ini sebagai "Tragedie-Sukarno". Pada kesempatan itu, Hatta amat menyesalkan inkonsistensi serta lemahnya semangat perlawanan tokoh taktik non-kooperasi itu.[13] Bahwa dalam "meminta maaf" itu Sukarno tidak meminta pertim-bangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

kepada para pendukungnya membuat mereka sangat terkejut. Banyak anak-anak sekolah maupun orang dewasa dilaporkan menyobek-nyobek foto Bung Karno yang biasa mereka pajang di kelas atau dinding-dinding rumah.[14]

Menarik juga untuk diperhatikan bahwa meskipun dengan keras ia mengecam imperialisme Barat, Sukarno muda mem-biarkan diri dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Barat. Hal ini tercermin dalam tulisan-tulisannya yang acuan-acuan utamanya adalah literatur Barat. Bahkan ketika ia menyodorkan nama-nama penentang imperialisme seperti Syeikh Muhammad 'Abduh dan Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, ia menggunakan sumber Barat, yakni buku *The New World of Islam* karya Lothrop Stoddard terbitan New York 1921. Begitu setianya Sukarno mengutip sumber Barat itu, hingga kekeliruan penulisan angka tahun kematian al-Afghani diulanginya begitu saja. Lebih jauh, hal ini mencerminkan pandangan bahwa masyarakat Barat yang kapitalis itu dipandang sebagai penindas, tetapi sekaligus juga sebagai sumber ide-ide yang perlu untuk dijadikan acuan bagi Indonesia merdeka.[15]

Elite metropolitan

Berhubungan dengan sikap anti-elitismenya perlu dilihat bahwa meskipun dalam pidato dan tulisan-tulisannya Sukarno tampak melawan sikap elitis, tetapi sebenarnya bisa diragukan apakah dia sepenuhnya demikian. Hal ini tampak, misalnya, pada pidato yang dia sampaikan pada 26 November 1932 di Yogyakarta, yang adalah pusat aristokrasi Jawa. Dalam pidato itu, Bung Karno mengajak setiap orang—entah berpendidikan tinggi atau rendah, keturunan ningrat atau

www.facebook.com/indonesiapustaka

bukan—untuk bersatu demi kemerdekaan. Tetapi sekaligus dia menegaskan bahwa bersama Partindo dirinya tidak menginginkan perjuangan kelas.

Dalam tulisan "Nasionalisme, Islam dan Marxisme," sebagaimana disinyalir oleh Ruth McVey, sebenarnya Sukarno sama sekali tidak sedang bicara dengan rakyat banyak. Dalam tulisan itu, Sukarno, menurut McVey, "tidak menyampaikan imbauannya kepada kelompok-kelompok radikal pedesaan dan proletar yang telah memelopori pemberontakan komunis setahun sebelumnya, atau kepada para santri-santri taat pejuang Islam, atau kepada rakyat kebanyakan di dalam maupun di sekitar wilayah perkotaan yang bergabung ke dalam PNI yang didirikan oleh Sukarno saat mereka sedang mencari pegangan di tengah lunturnya nilai-nilai tradisional."[16] Sukarno, sebaliknya, lebih mengalamatkan imbauannya kepada sesama kaum elite pergerakan, atau kepada apa yang disebut oleh McVey sebagai "elite metropolitan", yang keanggotaannya biasanya ditentukan oleh tingkat pendidikan Barat yang diperoleh seseorang, entah di dalam negeri entah di luar negeri.[17] Pada akhirnya, siapa *sih* di antara masyarakat Indonesia pada 1920-an (di mana tingkat melek huruf kurang dari 10 persen penduduk pribumi) yang akan tertarik ketika disodori gagasan-gagasan Schafer, Renan, Kautsky, Bauer dan sebagainya, kalau bukan kelompok elite ini?

Kelompok elite metropolitan yang dituju oleh tulisan Sukarno itu sebenarnya jumlahnya amat kecil, dan kebanyakan dari mereka tinggal di kota-kota dengan pengaruh Eropa, seperti Bandung, Surabaya, Medan atau Jakarta.[18] Di satu

www.facebook.com/indonesiapustaka

pihak, kelompok elite ini mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia serta telah berpikir dalam rangka identitas nasional dan tidak lagi dalam rangka identitas regional seperti generasi pendahulunya.[19] Di lain pihak, kelompok ini tidak melihat perlunya mengadakan suatu revolusi sosial yang akan secara total mengubah sistem pemerintahan yang ada. Yang lebih mendesak, menurut para aktivis generasi ini, adalah me-*lengser* elite politik kolonial asing dan menggantinya dengan elite lokal yang dalam hal ini adalah diri mereka sendiri. Dengan kata lain, mereka menghendaki adanya revolusi nasional, tetapi bukan revolusi sosial. Hal ini berbeda, misalnya, dengan apa yang terjadi di Vietnam. Meskipun pada mulanya para aktivis pergerakan di sana sama-sama menekankan revolusi nasional, tetapi kemudian mereka melanjutkannya dengan revolusi sosial.[20]

Dalam kaitannya dengan rakyat banyak, anggota kelompok elite ini merasakan perlunya dukungan rakyat dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial. Pada saat yang sama, mereka berupaya mengikis sikap-sikap tradisional rakyat yang mereka pandang sebagai penghalang bagi langkah menuju dunia modern, yakni dunia sebagaimana tercermin dalam kaum kolonialis Barat.[21] Perasaan yang serupa tampaknya juga dimiliki oleh Sukarno. Bagi Sukarno muda, massa rakyat—betapapun tampak penting sebagai simbol dan sebagai potensi politik—sebenarnya lebih dibutuhkan sebagai sumber dukungan baginya dalam mengambil langkah-langkah politis.[22]

Oleh karena itu, tidak mengherankan, sebagaimana pernah dikeluhkan oleh Hatta, jika kontak Sukarno dengan

www.facebook.com/indonesiapustaka

rakyat kebanyakan sebenarnya amat sedikit, terbatas pada kontak melalui pidato-pidato yang penuh tepuk tangan dan sorak-sorai.[23] Dikatakan oleh Dahm, di satu pihak, Sukarno me-nentang sikap rakyat yang mudah pasrah pada nasib, tetapi di lain pihak, dia "membutuhkan sorak-sorai tepuk tangan [mereka] guna mendukung rasa percaya dirinya."[24] Dalam istilah Adam Malik, periode Sukarno adalah "periode hipnotis kolektif".[25] Seluruh rakyat seolah-olah terlibat, tetapi tidak sepenuhnya menjadi subjek dari kiprah penyelenggaraan negara. Sukarno lebih tertarik untuk menggerakkan massa daripada membentuk partai kader sebagaimana yang di-inginkan oleh Hatta dan Syahrir.

Apa pun latar belakang sikap-sikap itu, pola hubungan elite-rakyat yang diambil oleh Sukarno dan para aktivis pergerakan waktu itu rupa-rupanya memiliki dampak yang luas. Ketika pada 1933-1934 Sukarno serta para pemimpin lain ditangkap dan diasingkan oleh Belanda, gerakan kemerdekaan mengalami kemacetan total. Tanpa adanya elite-metropolitan itu seolah-olah rakyat tidak bisa lagi bergerak dalam perjuangan demi kemerdekaan. Pergerakan itu baru muncul kembali ketika para pemimpin yang diasingkan itu dibebaskan oleh Belanda saat mereka terancam oleh kedatangan balatentara Jepang.

Bahkan pada masa revolusi sendiri bisa dipertanyakan apakah sebenarnya rakyat yang ikut gigih bertempur dan berkorban mempertahankan kemerdekaan itu mendapat kesempatan yang maksimal dalam menentukan arah revolusi. Dalam tulisannya mengenai pola hubungan antara elite dan rakyat pada zaman revolusi, Barbara Harvey menyatakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

bahwa hubungan itu tidak hanya amat lemah, tetapi juga berakibat cukup fatal bagi revolusi kemerdekaan itu sendiri. Lemahnya hubungan di antara para pemimpin nasional di tingkat pusat dengan rakyat di desa-desa, menurutnya, "merupakan faktor utama bagi gagalnya elite kepemimpinan untuk menggalang dan mengarahkan kekuatan rakyat demi terwujudnya tujuan-tujuan revolusi".[26]

Dengan kata lain, sebenarnya ada kemungkinan bahwa rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses bernegara. Jika ini benar, mungkin tak terlalu mengherankan jika PKI, yang meskipun pada 1948 ditekan besar-besaran setelah peristiwa Madiun, dalam waktu singkat berkembang pesat pengikutnya. Ini, antara lain, karena di dalam PKI banyak rakyat merasakan bahwa dalam partai yang menekankan antikemapanan (baca: anti-"elite metropolitan") itu kepentingan dan cita-cita mereka mendapat tempatnya.

Berkaitan dengan hal di atas, mungkin bisa ditambahkan di sini bahwa pada 1950-an para elite ragu-ragu untuk menyelenggarakan pemilu, karena takut bahwa dukungan dari rakyat tak akan banyak. Namun akhirnya pemilu itu terlaksana juga. Pemilu itu diadakan pada 1955, dan PKI keluar sebagai pengumpul suara terbanyak nomor 4. Pada akhir 1957 demokrasi parlementer dibubarkan, tetapi peran elite metropolitan tetap dipertahankan. Posisi ini terus berlangsung dengan ditiadakannya pemilihan umum selama Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangan selanjutnya, elite ini nantinya akan terancam oleh dua kelompok lain yang makin menonjol posisi politisnya, yakni PKI dan militer. Sementara itu, sampai pada 1960-an PKI terus dipandang sebagai ancaman kekuatan tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

hanya bagi elite-metropolitan melainkan juga—sebagaimama akan kita lihat—kepentingan asing di Indonesia. (Dan kelak pada 1965-66, ketika di Jakarta terjadi konflik antarelite, ratusan ribu rakyat yang mungkin tak tahu banyak tentang seluk-beluk perpolitikan waktu itu menjadi korban kebrutalan massal.)

Betapa pun kuatnya retorika pembelaan Sukarno muda pada rakyat kecil, sebagaimana terungkap dalam Marhaenisme, dia tidak tampak benar-benar berusaha mengubah posisi sosial-politis rakyat, ditandai dengan absennya konsep perjuangan kelas dalam pidato dan tulisan-tulisan politisnya. Hal serupa juga terjadi pada para aktivis pergerakan yang lain, meskipun sebagian besar dari para aktivis itu banyak menggunakan ide-ide Karl Marx.[27] Hal itu menunjukkan bahwa apa yang ada di benak Sukarno serta para pejuang kemerdekaan generasinya bukanlah sepenuhnya menumbangkan dan menggantikan masyarakat kolonial dengan tatanan masyarakat yang sepenuhnya baru, melainkan sekali lagi menggantikan elite-kolonial dengan elite-metropolitan pribumi di mana mereka menjadi bagian utamanya. Sukarno dan para pejuang dari generasinya tidak akan mau sepenuhnya mengadopsi pikiran-pikiran Marx, karena hal itu akan membahayakan kedudukan mereka sendiri dalam masyarakat pasca-revolusi.[28] Dengan demikian, tampak ada kemenduaan (ambivalensi) dalam sikap-sikap Sukarno terhadap kapitalisme, imperialisme maupun elitisme: Di satu pihak, dia membenci ketiganya. Di lain pihak, sadar atau tidak, dia melihat bahwa beberapa aspek di dalam ketiganya layak untuk dipertahankan atau setidaknya untuk tidak dikutak-katik.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Anak Zamannya

Pertanyaannya, mengapa Sukarno mengambil sikap mendua itu? Pertama-tama perlu dikatakan bahwa bagaimana-pun juga Sukarno adalah anak zamannya. Dia adalah bagian dari generasi pergerakan era 1920-an. Berbeda dari generasi 1908 yang berorientasi pada perubahan sistem tanpa disertai kuatnya gagasan mengenai Indonesia merdeka, generasi Sukarno lebih berorientasi pada pentingya kemerdekaan, tetapi lemah dalam hal perjuangan demi perubahan sistem. Lebih dari itu, generasi 1920-an—dengan lebih banyak lulusan pendidikan Barat—cenderung untuk justru mempertahankan sistem pemerintahan Barat yang ada, tetapi dengan menggeser elite kolonialnya untuk diganti dengan elite lokal.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Takashi Shriaishi, berbeda dengan generasi pendahulu yang menekankan ketokohan individu, generasi Sukarno menekankan kepartaian.[29] Tetapi pada 1920-an, partai-partai itu mengalami banyak pertentangan internal yang di mata Sukarno akibatnya bisa fatal bagi gerakan menuju kemerdekaan. Pada 1920, misalnya, terjadi pertentangan dalam tubuh Sarekat Islam, terutama antara apa yang disebut sebagai "SI Putih" dengan lawannya, "SI Merah". Pertentangan ini kemudian mendorong lahirnya Partai komunis Indonesia (PKI).[30] Pada 1923 gerakan nasionalisme mengalami kemandegan total, ditandai dengan dibubarkannya National-Indische Partij (NIP) pada tahun itu, dan suburnya gerakan-gerakan yang lebih bercorak international, khususnya gerakan Islam dan Komunis.[31] Pada 1926-27, PKI memutuskan untuk berontak terhadap pemerintah kolonial Belanda, tetapi karena kurangnya dukungan masyarakat pem-

www.facebook.com/indonesiapustaka

berontakan itu gagal. Sukarno sadar bahwa jika perpecahan itu tidak diatasi sekarang, maka hal itu bisa berakibat fatal bagi perjuangan kemerdekaan selanjutnya.[32]

Jika Sukarno muda tampak terpisah dari rakyat, sebenarnya ia tidak sendirian. Banyak tokoh elite perjuangan pada zamannya juga demikian. Ketika membubarkan PNI pada 25 April 1931, misalnya, para pemimpin partai itu tidak banyak berkonsultasi dengan rakyat kebanyakan yang menjadi anggotanya. Akibatnya, rakyat menjadi kecewa, membentuk apa yang disebut "Golongan Merdeka", dan menekankan pentingnya pendidikan rakyat. Kelompok inilah yang dengan dukungan Hatta dan Syahrir yang baru pulang dari studi di Belanda, membentuk suatu wadah yang disebut "Pendidikan Nasional Indonesia" atau PNI-Baru.[33]

Tentang perubahan sikap atau permohonan maaf kepada pemerintah kolonial, hal itu perlu dilihat dalam konteksnya. Waktu dipenjara untuk kedua kalinya, Sukarno muda adalah bagaikan ikan yang dipisahkan dari "air"-nya, yakni massa yang biasa mendukungnya, dan yang membuatnya bersemangat dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam penjara itu, dia disel sendirian selama 8 bulan, tidak hanya tanpa harapan akan adanya keringanan hukum, melainkan juga dibayang-bayangi kemungkinan pembuangan ke "neraka" Boven Digul. Dalam keadaan demikian, tidak mengherankan jika sebagai manusia, pada Sukarno ada unsur menyerah. Tetapi, menurut Dahm, yang Sukarno lakukan sebenarnya bukan "menyerah". Ia hanya "mengubah taktik" untuk tidak lagi mendewa-dewakan prinsip, dalam hal ini prinsip non-kooperasi.[34]

www.facebook.com/indonesiapustaka

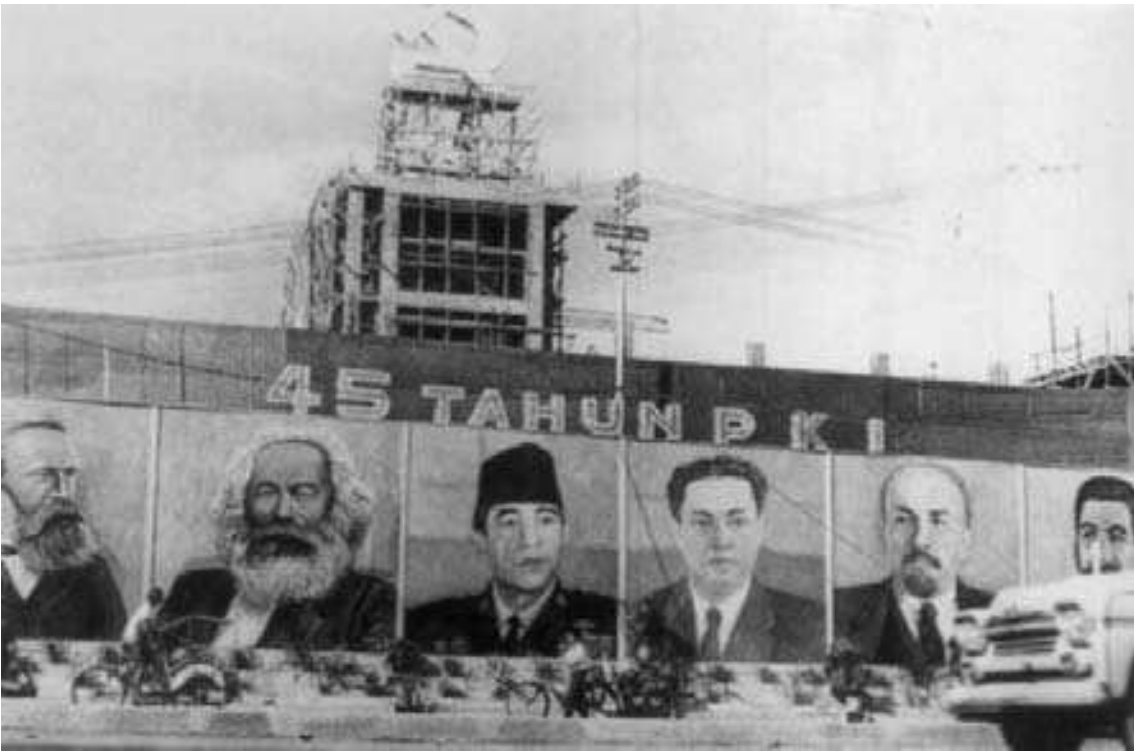

Baliho raksasa terpampang di tengah kota Jakarta.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Belum Tinggi

Tentang contoh-contoh dari luar negeri yang dia kutip, pada pertengahan 1920-an, kerja sama melawan imperialisme dan kapitalisme di sejumlah negeri terjajah memang tampak menjanjikan. Banyak pemimpin pergerakan yang meskipun berbeda keyakinan mau dan mampu bekerja sama satu sama lain. Di India, misalnya, filsuf dan guru agama Hindu T.L. Vaswami mendukung perjuangan Islam melawan kapitalisme dan imperialisme Barat.[35] Di Cina, Dr. Sun Yat-sen yang nasionalis bersedia bekerja sama dengan kaum Marxis dalam menghadapi dominasi asing.[36] Berbagai bentuk kerja sama serupa terjadi di banyak negeri lain seperti Mesir, Maroko, Congo, Turki, Afganistan. Semua itu memberi inspirasi pada Sukarno dalam upaya menentang kolonialisme Belanda di Indonesia.[37]

Berkaitan dengan kecenderungan Sukarno muda untuk mengacu pada literatur Barat perlu disadari bahwa kebanyakan buku yang tersedia padanya waktu itu adalah buku-buku terbitan Barat.[38] Sementara itu, tentang tertujunya tulisan-tulisan Sukarno hanya pada kaum elite perjuangan, perlu diakui bahwa tingkat pendidikan rakyat kebanyakan waktu itu masih belum tinggi. Sebagaimana telah kita singgung, tingkat melek huruf (literasi) saat itu masih jauh di bawah 10 persen.

Konsisten

Apa pun latar belakang dan bentuk pemikiran-pemikiran Sukarno muda, yang jelas ia tetap konsisten dengan pemikiran-pemikirannya itu sampai saat hari tuanya. Hal itu

www.facebook.com/indonesiapustaka

tampak misalnya ketika pada 17 Mei 1956, Presiden Sukarno mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan Kongres Gabungan Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke negeri tersebut. Sebagaimana dilaporkan pada halaman pertama *New York Times* pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Sukarno menyerang kolonialisme[39] "Per-juangan dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat kami dari belenggu kolonialisme," papar Sukarno, "telah berlangsung dari generasi ke generasi selama berabad-abad." Tetapi, tambahnya, perjuangan itu masih belum selesai. "Bagaimana perjuangan itu bisa dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati kemerdekaan?" pekik Sukarno kepada para pendengarnya.

Ketika salah seorang penulis biografi Sukarno, Bernhard Dahm, bertemu dengannya tahun 1966, Dahm mendapat kesan bahwa bahkan pada pekan-pekan terakhir menjelang turunnya dari dunia perpolitikan Indonesia, Sukarno tetap konsisten dengan apa yang dia perjuangkan pada era 1920-an. Dia tetap mengharapkan bahwa di tengah pluralitas yang ada, bangsa Indonesia mampu membina persatuan, dan ia tetap teguh dalam perlawanannya terhadap musuh lamanya, yakni "kolo-nialisme" dan "imperialisme". Oleh karena itu, menurut Dahm, pesan pokok Sukarno tetap sama: di satu pihak, melawan imperialisme sampai ke akar-akarnya, dan, di lain pihak, membangun suatu tatanan baru dengan jalan mempersatukan berbagai ideologi yang berbeda ke dalam suatu kesatuan yang harmonis."[40] Conefo (Conference of the New Emerging Force) yang direncanakan berlangsung pada

www.facebook.com/indonesiapustaka

1966 (tetapi batal dilaksanakan) juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan dunia guna melawan imperialisme. Kemenangan atas imperialisme, menurut Sukarno, akan melapangkan jalan bagi lahirnya perdamaian abadi di dalam masyarakat yang bebas dari penindasan manusia.[41]

Kompleks

Memahami Sukarno beserta ide-idenya memang bukan merupakan sesuatu yang mudah. Di satu pihak, dia memiliki ide-ide cemerlang, namun di lain pihak, ide-ide itu tidak selalu rasional. Pada satu sisi, ide-ide itu terkesan agak tergesa-gesa dirumuskan, namun di lain pihak, dia konsisten dalam memperjuangkannya sejak masa muda. Berhadapan dengan hal ini, Justus M. van der Kroef—yang sebenarnya amat kritis dalam memandang Sukarno dalam kapasitasnya sebagai ideologi—mengusulkan cara pandang tertentu. Menurutnya, Sukarno perlu dilihat sebagai seorang politikus yang "kompleks, penuh gairah, dan banyak akal *(resourceful)*, tak takut berubah-ubah posisi dalam menghadapi pasang-surutnya gelombang ideologi". Selanjutnya, Sukarno juga perlu dilihat sebagai seorang politikus yang "selalu siap merasionalisir perubahan-perubahan itu, termasuk berbagai ungkapan 'irasional' dalam pidato-pidatonya, dan selalu waspada—sampai pekan-pekan yang menentukan pada 1967—terhadap berbagai kemungkinan yang tak terhingga untuk mendahului atau masuk ke dalam badai politik…"[42] Dengan kata lain, lepas dari apakah orang setuju dengan gagasan-gagasannya, Sukarno adalah seorang pribadi

www.facebook.com/indonesiapustaka

kompleks yang selalu mengundang kita untuk terus berefleksi tentang dia dan zamannya.[]

Catatan Akhir:

1 Versi awal dari bab ini pernah dimuat di *Kompas* edisi khusus 1 Juni 2001 dan dalam buku St. Sularto, (ed.), *Dialog Dengan Sejarah* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2001).

2 Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas), h. 335.

3 Lihat Benedict R.O'G Anderson, "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective," *Journal of Asian Studies*, Volume 42, Issue 3 (May 1983), h. 477-496.

4 Ruth T. McVey. "Nationalism, Islam, And Marxism: The Management of Ideological Conflict in Indonesia," *An Introduction to Soekarno. Nationalism, Islam and Marxism* (Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, 1970), h. 5.

5 McVey, h. 5.

6 McVey, Introduction, h. 6-7.

7 Bernhard Dahm. *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence.* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969), h. 151-155.

8 Dahm, h. 98.

9 Dahm, h. 149. Sumber *Fikiran Rakyat* November-Desember 1932.

10 Lihat catatan McVey, h. 40-41.

11 Dahm, h. 96.

12 Simbolon, h. 739.

13 Simbolon, h. 739

14 Dahm, h. 168.

15 McVey, Introduction, h. 3.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[16] McVey, Introduction, h. 2.
[17] McVey, Introduction, h. 2.
[18] McVey, Introduction, h. 3.
[19] McVey, h. 3
[20] Harvey, h. 67.
[21] McVey, h. 3.
[22] McVey, h. 6.
[23] Dahm, h. 130.
[24] Dahm, h. 158.
[25] Adam Malik, "Promise in Indonesia," *Foreign Affairs*, vol. 46 (January 1968), no. 2, h. 393.
[26] Barbara S. Harvey, "Diplomacy and Armed Struggle in the Indonesian National Revolution: Choice and Constraint in a Comparative Perspective," dalam Daniel S. Lev and Ruth McVey, eds., *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1996), 80.
[27] McVey, Introduction, h. 9.
[28] McVey, Introduction, h. 10.
[29] Takashi Shiraishi, "Madu dan Racun: Takashi Shiraishi tentang Kebangkitan Nasional", dalam Baskara T. Wardaya (ed.), *Menuju Demokrasi: Sejarah Indonesia dalam Perspektif Historis* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 134-135.
[30] Dahm, h. 33-34.
[31] Dahm, h. 52.
[32] McVey, Introduction, h. 1.
[33] Simbolon, h. 348-49.
[34] Dahm, h. 169-172.
[35] Sukarno, NIM, h. 42.
[36] Sukarno, NIM, h. 43.
[37] Sukarno, NIM, h. 45.
[38] Itulah sebabnya ketika bicara soal nasionalisme, misalnya, ia meng-acu pada sejarawan dan filsuf Prancis Ernest Rennan,

www.facebook.com/indonesiapustaka

pemikir revisionis Jerman Karl Kautsky, dan pemikir sosialis Austria Otto Bauer. Ketika menanggapi tuduhan pemerintah bahwa PNI sedang bersekongkol untuk memperjuangkan kemerdekaan, dalam pledoi *Indonesia Menggugat* Sukarno mengatakan bahwa itu merupakan tuduhan yang tak berdasar sambil mengacu pada perjuangan yang panjang dari kelas buruh di Eropa Barat. Sementara itu, atas tuduhan bahwa PNI menyebarkan rumor mengenai akan pecahnya Perang Pasifik, Sukarno menyatakan bahwa PNI hanya meneruskan saja apa yang bisa dibaca dari tulisan-tulisan para pemikir Barat dan koran-koran kolonial. Lihat, review oleh Paul W. van der Veur atas *Indonesia Menggugat*, dalam *Pacific Affairs*, vol 49, Issue 2 (Summer, 1976), h. 377-379. Sebagaimana ditunjukkan, misalnya, oleh Roger K. Paget, bahkan dalam mengkritik imperialisme dan kolonialisme Sukarno banyak tergantung pada penulis-penulis sosialis yang berasal dari Barat. Lihat, *review* oleh Paul W. van der Veur atas *Indonesia Menggugat*, dalam *Pacific Affairs*, vol 49, Issue 2 (Summer, 1976), h. 377-379.

39 *New York Times*, 18 Mei 1956, h. 1, 4.

40 Dahm, h. xii-xiii.

41 Dahm, h. xiii.

42 Kroef, "Sukarno the Ideologue," *Pacific Affairs*, Vol. 41, Issue 2 (Summer 1968), h. 261.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bagian II
MENGGUGAT KETERLIBATAN AMERIKA

www.facebook.com/indonesiapustaka

KETERLIBATAN AMERIKA DI INDONESIA

Kakak-beradik Dulles dan Presiden Eisenhower percaya betul bahwa suatu negara yang menganut paham netralitas dalam kebijakan luar negerinya, sengaja atau tidak akan menjadi pendukung Blok Komunis, yakni Blok Soviet. Pandangan semacam itu tentu amat sederhana, tetapi waktu itu dipercayai betul.

George Kahin (1999)

Mudah diduga, betapapun bersemangatnya, Sukarno bukanlah satu-satunya faktor penentu bagi dinamika politik Indonesia pada zamannya. Ada sejumlah faktor lain yang ikut berperan. Misalnya saja, faktor keterlibatan negara-negara lain yang memiliki kepentingan besar di Indonesia. Negara-negara yang punya kepentingan semacam itu tentu akan tertarik untuk ikut bermain dalam perpolitikan di Indonesia guna mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di antara negara-negara itu tentu saja adalah Amerika Serikat (AS). Dalam konteks Perang Dingin, berbagai kepentingan (ideologis, politis, maupun ekonomis) yang dimiliki oleh salah satu negara adidaya itu bercampur baur dan turut menentukan dinamika kehidupan politik negeri pada zaman Bung Karno.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Dalam bab berikut kita akan sekilas melihat bagaimana keterlibatan AS di Indonesia bermula, khususnya sejak pemerintahan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman hingga pemerintahan Presiden Dwight D. Eisenhower. Dalam bab selanjutnya, kita akan menelusuri bagaimana kebijakan-kebijakan Presiden Eisenhower terhadap Indonesia dalam praktiknya dilaksanakan oleh dinas rahasia AS, yakni the Central Intelligence Agency (CIA). Dalam praktiknya, upaya pelaksanaan kebijakan itu ada yang berhasil, tetapi banyak juga yang gagal. Dengan melihat konteks yang lebih luas semacam ini, diharapkan akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk memahami berbagai sikap dan tindakan politik yang diambil oleh Presiden Sukarno pada waktu itu serta dinamika politik Indonesia pada umumnya.

Amerika dan Kemerdekaan Indonesia

Keterlibatan Amerika dalam politik internal Indonesia sebenarnya telah dimulai tak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keterlibatan itu khususnya berlangsung ketika pihak Indonesia dan Belanda sedang melakukan berbagai bentuk negosiasi berkaitan dengan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan serta penetapan batas-batas wilayah negara baru Indonesia. Pada periode ini, sebenarnya baik Amerika maupun Indonesia sama-sama memiliki perasaan kuat dalam hal menentang kolonialisme. Maklum, Amerika sendiri pernah berada di bawah jajahan Inggris dan berjuang untuk mengusir Inggris dari wilayah Amerika Utara. Meskipun demikian, sentimen anti-kolonialisme itu makin diabaikan dan secara diam-diam Amerika di

www.facebook.com/indonesiapustaka

bawah pemerintahan Presiden Harry S. Truman (1945-1953) mendukung upaya pendudukan kembali Kepulauan Nusantara ini oleh pemerintah kolonial Belanda.[1] Ada sejumlah alasan bagi posisi demikian.

Pertama, ketakutan akan Komunisme. Para pembuat kebijakan luar negeri dalam pemerintahan Truman takut bahwa tiadanya kekuatan Barat di Indonesia pada pasca-Perang Dunua II akan memungkinkan masuknya Uni Soviet dan men-jadikan wilayah tersebut akan rentan terhadap pengaruh Komunisme. Lebih lanjut, mereka khawatir bahwa masuknya Komunisme di wilayah ini akan mengancam negara-negara lain di kawawan Asia Tenggara. Para pembantu Truman di Washington sependapat dengan pandangan Loving, Duta Besar Belanda untuk Uni Soviet, bahwa di Indonesia "apa yang dipertaruhkan oleh Uni Soviet berkaitan dengan masalah strategis sangat tinggi—sebuah benteng Komunis yang terletak antara Singapura, Filipina dan Australia". [2] Mereka berharap bahwa keberadaan Belanda di wilayah itu akan mampu menghalangi ketakutan macam itu menjadi kenyataan. Dengan kata lain, ketakutan terhadap penyebaran Komunisme mengalahkan sentimen anti-kolonial Amerika.[3]

Kedua, pentingnya Indonesia bagi kepentingan ekonomi Belanda. Indonesia yang kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti minyak, emas, timah, karet, *bauxite*, karet, kopra, dan lain-lain telah menjadi sumber utama ekonomi Belanda selama masa penjajahan. Negeri jajahan ini telah menyumbangkan sekitar duapuluh persen pemasukan ekonominya. Membantu "mengembalikan" Indonesia ke Belanda akan membantu Negeri Kincir Angin tersebut dalam usaha mem-

www.facebook.com/indonesiapustaka

bangun kembali perekonomiannya yang telah porak-poranda oleh Perang Dunia II. Sebaliknya, begitu Washington berpikir, kegagalan Amerika untuk membantu menguasai kembali Indonesia akan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi Belanda, betapapun besarnya bantuan Amerika yang dikucurkan ke Belanda.[4]

Ketiga, kepentingan ekonomi Amerika. Meskipun belum besar sekali, pada masa itu Amerika telah memiliki berbagai kepentingan ekonomi di Indonesia. Ada sejumlah perusahaan Amerika yang beroperasi di sini, khususnya dalam bisnis minyak dan karet di Sumatra. Keberadaan Belanda di Indonesia akan menjamin keamanan perusahaan-perusahaan Amerika. Para pejabat Amerika khawatir bahwa kepergian Belanda dari Indonesia akan mendorong negeri baru itu untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing termasuk milik Amerika.[5] Stanley Hornbeck, salah seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS yang paling ahli mengenai Asia saat itu, menulis pada 1948 bahwa Indonesia adalah "rangkaian kepulauan yang paling kaya di dunia … suatu wilayah yang secara politis, ekonomis, dan strategis amat peting bagi seluruh dunia". [6] Sementara itu, dalam surat kepada Dubes Amerika untuk Inggris (Harriman) pad 12 Juni 1946, Menteri Luar Negeri AS Byrnes menulis:

> ... perlindungan terhadap berbagai kepentingan yang berkaitan dengan minyak di wilayah Palembang, khususnya ladang-ladang minyak, merupakan hal yang amat mendesak, mengingat bahwa kaum ekstremis sedang bersiap-siap untuk menghancurkan sumur-sumur minyak dan berbagai instalasi yang berkaitan dengan penyulingan minyak. Sejauh ini, Departemen Luar

www.facebook.com/indonesiapustaka

Ramah-tamah Presiden Sukarno dan Duta Besar Amerika Serikat Marshall Green saat menyerahkan surat-surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta.

www.facebook.com/indonesiapustaka

> Negeri belum mendapat kejelasan mengenai siapa yang akan melindungi ladang-ladang minyak itu, sementara rencana untuk melindungi kota Palembang tetap meragukan. Berhubung kepentingan Inggris dalam melindungi perusahaan Shell juga melibatkan perlindungan sumur-sumur dan berbagai peralatan yang letaknya tak jauh dari lokasi perusahaan Amerika di Pendopo dan Talang Akar, Departemen Luar Negeri mengandaikan bahwa pemerintah Inggris akan mengambil langkah-langkah guna melindungi berbagai aset itu.[7]

Dengan kata lain, keberadaan Belanda diharapkan akan turut menjamin keamanan kepentingan ekonomi Amerika di Indonesia.

Keempat, kebutuhan Amerika akan dukungan Belanda di Eropa pasca-Perang Dunia II. Pada tahun-tahun pertama Perang Dingin, Amerika amat membutuhkan dukungan pihak Belanda untuk bersama negara-negara lain membendung pengaruh Uni Soviet di Eropa Barat. Sebagai imbalannya, Amerika membantu Belanda untuk menguasai kembali Indonesia, atau setidaknya ikut mengusahakan terjaminnya berbagai kepentingan ekonomi Belanda di wilayah bekas jajahannya ini. [8]

Kelima, kebutuhan Belanda akan dukungan Amerika. Sebagai negara kecil yang luluh-lantak akibat serbuan Jerman dalam Perang Dunia II, Belanda benar-benar membutuhkan bantuan Amerika atau negara mana pun untuk menguasai kembali bekas jajahannya guna membangun kembali ekonomi-nya. Tanpa bantuan dari luar, khususnya AS, akan sulit bagi Belanda untuk bisa menguasai kembali Indonesia. Dalam rangka itulah mereka selalu menekankan kepada pihak Amerika bahwa Sukarno, Hatta, dan para pemimpin

www.facebook.com/indonesiapustaka

Indonesia yang lain telah melakukan tindakan tercela dengan menjadi kolaborator Jepang. Lebih dari itu, sekarang ini mereka telah berubah menjadi "kaum ekstremis" yang condong pada Komunisme, meskipun dalam politik luar negeri resminya menganut prinsip non-blok. Jika para pemimpin itu berhasil dalam perjuangan mengusir kekuatan Barat, demikian kata mereka, maka akan terbukalah jalan bagi masuknya Uni Soviet dan pengaruh Komunisme—tidak hanya di Indonesia melainkan juga di Asia Tenggara pada umumnya. [9]

Amerika setelah Kemerdekaan Indonesia

Untuk beberapa saat, alasan-alasan di atas menjadi faktor penentu bagi sikap AS terhadap Indonesia. Meskipun demikian, pada akhirnya sikap itu mulai berubah. Ada dua alasan pokok yang mendorong perubahan itu. Pertama, adalah keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengatasi Peristiwa Madiun 1948, sebuah konflik militer yang dipandang sebagai pemberontakan komunis.[10] Para pejabat AS sangat terkesan akan tindakan pemerintah pusat di Yogyakarta yang begitu cepat dan tegas dalam mengatasi konflik itu.[11] Keberhasilan ini membuat Washington mempertanyakan klaim pihak Belanda bahwa para pemimpin Indonesia itu berhaluan komunis.[12] Kalau betul para pemimpin Indonesia itu komunis, tentu tidak akan mau memadamkan pemberontakan komunis.

Alasan lain adalah serangan militer Belanda terhadap Indonesia dalam Agressi Pertama (Juli-Agustus 1947) dan Agresi Kedua (Desember 1948). Dalam aksi militer yang oleh Belanda disebut sebagai "aksi polisionil" itu, tentara Belanda meng-

www.facebook.com/indonesiapustaka

abaikan desakan PBB untuk menghentikan serangan militernya dan keluar dari Yogyakarta. Selain itu, Belanda juga mengabaikan tuntutan PBB agar melepaskan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan, termasuk Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta. Para pejabat Amerika khawatir bahwa kegagalan PBB untuk menunjukkan otoritasnya terhadap negara kecil seperti Belanda akan merongrong wibawa lembaga internasional itu dan dapat mendorong kehancurannya sebagaimana yang terjadi pada Liga Bangsa-bangsa sebelumnya. [13]

Berdasarkan dua pertimbangan itu, banyak pejabat AS mulai meninjau kembali dukungan mereka terhadap Belanda, dan mulai menunjukkan dukungan terhadap Indonesia. Mereka kemudian menekan Menlu Dean Acheson yang selama itu condong untuk selalu mendukung kepentingan Belanda. Acheson pun setuju bahwa Amerika ikut membantu perundingan Indonesia-Belanda yang disponsori oleh PBB dan akan diadakan di Den Haag pada 1949. Dalam perundingan yang disebut sebagai Konferensi Meja Bundar (KMB) itu, Amerika mengirim Merle Cochran sebagai wakilnya.[14] Sebagaimana kita tahu, di akhir konferensi tersebut Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia, namun menolak masuknya Irian Barat dalam wilayah RI. Selanjutnya, Belanda juga menuntut Indonesia untuk membayar "utang" sebesar 1,3 Milyar dollar AS kepada Belanda. Penolakan Belanda untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI itu nantinya menjadi "duri dalam daging" dalam hubungan antara Belanda, Indonesia dan Amerika.[15]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sejak diakhirinya KMB, sebenarnya hubungan Indonesia-Amerika membaik. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Gara-garanya adalah duta besar Amerika pertama untuk Indonesia, yakni Merle Cochran, orang yang sama yang dulu mewakili pemerintah AS dalam KMB.[16] Dengan maksud untuk meningkatkan kariernya sendiri Cochran membujuk pemerintah Indonesia untuk meninggalkan prinsip non-bloknya dan memihak ke Blok Barat. Tanpa persetujuan dari Depar-temen Luar Negeri AS Cochran membohongi pemerintah RI bahwa pemerintah AS bermaksud memberikan bantuan ekonomi, tapi dengan syarat Indonesia memihak Blok Barat pimpinan AS. Tidak sadar bahwa sebenarnya Cochran sedang berbohong, Pemerintah RI menyetujui tawaran itu. Namun ketika mengetahui bahwa sejumlah negara non-blok yang lain (seperti India dan Burma) bisa menerima bantuan tanpa harus meninggalkan prinsip non-bloknya, pihak Indonesia marah besar. Terjadilah demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat, dan semuanya mengecam AS. Pemerintah Amerika pun mencari berbagai upaya untuk memperbaiki kembali hubungan dengan Indonesia yang telah rusak itu.[17]

Eisenhower dan Pemberontakan Daerah

Meskipun telah ada usaha perbaikan hubungan, dukungan Amerika terhadap kemerdekaan Indonesia tampak mulai menurun. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Amerika menyikapi berbagai perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Pada awal era 1950-an, Presiden Sukarno makin kuat berpegang pada prinsip non-blok dan politik bebas-aktif dalam hubungan luar negeri. Ia pun rajin membina hubungan

www.facebook.com/indonesiapustaka

dengan negara-negara Blok Timur yang adalah lawan Amerika. Sementara itu, sikap Presiden Sukarno terhadap Amerika sendiri juga semakin kritis. Ia berterima kasih atas segala bantuan negara adidaya itu, tetapi pada saat yang sama ia menunjukkan sikap hati-hati. Dalam pidato di hadapan Kongres 17 Mei 1956, misalnya, dengan jelas Bung Karno menunjukkan sikap demikian. Dalam pidato itu, dia meminta pengertian Amerika terhadap berbagai masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia. Ia berterima kasih atas persahabatan dan bantuan Amerika, tetapi kemudian menambahkan, "dalam menyatakan rasa terima kasih saya, saya ingin mengungkapkan diri secara terus terang sebagai teman." Dengan agak berseloroh, dia lantas bertanya: "Apakah saya diizinkan untuk beterus terang, Bapak Ketua Sidang?"

Bagi Sukarno bantuan luar negeri itu baik, namun ada sejumlah catatan yang perlu ditambahkan. Katanya:

> ... dalam situasi dunia internasional yang terbelah seperti sekarang ini, kami telah berketetapan bahwa dari mana pun datangnya suatu bantuan, tak ada bantuan material yang akan mampu merampas dari tangan kami kemerdekaan yang telah kami perjuangkan mati-matian itu. Bagi kami kemerdekaan itu jauh lebih berharga daripada produk apa pun yang dapat dibeli atau dijual oleh suatu negara ... Kami terbuka terhadap berbagai bantuan, namun dengan syarat bantuan itu diberikan demi keuntungan timbal-balik. Kami menolak gagasan untuk menggadaikan kemerdekaan intelektual dan spiritual ataupun kebebasan fisik hanya demi uang.[18]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sementara itu, di dalam negeri dia tidak mengekang kebangkitan kembali PKI yang telah hancur sejak Peristiwa Madiun 1948. Hal-hal itu membuat Washington waswas, dan mulai mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap Sukarno dan pemerintah Indonesia.

Terdorong oleh keinginan untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis di Indonesia, Presiden Eisenhower mulai menerapkan *"containment policy"* atau kebijakan membendung komunisme yang dulu dimulai oleh Presiden Truman. Berhubung kebijakan macam itu menuntut kerahasiaan, Presiden Eisenhower dan Menteri Luar Negeri (Menlu) John Foster Dulles banyak bergantung pada CIA. Kebetulan waktu itu CIA dikepalai oleh Allen Dulles, yang adalah saudara kandung dari Menlu Dulles. Di bawah kepemimpinan Allen Dulles CIA menjadi institusi penting yang amat menentukan berbagai kebijakan AS terhadap Indonesia, [19] dan bertanggung jawab langsung pada Presiden. [20] Audrey dan George Kahin berkesimpulan, "hal itu terutama betul… pada masa-masa genting antara 1957 dan pertengahan 1958, [ketika] laporan-laporan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta dan para pejabat Departemen Luar Negeri untuk urusan Indonesia kecil sekali peran dan pengaruhnya." [21]

Penting untuk diketahui bahwa kebijakan pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia pada periode itu sangat segaris dengan kebijakan Amerika pada umumnya terhadap negara-negara Asia Tenggara yang lain, seperti Birma, Kamboja, Laos dan Vietnam. Pada saat ini Amerika melancarkan berbagai operasi rahasia di negara-negara tersebut. Berbagai operasi militer yang rahasia tetapi besar-besaran sering-

www.facebook.com/indonesiapustaka

kali lebih diutamakan daripada berbagai kebijakan resmi yang tampak di permukaan.[22] Salah satu "benang merah" yang menghubungkan berbagai operasi itu tentu saja adalah upaya agar tak terulangnya apa yang disebut sebagai "hilangnya Cina" ke bawah pemerintahan Komunis pada tahun 1949.[23]

Banyak penentu kebijakan dalam pemerintahan Eisenhower percaya bahwa hilangnya Cina itu sebenarnya dapat dihindari seandainya Presiden Truman menerapkan pandangan yang lebih realistik dalam berurusan dengan Cina. Pemerintahan Presiden Truman, demikian mereka percaya, terlalu menekankan pentingnya "keutuhan teriorial" Cina, pada saat Pemerintah Nasionalis Cina sedang menghadapi ancaman komunis. Setelah berakhirnya konflik antara kelompok Nasionalis dan kelompok Komunis, keutuhan Cina memang terjaga, tapi justru untuk kepentingan Komunis yang berhasil mengambil alih kekuasaan pada 1949. Sebagaimana dikatakan oleh John Foster Dulles, "Keutuhan teritorial Cina telah menjadi semboyan. Akhirnya, kita memang mendapatkan Cina secara teritorial tetap utuh—tapi demi keuntungan siapa? Keuntungan Komunis!" [24] Padahal, menurutnya, seharusnya pemerintah Amerika mendukung Chiang Kai-sek dan membantu dia untuk mengonsentrasikan kekuatan Pemerintah Nasionalis di daerah-daerah yang paling bisa dipertahankan. Daerah-daerah yang tidak bisa dipertahankan seharusnya dibiarkan saja kalau mau dikuasai oleh kaum Komunis, untuk nanti direbut kembali. Menlu Dulles dan kawan-kawan percaya bahwa alih-alih mempertahankan keutuhan teritorial Cina seharusnya Amerika membiarkan perpecahan negara itu untuk sementara.[25]

www.facebook.com/indonesiapustaka

"Pelajaran dari Cina" inilah yang kemudian menjadi salah satu titik tolak berbagai operasi rahasia pemerintahan Eisenhower terhadap Indonesia pada paro kedua tahun1950-an. Sedemikian besar operasi rahasia itu hingga dapat dikatakan sebagai salah satu operasi militer rahasia yang terbesar yang pernah dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, tetapi yang sekaligus paling tak diketahui oleh publik Amerika sendiri.[26] Dalam pandangan pemerintah Eisenhower, adalah lebih baik bahwa Indonesia terpecah-pecah menjadi sejumlah kesatuan politis daripada tetap utuh tapi jatuh ke tangan Komunis. Kepada Dubes AS untuk Indonesia waktu itu, yakni Hugh S. Cumming, Presiden Eisenhower mengatakan bahwa kalau harus memilih antara Indonesia yang utuh tapi berada di bawah kekuasaan Komunis dan Indonesia yang terpecah-pecah dia lebih memilih yang kedua. [27] Secara lebih eksplisit, Menlu Dulles mengatakan kepada Dubes Cumming:

> Antara Indonesia yang secara teritorial utuh tetapi sedikit demi sedikit condong ke arah Komunisme dan terbagi-baginya negara itu menjadi wilayah-wilayah menurut garis etnis dan geografis, saya akan memilih yang kedua. Satuan wilayah-wilayah itu nantinya dapat digunakan oleh Amerika sebagai pangkalan untuk membantu mereka dalam menghabisi Komunisme wilayah demi wilayah. Setelah itu, kalau memang mereka mau, wilayah-wilayah itu dapat disatukan kembali sebagai Indonesia yang utuh kembali. [28]

Kebijakan Terhadap Indonesia

Pada pertengahan 1957, pemerintah Eisenhower menjadi waswas ketika melihat bahwa pemerintah Indonesia semakin lama semakin cenderung kekiri-kirian. Presiden Eisenhower

www.facebook.com/indonesiapustaka

dan sejumlah pembantunya—termasuk dua bersaudara Dulles—khawatir bahwa Presiden Sukarno dan Angkatan Bersenjata Indonesia sedang membiarkan diri dikuasai oleh kaum Komunis. Sukarno yang berkali-kali menekankan pentingnya kebijakan non-blok, serta pesatnya peningkatan keanggotaan PKI membuat Washington semakin gelisah. [29]

Setahun sebelumnya, tepatnya pada pertengahan 1956, terjadi ketidakpuasan di antara sejumlah perwira Angkatan Darat. Pemicunya adalah adanya perintah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A.H. Nasution berkenaan dengan masalah mutasi dan pengangkatan para perwira Angkatan Darat. Sejumlah perwira merasa kecewa atas perintah itu dan menuntut adanya perubahan dalam struktur kekuasaan Angkatan Darat. Ketidakpuasan itu muncul pada November 1956 saat dilangsungkan reuni di SSKAD di Bandung. Dalam kesempatan itu, sejumlah perwira terang-terangan mengkritik Nasutian dan menuntut diadakan pergantian kepemimpinan Angkatan Darat. Sebulan kemudian, di bawah pimpinan Maludin Simbolon, Komandan Militer Sumatra Utara, sejumlah perwira Angkatan Darat di Sumatra Utara berkumpul dan mendesak komandan-komandan militer di berbagai wilayah untuk bergabung dengan mereka dalam membebaskan diri dari cengkeraman komando militer pusat di Jakarta. Pada 16 Desember, mereka melangkah lebih jauh dengan cara terang-terangan menentang kekuasaan pemerintah Pusat RI. Untuk menunjukkan rasa solidaritas terhadap upaya membebaskan diri itu, mereka minum "lalu bersama-sama membanting gelas-gelas yang habis mereka pakai itu guna melam-

www.facebook.com/indonesiapustaka

bangkan niat mereka untuk memutuskan diri dengan masa lalu." [30]

Sepanjang 1957, diadakan berbagai pembicaraan antara para perwira pembangkang, pemerintah maupun satuan Angkatan Darat, namun tidak melahirkan hasil yang berarti. Pada 8 September tahun itu, para pembangkang mengumumkan sebuah deklarasi yang mereka sebut sebagai "Piagam Palembang", ditandatangani oleh tiga orang pemimpin mereka, yakni Letnan Kolonel Barlian, Letnan Kolonel Ahmat Husein, dan Kolonel H.N.V. Sumual. Ada enam butir yang penjadi tuntutan mereka: dikembalikannya Dwitunggal Sukarno-Hatta;[31] digantinya kepemimpinan Angkatan Darat; otonomi seluas-luasnya kepada daerah-daerah; pembentukan majelis militer; peremajaan dalam tubuh pemerintah dan dalam tubuh bangsa seluruhnya; pelarangan Komunisme yang berorientasi internasional.[32]

Pada 5 Februari 1958, setelah ultimatum mereka ditolak oleh pemerintah, para pembangkang mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi di Sumatra dan secara resmi memisahkan diri dari pemerintah Republik Indonesia. Mereka lantas membentuk pemerintahan sendiri yang didukung oleh sebuah kabinet koalisi yang multipartai.[33] Banyak pejabat senior dalam pemerintahan Eisenhower menyambut gembira pemberontakan itu serta pernyataan bahwa para pemberontak memisahkan diri dari pemerintah RI. Mereka memandangnya sebagai kesempatan yang baik untuk menggeser orientasi Komunis pemerintah Indonesia ke arah non-Komunis. Guna mencapai tujuan itu, mereka pun mengembangkan suatu kebijakan yang arahnya, "menghancurkan PKI, memperlemah kekuatan

www.facebook.com/indonesiapustaka

Angkatan Darat di Jawa, dan sejauh mungkin membatasi gerak, kalau bukan sepenuhnya menurunkan, Presiden Sukarno." [34]

Segera setelah itu para pejabat di Washington melancarkan suatu operasi untu memberikan bantuan militer langsung kepada para pemberontak. Pada saat yang sama, mereka berusaha keras supaya operasi itu tetap rahasia dan tidak diketahui baik oleh pemerintah pusat Indonesia maupun masyarakat Amerika. Pada awal Maret 1958, dalam upaya untuk merahasiakan operasi militer itu, Menlu Dulles menyatakan kepada Kongres bahwa kebijakan AS terhadap Indonesia itu "merupakan tindakan yang benar dari sudut pandang hukum internasional". Ia melanjutkan, "*Kita tidak campur tangan* terhadap urusan internal negara tersebut."[35] Pada kesempatan lain, sang Menlu juga menyatakan, "Washington akan lebih senang dengan suatu pemerintahan [Indonesia] yang lebih konstitusional." [36]

Seminggu kemudian, para pemimpin pemberontak di Sumatra meminta bantuan militer yang lebih besar kepada Washington. Mereka juga mencari pengakuan resmi dari SEATO (South East Asian Treaty Organization). Washington bermaksud memenuhi permintaan itu, namun sekali lagi Menlu Dulles dalam berbagai pernyataan publiknya berusaha merahasiakannya. Ia nyatakan bahwa pemerintah Amerika tetap pada posisi netral, tidak memihak para pemberontak. Katanya: "Amerika memandang kerusuhan di Sumatra sebagai masalah internal ... Kita berusaha sekuat tenaga agar sikap dan kebijakan kita tetap sesuai dengan peraturan-peraturan internasional yang berlaku."[37]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Presiden Soekarno menginjakkan kaki di pulau dewata.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Meskipun demikian, tampaknya Presiden Sukarno tahu apa yang sesungguhnya sedang dilakukan oleh Washington. Pada 30 April 1958, dia menuduh pemerintah Amerika Serikat membantu angkatan udara para pemberontak dengan mengirimkan sejumlah pilot dan pesawat pengebom. Sukarno mem-peringatkan pemerintahan Eisenhower untuk "tidak bermain api dengan Indonesia".[38] Ia menggugat campur tangan AS itu sambil menambahkan: "Kalau ada pihak luar yang ingin menjadikan Indonesia seperti Korea kedua atau Vietnam kedua, maka akan pecahlah Perang Dunia Ketiga."[39]

Pada sebuah konferensi pers yang diadakan pada hari yang sama, seorang wartawan menanyakan kepada Presiden Eisenhower bagaimana reaksi dia terhadap gugatan Presiden Sukarno atas keterlibatan AS di Indonesia. Eisenhower menjawab: "Kebijakan-kebijakan kita selalu bersifat netral dan sikap kita sepenuhnya selalu sama, yakni tidak ingin campur tangan dalam hal-hal yang bukan merupakan urusan kita." Ia melanjutkan: "Namun sejauh saya dengar, dalam setiap pemberontakan selalu saja ada apa yang disebut sebagai tentara bayaran ... Banyak orang suka berpetualang dalam pertempuran; kadang-kadang karena mengharapkan bayaran, tapi kadang-kadang juga demi petualangan itu sendiri. Hal macam itu akan terjadi di mana pun setiap kali ada pemberontakan."[40] Pada intinya, Eisenhower menolak gugatan Sukarno dan ingin memberi kesan kepada masyarakat Amerika bahwa pemerintahnya tidak terlibat dalam pemberontakan daerah di Indonesia. Hal itu tentu saja sama sekali tidak benar.[41][]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Catatan Akhir:

1 Lihat U.S. Government, *Foreign Relations of the United States* (hereafter FRUS), vol. VIII, 1946, The Far East (Washington D.C.: Government Printing Office, 1971), h. 787-859. Audrey Kahin and George McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia* (New York: The New Press, 1995), h. 29.

2 U.S. Government, *FRUS*, Vol. VI, 1947, The Far East (Washington: Government Printing Office, 1972), Doc. 856E.00/4-1747, h. 917.

3 Kahin and Kahin, h. 29.

4 Kahin and Kahin, h. 29; *FRUS*, Vol. VI, Doc. 565.56D31/3-1247, h. 904-905. Joseph B. Smith, *Portrait of a Cold Warrior* (New York: G.P. Putnam's Sons, 1976), h. 212.

5 Kahin and Kahin, h. 29-30.

6 Stanley K. Hornbeck, "The United States and the Netherlands East Indies," *Annals of the American Academy of Political and Social Science,* 255 (January 1948): h. 124-25, seperti dikutip dalam Robert J. McMahon, *Colonialism and Cold War: The United States and the Struggle for Indonesian Independence, 1945-49* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1981), h. 19.

7 *FRUS*, Vol. VIII, 1946, Doc. 856E.00/6-1246, h. 827.

8 Kahin and Kahin, 30.

9 *Ibid.*, h. 31.

10 U.S. Government, *FRUS*, Vol. VI, 1948, The Far East And Australasia. (Washington: Government Printing Office, 1974), h. 353-58.

11 McMahon, h. 242-43.

12 Kahin and Kahin, h. 31.

13 *FRUS* Vol. VI, 1948, Doc. 586d.00/12-1348, h. 551. Kahin and Kahin, h. 31.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[14] Cochran, seorang diplomat karier, diketahui umum sebagai orang yang sangat pro-Belanda. McMahon, h. 233-234.

[15] Kahin and Kahin, h. 33, 36.

[16] Cochran bertugas sebagai Dubes AS untuk Indonesia dari Desember 1949 hingga Februari 1953.

[17] Kahin and Kahin, h. 34.

[18] The *New York Times*, May 18, 1956, h. 1, 4.

[19] Sebuah memo tertanggal 31 Januari 1958 tentang Direktur CIA Allen Dulles menunjukkan betapa besarnya obsesi CIA terhadap masalah Indonesia. Lihat U.S. Government, *Foreign Relation of the United States*, Vol. XVII, 1958-1960, Indonesia (Washington: Government Printing Office, 1994), Doc. 10-11, h. 16-24.

[20] Selama bertahun-tahun, para sejarawan berdebat mengenai siapa sebenarnya yang paling menentukan dalam politik luar negeri AS selama perintahan Eisenhower: apakah Eisenhower sendiri atau Menlu John Foster Dulles. Stephen Ambrose, salah seorang penulis biografi Eisenhower, mengatakan bahwa "yang benar adalah bahwa Eisenhower, dan bukan Dulles, yang menentukan kebijakan-kebijakan itu. Setiap orang yang paham akan cara kerja pemerintahan Eisenhower tahu akan hal ini." Stephen Ambrose, *Eisenhower,* vol. 2, *The President* (New York: Simon and Schuster, 1984), h. 442. Sementara itu, para penulis lain, seperti William Blum dan Joseph B. Smith, yang keduaduanya terlibat dalam penyusunan kebijakan luar negeri pemerintahan Eisenhower, mengatakan bahwa yang menentukan politik luar negeri adalah CIA dan bukan Eisenhower (terutama berkaitan dengan terhadap Indonesia). Lihat William Blum, *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II* (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995. First edition: 1986); Lihat juga Joseph B. Smith, *Portrait of a Cold Warrior*.

[21] Kahin and Kahin, h. 6.

[22] Kahin and Kahin, h. 8.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[23] Kahin and Kahin, h. 9.

[24] Papers of John Foster Dulles, Harvey Mudd Library, Princeton University, Princeton, N.J., sebagaimana dikutip dalam Kahin and Kahin, h. 10.

[25] Kahin and Kahin, h. 9.

[26] Kahin and Kahin, h. 10. Lihat juga George McTurnan Kahin, *Intervention: How America Became Involved in Vietnam* (New York: Anchor Books, Doubleday, 1986), h. 454n.

[27] Kahin and Kahin, h. 68.

[28] Kahin and Kahin, h. 68.

[29] Kahin and Kahin, h. 16.

[30] R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta* (Jakarta: Grafiti, 1991), h. 30; A.H. Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas Vol. 4: Masa Pancaroba Kedua* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 63; dan John Smail, "Military Politics of North Sumatra: December 1956-October 1957," *Indonesia* 6 (Oct. 1968), h. 140, sebagaimana dikutip dalam Kahin and Kahin, 57.

[31] Pada Desember 1956, Hatta, yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, mengundurkan diri. Alasannya adalah adanya ketidaksesuaian politis dengan Presiden Sukarno. Para pemberontak menuntut supaya Hatta dikembalikan ke posisi semula sebagai Wapres.

[32] Lihat Penerangan Angkatan Darat, *Kini Tabir dapat Dibuka* ([Jakarta?]: Kementerian Penerangan RI, 1958, h. 30; Daniel Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (Ithaca, New York: Monograph Series, Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, 1966), h. 36-37. Lihat juga Kahin and Kahin, h. 72.

[33] *Time*, February 24, 1958, h. 27-28.

[34] Kahin and Kahin, h. 17.

[35] David Wise and Thomas Ross. *The Invisible Government* (New York: Random House, 1964), h. 140. Cetak miring saya tambahkan.

[36] *Time*, March 10, 1958, h. 22.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[37] Ambrose, h. 249-50.

[38] Kahin and Kahin, h. 186.

[39] *Time*, May 12, 1958, h. 33.

[40] Ambrose, h. 250, *Time*, May 12, 1958, h. 33. Victor Marchetti and John Marks, *The CIA and the Cult of Intelligence* (New York: Knopf, 1964), h. 26.

[41] Wise and Ross, *Invisible Government*, h. 137. Ambrose, h. 250.

www.facebook.com/indonesiapustaka

CIA BERGERAK

Dan jangan lupa, untuk Amerika Serikat di zaman Perang Dingin negara yang tidak mau ikut dengan Barat berarti komunis. Musuhnya. Dan itu sebabnya Presiden Amerika Dwight Eisenhower sendiri punya politik untuk menggulung Sukarno. Itu sebabnya Amerika mendukung PRRI/Permesta.

Pramodeya Ananta Toer (2001)

Ketika menyebut soal "tentara bayaran" *(soldiers of fortunes)* itu tentu saja Presiden Eisenhower sedang berbohong. Orang-orang Amerika yang terlibat dalam bantuan terhadap para pemberontak guna melawan pemerintah pusat itu bukanlah tentara bayaran yang bertindak atas nama pribadi, melainkan adalah agen-agen lapangan yang secara resmi dikirim oleh pemerintah AS untuk suatu misi khusus, yakni misi menggulingkan pemerintah Republik Indonesia. Mereka adalah orang-orang terlatih yang profesional yang bergerak di bawah komando pemerintahan Eisenhower.[1] Mereka telah direkrut sebagai bagian dari operasi rahasia besar-besaran yang dilancarkan oleh pemerintahan itu guna membantu para perwira pemberontak dalam menggulingkan pemerintah pusat Indonesia yang sah.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Dalam melaksanakan operasi itu, pemerintahan Eisenhower amat menggantungkan diri pada CIA dan pada banyaknya peralatan militer modern yang dimiliki oleh Armada Ketujuh Amerika. Operasi itu juga mengandalkan dukungan dari negara-negara lain seperti Taiwan (Formosa), Filipina, Inggris dan Australia.[2] Meskipun demikian, seluruh operasi dikoordinasi dan dilaksanakan oleh CIA.

CIA dan Konferensi Asia-Afrika

Perlu dicatat, betapapun dahsyatnya, operasi CIA di Indonesia kali ini ternyata bukanlah merupakan operasi yang pertama. Beberapa tahun sebelum pemberontakan daerah itu mulai, dinas rahasia AS itu telah pernah pula melakukan aktivitas rahasia yang dimaksudkan untuk melawan pemerintah Indonesia. Misalnya, operasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika 1955. Operasi itu berawal dari reaksi AS atas inisiatif Presiden Sukarno untuk menyelenggarakan konferensi yang akan dilaksanakan di Bandung itu. Amerika mengetahui bahwa para calon peserta konferensi telah sepakat untuk bersama-sama secara resmi menetapkan posisi netral *(neutralism)* atau non-blok *(non-aligned)* sebagai posisi resmi negara-negara Asia-Afrika yang baru merdeka dalam hubungan internasional. Mereka tidak ingin tunduk pada Blok Timur maupun Blok Barat yang menegangkan dan amat mewarnai Perang Dingin itu. Jika sikap itu benar-benar diadopsi, begitu Amerika berpikir, konferensi tersebut akan merupakan tantangan langsung bagi pembentukan SEATO (South East Asia Treaty Organization), sebuah aliansi militer-politik negara-negara Asia Tenggara yang disponsori oleh Amerika Serikat guna membendung pe-

www.facebook.com/indonesiapustaka

ngaruh Komunis di wilayah itu. Bagi para pejabat dalam pemerintahan Eisenhower dan CIA, konferensi itu dengan demikian telah menjadi semacam "ajaran sesat" yang harus "dibereskan". Bertolak dari pikiran tersebut, CIA kemudian mengambil inisiatif untuk mempertimbangkan rencana pembunuhan sebagai salah satu cara untuk menggagalkan KAA.[3]

Selama bertahun-tahun rencana itu tersimpan sebagai rahasia yang tak diketahui publik. Semuanya baru terbuka pada 1975, ketika apa yang disebut sebagai "Komisi church" (*Church Committee*)—sebuah komisi Senat yang diketuai oleh Senator Frank Church untuk menyelidiki operasi-operasi rahasia CIA di luar negeri—mendengarkan kesaksian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rahasia yang dilakukan oleh para agen dinas rahasia tersebut di negara-negara Asia Timur. Menurut kesaksian itu, para pejabat CIA telah mengusulkan suatu rencana untuk membunuh "seorang pemimpin Asia Timur" guna mengacau KAA yang mereka pandang sebagai sebuah "Konferensi Komunis".[4] Komisi church mendapatkan sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan rencana untuk membunuh pemimpin Asia Timur itu adalah rencana untuk membunuh Presiden Sukarno. Komisi tersebut melaporkan bahwa rencana tersebut telah sampai pada tahap penunjukan seorang agen yang akan melaksanakan tugas pembunuhan itu. Dikatakan dalam laporan tersebut,

> … Selain rencana-rencana rahasia yang telah dipaparkan dalam laporan ini, Komisi juga menemukan sejumlah petunjuk bahwa CIA pernah berencana untuk membunuh Presiden Indonesia, Sukarno ... Mantan Wakil Direktur Bidang Perencanaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

> [CIA] Richard Bissel memberikan kesaksian bahwa pembunuhan atas Sukarno "pernah dipertimbangkan" oleh CIA, tetapi bahwa rencana itu tidak pernah lebih jauh daripada menentukan seorang "asset" yang diperkirakan akan direkrut untuk melaksanakan pembunuhan itu. Persenjataan dikirim kepada para pemberontak di Indonesia, namun menurut Bissel senjata-senjata itu tidak dimaksudkan untuk melakukan pembunuhan [terhadap Sukarno]. (Bissel, 6/11/75. h. 89).[5]

Masih menurut Komisi tersebut, pada akhirnya "kepala dingin mendominasi Kantor Pusat CIA di Washington dan rencana itupun ditolak sepenuhnya". Konferensi Asia-Afrika berjalan sesuai persiapan, dan para peserta memang mengadopsi doktrin non-blok.

Bantuan untuk Masyumi

Campur tangan CIA juga pernah dilakukan berkaitan dengan diselenggarakannya Pemilu 1955. Pada waktu itu, para pejabat CIA bermaksud melakukan campur tangan guna ikut mempengaruhi hasil dari pemilu tersebut. Tujuan utamanya adalah mengacau PNI (Partai Nasional Indonesia)—yang secara tradisional dikaitkan dengan Bung Karno—dan PKI (Parai Komunis Indonesia). Untuk itu, CIA mengucurkan dana sebesar satu juta dollar AS ke Masyumi, sebuah partai yang di mata CIA berhaluan tengah dan merupakan koalisi organisasi-organisasi Muslim. Para agen CIA di Indonesia merasa perlu sekali bahwa Amerika memberikan dukungan finansial yang amat besar kepada partai tersebut. "Perhitungan kami atas situasi di Indonesia menjelang Pemilihan Umum 1955," kata mantan agen CIA Josehp B. Smith, "adalah bahwa Masyumi merupakan kekuatan-tanding *(counterforce)* yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

dibutuhkan oleh Indonesia untuk menghentikan kecenderungan Sukarno dan para pendukung politisnya untuk condong ke kiri, menuju ke suatu pemerintahan otoriter yang didukung oleh PKI."[6]

Smith—yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Ketua Cabang CIA untuk Divisi Asia Timur—mengakui bahwa sumbangan uang sebesar itu untuk sebuah partai politik merupakan hal yang tidak biasa. Oleh karena itu, supaya kelak tidak ketahuan, CIA menggunakan taktik *"complete write-off"*, yakni tiadanya permintaan pertanggung jawaban atas bagaimana uang itu akan digunakan. "Saya sama sekali tidak tahu bagaimana dan untuk apa akhirnya uang sejuta dolar itu digunakan oleh Masyumi."[7] Sebagaimana terbukti kemudian, proyek itu gagal total. "Sama sekali tak menghasilkan jumlah suara sebagaimana diharapkan," keluh Smith.[8] Dalam Pemilu 1955 Masyumi memang gagal mengumpulkan suara terbanyak dan hanya menjadi pemenang pada urutan kedua setelah PNI.

"Memanggang Kaki Sukarno"

Berkaitan dengan pidato Bung Karno di depan Kongres 1956 sebagaimana telah kita lihat di depan, banyak pejabat CIA merasa gusar. Mereka kecewa bahwa Presiden Indonesia itu mengkritik motivasi di balik bantuan Amerika Serikat dan bahwa dia sama sekali tidak menunjukkan kehendak untuk menghentikan perkembangan Komunisme di negerinya. Frank Wisner, Wakil Direktur Perencanaan CIA dan kepala operasi rahasia adalah salah seorang yang merasa kecewa. Kira-kira pada November 1956, secara terus-terang ia mengung-

www.facebook.com/indonesiapustaka

kapkan kekecewaannya itu melalui Al Ulmer, Ketua Divisi Timur Jauh yang baru. Katanya: "Saya kira sekarang ini adalah saatnya bagi kita untuk Memanggang Kaki Sukarno di atas api."[9] Meskipun sebenarnya tak seorang pun di CIA yang tahu persis apa yang dimaksud Wisner, namun banyak pejabat CIA tahu bahwa Ulmer menganggap serius kata-kata Wisner itu. Joseph Smith menulis, "Al [Ulmer] secara terang-terangan mengatakan kepada para agen Divisi FE/5, yakni divisi yang bertanggung jawab untuk urusan Indonesia, Malaya, dan kerja sama dengan dinas rahasia Australia, bahwa kalau mereka tidak segera menyusun rencana untuk itu ["Memanggang Kaki Sukarno"], mereka akan mendapatkan 'hadiah Natal' yang jauh lebih buruk." CIA mulai bergerak. Kata Smith: sejak itu "mulailah periode satu setengah tahun petualangan sia-sia yang mengakibatkan tewasnya ribuan nyawa orang Indonesia."[10]

CIA dan Pemberontakan Daerah

Dengan kata lain, komentar singkat Wisner itu segera diikuti oleh keputusan CIA untuk melancarkan tindakan langsung terhadap Indonesia. Pemberontakan di Sumatra, yang pendorongnya antara lain adalah kekhawatiran para sejumlah perwira daerah atas makin kuatnya pengaruh PKI di Jakarta, memberikan kesempatan untuk itu.[11] Oleh karena itu, pada 1957 CIA secara langsung melibatkan diri dalam pemberontakan tersebut melalui sebuah operasi militer. Berhubung operasi itu adalah sebuah operasi militer dalam skala besar, maka dibutuhkan resmi dukungan dari Pentagon. Namun hukum menuntut bahwa dukungan macam itu hanya bisa diberikan oleh Pentagon terhadap "misi aksi

www.facebook.com/indonesiapustaka

politik" serta harus disetujui oleh "Special Group" (Kelompok Khusus) yang merupakan bagian dari National Security Council (NSC/Dewan Keamanan Nasional). Wiliam Blum, seorang mantan staf Departemen Luar Negeri, menjelaskan bahwa Special Group itu "merupakan kelompok kecil sejumlah anggota NSC yang bertindak atas nama Presiden, guna melindunginya dan melindungi negara dengan cara mengevaluasi usulan-usulan rencana operasi rahasia dan juga memastikan bahwa CIA tidak keluar dari rel. Kelompok macam ini sering disebut sebagai Komisi 5412, Komisi 303, Komisi 40, atau Operation Advisory Group [Kelompok Penasihat Operasi]." [12]

Taktik yang ditempuh oleh para agen CIA guna mendapatkan izin operasi menunjukkan bagaimana berpengaruhnya institusi itu dalam menentukan kebijakan luar negeri Amerika. Dalam memoirnya, John Smith—yang antara pertengahan 1956 hingga awal 1958 menjabat sebagai staf CIA urusan Indonesia—menceritakan hal tersebut. Alih-alih mengusulkan suatu rencana untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintahan Eisenhower, Smith dan para agen CIA yang lain:

> ... mulai membanjiri Departeman Luar Negeri dan Departemen Pertahanan dengan laporan-laporan intelijen yang tampaknya memang paling tepat untuk memahami situasi di Indonesia. Setelah mereka cukup membaca data-data yang menggelisahkan, kami pun lantas menyusun rencana untuk mengusulkan bahwa kita [pemerintahan Eisenhower] harus mendukung rencana para perwira daerah dalam melancarkan pemberontakan guna mengurangi kekuasaan Sukarno.

www.facebook.com/indonesiapustaka

> Cara demikian merupakan cara standar bagi banyak petualangan politis CIA tahun 1960-an dan 1970-an. Dengan kata lain, keliru kalau mengira bahwa CIA baru mengambil inisiatif untuk melakukan operasi-operasi rahasia seperti di Chile *setelah* diperintahkan oleh … Special Group.
>
> Dalam banyak kasus kamilah yang sebenarnya duluan menyusun rencana operasi setelah kami mengumpulkan cukup banyak data intelijen yang seolah-olah memang menuntut suatu operasi rahasia. Kegiatan kami di Indonesia tahun 1957-1958 adalah salah satu contohnya. Kami juga sering menggunakan taktik-taktik tertentu untuk menimbulkan kesan seolah-olah CIA memang harus dilibatkan.[13]

Smith mengakui bahwa dalam berurusan dengan para pemberontak, CIA "menghadapi banyak masalah". Namun di antara masalah-masalah itu, menurut dia, masalah yang terbesar adalah "masalah yang kami ciptakan sendiri." Smith dan para agen CIA yang lain misalnya, amat kesulitan mengungkapkan kepada para pejabat kepresidenan di Washington apa sebenarnya yang menjadi tujuan pokok CIA dalam membantu para perwira pemberontak itu. Di satu pihak, mereka bermaksud mendukung para perwira itu untuk memisahkan diri dari pemerintahan Sukarno, namun di lain pihak, para agen CIA belum berani mengatakan rencana dukungan tersebut secara terus-terang sebelum yakin bahwa Washington benar-benar akan mendukungnya.[14]

Apa yang dikatakan oleh Smith itu sesuai dengan kesimpulan Audrey dan George Kahin. Kedua pakar tentang Indonesia itu menyatakan bahwa dalam penyusunan kebijakan terhadap Indonesia, Presiden Eisenhower dan Menlu John Foster Dulles amat ditentukan oleh kepercayaan mereka

www.facebook.com/indonesiapustaka

"terhadap laporan-laporan CIA yang biasanya tendensius dan seringkali tak dapat diandalkan—yang berisi informasi dan interpretasi yang cuma sesuai dengan isapan jempol mereka sendiri". Ironisnya, tutur keduanya, baik Presiden maupun Menlu-nya "justru kurang mempercayai laporan-laporan yang umumnya lebih bisa diandalkan yang disampaikan oleh Duta Besar atau staf kedutaan di Jakarta, termasuk laporan dari atase militer."[15] Selain itu, Presiden Eisenhower dan Menlu Dulles juga menggantungkan diri pada laporan-laporan yang diberikan oleh Hugh S. Cumming Jr.—Dubes Amerika untuk Indonesia (3 September 1953-3Maret 1957) dan Ketua Inter-Departmental Taks Force on Indonesia (1957-1958), yang memang memiliki ketidaksukaan pribadi kepada Presiden Sukarno.[16]

Sementara itu, di Indonesia sedang terjadi perkembangan yang makin mengkhawatirkan AS. Dalam Pemilu Daerah pada 1957, PKI mendapatkan perolehan suara yang luar biasa. Gedung Putih gelisah. Dalam rapat NSC 1 Agustus, Wakil Menteri Luar Negeri Christian A. Herter menyatakan bahwa dia "prihatin dengan perkembangan yang sedang terjadi di Indonesia". Alasannya, kata dia, "pemerintahan demokratis di negeri itu sedang dilempar keluar jendela."[17] Herter merasa perlu bahwa "JCS [Joint Chiefs of Staff] melihat kembali pentingya mempertahankan Jawa dalam lingkaran *Free World* [Blok Barat pimpinan AS]." Dalam rapat itu, Herter mendesak dipertimbangkannya berbagai konsekuensi lebih jauh seandainya Jawa dan Sumatra terpisah dari bagian-bagian Indonesia yang lain. Pertimbangan macam itu menurutnya "akan sangat berguna bagi kita untuk memutuskan seberapa

www.facebook.com/indonesiapustaka

banyak upaya yang harus kita lakukan terhadap Indonesia di masa depan."[18]

Banyak pejabat di Departemen Luar Negeri turut merasakan keprihatinan Herter mengenai situasi di Indonesia. Pada 2 Agustus 1957, misalnya, Pembantu Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh Walter S. Robsertson menyampaikan keprihatinan kepada Dubes Amerika untuk Indonesia John M. Allison atas "situasi yang terus memburuk di Indonesia." Ia juga menyatakan kekhawatirannya bahwa kalau Amerika tidak mampu berbuat sesuatu "Komunis akan segera merebut posisi yang amat menentukan dalam kehidupan politik di negeri itu." Ia pun merasa bahwa "ujung dari tindakan dan posisi yang diambil Sukarno sekarang ini (sengaja atau tidak) adalah meningkatnya peran PKI."[19]

Pencopotan John Allison

Berbagai macam jenis keprihatinan itu menjadi alasan tambahan bagi para staf CIA untuk meyakinkan pemerintahan Eisenhower tentang betapa seriusnya masalah Komunisme di Indonesia. Dalam kaitan itu, mereka merasa bahwa Dubes Allison menjadi semacam "batu sandungan" untuk rencana-rencana mereka. Ironisnya, sementara berbagai pihak di Amerika khawatir mengenai makin meningkatnya pengaruh Komunis di Indonesia, Allison malah menyatakan keyakinannya bahwa "meskipun secara resmi pemerintahnya menganut prinsip bebas-aktif dalam politik luar negerinya, orang-orang Indonesia tetap saja berpaling ke Amerika; apa yang mereka rindukan bukanlah sekadar bantuan teknis atau militer, melainkan hangatnya hubungan antarmanusia." Ia juga berpendapat, "Sampai sekarang cara pikir Amerika belum seiring

www.facebook.com/indonesiapustaka

sejalan dengan cara pikir Indonesia, dan orang-orang Indonesia merasa terluka, kecewa dan gundah karena melihat bahwa tampaknya kita sedang mengabaikan tradisi kita sendiri [sebagai bekas negara jajahan] dan malah bergabung dengan kelompok negara-negara kaya yang secara tegas meskipun agak ragu-ragu menutup pintu bagi kaum miskin."[20]

Allison—yang mulai menjabat sebagai Dubes AS tanggal 3 Maret 1957 menggantikan Hugh S. Cumming Jr.—percaya bahwa Washington "belum meluangkan cukup waktu untuk menjajagi kemungkinan mencari langkah-langkah yang lebih bisa membantu." Ia tidak setuju dengan mereka yang mengatakan bahwa Presiden Sukarno "sudah tak bisa ditolong lagi." Menurut Allison, masih terbuka kemungkinan untuk mengurangi ketergantungan Sukarno terhadap kelompok Komunis. Sebagai Duta Besar ia percaya bahwa sekarang ini seharusnya pemerintah Amerika "justru mendukung pemerintah pusat Indonesia, karena… pengaruh terbesar yang ada dalam Kabinet tetaplah pengaruh non-komunis".

Selanjutnya, Dubes Allison merekomendasikan pemerintah AS untuk memperbesar bantuan ekonomi dan penjualan alat-alat militer ke pemerintah Indonesia.[21]

Sebelum mengirimkan telegram itu, Allison juga telah menyatakan keberatannya mengenai keterlibatan CIA dalam urusan Indonesia. Menurut Joseph Smith, lain dengan staf CIA, Allison memandang bahwa operasi-operasi CIA itu:

> tidak ada sumbangannya bagi kebijakan luar negeri AS pada umumnya. Ia tidak terlalu yakin bahwa akan gunanya kalau melibatkan CIA di bawah payung Kedutaan untuk urusan

www.facebook.com/indonesiapustaka

membina kontak dengan para kolonel pemberontak. Itulah sebenarnya yang menjadi alasan utama Sang Dubes untuk mengirim telegram dan minta izin pada Kantor Pusat [Departemen Luar Negeri]. Tujuannya agar ia diperbolehkan untuk duluan menjalin kontak dengan para kolonel. Dengan demikian, kalau nanti ada apa-apa, ia bisa mengatakan bahwa dirinya telah menerima perintah dari Washington.[22]

Dengan kata lain, Allison telah menjadi "sumber masalah" bagi operasi-operasi rahasia CIA. Ia sering mengajukan "pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan" berkaitan dengan kegiatan CIA. Dubes Allison, lanjut Smith, "secara tertulis menyampaikan laporan ke Washington mengenai ketidaksetujuan dia dengan estimasi kami mengenai perkembangan situasi di Indonesia." Sebagai reaksi, dalam berurusan dengan Dubes yang "keras kepala" macam ini CIA menggunakan taktik lama yang sudah biasa mereka pakai. "Cara terbaik untuk membereskan dutabesar yang menggunakan haknya sebagai kepala misi pemerintah Amerika di luar negeri untuk meminta informasi mengenai operasi-operasi CIA," tutur Smith, "adalah dengan membohongi mereka." [23]

Kecewa berat dengan Sang Dubes, staf CIA mulai menyusun rencana untuk mengatasi masalah Allison. Sebagaimana dilaporkan juga oleh Smith, orang-orang CIA itu "menangani masalah ini dengan cara mendesak Allen Dulles [Direktur CIA] agar mengusahakan supaya kakaknya mencopot Allison dari kedudukannya sebagai Dubes, meskipun belum ada setahun dia bertugas di Indonesia."[24] Dengan segera John Foster Dulles memenuhi permintaan itu. Pada 3 Januari 1958, Deputi Wakil Menteri Luar Negeri untuk urusan Managemen, Loy Hender-son, mengirim kawat ke Dubes Allison di Jakarta,

www.facebook.com/indonesiapustaka

dan meminta dia untuk meninggalkan Indonesia karena mau diberi tugas lain. Henderson menulis,

> Sebagai tanggapan terhadap telegram Anda kepada Robertson [maksudnya Pembantu Menteri Luar Negeri untuk Urusan Timur Jauh Walter S. Roberston] melalui Mein [yakni Direktur Urusan Pasifik Barat Daya John Gordon Mein], kami bermaksud meminta kepada Presiden agar Anda dialihtugaskan sebagai Dubes AS untuk Cekoslowakia. Sangat diharapkan bahwa Anda segera menyampaikan bagaimana tanggapan Anda atas tawaran ini.[25]

Membaca telegram tersebut, Allison mengerti bahwa alasan bagi pencopotannya adalah soal penilaiannya terhadap kebijakan Amerika terhadap Indonesia. Pada 6 Januari 1958, dia menjawab:

> Saya sangat menghargai kiriman telegram Anda dan telah mempertimbangkan dengan masak-masak tawaran yang Anda berikan. Dari kalimat pertama telegram yang saya kirim kelihatan bahwa menurut saya kebijakan [AS] di Indonesia saat ini sedang mengalami kekurangan elemen-elemen penting sebagaimana yang saya sebutkan pada Mein. Kalau itu benar, sebagaimana saya katakan pada Mein, akan sulit sekali bagi saya untuk terus melaksanakan tugas. Dan saya kira pemerintah [AS] juga tidak akan lebih diuntungkan kalau nanti ada Dubes baru. Saya dan istri saya telah sungguh-sungguh mempertimbangkan apakah penugasan ke Cekoslowakia itu harus saya terima seandainya memang ditawarkan ke saya. Meskipun baik saya maupun istri sama sekali tidak gembira dengan tawaran tersebut, sebagai diplomat karier saya harus bersedia pergi ke mana pun saya dikehendaki oleh Deplu." [26]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pada 28 Januari 1958—kurang dari setahun bertugas sebagai Dubes AS untuk Indonesia—John M. Allison ditarik. Ia digantikan oleh Howard P. Jones yang penunjukkannya amat "membahagiakan" para agen CIA di Indonesia. Smith mengatakan, "Jones adalah orang yang benar-benar pas untuk urusan operasi-operasi [CIA], dan penunjukannya membuat semua agen kami merasa senang."[27]

CIA dan Peristiwa Cikini

Ada contoh lain yang dapat menggambarkan bagaimana CIA melaksanakan operasi rahasianya di Indonesia. Pada 30 November 1957, terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Ketika itu, Presiden sedang meninggalkan sebuah sekolah di bilangan Cikini, Jakarta. Tiba-tiba sejumlah granat dilemparkan ke arahnya. Bung Karno sendiri selamat, tetapi ada 10 orang tewas dan 48 anak sekolah terluka. Siapa sebenarnya pelaku peledakan itu tak dapat segera diketahui. Dalam rapat NSC 5 Desember 1957, Direktur CIA Allen Dulles juga menyatakan keraguannya pada laporan-laporan yang menyatakan bahwa orang-orang Komunis berada di balik percobaan pembunuhan itu.[28] Meskipun demikian, para agen CIA di Jakarta justru memanfaatkan situasi dan mengambil keputusan sendiri. Mereka pun mulai menyebarkan propaganda bahwa orang-orang Komunis-lah yang menjadi otak percobaan pembunuhan. Smith menerangkan mengapa keputusan macam itu harus segera diambil:

> … Saya mengusulkan supaya kami bergerak dengan cepat, sebelum teman-teman kami [para kolonel pemberontak] dituduh. Apakah mereka ini terlibat atau tidak, itu urusan nanti.

www.facebook.com/indonesiapustaka

> Maka kami pun segera menyerbarkan cerita bahwa percobaan pembunuhan yang amatiran itu dilakukan oleh PKI berdasarkan nasihat dari agen-agen Soviet untuk memberi kesan bahwa musuh-musuh Sukarno itu adalah orang-orang yang kejam dan kacau.[29]

Belakangan diketahui bahwa para pelakunya adalah anggota sebuah kelompok agama tertentu yang tak ada kaitannya dengan PKI maupun CIA. [30]

Allen Dulles, NSC dan Pemberontakan Daerah

Pada 6 Januari 1958, Allen Dulles memberikan *briefing* dalam rapat NSC (National Security Council) tentang perkembangan terakhir di Indonesia. Direktur CIA itu melaporkan bahwa "Pemerintah Indonesia tampaknya telah memutuskan untuk berpaling ke Blok Soviet dalam hal pembelian persenjataan, meskipun juga akan membeli senjata dari Eropa Barat". Negara-negara tempat membeli senjata itu, ungkap Dules, adalah Yugoslavia, Cekoslowakia, dan Polandia. Dia juga melaporkan bahwa "memburuknya situasi ekonomi di Jawa telah mendorong lebih banyak desersi militer dari pemerintah pusat. Hal itu terjadi di Kalimantan, sebagaimana telah terjadi di Sumatra dan Sulawesi".[31]

Dalam rapat NSC sebulan kemudian, 6 Februari 1958, Allen Dulles mengatakan, "Apa pun yang terjadi, cepat atau lambat wilayah Luar Jawa akan memisahkan diri dari Jawa." Menurutnya terpecahnya Republik Indonesia sudah tak terhindarkan.[32] Empat hari kemudian, pada 10 Februari, NSC menyetujui Laporan Khusus tentang Indonesia—disebut NSC 1788—yang merekomendasikan tiga pendekatan yang perlu

www.facebook.com/indonesiapustaka

ditempuh guna mencapai tujuan-tujuan Amerika di Indonesia. Masing-masing adalah:

a. Kerahkan semua sarana rahasia untuk memperkuat tujuan, niat dan persatuan kekuatan anti-Komunis di Luar Jawa, khususnya di Sumatra dan Sulawesi; tujuannya adalah supaya tindakan itu nantinya bisa mempengaruhi situasi di Jawa, dan dengan demikian bisa menjadi sarana perlawanan seandainya nanti kelompok Komunis mengambil oper Jawa.

b. Jika situasi di Jawa terus memburuk, tingkatkan terus langkah-langkah sebagaimana diuraikan dalam butir a.

c. Gunakan situasi dan sarana yang telah ada atau yang akan dibangun oleh kekuatan anti-Komunis di Luar Jawa guna melanjutkan usaha kita dalam mempersatukan dan mendorong tindakan, entah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, semua elemen non-Komunis dan anti-Komunis di Jawa, guna melawan kelompok Komunis. [33]

Pada hari yang sama garis kebijakan ini disetujui, para kolonel pemberontak mengeluarkan ultimatum melawan pemerintah pusat sebagaimana yang telah mereka janjikan kepada CIA. Mereka menuntut Presiden Sukarno supaya menghentikan "tindakan-tindakan inkonstitusional"-nya dan kembali ke posisi konstitutional seperti semula. Mereka juga menuntut sejumlah perubahan dalam pemerintahan.[34] Para pemberontak memberi waktu lima hari kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan ultimatum itu.

Pada 13 Februari, segera setelah rapat NSC, Allen Dulles dan Wakil Menlu Herter bertemu dengan Presiden Eisenhower untuk membicarakan situasi di Indonesia. Dalam pertemuan

www.facebook.com/indonesiapustaka

itu "CAH [Christian A. Herter] mengatakan kepada Menteri Luar Negeri bahwa Presiden tidak bisa ikut rapat NSC hari ini, tetapi setelah rapat itu CAH dan Allen Dulles bertemu dan berbicara dengan Presiden guna menyampaikan laporan terakhir mengenai sejumlah rahasia berkaitan dengan masalah Indonesia." Sayang sekali catatan mengenai pertemuan tiga orang itu tak ditemukan. [35]

Apa pun isi pembicaraan itu, yang jelas pemerintah pusat Indonesia tegas-tegas menolak ultimatum itu. Jenderal Nasution memecat pemimpin pemberontakan, yakni Kolonel Ahmad Hussein dari dinas kemiliteran. Bersamaan dengan itu dipecat pula para pendukungnya, seperti Colonel Zulkifly Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, dan Kolonel Maludin Simbolon.[36] Pada 15 Februari 1958, para pemberontak dari Sumatra menjawab pemecatan itu dengan mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Syafruddin Prawiranegara diangkat menjadi Perdana Menteri pemrintahan yang baru itu.[37]

Majalah *Time* melaporkan bahwa 40 ribu tentara dan penduduk sipil hadir ketika Hussein mengumumkan berdirinya "suatu pemerintahan revolusioner yang berdaulat penuh atas seluruh Indonesia" tersebut. Majalah itu juga melaporkan pidato Perdana Menteri baru Syafruddin: "Dengan kesedihan dan kesusahan yang mendalam kita terpaksa mengibarkan bendera menentang Kepala Negara kita sendiri. Kita telah bicara dan bicara. Sekarang tiba saatnya untuk bertindak."[38] Pada 2 Maret 1957, di Sulawesi deklarasi pembentukan PRRI itu disusul oleh pengumuman deklarasi "Piagam Perjuangan Semesta Alam", disingkat "Permesta".

www.facebook.com/indonesiapustaka

Di bawah pimpinan Kolonel H.N.V. Sumual, sejumlah perwira mengumumkan keadaan darurat yang meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Tak lama kemudian Permesta bergabung dengan PRRI.

Dari Washington, Allen Dulles mengikuti perkembangan di Indonesia dengan seksama dan selalu mendapat laporan terbaru dari staf CIA. Pada 6 Maret, dia memberikan *briefing* kepada NSC dan mengatakan bahwa Luar Jawa akan memisahkan diri dari Jawa. Ia juga memberi gambaran umum mengenai situasi Indonesia. Ketika harus mengatakan darimana ia mendapatkan informasi, Allen Dulles hanya menyebut "kalangan intelijen". Jelas sekali yang dia maksud adalah para agen CIA yang sedang menjalankan misi rahasia di Indonesia. Sementara itu, dalam menjalankan misinya CIA sangat diuntungkan oleh kehadiran militer AS di Asia Tenggara. Pihak Inggris juga membantu CIA dengan menyediakan markas operasi di Singapura, yang tentu saja sangat dekat dengan Sumatra. Di Filipina, CIA dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas pelatihan, sedang di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan Indonesia dinas rahasia itu membuat lapangan-lapangan udara kecil yang dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat dalam rangka transportasi logistik maupun pengeboman. CIA merekrut banyak orang Indonesia, Filipina, Taiwan maupun Amerika untuk melaksanakan tugas-tugas itu dan membekali mereka dengan berbagai bentuk peralatan dan senjata.[39]

Sampai saat itu, operasi mendukung pemberontakan daerah di Indonesia merupakan operasi rahasia yang paling ambisius yang pernah dilakukan oleh CIA. Operasi itu sendiri

www.facebook.com/indonesiapustaka

melibatkan ribuan personil yang semuanya dilatih, dipersenjatai, serta dilengkapi oleh Angkatan Darat Amerika. Sementara itu, kapal-kapal selam milik Angkatan Laut Amerika membantu melakukan patroli di sepanjang pantai pulau Sumatra, yang adalah basis para pemberontak. Angkatan Udara Amerika juga membantu para pemberontak dengan cara menerjunkan peralatan dan senjata. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa sebelum diterbangkan, pesawat-pesawat itu harus menjalani prosedur "sanitasi" (penghapusan identitas), sehingga kalau ada yang jatuh atau tertangkap, pihak Amerika bisa menyangkal keterlibatannya.[40]

Pada bulan-bulan pertama pemberontakan, CIA menyediakan sejumlah pesawat beserta para pilotnya kepada pihak pemberontak guna menjalankan tugas penembakan dan pengeboman atas lokasi-lokasi pertahanan pemerintah RI.[41] Kebanyakan tugas-tugas itu berjalan dengan lancar. Pada Mei 1958, salah seorang pilot itu mengebom dan menghancurkan sebuah kapal tanker milik Inggris bernama *San Flaviano* yang sedang berlabuh di Balikpapan. Sebuah kapal kecil milik Indonesia yang sedang berlabuh di dekatnya juga ikut kena. *Aquilla*, sebuah kapal barang milik Italia dibom dan tenggelam di pelabuhan Amboina. Di pelabuhan yang sama sebuah kapal berbendera Yunani *Armonia* juga diserang, sedang sebuah kapal berbendera Panama bernama *Flying Lark* juga dijatuhi bom dan menewaskan sembilan orang. Meskipun semua pesawat yang digunakan itu tidak ada tanda resminya, orang-orang di wilayah target operasi tahu bahwa itu semua adalah pesawat Amerika. Seorang awak kapal *Flaviano* yang selamat mengatakan, "Jangan bohongi saya

www.facebook.com/indonesiapustaka

dengan mengatakan bahwa Amerika tidak terlibat [dalam serangan-serangan itu]."[42]

Dalam suatu upaya lebih lanjut untuk memperkuat posisi pihak pemberontak, staf CIA membujuk atase militer Indonesia di Washington supaya ikut bergabung dengan para kolonel. Semula negosiasi berjalan alot, namun kemudian ada indikasi "kemajuan". Kepala divisi Indonesia di kantor pusat CIA, menurut Joseph Smith, "merasa gembira karena sepertinya usaha kami untuk menarik Kolonel Alex Kawilarang, atase militer Indonesia di Washington, menunjukkan tanda-tanda akan berhasil."[43] Kawilarang dipandang sebagai "orang yang paling bisa memimpin tentara pemberontak."[44] Guna menjamin keberhasilan rencana desersi itu Menlu Dulles diberi tugas khusus. Ia diminta membuat dan mengumumkan sebuah pernyataan resmi guna memberi kesan seolah-olah desersi itu tak ada kaitannya dengan AS. Dan memang itulah yang terjadi. Pada hari berikutnya, Menlu Dulles mengumumkan bahwa desersi Kawilarang itu merupakan bagian dari "masalah internal Indonesia." Ia pun menambahkan, "rupa-rupanya sistem Demokrasi Terpimpin yang dicanangkan Sukarno telah mengecewakan banyak orang di Indonesia sendiri."[45] Kolonel Kawilarang meninggalkan AS dan langsung bergabung dengan para pemberontak di Sulawesi. [Keterangan lain menyebutkan bahwa Kawilarang sebenarnya dijebak untuk bergabung dengan para pemberontak].

Operasi Penumpasan

Pemberontakan daerah itu ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan direncakan oleh CIA. Pada April

www.facebook.com/indonesiapustaka

1958, menjadi semakin jelas bahwa meskipun didukung secara besar-besaran oleh CIA, serangan-serangan pihak pemberontak terhadap pemerintah pusat tidak efektif.[46] Sebaliknya, operasi-operasi militer pemerintah Jakarta terhadap posisi para pemberontak jauh lebih terkoordinasi. Majalah *Time* memberi contoh bagaimana tentara pemerintah menghadapi tentara pemberontak di Padang, Sumatra Barat:

> Pagi-pagi benar tentara pemerintah berdesak-desakan masuk ke kapal pengangkut dan kapal pendarat, menuju ke pantai dekat Padang yang merupakan basis para pemberontak. Sekelompok marinir telah mendarat sebelumnya, merasuk ke arah daratan dan hanya menemui tembakan pertahanan yang ala kadarnya. Di atas lapangan udara Padang, kira-kira delapan mil dari kota, pesawat-pesawat pemerintah melakukan tembakan ke lokasi-lokasi persenjataan, sementara 200-an tentara terjun di sekitar lapangan udara. Dalam waktu 12 jam, tentara pemberontak menarik diri di sepanjang jalan menuju Bukit Tinggi, yang jaraknya kira-kira 58 mil dari Padang. Tak lama kemudian Padang sendiri berhasil direbut oleh tentara pusat di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani. Tampaknya Kolonel Yani telah belajar dengan baik ketika kuliah di Command and General Staff College milik Angkatan Darat Amerika di Fort Leavenworth, Kansas.[47]

Dalam upaya untuk menghambat laju tentara pemerintah pusat, CIA membantu para pemberontak dengan meningkatkan serangan tembak dan pengeboman di Maluku. Dalam otobiografinya, Presiden Sukarno mengklaim bahwa salah satu operasi serangan telah menewaskan ratusan rakyat Indonesia. Meskipun tidak menyebut satu negara secara khusus, Bung Karno menunjukkan bahwa ia telah mencurigai adanya

www.facebook.com/indonesiapustaka

"pihak ketiga" yang terlibat dalam serangan-serangan macam itu. Katanya:

> Seringkali ada pihak ketiga yang campur tangan untuk menyelesaikan suatu konflik, tetapi ketika pihak ketiga itu mulai mengebom kita, itu namanya bukan sekadar campur tangan. Pada suatu hari Minggu di bulan April 1958, misalnya, pesawat-pesawat pemberontak melancarkan serangan berdarah di atas Pulau Kristen Ambon dan salah satu bomnya langsung mengenai sebuah gereja. Gedung gereja hancur. Setiap orang yang ada di dalamnya tewas. Pesawat-pesawat itu juga menenggelamkan sebuah kapal milik Republik yang sedang berlabuh, menewaskan seluruh penumpangnya. Dalam serangan tunggal itu ada sekitar 700-an orang menjadi korban. Jumlah mereka yang tewas tak dapat dihitung.[48]

Tertangkapnya Allen Pope

Apa yang dikatakan Bung Karno segera terbukti. Kecurigaan dia tentang adanya keterlibatan "pihak ketiga" memang bukan sekadar omong kosong. Pada hari Minggu pagi, 18 Mei 1958, ketika sedang melakukan pengeboman atas wilayah Ambon, sebuah pesawat pemberontak tertembak jatuh. Peristiwa itu terjadi hanya selang tiga hari saja setelah suatu serangan udara menewaskan banyak orang di sekitar Gereja. Ketika pesawat ditembak, pilot dan co-pilot dari pesawat itu sempat melompat keluar dari pesawat dan selamat, tetapi lalu tertangkap oleh pihak RI. Pilot utama pesawat itu adalah Allen Lawrence Pope, seorang agen CIA.

Berusia 29 tahun dan berasal dari negara-bagian Florida, Pope adalah seorang mantan letnan penerbang Angkatan

www.facebook.com/indonesiapustaka

Udara AS dan pernah mendapatkan medali penghormatan karena tugasnya dalam Perang Korea. Dalam perang itu, dia berhasil menjalankan misi penerbangan malam sebanyak 55 kali. Sementara di Vietnam, dia pernah menjalankan tugas dengan baik sebagai penerbang CIA yang membantu menyuplai tentara Prancis yang terkepung di Dien Bien Phu.[49] Di Ambon nasibnya lain. Pesawatnya tertembak. Untunglah dia berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dan terjun payung. Meskipun begitu sampai di darat dia langsung ditangkap oleh tentara RI dan "diselamatkan" dari amukan penduduk. Kepada Colonel Herman Pieters, komandan militer di Ambon, ia mengaku bahwa para pemberontak telah merekrutnya sebagai pilot dengan gaji 10.000 dollar AS per bulan. Dengan terus-terang, dia mengatakan bahwa tugasnya adalah melakukan pengeboman di wilayah Indonesia Timur, dan telah menenggelamkan sejumlah kapal asing maupun kapal Indonesia. Kepada mereka yang menginterogasinya ia juga mengatakan bahwa ia tertarik menjalankan pekerjaan ini karena ia khawatir bahwa Indonesia akan "menjadi Komunis."[50]

Ketika dimintai tanggapannya atas penangkapan pilot CIA itu, Dubes Amerika untuk Indonesia Howard P. Jones hanya bisa memberikan pernyataan standar. Ia ulangi saja kata-kata Presiden Eisenhower yang sejak lama berusaha menyangkal keterlibatan AS. Menurutnya Allen Pope adalah "jenis orang yang sering disebut sebagai 'tentara bayaran' *[soldiers of fortune]*... yang suka beravonturir dan suka *nyrempet-nyrempet* bahaya di mana pun dia bisa mendapatkannya."[51] Persis dengan apa yang pernah dikatakan oleh Eisenhower sebelumnya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Mendengar pernyataan itu, Bung Karno kecewa dan marah sekali. Kepada Dubes Jones ia mengatakan:

> Fakta bahwa pemerintah Anda [Amerika] mencoba meremehkan dia [Allen Pope] dan menyebutnya sebagai "tentara bayaran" adalah sebuah isapan jempol yang lucu ... Kekanak-kanakan. Sudah umum diketahui bahwa Amerika, Taiwan, dan Inggris secara aktif membantu para pemberontak. Saya yakin pilot itu adalah agen CIA. Tariklah garis di sekeliling negeri saya dan tandailah lapangan-lapangan terbang *[airstrips]* yang ada dalam jarak pengisian bahan-bakar yang dapat didarati pesawat dan bisa menyuplai bahan-bakar untuk pesawat-pesawat yang menjatuhkan kiriman senjata untuk para pemberontak. Tidak banyak. Akan kelihatan bahwa lapangan-lapangan udara itu adalah milik Inggris di Singapura atau milik Amerika di Filipina … Misalnya terbukti bahwa titik berangkat Pope itu ternyata adalah lapangan udara milik Inggris atau Amerika, bukankah saya berhak untuk marah dan mengutuk kaum imperialis yang mencoba menggerogoti negara saya?[52]

Menyadari bahwa seorang personil militer Amerika yang tertangkap bisa menjadi semacam "komoditi berita dunia", pada 27 Mei 1958 pemerintah Indonesia mengadakan konferensi pers. Pada kesempatan itu, dokumen-dokumen resmi Pope diumumkan kepada publik. Allen Pope bukan orang yang bodoh. Ketika tertangkap sang pilot membawa "sejumlah dokumen penting, termasuk surat yang menunjukkan bahwa ia adalah pilot Angkatan Udara Amerika serta pilot yang bekerja untuk institusi penerbangan milik CIA, Civic Air Transport (CAT)". Sebenarnya, sebelum berangkat untuk melakukan tugas pengeboman itu pilot dan pesawatnya telah

www.facebook.com/indonesiapustaka

menjalani prosedur "sanitasi" sebagaimana yang telah kita singgung di depan, namun diam-diam Pope mengantongi kembali dokumen-dokumen pribadinya. Ia tahu, kalau sampai ia tertangkap tanpa disertai dokumen ia bisa dianggap sebagai *"stateless person"* alias orang yang tak berkewarganegaraan dan oleh karena itu, bisa dieksekusi tanpa harus melalui prosedur hukum yang berlaku.[53] Yang jelas pengungkapan identitas Pope itu menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan bahwa Amerika memang terlibat dan mendukung pemberontakan daerah.[54] Dengan kata lain, kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika itu netral, berarti dia berbohong.[]

Catatan Akhir:

1 Stephen Ambrose. *Eisenhower,* vol. 2, *The President.* (New York: Simon and Schuster, 1984), 250.

2 Audrey Kahin and George McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia*. (New York: The New Press, 1995), h. 17. Lihat juga *FRUS*, Vol. XVII, Doc. 101, h. 182, Doc. 145, h. 264, Doc. 37, h. 66, Doc. 51, h. 91-92. *Time*, June 2, 1958, h. 27.

3 William Blum. *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II.* (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995. First edition: 1986), h. 99.

4 *Supplementary Detailed Staff Reports on Foreign and Military Intelligence,* Book 4, Final Report of The Select Committee to Study Govern-

www.facebook.com/indonesiapustaka

mental Operation with Respect to Intelligence Activities (U.S. Senate), April 1976 sebagaimana dikutip dalam Blum, h. 99.

5 *Interim Report: Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders,* The Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities (U.S. Senate) November 20, 1975, h. 4 catatan, sebagaimana dikutip dalam Blum, h. 100. Lihat Kahin and Kahin, h. 114.

6 Joseph B. Smith, *Portrait of a Cold Warrior* (New York: G.P. Putnam's Sons, 1976), h. 214.

7 Smith, h. 210-211.

8 Smith, h. 211. Ketika para agen CIA tahu bahwa Bung Karno mulai menerima bantuan militer dari Uni Soviet, mereka mulai menyusun rencana operasi yang mirip dengan rencana yang sebelumnya pernah digunakan oleh CIA untuk menghadapi Mohammad Mossadegh di Iran tahun 1953 dan Jacobo Arbenz dari Guatemala, tahun 1954. Rencana operasi itu "hampir sama persis" dengan rencana untuk menggulingkan Arbenz, PBSUCCESS, dan diperiksa langsung serta disetujui oleh Presiden Eisenhower sendiri. Stephen Ambrose, *Ike Spies: Eisenhower and the Espionage Establishment* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1981), h. 222-223, 250.

9 Smith, h. 205. Blum, 99, John Ranelagh. *The Agency: The Rise and Decline of the CIA* (New York: Simon & Schuster, 1987), h. 334; Kahin and Kahin, h. 85.

10 Smith, 205.

11 Blum, 100.

12 Blum, 101.

13 Smith, 229. Cetak miring sesuai aslinya.

14 Smith., 225.

15 Kahin and Kahin, 17.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[16] Kahin and Kahin, h. 82. Lihat U.S. Government, *Foreign Relations of the United States*, Vol. XXII, Southeast Asia, (Washington: Government Printing Office, 1989), Doc. 207, h. 350.

[17] *FRUS*, Vol. XXII, Doc. 240, h. 400.

[18] *FRUS*, Vol. XXII Doc 240, 400.

[19] *FRUS*, Vol. XXII., Doc. 241, h. 402-403.

[20] Department of State, Central Files, 656.56D13/12-3057. Lihat "Telegram From the Embassy in Indonesia to the Department of States," Jakarta, December 30, 1957, *FRUS*, Vol. XVII, Doc. 341, 577.

[21] "Memorandum From the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Robertson) to Secretary of State Dulles," January 2, 1958. *FRUS*, Vol. XVII, Doc.1, h. 3.

[22] Smith, 229.

[23] Smith, 230, 240.

[24] Smith, 230.

[25] *FRUS*, Vol. XVII, Doc. 4, h. 10.

[26] Department of State, Central Files, 123 Allison, John Monroe. See "Editorial Note," *FRUS*, Vol. XVII, 1958-1960, Doc. 4, h. 10.

[27] Smith, h. 246.

[28] *FRUS*, Vol. XXII, Doc. 306, h. 526.

[29] Smith, h. 243.

[30] Smith, h. 243.

[31] Whitman File, NSC Records, Eisenhower Library. *FRUS*, Vol. XVII, Doc. 5, h. 11.

[32] *FRUS*, Vol. XVII, Doc. 13, h. 27.

[33] "U.S. Policy Towards Indonesia," *FRUS*, Vol. XVII, Doc. 15, h. 31-34.

[34] Kahin and Kahin, h. 139.

[35] *FRUS*, Vol. XVII, Doc, 18, h. 38.

[36] Ambrose, h. 249.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[37] *FRUS,* Vol. XVII, Doc, 18, h. 38.

[38] *Time*, February 24, 1958, h. 27-28.

[39] Blum, h. 102.

[40] *Ibid.*, h. 102. "Telegram From the Chief of Naval Operation (Burke) to the Commander in Chief, Pacific (Stump) December 7, 1957," *FRUS,* Vol. XXII, Doc. 312, h. 533.

[41] Blum, h. 103.

[42] *Time*, May 12, 1958, h. 33.

[43] Smith, h. 246.

[44] Smith, h. 246.

[45] Smith, h. 246. See also *FRUS,* Vol. XVII, Doc. 59, h. 105. Blum, 103.

[46] Blum, h. 103.

[47] *Time*, April 28, 1958, h. 32.

[48] Sukarno, *An Autobiography As Told to Cindy Adams*. (New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965), h. 268-269.

[49] Blum, h. 103.

[50] *Time*, May 12, 1958, h. 33, and June 9, 1958, h. 31-32.

[51] Howard P. Jones, *Indonesia: The Possible Dream.* (Singapore: Mas Aju PTE, LTD, 1973), h. 129.

[52] Sukarno, h. 269.

[53] Blum, h. 103.

[54] Blum, h. 103. Tentang operasi militer itu dan masalah Allen Pope, lihat Wise and Ross, h. 145-46; Christopher Robins, *Air America* (US, 1979), h. 88-94. Col. L. Fletcher Prouty, US Air Force, Ret., *The Secret Team: The CIA and Its Allies in Control of the World* (New York: 1974), 155, 308, h. 363-66; *New York Times*, May 9, 1958, h. 9; Sukarno, h. 269-71.

www.facebook.com/indonesiapustaka

CIA GAGAL

… Pemerintah Amerika mendesak terus. Terutama setelah pemilihan Eisenhower tahun 1952… Perang Dingin sudah menggambarkan dunia dibagi dua. Sebelah sana ada komunisme, Uni Soviet. Sebelah sini ada free world *…Itu mempengaruhi kedua* great powers *ini untuk mempermainkan sebagian politik luar negeri maupun dalam negeri Indonesia.*

Daniel Lev (1999)

DENGAN tertangkapnya Allen Pope, Washington tak bisa lagi menyangkal keterlibatannya. Dengan kata lain, Amerika telah mendukung suatu tindak pemberontakan melawan Pemerintah Indonesia yang sah, yang diakui oleh dunia internasional. Perkembangan situasi ini membuat Amerika berpikir ulang mengenai keterlibatannya. Apalagi semakin hari semakin kelihatan bahwa pemberontakan itu tidak efektif atau bahkan akan gagal sama sekali.

"Cerita Besar"

Sebenarnya, bahkan sebelum tertangkapnya Pope, Dubes Jones sudah mengusulkan agar Amerika menarik diri saja.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pada 17 Mei 1958, misalnya, Jones mengirim telegram kepada Menlu Dulles dan mengatakan:

> Izinkan saya menekankan kembali bahwa berbagai pihak di sini—entah itu orang Inggris, Australia, orang Amerika sendiri, atau orang Indonesia yang anti-Komunis—setuju bahwa sebaiknya sekarang ini pemerintah Amerika mulai menunjukkan sikap positif dan mulai mendukung Pemerintah Indonesia. Menurut saya pribadi, hal itu sebaiknya dilakukan melalui pernyataan publik Bapak Menlu, tetapi harus segera disertai tindakan konkret, yakni dengan benar-benar mengurangi bantuan untuk para pemberontak, khususnya bantuan operasi pengeboman. Selama ini operasi-operasi itu telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk pihak-pihak yang sebenarnya bersimpati kepada para pemberontak. [1]

Desakan macam itu, ditambah dengan faktor kegagalan para pemberontak serta tertangkapnya pilot Pope membuat para penentu kebijakan di Washington terpaksa benar-benar mempertimbangkan kembali dukungan mereka bagi pemberontakan daerah. Beberapa pihak mulai merasa bahwa dukungan kepada para pemberontak itu laksana "menyalakan lilin yang cahayanya tak lagi dibutuhkan".[2] Pada 27 Mei 1958, Menlu Dulles mengadakan rapat dengan beberapa staf Kedutaan Besar Belanda untuk Amerika, Asisten Menlu untuk urusan Asia Timur Walster S. Robertson, Deputi Asisten Menlu untuk Urusan Eropa dan Kanada Fred W. Jandrey, serta Deputi Direktur Kantor Urusan Eropa Barat Turner C. Cameron. Sebagaimana dilaporkan dalam memorandum dari rapat itu Dulles menerangkan latar belakang usaha Amerika untuk mendukung dan mempengaruhi kalangan militer maupun sipil di Indonesia guna mengambil langkah-langkah untuk

www.facebook.com/indonesiapustaka

menghentikan kecenderungan negeri itu yang semakin berorientasi Komunis. Dulles lalu mengatakan bahwa mula-mula Amerika mendukung pemberontakan regional di Sumatra dan Sulawesi. Ia percaya bahwa usaha-usaha Amerika itu akan dapat menciptakan "sebuah cerita besar". Namun semakin lama para pemberontak semakin kehilangan tenaga. Apa boleh buat, "cerita besar" itupun tak pernah menjadi kenyataan. "Bantuan senjata yang dikirim ke para pemberontak pada hilang," keluhnya, "Sekarang ini pemerintah Indonesia bahkan sedang menahan seorang [pilot] Amerika… *[1 ½ baris dalam memorandum masih dalam status klasifikasi rahasia ...]*".[3]

Sementara itu, pada akhir Juni 1958 tentara yang loyal kepada Presiden Sukarno telah berhasil menghancurkan kekuatan pemberontak di Sumatra.[4] Para pemberontak mengalihkan kekuatan ke Sulawesi dan Maluku, namun di sana pun mereka dikalahkan oleh tentara pemerintah. Sebenarnya, pada Mei 1958 pemimpin pemberontakan di Sulawesi, Kolonel Sumual, sudah menunjukkan tanda-tanda mau menyerah dan bernegosiasi,[5] namun Presiden Sukarno menolak. Operasi militer terhadap para pemberontak jalan terus. Majalah *Time* melaporkan keberhasilan tentara pemerintah dengan menuturkan: "Morotai, salah satu lokasi bersejarah dalam serbuan AS di Pasifik Selatan selama Perang Dunia II telah direbut kembali; Gorontalo di Sulawesi dikuasai; sementara itu pesawat-pesawat pemerintah melakukan lima kali serangan bom atas Manado yang merupakan pusat pemberontakan tanpa kehilangan satu pilot pun."[6]

www.facebook.com/indonesiapustaka

CIA Menarik Diri

Semua yang terjadi itu tak urung membuat CIA kecewa dan harus mengevaluasi kembali operasi-operasi rahasianya untuk mendukung para pemberontak. Makin lemahnya posisi militer kelompok pemberontak di satu pihak, serta keberhasilan operasi-operasi militer pemerintah di lain pihak, membuat operasi rahasia CIA dipertanyakan. Situasi menjadi makin buruk bagi CIA oleh tertangkapnya Allen Pope yang terbukti punya kaitan langsung dengan dinas rahasia itu.

Dengan semakin memburuknya situasi, staf CIA dipaksa oleh realitas untuk mengakui bahwa operasi para-militer rahasia di Indonesia merupakan sebuah *"blunder"* alias kesalahan besar yang harus segera diakhiri. Ray Cline, mantan Deputi Direktur CIA, dengan tepat menggambarkan *blunder* macam itu. Tulisnya:

> Titik lemah dalam sebuah operasi para-militer rahasia adalah bahwa sebuah kesalahan kecil saja yang mengungkapkan kaitan dengan CIA akan membuat Amerika dihadapkan pada dua pilihan: menghentikan operasi itu sama sekali atau mengubah sifat rahasia operasi itu menjadi sebuah intervensi militer terbuka. Namun berhubung operasi para-militer demikian biasanya dirahasiakan demi alasan-alasan politis, maka ketika kaitan dengan CIA ketahuan reaksi yang muncul dari pemerintah AS biasanya adalah menghentikan operasi rahasia itu, dan meninggalkan begitu saja para pemimpin lokal beserta anak buah mereka meskipun telah mempercayakan hidup-matinya di tangan pihak Amerika.[7]

Sejak pertengahan 1958, secara diam-diam dan sepihak CIA mulai menarik dukungannya. Akibatnya kekuatan para pemberontak juga menjadi makin berkurang secara drastis. Ketika sisa-sisa pasukan pemberontak di bawah pimpinan

www.facebook.com/indonesiapustaka

Joop Warouw meminta agar CIA tetap mengirim bantuan, tanggapan dari Direktur Allen Dulles dingin tetapi jelas: "Katakan kepada Kolonel Warouw kita harus menarik diri."[8]

Dengan ditariknya dukungan dari CIA, para pemberontak memang lantas kehilangan kemampuan dan arah. Batalion-batalion yang ada terpecah-pecah, atau bahkan saling bertarung satu melawan yang lain untuk akhirnya bubar.[9] Secara keseluruhan, pemberontakan itu sendiri menelan banyak korban, meskipun tak mudah menentukan berapa persis jumlahnya. Dalam bukunya *Memenuhi PanggilanTugas,* Jenderal Nasution memberikan hitungan kasar mengenai jumlah mereka yang tewas. Menurut dia, di pihak pemerintah pusat ada 10.150 orang tewas. Di antara yang tewas itu ada 2.499 tentara Angkatan Darat, 965 anggota organisasi Pemuda Rakyat (yang berafiliasi dengan PKI), 274 orang polisi, serta 5.592 penduduk sipil. Nasution tidak menyebut jumlah korban dari kalangan Angkatan Laut (yang sebenarnya amat tinggi) maupun Angkatan Udara. Ia mengatakan, 22.174 orang tentara pemberontak tewas, namun tidak menyebut berapa warga sipil di wilayah pemberontakan yang juga telah menjadi korban.[10]

Bersama dengan sedikit demi sedikit ditariknya dukungan CIA, secara resmi diakhiri pula dukungan pemerintahan Eisenhower terhadap pemberontakan daerah di Indonesia. Sebagaimana ditulis oleh Audrey dan George Kahin, "pada pertengahan 1958 pemerintahan Eisenhower dipaksa untuk mengakui bahwa proyek campur tangannya di Indonesia telah gagal total". Pelan tapi pasti pengakuan tersebut dilanjutkan dengan rencana untuk mengakhiri proyek yang tidak berhasil

www.facebook.com/indonesiapustaka

itu. Pada saat yang sama, masih menurut kedua penulis, pemerintahan Eisenhower "menyimpulkan bahwa dalam kondisi sekarang langkah yang paling bijak adalah mengadakan pembicaraan dan sedapat mungkin mencoba bekerjasama dengan pemerintahan yang baru saja mau digulingkan itu".[11] Dengan kata lain, sedang dipikirkan untuk dilancarkan sebuah kebijakan luar negeri terhadap Indonesia yang 180 derajat berbalikan dengan kebijakan sebelumnya.

Dalam rapat Departemen Luar Negeri AS pada 27 Mei 1958, Menlu Dulles memaparkan rencana pembalikan kebijakan itu. "Ketika arah pemberontakan di Sulawesi makin lama makin menyerupai apa yang terjadi di Sumatra," katanya pada para peserta rapat, "diputuskan bahwa telah tiba saatnya bagi kita untuk mempengaruhi para pemimpin militer dan sipil Indonesia." Sejak itu, bantuan untuk para pemberontak benar-benar dikurangi dan pemerintahan Eisenhower mulai mendukung pemerintah pusat Jakarta. Sebagaimana dikatakan di atas, sekarang Washington justru mulai mendukung pemerintah yang baru saja mau digulingkan.

Perubahan atas kebijakan itu terjadi ketika para pejabat dalam pemerintahan Eisenhower mulai menggantungkan diri pada laporan-laporan yang datang dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, dan bukan lagi pada CIA atau pada kelompok gugus-tugas interdepartemen yang dipimpin mantan Dubes Hugh Cumming Jr. Saat itu pula, Washington mulai menyadari bahwa jajaran militer di Jakarta itu sebenarnya tidak hanya non-Komunis, melainkan juga anti-Komunis. Washington juga memandang angkatan bersenjata Indonesia sebagai "partner kerja sama yang potensial dan dapat dipercaya dalam rangka

www.facebook.com/indonesiapustaka

meredam laju perkembangan Komunisme di Indonesia".[12] Dalam telegram tertanggal 6 Juni 1958 yang dikirim oleh Kedubes AS di Jakarta diusulkan bahwa Amerika Serikat "mempercepat pengiriman sumbangan paket militer sebesar tujuh juta dollar AS".[13] Usulan itu sesuai dengan apa yang pernah diajukan oleh Mukarto Notowidigdo, Dubes RI untuk AS, bahwa "bantuan AS untuk membangun barak-barak militer akan menjadi langkah penting dalam memperkuat orientasi militer Indonesia terhadap Amerika".[14]

Menanggapi usulan itu, Kepala Staf Angkatan Darat AS Jenderal Maxwell D. Taylor mendesak agar bantuan militer untuk Indonesia dikirim sesegera mungkin. Dia mengatakan, "penting bagi kita untuk mendukung Jenderal Nasution secepatnya." Tambahnya, "sebaiknya kita segera meminta persetujuan dari Presiden [Eisenhower] untuk rencana bantuan militer sebesar tujuh juta dollar itu sehingga kalau nanti sewaktu-waktu dibutuhkan kita bisa segera merealisasi-kannya."[15]

Sejak itu pula, Amerika melancarkan rangkaian kebijakan untuk mendukung militer Indonesia, bahkan setelah 1960.[16] NSC (National Security Council) 6023 menggambarkan garis besar kebijakan yang mau diterapkan di Indonesia untuk dekade 1960-an. NSC itu menginstruksikan bahwa pertama-tama Amerika harus:

> ... menempuh segala cara—termasuk pengerahan militer Amerika jika perlu—dengan tujuan mencegah Indonesia atau wilayah-wilayah penting negeri itu jatuh ke tangan Komunis entah melalui serangan militer terbuka, subversi, dominasi ekonomi, atau cara-cara lain; semua itu harus dilakukan sesuai

www.facebook.com/indonesiapustaka

dengan hukum yang berlaku; selain itu perlu dilakukan kerjasama dengan negara-negara lain sebagaimana mestinya.[17]

Berkaitan dengan masalah pemerintah pusat dan para pemberontak, NSC 6023 menggariskan agar Amerika "mendorong diperbaikinya hubungan baik antara para pemberontak dengan para pemimpin sipil dan militer di Jakarta, termasuk juga dengan partai-partai politik, demi mempercepat perkembangan kekuatan politik yang non-Komunis".[18] Selanjutnya, NSC 6023 mendesak pemerintah Amerika agar "memelihara dan memperkuat hubungan yang telah ada antara Amerika dengan kalangan polisi dan militer; dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjaga keamanan dalam negeri serta menekan aktivitas Komunis di Indonesia melalui bantuan senjata, peralatan, dan pelatihan dalam jumlah yang terbatas tapi terus-menerus". Dan sejauh mungkin, garis besar kebijakan itu menetapkan, "bantuan AS untuk melatih personil militer Indonesia diperluas; bersamaan itu perlu pula ditempuh segala cara untuk memangkas program-program pelatihan militer oleh Blok Cina-Soviet".[19]

Meskipun tampak mengesankan pembalikan kebijakan itu, ternyata hanya masalah perubahan taktik, bukan menyangkut keseluruhan politik luar negeri AS. Amerika tetap saja berpegang pada strategi pembendungan pengaruh Komunisme. Oleh karena itu, tujuan pertama dan jangka-pendek kebijakan tetaplah mencegah dominasi kekuasaan Komunis atas Indonesia. Sedang tujuan kedua dan jangka panjangnya adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang "secara politis stabil, secara ekonomis lancar, mau bersahabat dengan Blok Barat, mau dan mampu melawan pengaruh

www.facebook.com/indonesiapustaka

Dengan penuh percaya diri, Bung Karno menemui para pemimpin dunia.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Komunisme dari dalam maupun luar negeri, serta bersedia untuk tidak membiarkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan lokasi-lokasi strategisnya dikuasai oleh Blok Cina-Soviet".[20] Dengan demikian, sebenarnya tak ada yang baru, kecuali bahwa sikap permusuhan dengan pemerintah pusat Jakarta kini diganti dengan sikap yang tampak lebih bersahabat.

Tanggung Jawab

Secara umum, bisa dikatakan bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap Indonesia pada pertengahan 1950-an dapat dipandang sebagai gambaran kecil dari kebijakan negeri itu terhadap Indonesia periode 1945-1960 secara keseluruhan. Sebagaimana yang terjadi pada akhir 1950-an, kebijakan Amerika terhadap Indonesia pada periode 1945-1960-an tampak anti-revolusioner dan amat ditentukan oleh kekhawatiran akan menyebarnya pengaruh Komunisme di Indonesia. Ketika Amerika mengubah sikap anti-kolonialnya dengan mendukung upaya Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, motivasi utamanya adalah untuk mengusahakan agar Belanda tetap bercokol di Indonesia untuk menjamin kepentingan Barat dan membendung laju perkembangan pengaruh Uni Soviet dan Cina yang Komunis.

Ketakutan AS akan penyebaran Komunisme lokal muncul berkat laporan-laporan dari pihak Belanda bahwa para pemimpin kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang yang pro-Komunis. Hal itu membuat pihak Amerika enggan untuk mendukung pemerintah RI. Namun ketika mengetahui bahwa dengan cepat pemerintah RI menyelesaikan Peristiwa Madiun

www.facebook.com/indonesiapustaka

1948 (yang dikatakan sebagai pemberontakan Komunis) pemerintah Amerika mulai mempertanyakan kebenaran laporan-laporan Belanda itu. Peristiwa tersebut membuat Washington berpikir bahwa laporan-laporan itu tidak benar dan bahwa sebenarnya pemerintah Indonesia itu justru anti-Komunis. Itulah sebabnya Amerika lantas mengubah kebijakannya dengan mendukung RI. Meskipun demikian, hal itu tak berlangsung lama. Dukungan AS segera ketika pada 1950-an Washington menyaksikan pesatnya perkembangan PKI dan tiadanya niat dari pemerintah RI untuk menghentikan laju pertumbuhan PKI. Para penentu kebijakan di Washington pun menjadi gelisah bahwa Indonesia "makin condong ke kiri". Apa yang terjadi selanjutnya adalah keputusan pemerintahan Eisenhower untuk melancarkan operasi-operasi rahasia mendukung pemberontakan daerah sebagaimana yang telah kita lihat. Tujuan utamanya adalah melawan pemerintahan Sukarno yang mereka tuduh pro-Komunis.

Dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap Indonesia antara 1945-1960, para pejabat Amerika bergerak dari *modus operandi* terbuka ke taktik operasi rahasia. Pada tahun-tahun pertama kemerdekaan RI, pemerintahan Truman melaksanakan kebijakannya terhadap Jakarta secara terang-terangan, misalnya dengan kesediaan membantu menengahi negosiasi antara RI dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun dalam perkembangan berikut pemerintahan Eisenhower menempuh cara-cara yang penuh kerahasiaan. Keterlibatan CIA dalam upaya menggagalkan Konferensi Asia-Afrika di Bandung adalah salah satu contoh.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pada tahap berikutnya, pemerintahan Eisenhower melakukan berbagai operasi rahasia yang tersembunyi dari pemerintah RI, dan dalam banyak kasus bahkan tersembunyi dari Kedubes AS di Jakarta maupun dari publik Amerika sendiri. Dukungan pemerintahan Eisenhower terhadap pemberontakan daerah PRRI dan Permesta adalah contoh yang jelas. Besarnya tekanan pada sifat rahasia ini terjadi oleh karena dalam masa jabatannya, Eisenhower banyak bergantung pada CIA. Ketergantungan ini terjadi karena Washington senang dengan kemampuan dinas intelijen tersebut untuk menyimpan berbagai perencanaan dan pelaksanaan operasi-operasi tertutup. Dengan begitu, pemerintah AS dapat menyembunyikan berbagai tindakannya dari pengamatan masyarakat maupun Kongres.[21] Selanjutnya sifat kerahasiaan itu penting guna menyembunyikan identitas mereka yang terlibat kalau nanti operasi itu gagal di tengah jalan—termasuk bukti-bukti keterlibatan Presiden atau para pejabat tinggi lain. Seperti telah kita lihat, apa yang terjadi dengan dukungan terhadap PRRI dan Permesta itu dengan tepat menggambarkan gagasan itu.[22]

Fakta bahwa tak satu pun orang Amerika tewas sebagai korban dalam operasi mengukung pemberontakan daerah tersebut membuat pemerintahan Eisenhower mampu menyimpan kerahasiaan operasi yang dikomandoi oleh CIA tersebut. Di lain pihak, bagi ribuan korban pemberontakan yang telah tewas, cedera, atau kehilangan sanak-saudara serta harta-benda, operasi itu tentu saja bukan merupakan rahasia sama sekali.[23]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Selanjutnya, sifat rahasia itu dapat menerangkan mengapa meskipun operasi keterlibatan pemerintahan Eisenhower dalam pemberontakan itu merupakan operasi besar-besaran, tak seorang pun pejabat tinggi di Washington yang dituntut bertanggung jawab atas proyek yang gagal itu: Presiden tidak, Menteri Luar Negeri tidak, Direktur dan Staf CIA juga tidak.[24] Untuk operasi sebesar itu, dengan korban sebanyak itu pula, tindakan demikian tentu saja merupakan sebentuk ketidak-adilan dan kesewenang-wenangan yang perlu untuk terus dikaji dan dituntaskan.

Konsekuensi Logis

Yang jelas kisah tentang keterlibatan rahasia Amerika dalam perpolitikan di Indonesia tidak berakhir dengan selesainya pemebrontakan daerah dan pembalikan kebijakan AS terhadap Indonesia pada 1958. Pada periode-periode selanjutnya dukungan Amerika terhadap militer Indonesia terus meningkat. Tujuannya adalah menghabisi PKI, membatasi kekuasaan Presiden Sukarno, dan mengubah orientasi pemerintah Indonesia agar menjadi lebih pro-Barat. Dan hal itu terjadi saat Bung Karno sedang berdiri di salah satu sudut "segitiga ketegangan politik" dalam negeri Indonesia, yang telah meruncing sejak Pemilu 1955. Selain Bung Karno di satu sudut, di dua sudut lain sedang berdiri Angkatan Darat dan PKI. Keduanya telah siap untuk saling "menerkam", sementara Bung Karno berperan sebagai kekuatan penyeimbang.

Dalam perspektif itu, apa yang terjadi di sekitar tahun 1965 hanyalah merupakan konsekuensi logis saja dari kondisi politik yang sudah ada. Pada awalnya, ketiga sudut tersebut

www.facebook.com/indonesiapustaka

memiliki kekuatan yang kurang lebih berimbang, namun berkat bantuan yang diberikan oleh Amerika, Angkatan Darat menjadi sudut yang paling kuat dan semakin kuat. Jika kemudian Angkatan Darat mampu mengambil kendali pemerintahan Indonesia itu bukan merupakan hal yang terlalu mengagetkan. Menariknya, apa yang kemudian terjadi di Indonesia setelah Tragedi 1965 memang sesuai dengan apa yang telah dicita-citakan oleh Washington sejak pembalikan kebijakan itu: PKI dihabisi, Sukarno ditendang dari kekuasaan, dan Indonesia menjadi makin terbuka terhadap kekuatan ekonomi dan politik Barat.[]

Catatan Akhir:

1 "Telegram From the Embassy in Indonesia to the Department of State", *Foreign Relations of the United States (FRUS),* Vol. XVII, Doc. 101, h. 184.

2 William Blum, *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II.* (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995. First edition: 1986), h. 103.

3 *FRUS*, Vol. XVII, Doc. 116, h. 211.

4 Blum, h. 103.

5 *Time*, June 2, 1958, h. 27.

6 *Time*, h. 27-28.

7 Ray Cline. *Secrets, Spies, and Soldiers* (New York: Acropolis Books, 1976), h. 182 sebagaimana dikutip dalam Stephen Ambrose, *Ike Spies: Eisenhower and the Espionage Establishment* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1981), h. 251. Setelah lulus dari Universitas Harvard, Cline bekerja sebagai staf dinas rahasia OSS,

www.facebook.com/indonesiapustaka

menjadi penulis di bagian Intelijen Nasional-nya CIA, dan akhirnya menjadi Wakil Direktur CIA. Ambrose, *Ike's Spies*, h. 236.

8 Joseph B. Smith, *Portrait of a Cold Warrior* (New York: G.P. Putnam's Sons, 1976), h. 247.

9 Wawancara kedua Kahin dengan Kawilarang, Jakarta 26 Mei 1971 sebagaimana dikutip dalam Kahin and Kahin, h. 213.

10 Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas* Vol. 4, h. 383, sebagaimana dirujuk dalam Kahin and Kahin, h. 305.

11 Kahin and Kahin, h. 18.

12 Kahin and Kahin, h. 18; *FRUS,* Vol. XVII, h. 213-315.

13 *FRUS,* Vol. XVII, Doc. 18, h. 216.

14 *FRUS,* Vol. XVII., Doc. 119, h. 217.

15 *FRUS,* Vol. XVII., Doc. 127, h. 230.

16 See NSC 5901, *FRUS,* Vol. XVII., Doc. 177, h. 334-344.

17 See *FRUS,* Vol. XVII, h. 571-583, NSC 6023: "Draft Statement of U.S. Policy on Indonesia," December 19, 1960, Doc. 293, h. 581.

18 See *FRUS,* Vol. XVII, NSC 6023: "Draft Statement of U.S. Policy on Indonesia," December 19, 1960, Doc. 293, h. 582.

19 See *FRUS,* Vol. XVII, h. 571-583: NSC 6023: "Draft Statement of U.S. Policy on Indonesia," December 19, 1960, Doc. 293, h. 582.

20 *FRUS,* Vol. XVII, Doc. 293, h. 581.

21 *FRUS,* Vol. XVII, 7.

22 *FRUS,* Vol. XVII, 18.

23 *FRUS,* Vol. XVII, 19.

24 Sangatlah menarik tetapi sekaligus menyedihkan bahwa dalam memoirnya, *The White House Years: Waging Peace, 1956-1961* Eisenhower tak menyebut sepatah katapun tentang pemberontakan daerah di Indonesia yang didukung oleh dia dan pemerintahannya itu. Dwight D. Eisenhower, *The White House Years: Waging Peace, 1956-1961* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1965).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bagian III
MENGGUGAT TRAGEDI 1965

www.facebook.com/indonesiapustaka

DALANG TRAGEDI 1965[1]

Bung Karno memang bukan seorang demokrat, bukan seorang republik. Memang Bung Karno juga taroh orang dalam penjara, tapi sejauh mungkin dia tidak mau membunuh orang. Sebagian karena dia memang tidak tahu bagaimana caranya memakai pistol. Tapi kebiasaannya sebagai pemimpin politik [adalah] ngomong, janji, kadang-kadang menipu juga. Kalau seorang jenderal memang lain. Pokoknya mereka lain.

Daniel Lev (1999)

EMPAT puluh tahun setelah terjadinya Tragedi 1965, tepatnya pada akhir 2005 lalu, wacana mengenai peristiwa itu mencuat secara keras baik di media cetak maupun media elektronik. Wacana yang sama bahkan sempat mencuat dalam wacana publik di jalan-jalan. Hal itu terjadi, antara lain, berkat terbitnya buku terjemahan karya Antonie C.A. Dake yang berjudul *Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan*.[2] Salah satu gagasan pokok dari buku itu adalah bahwa Sukarno-lah sebenarnya "dalang" dari Peristriwa G30S/1965. Terhadap buku tersebut telah timbul sikap pro dan kontra di masyarakat.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sedikit disayangkan, buku karya Dake itu maupun berbagai tanggapan yang muncul atasnya lebih banyak berkisar pada pertanyaan-pertanyaan di seputar siapa sebenarnya "dalang" di balik operasi militer yang dilancarkan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang menamakan diri "Gerakan Tigapuluh September" pada 1 Oktober 1965. Sebagaimana kita tahu, di bawah pimpinan Letkol Untung kelompok tersebut menjemput paksa sejumlah perwira militer di Jakarta. Penjemputan paksa itu berujung pada tewasnya tujuh orang perwira militer Angkatan Darat dan seorang putri Jenderal Nasution. Siapa sebenarnya yang menjadi tokoh kunci dari operasi militer itu sampai sekarang masih merupakan misteri, dan hal itu telah menjadi fokus berbagai wacana, termasuk tulisan-tulisan di atas.

Ratusan Ribu

Wacana demikian tentu saja amat perlu. Akan tetapi, kalau tak hati-hati bisa menimbulkan kesan, Tragedi yang terjadi pada tahun 1965 "hanya"-lah Tragedi terbunuhnya kedelapan tokoh tersebut. Padahal Tragedi yang terjadi pada tahun 1965 bukan hanya itu. Ada Tragedi lain yang tidak kalah dahsyatnya, yakni dibunuhnya *ratusan ribu* warga masyarakat Indonesia beberapa saat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan para petinggi militer tersebut—apa pun justifikasinya. Mereka di-bunuh di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sejumlah tempat lain di tanah air. Kebanyakan dari mereka yang dibunuh adalah rakyat biasa yang kemungkinan besar tak ada sangkut-paut langsung dengan operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan di Jakarta. Dalam jumlah besar, mereka dieksekusi tanpa melalui proses

www.facebook.com/indonesiapustaka

pengadilan. Sementara itu, banyak yang lolos dari eksekusi ditangkap dan dipenjara selama bertahun-tahun tanpa proses pengadilan. Sejumlah tokoh militer dan politik yang diduga terkait dengan operasi militer 1 Oktober 1965 itu memang diadili oleh suatu mahkamah khusus, tetapi sejauh mana pengadilan itu *fair* masih merupakan tanda tanya. Jumlah yang dibunuh sedemikian besar, sehingga bisa jadi merupakan pembunuhan warga sipil terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah bangsa ini.

Lepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah, pembunuhan itu mengingatkan, dalam sejarahnya bangsa kita pernah melakukan pembantaian terhadap sesama warganya dengan cara dan dalam jumlah yang amat mengerikan. Oleh karena itu, perlulah Tragedi berdarah tersebut terus diteliti dan dipelajari, sehingga tindakan di luar perikemanusiaan yang adil dan beradab semacam itu tak akan terulang di masa depan. Dalam konteks itu pulalah kiranya penting untuk mencari tahu tidak hanya siapa dalang di balik pembunuhan 1 Oktober 1965, melainkan juga dalang di balik pembunuhan massal pada pekan-pekan terakhir tahun 1965 itu. Selanjutnya, penting pula mempelajari siapa yang terutama diuntungkan, serta apa saja dampak Tragedi tersebut bagi Indonesia waktu itu, kini dan di masa depan.

Dalang Pembantaian

Secara teoretis, tampaknya tidak akan terlalu sulit menemukan dalang dari peristiwa tersebut, khususnya pada tingkat nasional. Fakta bahwa pembunuhan terjadi pada minggu ketiga Oktober di Jawa Tengah, bulan November di Jawa Timur, dan bulan Desember di Bali menunjukkan, pem-

www.facebook.com/indonesiapustaka

bunuhan itu tidak terjadi secara spontan dan serempak. Terkesan ada koordinasi dan provokasi. Dengan kata lain, ada unsur "koordinator" dan "provokator"-nya, dan itu penting untuk segera diketahui publik. Seorang perwira RPKAD memang pernah memimpin dan mengoordinasi operasi pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain, namun tampaknya dia lebih merupakan semacam "komandan lapangan" saja.[3] Besar kemungkinan, ada komando yang datang dari pihak yang lebih tinggi posisinya daripada dia, misalnya dari komando pusat di Jakarta. Kemungkinan macam itu tentu amat penting untuk secepatnya dikaji oleh masyarakat.

Jika dalam kasus operasi militer yang dilakukan oleh Gerakan Tigapuluh September dugaan tentang siapa dalangnya berkisar pada sejumlah pihak (seperti Bung Karno, PKI, Letkol Untung, Mayjen Soeharto, CIA, dan lain-lain), dalam kasus pembunuhan massal 1965 dugaan serupa bisa lebih dipersempit. Bung Karno tentu bukan dalangnya, karena tak ada tanda-tanda dia pernah berpikir membunuh secara massal anggota Partai komunis atau partai politik apa pun di negeri ini. Letkol Untung tentunya juga bukan, karena pada tanggal 2 Oktober 1965 gerakan yang dipimpinnya telah gagal dan ia melarikan diri. PKI juga tentu tidak, karena justru merekalah korban pembunuhan massal itu. Akhirnya, yang tinggal hanyalah sedikit kemungkinan, dan itu mendesak untuk segera diteliti lebih lanjut. Dengan begitu, diharapkan penelitian dan wacana tentang Tragedi 1965 tidak lagi hanya berkisar pada pencarian dalang Gerakan Tigapuluh September saja, melainkan juga dalang dari pembantaian massal 1965-

www.facebook.com/indonesiapustaka

Presiden Su karno bersama Soebandrio

www.facebook.com/indonesiapustaka

1966. Dengan kata lain, bahkan jika dalang dari operasi militer 1 Oktober 1965 itu telah ditemukan, masyarakat masih harus mencari siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan massal 1965.

Pada akhirnya, terpulang kepada masyarakat Indonesia sendiri (bukan hanya para peneliti asing) untuk mencari dan menemukan siapa sebenarnya tokoh kunci di balik pembunuhan dalam skala besar itu. Terpulang pula kepada masyarakat, langkah apa yang mau diambil jika tokoh itu nanti akhirnya ditemukan.[]

Catatan Akhir:

1 Sebelum ditulis kembali, bab ini pernah dimuat di *Kompas*, 17 Desember 2005, h. 7.

2 Antonie C.A. Dake. *Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan* (Jakarta, Aksara Karunia, 2005).

3 M.R. Siregar, *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan* (Amsterdam: TAPOL, The Indonesian Human Rights Campaign, 1995), h. 221-222.

www.facebook.com/indonesiapustaka

WASHINGTON DAN TRAGEDI 1965

Apa yang kemudian ditulis oleh bekas Menteri Pertahanan AS Robert McNamara? Kan dia sendiri mengakui bahwa 'teori domino' itu nggak bener. Dengan demikian implisit dikatakan bahwa politik mereka terhadap Sukarno itu salah. Anggapan mereka bahwa Sukarno akan membawa Indonesia ke komunis itu salah.

Joesoef Isak (2001)

PADA Bagian II buku ini, kita telah melihat bagaimana Amerika Serikat memiliki sejarah yang cukup kental berkaitan dengan keterlibatannya dalam dinamika politik dan militer di Indonesia. Dalam peristiwa pemberontakan daerah PRRI dan Permesta, misalnya, Amerika terlibat langsung, khususnya dalam bentuk bantuan militer kepada pihak pemberontak. Setelah pemberontakan gagal, pemerintah Amerika mengalihkan bantuannya kepada militer yang resminya "loyal" kepada pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Sukarno. Dalam praktiknya, bantuan militer—yang terutama diberikan kepada Angkatan Darat—terutama dimaksudkan untuk membatasi kiprah PKI dan membatasi kekuasaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sukarno menjadi sekecil mungkin. Sekaligus Amerika berharap bahwa dengan tersingkirnya PKI dan Bung Karno, Indonesia akan berada di bawah dominasi militer yang anti-Komunis dan yang berorientasi ke Barat. Apa yang terjadi selama dan setelah Tragedi 1965 ternyata sesuai dengan apa yang telah digariskan sebagai tujuan kebijakan luar negeri AS di Indonesia itu. Dengan kata lain, sangat besar kemungkinan bahwa—langsung atau tidak—pemerintah AS ikut berperan dalam apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1960-an.

Meskipun demikian, dalam memoar yang berisi pengalamannya sebagai Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia (1965-68), Marshall Green menulis sejumlah hal "menarik" tentang rangkaian Tragedi 1965. Sehubungan dengan Peristiwa G30S, misalnya, ia mengatakan bahwa dirinya beserta seluruh staf Kedubes AS tidak tahu-menahu sebelumnya, bahkan "benar-benar terkejut." Sementara itu, dalam kaitannya dengan rangkaian pembunuhan massal yang dimulai pada Oktober 1965, dia menyebut sejumlah faktor penyebab. Tetapi menurutnya sebab utamanya adalah bahwa kelompok komunis yang ateis dan rajin mengobarkan perjuangan kelas itu bertentangan dengan semangat gotong-royong dan musyawarah rakyat Indonesia.[1] Tak disebut faktor Perang Dingin, apalagi peran Washington, dalam Tragedi kemanusiaan itu.

Akan tetapi, berbagai perkembangan yang terjadi kemudian, khususnya hasil-hasil penelitian dan penulisan sejarah atas periode itu, menuntut supaya keterangan Green itu ditinjau kembali. Banyak dokumen, tulisan, dan keterangan

www.facebook.com/indonesiapustaka

lisan yang telah dipublikasikan berkaitan dengan situasi di Indonesia pada 1965-66 menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak hanya tahu mengenai hal itu, melainkan juga ikut aktif terlibat, entah itu secara langsung atau tak langsung.

Sulit Dipungkiri

Hal ini dapat dibaca misalnya dalam buku *Shadow of a Revolution* yang ditulis oleh Roland Challis (2001), wartawan BBC yang pada tahun-tahun itu bertugas di Asia Tenggara dan pada awal 1967 sengaja mengunjungi berbagai tempat di Indonesia.[2] Menurut Challis, pada awal 1960-an Dinas Intelijen AS (CIA) telah giat menginfiltrasi eselon atas Angkatan Darat (AD). Selanjutnya, CIA menjatuhkan pilihan pada salah seorang perwira oportunis, untuk kemudian "membantu dia dalam menjalankan suatu kudeta bertahap yang berlanjut dengan pembunuhan lebih dari sejuta orang yang dituduh sebagai 'komunis'".[3] Keterangan serupa pernah disampaikan oleh Peter Dale Scott, seorang mantan diplomat Kanada dan dosen di Universitas California-Berkeley.[4] Dengan tegas Scott mengatakan, "Pemerintah Amerika berbohong dalam soal ketidakterlibatannya itu". Setelah melacak program-program militer AS di Indonesia sejak pertengahan 50-an, dia menunjukkan bahwa di sekitar tahun 1965 volume bantuan militer AS untuk faksi tertentu dalam AD meningkat tajam.[5]

Dalam kaitan dengan Pembunuhan Massal yang berlangsung sejak akhir 1965 sampai awal 1966, keterlibatan Amerika tampaknya juga sulit dipungkiri. Challis menyebut kembali apa yang pernah ditulis oleh Kathy Kadane di koran *San Fransisco Examiner,* 20 Mei 1990 serta koran *Washington Post* edisi 21 Mei 1990, yakni perihal tindakan CIA menyerah-

www.facebook.com/indonesiapustaka

kan suatu daftar kepada pihak AD berisi nama "orang-orang komunis" yang harus dibunuh. Sebagaimana sudah banyak diketahui, terdapat dugaan kuat bahwa agen-agen CIA di Jakarta memberikan daftar sekitar 5000 orang yang dituduh sebagai pengurus atau anggota PKI yang harus "disingkirkan."

Maskas Besar CIA di AS menyangkal mentah-mentah keterlibatan CIA dalam penyusunan daftar itu. Tetapi penyangkalan itu kini diragukan. Dua orang yang waktu itu bekerja di Kedubes AS di Jakarta, yakni Joseph Lazarsky (Wakil Ketua Cabang CIA di Jakarta) dan Edward Masters (Direktur Bidang Politik Kedubes), menyanggah keterangan tersebut dengan menyatakan bahwa CIA memang terlibat. Robert Martens, bekas anggota staf Bidang Politik Kedubes waktu itu, pada 1990 mengakui adanya daftar tersebut. Menurutnya, daftar itu "merupakan bantuan yang amat berguna bagi AD". Ia menambahkan: "Mereka [AD] mungkin membunuh banyak orang, dan tangan saya sendiri mungkin berlumuran darah, tetapi toh tidak semuanya jelek. Ada momen di mana sese-orang harus ambil tindakan tegas pada saat-saat yang menentukan."[6]

Bagaimana dengan Dubes Marshall Green sendiri? Di luar bukunya, secara diplomatis ia pernah mengatakan: "Saya tahu, kita punya lebih banyak informasi [tentang PKI] daripada yang dimiliki oleh orang-orang Indonesia sendiri." Menurutnya, dalam berbagai kesempatan Martens memang pernah mengatakan padanya bahwa pemerintah Indonesia "tidak punya informasi yang bagus mengenai rencana-rencana pihak Komunis, dan ia memberi kesan kepada saya bahwa informasi yang kita miliki itu jauh lebih lengkap daripada yang dimiliki

www.facebook.com/indonesiapustaka

Presiden Sukarno bersama Presiden Nkrumah (Ghana), Presiden Nasser (Mesir) serta Presiden Tito (Yugoslavia) dalam pertemuan Gerakan Non-Blok.

www.facebook.com/indonesiapustaka

oleh mereka [pihak Indonesia]." Besar kemungkinan bahwa yang dimaksud di sini termasuk daftar orang-orang yang harus dihabisi itu. Dengan kata lain, setidaknya pihak Kedutaan tahu bahwa CIA terlibat. Seorang bekas agen CIA lain, yakni Ralph McGehee, juga memperkuat tuduhan keterlibatan organisasi intelijen AS itu dalam dua karangan yang terbit di majalah *The Nation* edisi 11 April 1981 dan 24 September 1990.

Dari Dekat

Berdasarkan riset yang penulis sendiri lakukan di sejumlah Perpustakaan Kepresidenan dan Perpustakaan Kongres di AS, memang tidak mudah untuk menemukan *"the smoking gun"* dari keterlibatan CIA dalam operasi G30S. Selain karena banyak faktor pokok di balik Kudeta 1 Oktober 1965 terkait dengan konflik internal di tubuh AD, juga karena belum semua dokumen yang berkaitan dengan Tragedi '65 di-deklasifikasi.[7] Meskipun demikian, sejumlah dokumen resmi mendukung dugaan akan keterlibatan AS, khususnya CIA. Di Perpustakaan Lyndon B. Johnson di Texas, misalnya, dapat ditemukan sejumlah dokumen yang menunjukkan bahwa Amerika mengikuti dari dekat setiap jengkal perkembangan yang ada di Indonesia pada saat-saat kritis itu.

Dalam dokumen berkategori "*Special Report*" 23 Oktober 1964, misalnya, CIA sudah khawatir bahwa jika Sukarno masih hidup beberapa tahun lagi, dikhawatirkan ia akan menjadi pemimpin sebuah "rezim Komunis". Kekhawatiran itu terus berlanjut dan tercermin dalam dokumen serupa tertanggal 26 Januari 1965, di mana CIA semakin meng-khawatirkan usaha Sukarno untuk memotong kepentingan

www.facebook.com/indonesiapustaka

AS sambil membuka peluang bagi PKI untuk mengambil alih pemerintahan. Rencana pembatalan kunjungan Sukarno ke Medan pada September 1965 dengan alasan kesehatan, bagi CIA merupakan salah satu indikasi bahwa Presiden "bisa meninggal dalam waktu yang tak terlalu lama".

Pada 22 Oktober 1965, saat pembunuhan massal mulai berlangsung di Jawa Tengah, sejumlah staf Gedung Putih tak kuasa menyembunyikan kegembiraan atas apa yang sedang terjadi di Indonesia. Perkembangan peristiwa yang terjadi sejak 1 Oktober, menurut mereka, merupakan "hadiah" bagi kebijakan AS yang selama ini dengan sabar lebih menekankan aspek jangka panjang. Mereka pun memuji sikap Green dan kawan-kawan. Dikatakan, *"our Embassy is performing well"*. Dalam telegram tertanggal 28 Oktober 1965, Green meminta dukungan bagi AD karena, menurutnya, AD "telah bekerja dengan jauh lebih baik daripada yang diharapkan". Alasannya? Karena AD berani melanggar himbauan Bung Karno yang begitu sering, yakni bahwa serangan terhadap PKI harus dihentikan. Dua hari kemudian Green merekomendasi Washington untuk segera mendekati pucuk pimpinan AD namun jangan sampai diketahui oleh publik. Ia pun mengusulkan bahwa Washington segera mengirim bantuan senjata ke pihak AD, tetapi sebaiknya bukan senjata bikinan AS.

Melihat semakin jelasnya keterlibatan AS, tak mengherankan bahwa pada 2001 lalu CIA dan pemerintah AS bersusah payah menarik kembali publikasi sejumlah dokumen dalam serial *Foreign Relations of the United States* yang berkaitan dengan keterlibatan itu. Syukurlah ketika pelarangan itu diumumkan sebagian buku telah sempat beredar (dan di-

www.facebook.com/indonesiapustaka

terbitkan di Internet), sehingga dokumen-dokumen itu sampai kini bisa dibaca secara luas, bahkan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.[8]

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas semakin kuatlah dugaan bahwa Amerika memang terlibat dalam Tragedi '65. Oleh karena itu, perlulah kiranya mantan Dubes AS Marshall Green sedikit merevisi memoarnya. Sikap "sok tidak tahu" guna menutup-nutupi keterlibatan pemerintahnya dalam Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Indonesia itu kiranya perlu segera diganti dengan pengakuan yang lebih jujur dan objektif. Pada saat yang sama diharapkan bahwa masyarakat Indonesia belum lelah untuk terus mencari jawab bagi pertanyaan di seputar rangkaian Tragedi '65: Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa itu terjadi? Serta apa konsekuensi dari itu semua? Bangsa yang sehat adalah bangsa yang tak takut untuk terus mengolah sejarahnya sendiri demi masa kini dan masa depan yang lebih baik.[]

Catatan Akhir:

1 Marshall Green, *Indonesia: Crisis and Transformation, 1965-1968* (Washington, D.C.: The Compass Press 1990), h. 59.

2 Roland Challis, *Shadow of a Revolution* (Sutton Publishing, 2001).

3 Challis: 2001.

4 Peter Dale Scott, "Peran Amerika Serikat dalam Penggulingan Soekarno, 1965-1967" dalam Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno* (Jakarta; Hasta Mitra, 2001).

5 Scott, h. 302-303.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[6] Wiliam Blum, *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II.* (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995. First edition: 1986), h. 194.

[7] Benedict Anderson dan Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Modern Indonesia Project, 1971).

[8] Redaksi Hasta Mitra, *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965* (Jakarta: Hasta Mitra 2001).

www.facebook.com/indonesiapustaka

MENEMBUS POLITIK INGATAN[1]

Tentara membantu pembersihan terhadap PKI, bahkan tentara yang mendorong, terutama di Jawa Tengah. Dan terjadilah pembunuhan massal itu. Yang menarik adalah di Jawa Barat tidak meluas seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Bali.

Goenawan Mohamad (1999)

TRAGEDI berdarah yang terjadi pada 1965 merupakan salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah modern Indonesia. Selain karena begitu banyaknya warga bangsa ini yang telah menjadi korbannya, juga karena dahsyatnya dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang ditimbulkannya. Ironisnya, meskipun tragedi itu adalah sebuah peristiwa terbuka yang besar-besaran an berlangsung dalam kurun waktu setidaknya beberapa bulan, ia masih menyimpan begitu banyak "misteri". Dan karena adanya unsur misteri ini, Tragedi 1965 mendorong lahirnya banyak spekulasi, di samping tentu saja manipulasi dan distorsi. Salah satunya menjadi dalang (atau setidaknya salah satu dalang) dari "Peristiwa G30S" termasuk dalang pembunuhan terhadap

www.facebook.com/indonesiapustaka

para perwira tinggi Angkatan Darat. Hal itu sering disampaikan dengan mantap dan dengan "bukti-bukti" yang tampaknya mantap pula, hingga terasa meyakinkan. Dalam penuturan macam itu biasanya tak ada konteks sosial-politik dalam negeri yang lebih luas. Tak ada pula konteks Perang Dingin serta sejarah keterlibatan Amerika di Indonesia sebagaimana telah coba kita lihat di depan. Tak pelak lagi penuturan macam itu sering mengantar orang ke kesimpulan bahwa apa yang terjadi pada 1965 adalah "salahnya Bung Karno".

Padahal kita ingat, peristiwa tragis itu bermula dari ditangkap dan dibunuhnya tujuh orang perwira tinggi Angkatan Darat dalam sebuah operasi militer yang diadakan oleh Letkol Untung Syamsuri dan kawan-kawan. Selang beberapa waktu kemudian, ada ratusan ribu rakyat Indonesia yang dalam tempo beberapa bulan tewas dibantai oleh rekan-rekan sesama warga negara. Lebih lanjut, selama beberapa dekade berikut, ingatan akan tragedi yang terjadi pada tahun 1965-66 itu terus diproduksi dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi alat efektif untuk melayani berbagai macam kepentingan kelompok.

Oleh karena itu, supaya tidak begitu saja melimpahkan tanggung jawab atas peristiwa itu kepada Bung Karno, sekaligus agar bisa melihat masalahnya secara lebih jernih, dalam berbicara mengenai Tragedi 1965 kita perlu memerinci dan menyoroti tiga unsur penting yang tampaknya tak terpisahkan namun sebenarnya berbeda. Ketiganya adalah: (a) *operasi militer* Letkol Untung dan kawan-kawan; (b) *pembunuhan massal*; dan (c) *produksi ingatan* atas tragedi tersebut. Tanpa bermaksud membela atau menyalahkan PKI maupun

www.facebook.com/indonesiapustaka

berbagai pihak lain yang terlibat, tulisan ini dimaksudkan untuk mengajak para pembaca agar mau secara kritis berpikir ulang mengenai ketiga hal tersebut dan belajar dari refleksi atas ketiganya.

Operasi Militer Letkol Untung dan Kawan-kawan

Ketika orang berbicara mengenai peristiwa G30S 1965 *biasanya* versi yang secara resmi dan umum berlaku adalah sebagai berikut. Pada 30 September 1965 melalui Pasukan Cakrabirawa, PKI telah melancarkan kudeta dengan jalan membunuh tokoh-tokoh tertinggi militer Indonesia di Jakarta. Begitu kejamnya orang-orang PKI itu sehingga enam orang Jenderal plus seorang Kapten telah menjadi korban. (Dalam salah satu operasi penangkapan, seorang jenderal berhasil lolos dari upaya itu, namun putrinya tewas secara mengenaskan di tangan PKI). Kekejaman PKI berlanjut di Lubang Buaya, dengan jalan menyayat-nyayat tubuh para jenderal. Sekelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) bahkan memotong alat-alat vital para jenderal itu sambil menari-nari di tengah *orgi* yang disebut "pesta harum bunga". Mata dari sebagian korban juga dicungkil dengan alat khusus.

Menurut versi resmi ini, karena PKI dipandang sebagai satu-satunya "dalang" dari peristiwa keji tersebut, maka "sudah selayaknya" bahwa ratusan ribu anggota PKI di mana pun mereka berada dikejar dan dibunuh secara beramai-ramai. Pantas pula peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu disebut "G30S/PKI" dengan tekanan pada "PKI"-nya karena PKI merupakan pelaku utama. Juga, tepat kalau istilah yang dipakai adalah istilah "Gestapu" (Gerakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

September Tigapuluh). PKI juga layak ditumpas karena sebelumnya mereka telah dua kali "memberontak" (tahun 1926/27 dan 1948), dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Komunis yang ateis.

Masih menurut versi di atas, siapa pun yang telah berhasil "menyelamatkan" negara dan bangsa ini dari kaum komunis dengan jalan memimpin operasi pembantaian dan pemenjaraan massal atas mereka, "berhak" menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Tanpa kepemimpinannya (dan orang-orang dekatnya) negeri ini akan terus-menerus berada di bawah rongrongan kaum komunis yang kejam.

Lepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan versi resmi di atas, tampaknya ada sejumlah kejanggalan atau misteri yang belum terjawab berkaitan dengan narasi mengenai apa yang terjadi di seputar 30 September dan awal Oktober 1965 itu. Misalnya saja soal tuduhan PKI sebagai pelaku utama G30S. Kita ketahui, PKI adalah organisasi sipil. Sementara itu tokoh-tokoh kunci dalam gerakan yang menamakan diri sebagai "Gerakan Tigapuluh September" (G30S) itu—yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo—adalah justru personil-personil militer, khususnya dari kesatuan TNI-Angkatan Darat. Perlu diingat, Angkatan Darat sendiri sejak Pemilu 1955 telah makin sengit berlawanan dengan PKI. Penyebabnya, antara lain, adalah tingginya perolehan suara PKI sementara, dalam pemilu tersebut perolehan partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), yakni partai politik yang dipelopori oleh Angkatan Darat, amat kecil.[2] Pertanyaannya, sedemikian hebatkah PKI sehingga meskipun merupakan organisasi sipil ia telah berhasil mempengaruhi

www.facebook.com/indonesiapustaka

atau "membina" para perwira Angkatan Darat ini sehingga mereka tunduk dan mau melaksanakan rencana PKI untuk melawan kesatuannya sendiri?

Dalam pledoinya, Kolonel Abdul Latief—Komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam V Jaya dan salah seorang tokoh kunci G30S—mengatakan bahwa sebelum dilaksanakan operasi militer itu, pada 30 September 1965 sore dia telah melapor ke Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto.[3] Dikatakan bahwa Soeharto juga telah mengetahui rencana *move* militer itu melalui salah seorang bekas anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagiyo, yang menemuinya pada 28 September 1965.[4] Pertanyaannya, mengapa Pangkostrad Soeharto tidak melaporkan rencana operasi militer itu kepada atasannya, yakni Jenderal Achmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat? Atau mengapa ia tidak menyampaikan informasi itu kepada Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi? Padahal, ia tahu bahwa operasi militer itu adalah operasi besar dan serius, dan direncanakan akan berlangsung di Ibukota Negara.

Pada waktu itu, salah satu posisi paling penting dalam angkatan bersenjata di Indonesia adalah posisi Pangkostrad (Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) yang waktu itu dijabat oleh Mayjen Soeharto. Pertanyaannya, kalau G30S itu adalah gerakan PKI untuk melawan Angkatan Darat, mengapa Soeharto sebagai Pangkostrad tidak diapa-apakan? Terhadap pertanyaan ini, ada dua kemungkinan jawaban: (a) Para pelaku G30S begitu bodoh sehingga mereka mengabaikan Soeharto dan pasukannya; (b) telah ada sikap "saling pengertian" antara para pelaku G30S dengan Soeharto, atau bahkan Soeharto merupakan bagian dari G30S itu

www.facebook.com/indonesiapustaka

sendiri.[5] Mana dari kedua kemungkinan ini yang lebih dapat diterima?

Dalam konteks Perang Dingin, tentu ada banyak negara yang senang atau sebaliknya khawatir dengan perkembangan politik di Indonesia waktu itu. Hal ini terutama berkaitan dengan kecenderungan politik Presiden Sukarno, soal konfrontasi Indonesia melawan Malaysia, perkembangan politis yang berujung pada "segitiga ketegangan" antara PKI, Bung Karno dan militer (khususnya Angkatan Darat). Sangat mungkin bahwa sejumlah negara, entah itu dari blok kapitalis pimpinan Amerika Serikat maupun dari kubu komunis yang dipelopori Uni Soviet dan Cina, ikut berkepentingan atas terjadinya perubahan mendasar dalam perpolitikan di Indonesia waktu itu. Dengan demikian pertanyaannya, bukankah tidak mungkin bahwa ada sejumlah pihak asing yang—entah secara langsung atau tak langsung— ikut terlibat dalam aksi militer yang diperkirakan akan membawa perubahan mendasar itu? Kalau keterlibatan itu ada, benarkah PKI mampu mengorganisir berbagai kekuatan asing itu?

Satu-satunya kaitan *(link)* yang menghubungkan Gerakan 30 September dengan PKI adalah Ketua Biro Khusus PKI, yakni Sjam Kamaruzzaman alias Sjamsul Qamar Mubaidah. Oleh PKI, dia ditugasi untuk "membina" sejumlah anggota TNI-AD agar mendukung PKI. Pertanyaannya, bagaimana dengan dugaan bahwa sebenarnya Sjam adalah sekaligus bertindak sebagai agen ganda yang juga bertugas memata-matai gerak PKI demi kepentingan kalangan militer? Kalau dugaan itu benar, bagaimana mungkin posisi Sjam yang masih meragukan itu bisa dijadikan bukti bahwa PKI meru-

www.facebook.com/indonesiapustaka

pakan "dalang" dari operasi militer G30S?[6] "Misteri" tentang Sjam ini menjadi lebih menarik jika diingat bahwa meskipun dituduh sebagai tokoh kunci PKI dalam G30S ia tidak dihukum mati seperti yang lain. Bahkan di mana kini ia berada masih merupakan tanda tanya besar yang sepertinya tak seorang pun mau mengatakannya.

Sering dikatakan bahwa PKI adalah *satu-satunya dalang* dari operasi militer kelompok G30S. Pertanyaannya, benarkah bahwa dalang dari operasi militer itu tunggal? Tidak mungkinkah bahwa dalang dari peristiwa tersebut bukan satu melainkan beberapa? Mustahilkah bahwa operasi militer yang dilakukan oleh kelompok G30S itu merupakan *muara* dari berbagai kelompok kepentingan (dari dalam maupun luar negeri) yang sama-sama berharap menguasai perpolitikan di Indonesia saat itu? Selanjutnya, tidak mungkinkah bahwa seandainya pun PKI terlibat, ia merupakan *salah satu* dari berbagai kelompok kepentingan itu, tetapi bukan satu-satunya?

Menurut versi resmi di atas, apa yang terjadi pada malam 30 September-1 Oktober 1965 itu merupakan suatu "pemberontakan". Maksudnya tentu saja pemberontakan yang dilakukan oleh PKI melawan pemerintah RI. Pertanyaannya, tepatkah penggunaan istilah "pemberontakan" itu di sini? Jawab atas pertanyaan ini penting, mengingat secara etimologis istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Istilah pemberontakan dalam bahasa Inggris adalah *rebellion*, yang berarti *"an open defiance of or resistance to an established government"*—suatu tindakan menentang atau resistensi secara terbuka terhadap pemerintah yang ada. Istilah itu perlu dibedakan dengan istilah *coup d'etat* (kudeta), yang berarti pere-

www.facebook.com/indonesiapustaka

butan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara bersama sipil; dengan istilah *pronounciamento* yang berarti perebutan kekuasaan yang semua pelakunya adalah tentara; dan dengan istilah *putsch* yang pengertiannya adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok tentara.[7] Dari definisi-definisi itu kelihatan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawannya itu lebih dekat dengan pengertian *putsch* daripada pemberontakan, karena tidak dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan hanya dilakukan oleh sekelompok tentara. Tetapi mengapa istilah yang dipakai oleh versi resmi selalu saja istilah "pemberontakan" dan bukan *putsch*? Itu pun selalu dikaitkan dengan "pemberontakan-pemberontakan PKI" yang terjadi pada 1926/27 dan 1948, biasanya tanpa pemahaman yang memadai tentang konteks dan kaitan antara dua peristiwa tersebut.

Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, tentu masih ada sejumlah pertanyaan lain yang bisa diajukan terhadap versi resmi itu. Misalnya saja, berkaitan dengan benar atau tidaknya kisah tentang pencungkilan mata para korban, atau tentang tarian orgi para anggota Gerwani yang berjoget sambil menyayat-nyayat bagian tubuh para jenderal militer. Bisa diajukan pula pertanyaan mengenai benar atau tidaknya pandangan bahwa TNI-Angkatan Udara merupakan bagian utama dari G30S. Sementara itu, kaitan geografis antara Markas TNI-AU di Halim Perdanakusuma dan lokasi pembuangan mayat para jenderal di Lubang Buaya juga sering kabur—atau sengaja dikaburkan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pembunuhan Massal

Apa pun jawab atas berbagai pertanyaan yang muncul di seputar kejanggalan atau misteri versi resmi di atas, telah diketahui bahwa dalam waktu singkat operasi militer yang dipimpin oleh Letkol Untung dan kawan-kawan itu diketahui umum, dan pada 2 Oktober dinyatakan *abortive* atau gagal. Koran PKI *Harian Rakjat* sempat menyatakan dukungan kepada operasi militer Letkol Untung, tetapi siapa sebenarnya yang membuat pernyataan itu dan kapan konsep pernyataan itu dibuat, kini banyak diperdebatkan.[8] Letkol Untung pun me-larikan diri ke luar Jakarta. Bersamaan dengan itu tercerai-berai pula para bekas pelaku utama Gerakan Tigapuluh September. Sejak itu, berlangsung masa yang relatif tenang, dalam arti tak terjadi pergolakan sosial besar-besaran di masyarakat, meskipun di sana-sini muncul suasana tegang akibat pembunuhan para jenderal di Jakarta beserta berita-berita tentang itu.

Pergolakan sosial baru terjadi sekitar 20-21 Oktober, ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Dengan kata lain, pembunuhan massal itu baru terjadi sekitar dua atau tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer yang dilakukan oleh kelompok G30S. Dan pembunuhan massal itu pun terjadi secara bergelombang. Pada bulan Oktober, pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November merembet ke Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Pulau Bali.

Pembunuhan itu sendiri berlangsung secara sungguh keji dan sungguh massal. Pada dinihari 23 Oktober 1965, misalnya,

www.facebook.com/indonesiapustaka

di Boyolali ada sekitar 250 orang yang dibunuh secara beramai-ramai, termasuk seorang guru SD dan istrinya yang dilempar ke sumur dalam keadaan hidup-hidup.[9] Dalam keadaan tak menentu, banyak warga keturunan Cina di Semarang, Yogyakarta dan Surakarta juga menjadi korban amuk massa. Tindakan kejam serupa terjadi di berbagai tempat lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sejumlah lokasi di luar Jawa. Jumlah pasti tentang berapa korban yang tewas sulit ditentukan, tetapi umumnya berkisar antara setengah juta sampai satu juta jiwa.[10] Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa dari segi skala kekejaman dan jumlah, pembantaian massal 1965 di Indonesia merupakan salah satu kekejian kemanusiaan di luar perang yang paling mengerikan.

Di sinilah terletak aspek *Tragedi* dari apa yang terjadi pada 1965-1966 itu. Yakni *pertama*, bahwa tujuh perwira tinggi militer telah dibunuh—bukan oleh musuh dari luar Indonesia, melainkan oleh sesama warga negaranya, bukan di medan tempur melainkan di rumah atau lingkungan masing-masing. *Kedua*, pembunuhan atas para perwira itu disusul oleh pembantaian ratusan ribu (kalau tak mau dikatakan jutaan) atas warga bangsa ini—juga bukan oleh kekuatan asing, melainkan oleh rekan-rekan sesama warga bangsanya. *Ketiga*, tak cukup berhenti di situ, pembantaian warga sipil dan militer tersebut dilanjutkan dengan pemenjaraan massal atas mereka yang dituduh sebagai punya kaitan dengan PKI, *tanpa proses pengadilan*. Hak-hak mereka sebagai warga negara dicabut oleh rekan-rekan sebangsa mereka. Selanjutnya mereka mengalami stigmatisasi yang akan merugikan secara sosial, politik dan ekonomi secara berkepanjangan. Hak-hak asasi

www.facebook.com/indonesiapustaka

mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara telah dilanggar dan terus-menerus dilanggar.

Berkaitan dengan pembunuhan massal itu tentu ada banyak hal yang juga bisa dipertanyakan. Antara lain adalah, mengapa pembunuhan massal itu tidak berlangsung secara serempak, melainkan bergelombang atau bergiliran? Adakah faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu bagi mulainya pembunuhan massal itu di masing-masing daerah? Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan UUBH (Undang-undang Bagi Hasil) pada tahun 1964 terjadi ketegangan antara PKI dan para tuan tanah memang betul; tetapi mengapa pembantaian di masing-masing daerah itu baru mulai terjadi pada 1965 dan itu pun pada bulan-bulan terakhir tahun tersebut dan awal 1966? Di be-berapa tempat, pembantaian berlangsung justru pada 1967-1968, saat ketika konon PKI telah berhasil ditumpas. Dan korbannya ternyata memang bukan hanya para anggota PKI.[11] Mengapa?

Produksi dan Reproduksi Ingatan

Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tak dapat dimungkiri bahwa tampaknya memang terdapat unsur kesengajaan untuk mengarahkan atau bahkan memproduksi opini publik dan ingatan (*memory*) akan apa yang terjadi pada 1965 itu menurut versi tertentu demi tujuan-tujuan tertentu pula. Misalnya saja penggunaan istilah "G30S/PKI". Meskipun sebenarnya dalang yang sesungguhnya dari pembunuhan para jenderal itu belum jelas—atau bahkan setelah diketahui bahwa tokoh-tokoh kunci dari G30S itu adalah justru anggota militer—tetap saja digunakan istilah tersebut dengan maksud

www.facebook.com/indonesiapustaka

untuk memojokkan PKI. Bahkan penggunaan istilah "Gestapu" tampak sekali sengaja dilakukan untuk mengasosiasikan operasi militer yang konon didalangi oleh PKI itu dengan polisi rahasia Jerman Gestapo *(Geheime Stat Polizei)* yang terkenal kejamnya.

Produksi ingatan akan apa yang terjadi pada 1965 itu sudah dimulai ketika pada dua pekan pertama bulan Oktober hampir semua koran disensor, dan hanya koran-koran tertentu yang boleh terbit, khususnya harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha* yang dikelola oleh Angkatan Darat. Melalui koran-koran ini, dan melalui berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dikisahkan mengenai berbagai kekejaman PKI di Lubang Buaya, seperti kisah "pesta harum bunga", kisah pemotongan alat-alat vital, serta kisah pencungkilan mata yang sampai sekarang belum terbukti itu. Dalam koran *Angkatan Bersenjata* edisi 7 Oktober 1965, misalnya, dikatakan bahwa para jenderal itu "matanya dicongkel". Padahal, Brigjen TNI dr Rubiono Kertapati yang mengetuai tim dokter yang melakukan autopsi atas para korban menyatakan dalam laporan *visum et repertum*-nya bahwa tak ada penyiksaan atas tubuh para korban.[12]

Lepas dari apakah orang setuju atau tak setuju dengan PKI, atau apakah sebenarnya PKI bersalah atau tidak, faktanya adalah bahwa hanya kisah-kisah resmi versi militer yang memojokkan PKI yang waktu itu boleh beredar. Bahkan ketika ada anggota TNI AD yang ditugaskan sebagai wartawan Kantor Berita Antara meliput kekejaman terhadap PKI, ia malah "di-PKI-kan" dan dijebloskan ke penjara selama bertahun-tahun. Akibatnya, rakyat menjadi mudah disulut untuk melakukan tindakan massal dalam rangka menghabisi

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kunjungan Perdana Menteri India ke Indonesia

www.facebook.com/indonesiapustaka

para anggota PKI atau yang diduga anggota PKI. Slogan yang beredar di masyarakat adalah "membunuh atau dibunuh"—persis slogan militer dalam perang. Pembunuhan massal pun terjadi, dan bagaikan Perang Baratayudha, bangsa Indonesia "mandi darah" saudara sendiri. Kemudian pembunuhan itu diikuti dengan pemenjaraan massal di Jawa maupun di luar Jawa, dan hampir semuanya tanpa didahului oleh proses pengadilan yang memadai.

Selanjutnya, ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menurut versi resmi itu tidak hanya diproduksi melainkan juga terus direproduksi, karena produksi dan reproduksi macam itu menguntungkan sejumlah pihak, baik dari kalangan militer maupun sipil. Pembuatan, pemutaran dan pemaksaan untuk menonton film yang berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI* karya Arifin C. Noer pada tahun 1980-an hingga 1990-an hanyalah salah satu contoh. Dalam film yang berat sebelah dan bernada propaganda atas versi resmi itu ditunjukkan kekejaman yang terjadi pada dinihari 1 Oktober 1965 yang menurut film tersebut jelas-jelas dilakukan oleh PKI.[13]

Oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu produksi dan reproduksi ingatan menurut versi resmi atas Tragedi '65 itu dipandang penting, karena hal itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikontrol. Ia menjadi semacam menara panoptiknya Foucault yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang dominan tapi tak mudah diduga. Pembubuhan kode "ET" (Eks Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa,

www.facebook.com/indonesiapustaka

misalnya, membuat orang-orang itu ketakutan dan berpikir dua kali kalau tak mau tunduk pada pemerintah.

Konsekuensi Lebih Jauh

Lebih daripada sekadar membuat takutnya orang-orang yang KTP-nya diberi kode "ET", produksi dan reproduksi ingatan oleh penguasa yang bersifat sepihak juga memiliki konsekuensi lebih jauh bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Salah satunya ialah bahwa ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada 1965 itu menjadi kabur dan campur-aduk. Masyarakat bahkan sulit membedakan antara (a) *operasi militer* yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan dengan (b) *pembunuhan massal* terhadap rakyat Indonesia oleh rakyat Indonesia, serta (c) berbagai upaya *produksi dan reproduksi ingatan* akan Tragedi 1965 yang telah dimanipulasi.

Kebiasaan memusatkan peringatan Tragedi '65 pada bulan September adalah contoh bagaimana masyarakat mengira bahwa "puncak" Tragedi itu ada pada bulan September. Seakan-akan pada bulan itulah Tragedi tersebut terjadi. Padahal pembunuhan para jenderal itu terjadi pada dinihari hari pertama bulan Oktober, dan pada bulan Oktober pula *mulai* terjadi pembantaian massal di Jawa Tengah, yang kemudian terus berlangsung pada bulan November, Desember, dan seterusnya. (Kiranya sudah saatnya peringatan Tragedi '65 digeser ke bulan Oktober atau setelahnya, supaya bangsa Indonesia bisa belajar untuk tidak saling membunuh).

Tidak lengkapnya ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada 1965 itu juga membuat tidak adanya upaya hukum untuk secara serius mengadili para pemberi komando maupun

www.facebook.com/indonesiapustaka

para pelaku-lapangan atas pembantaian massal itu. Mahmilub (Mahkamah Militer Luar Biasa) yang diadakan pada waktu itu terkesan lebih dimaksudkan untuk memosisikan tokoh-tokoh PKI dan para pelaku G30S sedemikian rupa agar mudah dijatuhi hukuman (mati). Selain itu, juga dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan terhadap mereka yang punya afiliasi dengan komunisme atau terhadap setiap gerakan kiri di negeri ini.

Konsekuensi praktisnya ialah, kalau membunuh ratusan ribu orang saja dibiarkan, orang akan merasa *tidak apa-apa* ketika melakukan tindakan-tindakan lain yang sebenarnya jahat, tetapi yang ia pandang "lebih ringan" daripada apa yang terjadi pada 1965 itu. Misalnya tindakan melakukan penculikan dan pembunuhan atas beberapa mahasiswa, mencuri beberapa milyar rupiah uang negara, menjual sumber-sumber daya alam ke negara lain, menaikkan harga kebutuhan pokok rakyat bawah secara berlebihan, atau memprovokasi konflik-konflik horisontal yang korbannya "hanya" beberapa ribu orang, dan sebagainya. Akibat selanjutnya adalah begitu banyak kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) berat yang tak pernah diselesaikan secara tuntas di pengadilan, entah itu berkaitan dengan masalah Maluku, Aceh, Poso, Tanjung Priok, Timor Leste, atau yang lain.

Belajar dari Sejarah

Situasi demikian tentu tak dapat dibiarkan terus berlangsung. Perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak, keadaan akan terus memburuk dan masa depan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang adil dan demokratis akan semakin dipertanyakan. Peringatan tahunan Tragedi '65

www.facebook.com/indonesiapustaka

adalah momentum yang amat berharga bagi bangsa ini untuk setiap tahun mengenang kembali apa yang terjadi waktu itu. Pada kesempatan macam itu, misalnya, bisa dipikirkan untuk menggeser puncak peringatan Tragedi 1965-1966 dari September hingga Oktober atau sesudahnya. Peringatan tahunan itu bisa menjadi kesempatan bagi semua pihak, baik para sejarawan maupun masyarakat pada umumnya, untuk secara kritis meninjau dan merekonstruksi kembali apa yang terjadi pada pertengahan 1960-an dengan segala kompleksitasnya. Lebih dari itu, peringatan macam itu akan mengundang kita untuk berefleksi dan belajar dari Tragedi yang terjadi pada tahun 1965 itu, yang kekejamannya nyaris tak tertandingi dalam sejarah Indonesia dan yang dampaknya masih tetap mengganggu kehidupan bersama kita sebagai bangsa sampai sekarang.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari sejarahnya sendiri.[]

Catatan Akhir:

[1] Sebelum diolah kembali pokok-pokok gagasan dalam bab ini pernah disampaikan pada seminar "Menguak Tabir Merajut Masa Depan" 29 September, di Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat; seminar "Rekonsiliasi dan Rekonstruksi Tragedi 1965-1966" di PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) Universitas Sanata Dharma, 22 Oktober 2005 dan di *Kompas*, 30 September 2005. Terima kasih untuk semua pihak yang telah memberi masukan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[2] Sementara perolehan suara PKI adalah 16,4%, IPKI hanya mendapatkan 1,4% suara dalam pemilu tersebut. Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962), h. 434-440.

[3] Kolonel Abdul Latief, *Pledoi Kol A. Latief: Soeharto Terlibat G30S* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2000), h. 157-158, 277-282.

[4] James Luhulima, "G30S, Terlibatkah Soeharto?" *Kompas*, 27 Oktober, 2004.

[5] Daniel Lev, "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik" dalam Baskara T. Wardaya (ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 206-207.

[6] Dalam masa Revolusi, Sjam Kamaruzzaman adalah anggota kelompok Pemuda Pathuk di Yogyakarta, di mana Soeharto adalah juga salah seorang anggotanya. Keduanya telah lama saling mengenal. Tentang betapa "misterius"-nya Sjam, lihat Benedict Anderson, "Jangan Terjadi Lagi" dalam Baskara T. Wardaya (ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 269-270.

[7] Asvi Warman Adam, "Di Balik Pemberontakan", h. 2005.

[8] Lihat Bendict R. Anderson dan Ruth T. McVey, *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* (juga disebut sebagai "The Cornell Paper") (Cornell University, Ithaca, New York, 1971), h. 101.

[9] Arthur J. Dommen, "The Attempted Coup in Indonesia", *The China Quarterly,* No. 25 (Jan.-Mar 1966), h. 28.

[10] Robert Cribb (ed), *Pembantaian PKI di Jwa dan Bali 1965-66* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2004), h. 15; Helen Fein, "Revolutionary and Antirevolutionary Genocides: A Comparison of State Murders in Democratic Campuchea, 1975-1979, and in Indonesia, 1965-1966" (*Comparative Studies in Society and History*, Vol 35 No. 4, Oct 1993), h. 802.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[11] Lihat Bonnie Triyana, "Konspirasi dan Genosida: Kemunculan Orde Baru dan Pembunuhan Massal" makalah seminar, Yogyakarta 17 Oktober 2002; Robert Cribb (ed), *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-66*, h. 323-384.

[12] Salah seorang yang pernah membaca laporan visum itu adalah Profesor Benedict Anderson dari Cornell University, AS. Berdasarkan pembacaannya, catatan mengenai penyiksaan-penyiksaan itu "sama sekali tak ada". Menurutnya berbagai pemberitaan tentang kekejaman PKI waktu itu "jelas direkayasa". Dalam pandangannya pemberitaan macam itu merupakan "salah satu strategi utnuk menimbulkan suasana yang tegangnya bukan main ... Di mana saja di dunia, kalau mau diadakan pembantaian massal harus diciptakan suasanya di mana orang merasa apa saja boleh, karena calon korban sudah berbuat hal-hal di luar peri kemanusiaan." Lihat Benedict Anderson, "Jangan Terjadi Lagi" dalam Baskara T. Wardaya (ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indoensia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 251-256.

[13] Ketika pada 1998 pemutaran film itu dihentikan, penggantinya adalah film *Bukan Sekadar Kenangan*. Isinya mengingatkan orang akan tetap berlakunya stigmatisasi terhadap para mantan anggota PKI beserta keluarga mereka (Schreiner: 2002).

www.facebook.com/indonesiapustaka

MENGGUGAT MITOS-MITOS ORDE BARU[1]

Tahun 1965 itu titik balik kemenangan modal dan bedil ... Dengan demikian, mau ngomong apa pun—pendidikan, kesenian, agama, dan sebagainya—kita harus paham apa yang terjadi pada tahun 1965.

Ariel Heryanto (1999)

SUDAH bukan rahasia lagi, selama masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998) ada banyak sekali momen historis bangsa ini yang kisahnya didistorsi atau dimanipulasi demi keuntungan pihak penguasa. Banyak kisah ditulis atau diceritakan dalam bentuk mitos dengan versi-versi tertentu, sehingga menghasilkan dampak yang bermanfaat untuk melayani kepentingan tertentu pula. Tidak harus kisah-kisah itu diubah sepenuhnya, tetapi beberapa data diplintir atau didistorsi sehingga pembaca atau pendengarnya menarik kesimpulan tertentu yang berguna bagi kepentingan si pencerita atau kelompoknya.

Alat Legitimasi

SALAH satu contoh klasik adalah "Serangan Oemoem 1 Maret 1949" atas kedudukan Belanda di Ibukota RI waktu itu, Yogyakarta. Serangan ini berlangsung singkat (6 jam)

www.facebook.com/indonesiapustaka

tetapi merupakan hal penting dalam rangka menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia tidaklah "bubar" sebagaimana didengung-dengungkan Belanda di forum internasional waktu itu. Oleh pemerintah Orde Baru diceritakan bahwa serangan itu merupakan hasil dari inisiatif dan kepemimpinan Letkol Soeharto. Cerita disebar, dan "Monumen Yogya Kembali" pun dibangun untuk menunjukkan ketokohan Sang Letkol. Belakangan diketahui bahwa cerita itu merupakan mitos yang diragukan kebenarannya.

Manipulasi serupa juga terjadi berkaitan dengan momen-momen lain dalam sejarah Indonesia. Dalam penataran-penataran P-4 misalnya, selalu dikatakan bahwa Orde Baru merupakan "koreksi total" terhadap berbagai kegagalan sebuah sistem pemerintahan "Orde Lama". Sering pula dikatakan, militer Indonesia merupakan "anak kandung rakyat" yang lahir pada masa Revolusi, tetapi tanpa dijelaskan apa maksud istilah "anak kandung" di sini. Tak dijelaskan, misalnya, kaitan antara tentara dengan KNIL, meskipun banyak tokoh militer Indonesia adalah bekas anggota KNIL. Padahal tugas utama KNIL dalam masa penjajahan adalah "membasmi" setiap perlawanan rakyat yang dirasa mengganggu "kepentingan pusat"–maksudnya tentu saja adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berpusat di Batavia beserta para kroninya. Penyerbuan Timor Timur pada akhir 1975 berikut pendudukan atasnya dikatakan sebagai "integrasi", padahal sejatinya adalah *invasi* dan *kolonisasi*.

Sebagaimana telah kita lihat, mitos-mitos serupa juga diciptakan dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 1965-66 dan setelahnya. Dikatakan misalnya,

www.facebook.com/indonesiapustaka

Gerakan Tigapuluh September yang melakukan pembunuhan terhadap para jenderal Angkatan Darat pada dinihari 1 Oktober 1965 itu diotaki oleh PKI atau—sebagaimana telah kita singgung—konon bahkan didalangi oleh Bung Karno sendiri. Tetapi tuduhan macam itu tidak pernah dibuktikan secara rasional dan legal di depan pengadilan yang terbuka dan *fair*, khususnya sebelum dilancarkan eksekusi massal atas mereka yang dituduh bersalah. Tuturan mengenai wanita-wanita Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) menyayat tubuh para korban adalah contoh lain dari mitos itu. Seakan-akan tuturan itu benar, padahal visum dari tim dokter Universitas Indonesia (UI) menyatakan lain. Diberitakan pula bahwa apa yang dilakukan oleh militer pada periode itu semuanya benar, karena ditujukan untuk "membasmi" PKI dan para pengikutnya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa yang dibasmi bukan hanya PKI, melainkan setiap kelompok yang potensial menjadi penghalang bagi supremasi Orde Baru, termasuk orang-orang dan kelompok-kelompok yang ingin setia pada Bung Karno.

Dengan memopulerkan mitos tentang betapa "kacau"-nya negara ini ketika berada di bawah pimpinan Presiden Sukarno, seakan-akan menjadi sah-lah kalau ada pemerintahan lain yang menggantikan. Dikatakan bahwa salah satu "dosa" terbesar dari pemerintahan Bung Karno adalah membiarkan tumbuhnya PKI sehingga akhirnya melakukan "kudeta" ber-darah—meskipun tak jelas betul itu kudeta siapa melawan siapa. Dengan menciptakan mitos bahwa PKI melakukan kudeta, dan kudeta itu (anehnya) didukung oleh Bung Karno, maka menjadi "sah" kalau kalangan militer tertentu melakukan pembasmian terhadap PKI, meng-

www.facebook.com/indonesiapustaka

hancurkan mereka yang dianggap mendukung Bung Karno, lalu menyingkirkan Bung Karno sendiri, untuk kemudian membentuk pemerintahan yang baru yang mereka kuasai.

Lebih dari itu, mitos-mitos tersebut memungkinkan digunakannya cara-cara militer dalam berhadapan dengan PKI—atau siapa pun yang menghalangi niat kelompok tentara yang waktu itu ingin berkuasa. Tak perlu ada negosiasi, tak perlu ada surat resmi perintah penangkapan, bahkan tak perlu ada proses pengadilan sebelum dilaksanakan "hukuman mati" secara massal. Tidak hanya pihak militer saja yang dapat melakukan semua itu, melainkan juga warga sipil yang telah terprovokasi. Mereka juga bersemangat untuk melakukan tindakan yang sama. Dengan kata lain, mitos-mitos itu merupakan sarana vital untuk legitimasi kekuasaan.

Di awal naiknya Orde Baru, mitos-mitos macam itu membantu memperlancar naiknya rezim tersebut, misalnya dengan cara menggalang kalangan pelajar dan mahasiswa untuk melakukan demo-demo melawan Bung Karno. Begitu pula, dengan relatif mudah TNI-Angkatan Darat menyusup ke dalam gerakan mahasiswa sehingga demo-demo yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa waktu itu terkesan merupakan suatu gerakan moral-sosial murni yang berasal dari kalangan sipil. Bahkan di antara para pelajar dan mahasiswa sendiri waktu itu banyak yang tak sadar akan adanya penyusupan dan provokasi di antara mereka.

Di bawah kekuasaan Orde Baru selanjutnya, adanya mitos-mitos itu membuat masyarakat selalu berada di bawah atmosfir ketakutan sehingga mudah dikontrol. Misalnya saja adanya mitos "bahaya laten PKI" membuat masyarakat selalu

www.facebook.com/indonesiapustaka

waswas akan adanya kebangkitan partai komunis itu, sehingga dengan demikian akan cenderung mengharapkan perlindungan dari pemerintah dan militer. Demikian pula dengan adanya istilah-istilah ciptaan Orba seperti "bersih diri," "bersih lingkungan," "waskat" (pengawasan melekat terhadap orang-orang yang diduga pro-PKI), dsb. Banyak orang benar-benar menjadi takut dan patuh pada slogan-slogan itu, nyaris tanpa seorang pun bertanya: kalau memang operasi militer tahun 1965-66 itu berhasil, mengapa duapuluh tahun kemudian belum juga berhasil membasmi tuntas komunisme di Indonesia? Apakah yang dibunuh dan dipenjarakan waktu itu masih "kurang banyak"? Kalau setengah jutaan saja masih kurang banyak, lantas berapa banyak lagi seharusnya?

Adanya mitos-mitos itu juga menciptakan ketidakpercayaan sipil atas dirinya sendiri untuk mampu menyelenggarakan suatu pemerintahan yang stabil dan berkesinambungan. Besarnya rasa takut di kalangan masyarakat serta ketergantungan mereka akan "perlindungan" pemerintah membuat masyarakat merasa tidak mampu untuk memberikan alternatif bagi pemerintahan otoriter-militeristik. Urusan-urusan politik diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, dan partisipasi masyarakat pun menjadi amat terbatas. Tak ada kebebasan pers, tak ada kebebebasan berpendapat. Yang ada adalah "massa mengambang" *(floating mass)*. Bahkan kehidupan beragamapun amat diwarnai kepentingan-kepentingan politik. Pegawai negeri diberi slogan "Abdi Negara", yang dalam praktiknya berarti perpanjangan tangan partai pemerintah yang berkuasa.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Selebihnya, berkat adanya mitos-mitos ciptaan pemerintah itu terdapat kecenderungan diskriminatif di kalangan sipil. Masyarakat cenderung saling mencurigai, saling lebih menekankan perbedaan daripada kesamaan. Banyak perkara diselesaikan secara kekerasan. Istilah dan kesadaran akan "SARA" pun dipopulerkan. Meskipun di satu pihak tampaknya menjadi sarana untuk menjaga persatuan, di lain pihak istilah itu "perlu" selalu didengung-dengungkan untuk menyadarkan masyarakat bahwa secara etnis dan religius mereka berbeda, dan oleh karena itu mereka membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mencegah konflik, menjaga harmoni.

Lebih jauh, mitos-mitos ciptaan Orde Baru memungkinkan merajalelanya peran militer dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan sampai ke desa-desa. Pada masa itu militer, khususnya Angkatan Darat, ikut berperan aktif tidak hanya di bidang politik, melainkan juga dalam urusan-urusan lain, dari ekonomi sampai organisasi olah raga. Struktur organisasi militer juga dibuat sejajar dengan struktur pemerintahan sipil, dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa. Ini semua mengakibatkan makin terkontrolnya kehidupan masyarakat di bawah kekuasaan pemerintahan yang otoriter dan militeristik.

Menggugat Mitos

Sejak *lengser*-nya Orde Baru pada 1998, tampaknya suasana berubah. Berakhirnya rezim tersebut telah membawa "angin segar" bagi wacana mengenai sejarah Indonesia, khususnya berkaitan dengan Tragedi 1965. Bersamaan dengan lengsernya Orde Baru bermunculan buku-buku yang berkisah tentang

www.facebook.com/indonesiapustaka

Letjen. Soeharto saat memberikan keterangan pers di Jakarta

www.facebook.com/indonesiapustaka

apa yang terjadi di pertengahan 1960-an itu secara berbeda. Berbeda dengan buku-buku resmi terbitan pemerintah, buku-buku itu lebih banyak berkisah dari perspektif para korban—yang *notabene* kebanyakan adalah rakyat biasa yang tinggal di kota kecil atau desa, sebagaimana halnya sebagian besar rakyat Indonesia. Mempelajari buku-buku itu menarik dan sekaligus penting, karena membantu kita untuk menggugat kembali mitos-mitos yang telah diciptakan Orde Baru dan untuk memahami sejarah Indonesia dari perspektif yang lebih luas dan yang seringkali lebih dekat dengan kehidupan kita sendiri.

Sebagai salah satu contoh, marilah secara lebih dekat buku berjudul *Menembus Tirai Asap* yang terbit pada tahun 2004 dan dieditori oleh Melanie Budianta dkk.[2] Buku itu mengajak kita melihat kembali periode di seputar Tragedi '65 secara lain. Kalau selama tiga dasawarsa kita hanya boleh mendengar paparan Tragedi yang berlangsung pada tahun 1965-66 itu menurut versi resmi pemerintah (yang tentu saja penuh mitos pembenaran diri sebagai "yang benar"), dalam buku ini kita ditawari sudut pandang lain, yakni sudut pandang mereka yang telah menjadi korban. Diceritakan di situ latar belakang para narasumber yang adalah eks-tapol, bagaimana mereka ditangkap, seperti apa mereka diperlakukan di penjara, bagaimana mereka dipindah-pindahkan dari satu penjara ke penjara lain, serta bagaimana keadaan mereka setelah bebas.

Dengan membaca buku ini kita dibantu untuk menembus tirai kepalsuan sekaligus menguak konstruk mitos-mitos yang diciptakan oleh Orde Baru (beserta antek-anteknya) demi melayani kepentingan mereka. Melalui buku ini klaim bahwa

www.facebook.com/indonesiapustaka

apa yang terjadi pada tanggal 30 September-1 Oktober 1965 merupakan suatu "kudeta" yang dilakukan oleh Partai komunis Indonesia dipertanyakan. Juga klaim-klaim pembenaran bagi tindakan militer menangkapi penduduk yang dituduh sebagai anggota PKI. Jika apa yang kita dengar selama berkuasanya Orba adalah "narasi besar" ciptaan para pemenang dan penguasa, melalui buku ini kita diajak untuk menyimak "narasi-narasi kecil" sebagaimana dialami langsung oleh para korban kesewenang-wenangan politik Orba.

Dalam kaitan dengan itu, metode "sejarah lisan" yang digunakan dalam penyusunan buku ini amat penting. Metode ini memungkinkan kita untuk mendengar kisah-kisah yang bukan melulu resmi, artinya kisah yang diceritakan menurut sudut pandang para pelaku dan penguasa. Kisah-kisah yang ditampilkan di sini merupakan kisah-kisah dari mereka yang terlibat langsung, tetapi sebagai korban. Paparan mereka sering tidak runtut atau sistematis (antara lain karena direpresi selama puluhan tahun), tetapi dalam banyak hal lebih jujur dan terbuka. Mereka yang berkesempatan bicara dalam buku ini menampilkan diri secara apa adanya, meskipun dalam beberapa kasus masih harus menyembunyikan identitas demi keselamatan pribadi.

Wajah-Wajah Manusiawi

Dengan membaca buku-buku ini kita seakan diajak untuk "bertatap muka" dengan mereka yang selama ini dicap sebagai PKI dan eks-tapol, yang dianggap "layak" untuk dihukum seberat-beratnya. Stigma "PKI" di sini sering diasosiasikan sebagai cap "pengkhianat bangsa" yang dikatakan lihai melakukan trik-trik dan kekerasan politik. Dan

www.facebook.com/indonesiapustaka

karena dianggap berpaham "atheis" mereka sekaligus dipandang sebagai pengkhianat masyarakat Indonesia yang "religius".

Dalam tatap muka itu kitapun diajak ikut bersama-sama menelusuri jalan hidup, pengalaman dan perasaan mereka sebagai sesama warga masyarakat dengan wajah-wajah manusiawi yang penuh suka-duka kehidupan. Misalnya, kita dapat berjumpa dengan Zubaidi Hasan, seorang putra Jambi yang bangga menjadi penerbang pesawat canggih dan mengabdi negeri yang dipimpin oleh Bung Karno yang amat ia hormati. Sayang, kecintaannya pada negeri dan pemimpinnya itu akhirnya justru mengantarnya ke penjara selama bertahun-tahun.[3] Nasib serupa juga dialami oleh si "anak tangsi" dari Gianyar, Bali, yang bernama Dewa Ngurah Djenawi. Rasa hormat dan kepercayaannya pada Bung Karno membuatnya harus berhadapan dengan Angkatan Darat. Ia pun dipaksa mendengkam selama sepuluh tahun dalam penjara.[4] Di situ pula kita bertemu dengan kepedihan seorang Ibu, "Kusnah" namanya, yang selama sebelas tahun harus terpisah dari 13 anak kandungnya secara tiba-tiba. Juga, kita dapat merasakan hati yang bergetar mengikuti kisah Ratih, mahasiswi kedokteran yang dituduh anggota Pemuda Rakyat hanya karena di bukunya tertulis huruf "PR" (Pekerjaan Rumah), untuk kemudian dipenjara. Ia pun harus berpisah dengan ayahnya yang juga dituduh anggota PKI, dan baru bisa "bertemu kembali" dengan ayah tercinta dalam wujud tulang-belulang sekian tahun kemudian di Wonosobo.[5] Kisah-kisah manusiawi yang amat menyentuh hati orang yang berpikiran sehat.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Tampak pula bahwa di antara sesama tahanan politik ini terdapat rasa solidaritas yang tinggi. Dikisahkan oleh Djenawi bahwa di dalam penjara Gianyar di mana ia berada, sesama tahanan saling membantu. Jika misalnya sejumlah tahanan tak menerima kiriman makanan dari keluarga, yang mendapat kiriman membagikannya kepada yang tak mendapatkan. Juga secara gotong royong mereka membuat "perkebunan" sederhana untuk bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dimakan bersama. Tampak pula para tapol saling mengajarkan "ilmu" mereka satu sama lain, dari ilmu beternak ayam sampai ilmu kesehatan.[6]

Tak kalah menarik adalah adanya sikap inklusif dalam beragama para tapol. Dikisahkan oleh Sartono yang dipenjarakan di Pulau Buru, seringkali ada acara keagamaan Katolik tapi yang mempersiapkan adalah para tapol beragama Islam, demikian pula sebaliknya. Bahkan pernah konon kelompok Katolik mementaskan sebuah naskah keagamaan yang amat mengagumkan, yang ternyata ditulis oleh seorang Muslim. Di antara para tapol, praktik keagamaan terasa begitu hidup dan dinamis. Agama tidak harus membuat orang terpisah-pisah atau berlawanan satu sama lain.

Dari kisah-kisah yang terungkap kelihatan pula bahwa para eks-tapol itu tak diwarnai rasa dendam. Mereka merasa kecewa setengah mati atas pemenjaraan dan pembuangan yang berlangsung bertahun-tahun dan tanpa proses pengadilan itu, tetapi tak terbersit dalam hati mereka keinginan untuk misalnya menggalang persatuan dan melancarkan balas dendam bersama. Meskipun bertahun-tahun ditindas oleh kekerasan dan ketidakadilan militeristik, mereka tak mau

www.facebook.com/indonesiapustaka

mengadopsi perilaku keji itu dalam hidup mereka. Gara-gara adanya stigma "PKI", misalnya, Ibu Meriana ditolak oleh anaknya, tetapi dia tidak mendendam. Ia memilih untuk bersikap sabar, hingga akhirnya Sang Anak mengakuinya kembali sebagai Ibu yang patut dibanggakan.[7]

"Tigapuluh Es"

Pada sisi lain, dalam buku ini justru tampak betapa manipulatif, semena-mena dan keji-nya para pelaku itu terhadap rakyatnya sendiri. Sebagaimana terbaca dalam penuturan Kusnah tentang situasi di penjara wanita Plantungan, Jawa Tengah, banyak bantuan dari pemerintah asing maupun lembaga Gerejani Indonesia yang sebenarnya ditujukan untuk para tapol "disulap" oleh para petugas demi kepentingan pribadi. Dalam kisah yang juga dituturkan oleh Sartono kita baca bagaimana seorang jenderal memerintahkan penyiksaan terhadap mereka yang dituduh terlibat G-30-S. Bahkan kalangan militer dilarang menikahi anak-anak dari mereka yang dituduh terkait dengan peristiwa itu. Dan kalau ada orang yang ikut memperingati kematian mereka yang telah dibunuh dengan tuduhan tersebut, orang itu akan disamakan dengan mereka yang terlibat dalam G-30-S. Sementara itu dengan seenaknya saja Pangdam Irian Barat waktu itu membuat maklumat politik yang menyatakan, "Orang Jawa yang datang di Irian Barat sebelum 1965 adalah PKI tugas; setelah 1965 adalah PKI lari."[8]

Menjadi jelas pula bahwa dalam melaksanakan niatnya untuk membasmi PKI, kalangan militer bertindak semena-mena. Mereka mengambil orang dan merampas masa depan seenaknya. Simak misalnya, kisah Maria Goretti Sumilah. Pak

www.facebook.com/indonesiapustaka

Lurah di desa di mana Sumilah tinggal diperintahkan untuk menangkap seorang guru yang bernama Sumilah. Berhubung guru itu tak ditemukan, ditangkaplah Sumilah yang lain, yang umurnya baru 13 tahun. Ia ditangkap pada tanggal 19 November 1965 ketika sedang mengasuh adiknya di pelataran rumah. Dan selama 14 tahun berikut ia dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain. Semuanya dilakukan tanpa dasar hukum, tanpa proses pengadilan.[9]

Kita membaca kisah tentang janda muda Siti yang menolak untuk dijadikan istri kesekian dari seorang aparat. Karena Siti menolak, ia pun ditangkap. Ia digelandang bersama emaknya yang sudah tua dan bekerja di sebuah kedutaan asing. Keduanya dituduh sebagai PKI, padahal mereka sama sekali tak tahu-menahu soal politik, apalagi soal apa sebenarnya yang terjadi di peralihan bulan September-Oktober 1965 itu. Ketika di penjara Sang Emak ditanya petugas, apakah ia terlibat G-30-S, ia hanya bisa bisa menjawab: "*Enggak*, Pak. Di kedutaan saya kalau bikin es jumlahnya lima, sepuluh, limabelas—tidak sampai tigapulus es!" Sang Emak dibebaskan, tetapi anaknya disekap di penjara Plantungan, dan di sana dijadikan "bulan-bulanan" Pak Komandan.[10]

Meskipun telah terjadi berbagai bentuk salah tangkap, penahanan tanpa surat perintah, pemenjaraan selama bertahun-tahun tanpa pengadilan, penyiksaan atas para tahanan secara amat mengerikan, dsb. tampaknya tidak ada rasa menyesal atau pertanggung jawaban terhadap para korban itu oleh pihak militer. Tak ada kata "maaf", apalagi kompensasi. Hal ini menunjukkan betapa tidak bertanggung

www.facebook.com/indonesiapustaka

jawabnya kalangan militer yang waktu itu terlibat dalam penangkapan, pemenjaraan dan pembunuhan terhadap mereka yang dituduh komunis, lepas dari apakah tuduhan itu terbukti atau tidak.

Penting diingat, kita tak boleh memandang persoalan ini secara hitam-putih, misalnya dengan menyatakan bahwa para eks-tapol itu sepenuhnya bersih dan benar sedang militer itu semuanya kotor dan salah. Masing-masing pihak memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Di kalangan militer tentu saja ada banyak pribadi yang keberatan terhadap praktik-praktik kejam terhadap warga sipil itu. Meskipun demikian, kita tahu bahwa berbagai kekerasan yang terjadi lebih banyak dilakukan oleh militer terhadap para tapol daripada sebaliknya.

Membaca Tanda Jejak

Tidak kalah penting adalah melihat buku *Menembus Tirai Asap* ini dalam kaitannya dengan buku-buku serupa yang juga bertutur mengenai kisah-kisah di seputar Peristiwa '65. Buku-buku itu antara lain adalah *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu*-nya Pramoedya Ananta Toer, *Memoar Pulau Buru*-nya Hersri Setiawan, *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir* yang dieditori John Roosa dkk., atau buku *Di Negeri Orang* yang berisi kumpulan puisi para penyair Indonesia yang terpaksa mengasingkan diri ke luar negeri.[11]

Dengan membaca buku-buku itu, atau buku-buku lain yang serupa, kita dapat membaca kembali "tanda jejak" yang telah ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Lepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan pilihan politis atau ideologis masing-masing pelakunya, kita melihat bahwa apa yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

mereka lakukan, yang mereka catat, atau yang mereka tuturkan kembali, merupakan bagian dari jejak-jejak perjalanan bersama kita sebagai bangsa. Dari peninjauan kembali atas jejak-jejak itu kita dipanggil untuk belajar bersama demi terciptanya masyarakat yang lebih baik. Dalam kaitan dengan ini yang perlu dilihat bukanlah hanya apa yang terjadi setelah 1965, melainkan juga hal-hal yang terjadi sebelumnya: momen-momen penting apa yang terjadi sebelum itu? Hal-hal apa saja yang mau diperjuangkan masyarakat waktu itu (baik yang PKI maupun non-PKI)? Mengapa ada yang berhasil dan ada yang gagal? Pelajaran apa yang bisa kita petik dari sana? Dan sebagainya. Di sini terletak pentingnya terus belajar sejarah.

Dengan membaca kisah-kisah yang ada dalam buku-buku itu kita juga bisa melihat adanya "benang merah" yang ada dalam hidup para penulis atau penuturnya. Kita tahu, setiap keputusan pribadi diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baik itu yang bersifat personal maupun sosial. Dengan membaca karya-karya mereka kita bisa menjadi tahu, umpamanya, pertimbangan apa yang digunakan seseorang untuk mengambil keputusan tertentu, meskipun orang itu tahu beratnya konsekuensi dari keputusan itu. Dalam buku-buku itu bisa ditemukan jawaban, misalnya atas pertanyaan mengapa seseorang masuk partai politik tertentu? Pengalaman hidup atau ide-ide seperti apa yang mendorong dia bergabung dengannya? Apa yang dia mau cari selama aktif di dalamnya? Mengapa ia terdorong untuk menceritakan kembali pengalamannya? Bahan-bahan apa yang dia jadikan sumber ilhamnya? Dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

macam itu kita bisa belajar banyak hal, tanpa harus setuju dengan pilihan praktis yang akhirnya diambil oleh yang bersangkutan.

Sekaligus dengan membaca buku-buku itu kita akan dapat semakin memahami gerakan "kiri" yang pernah menjadi bagian utama dalam perjuangan dan dinamika bangsa ini. Sekarang ini terdapat kecenderungan untuk lekas-lekas curiga atau "phobi" terhadap segala sesuatu yang berbau kiri. Padahal gagasan-gagasan kiri—khususnya dalam arti perlawanan terhadap dominasi kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme—merupakan gagasan dominan dalam perjuangan para pendiri Republik ini. Gerakan-gerakan kiri yang tumbuh pada masa pra-1965 telah mengajarkan kepada bangsa ini sejumlah tradisi penting. Misalnya saja tradisi mengorganisir masyarakat (serikat buruh di zaman Kebangkitan Nasional, mengorganisir pemuda di zaman revolusi, lalu mengorganisir petani, wanita, seniman, wartawan, dan lain-lain); tradisi intelektual dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi, kelompok kebudayaan, lembaga-lembaga pendidikan, dsb; juga tradisi membangun front bersama demi kepentingan masyarakat luas. Sayang bahwa tradisi-tradisi macam itu banyak yang mati karena terlanjur dicap "kiri" atau "ateis".

Pada saat yang sama, dengan membaca buku-buku macam itu kita dapat belajar mengenai berbagai gerakan masyarakat. Menjadi tampak bahwa dalam suatu perjuangan bersama, tak mungkin segalanya ditentukan oleh satu kelompok atau satu partai politik saja. Semuanya harus dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai kelompok dan lapisan yang ada di Republik ini tanpa harus "main mutlak-

www.facebook.com/indonesiapustaka

mutlakan" (meminjam istilahnya Romo Mangun). Setiap perjuangan yang ingin berhasil selalu harus mau dan mampu melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat termasuk kaum agamawan, mahasiswa, pelajar, wartawan, pegawai, buruh, petani, nelayan, dsb. Tanpa melibatkan mereka, setiap perjuangan akan berjalan timpang dan hasilnya akan menimbulkan berbagai bentuk kecemburuan sosial.

Kesadaran sejarah

Dalam konteks sekarang, hal-hal semacam itu perlu dicermati kembali. Alasannya antara lain karena ada ke-cenderungan di masyarakat kita untuk mudah melupakan masa lalu. Inilah yang sering kita sebut sebagai kecenderungan amnesia sejarah dalam masyarakat kita. Kalau tak hati-hati kecenderungan macam ini bisa membuat masyarakat lupa atau enggan untuk belajar dari berbagai kesalahan yang terjadi di masa lampau.[12] Akibatnya akan menjadi sangat mungkin bahwa berbagai peristiwa kekerasan di masa lampau itu akan terulang kembali.

Menarik untuk melihat misalnya, ketika pada tahun 2004 diadakan Pemilu Legislatif, Golkar (yang merupakan bagian pokok dari otoritarianisme rezim Orde Baru) tampak kembali menguat. Sementara itu pemilu untuk memilih Presiden bulan Juli 2004 mengindikasikan kembalinya tokoh-tokoh militer Angkatan Darat dalam kancah pemerintahan pusat negeri ini. Artinya, hanya selang beberapa tahun setelah dilengserkan, Orde Baru dan Angkatan Darat yang dulu memegang peran penting dalam Tragedi 1965 seakan telah "diterima kembali" oleh masyarakat—bahkan terkesan mau diberi kesempatan untuk berkuasa lagi.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Guna menanggapi fenomena macam itu, perlulah kiranya segera dibangun suatu masyarakat di mana kekuatan-kekuatan sipil bersatu dan menunjukkan diri sebagai kelompok yang mampu menciptakan pemerintahan yang adil dan demokratis tanpa disertai kekerasan militeristik. Perlu pula diciptakan suatu masyarakat yang bersifat inklusif, yang menganggap perbedaan dan kebhinnekaan bukan sebagai ancaman yang harus "dibasmi" melainkan sebagai kekayaan bersama yang perlu dimanfaatkan. Ingatan bersama akan dahsyatnya dampak dari penggunaan kekerasaan di masa lalu perlu terus dipelihara—bukan untuk melestarikan rasa dendam, melainkan supaya kita selalu waspada dan menghindari terulangnya kekejaman serupa.

Dalam rangka ini, perlulah terus-menerus dilakukan upaya meningkatkan kesadaran sejarah. Pepatah mengingatkan, siapa yang tak mau belajar dari sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Penulisan dan penerbitan buku-buku alternatif sebagaimana kita lihat di depan beserta diskusi-diskusi yang menyertainya amat penting dalam rangka peningkatan kesadaran sejarah macam itu. Sekaligus hal ini juga penting dalam rangka mendorong lahirnya sikap kritis masyarakat dalam rangka menggugat mitos-mitos yang diciptakan oleh setiap penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya. Sebagaimana kita tahu, kekuasaan yang sibuk meligitimasi diri biasanya adalah kekuasaan yang juga rajin menindas rakyatnya.[]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Catatan Akhir:

[1] Semula, sebelum diolah kembali, bab ini merupakan makalah yang disampaikan dalam rangka bedah buku HD. Haryo Sasongko, dkk (ed.) *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965* (Jakarta: Amanah-Lontar, 2003), Yogyakarta, 1 Juni 2004.

[2] HD. Haryo Sasongko dkk (ed.) *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965* (Jakarta: Amanah Lontar, 2003).

[3] Sasongko, h. 3-23.

[4] Sasongko, h. 25-54.

[5] Sasongko, h. 155-174.

[6] Sasongko, h. 47.

[7] Sasongko, h. 142-144.

[8] Sasongko, h. 77.

[9] Sasongko, h. 195-216.

[10] Sasongko, h. 136-137.

[11] Pramoedya Andanta Toer, *Nyanyi Sunyi Seorang Bisu* (Jakarta: Lentera, 1995); Hersri Setiawan, *Memoar Pulau Buru* (Yogyakarta, Indonesia Terra, 2003); John Roosa, dkk. *Tahun Yang Tak Pernah Berakhir. Memahami Pengalaman Korban, Esai-esai Sejarah Lisan* (Jakarta: Elsam, 2004); A. Kembara dkk. *Di Negeri Orang: Puisi Penyair Indonesia Eksil* (Jakarta: Amanah Lontar, 2002).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bagian IV
MENGGUGAT KEPEMIMPINAN BANGSA

www.facebook.com/indonesiapustaka

BUNG KARNO SEBAGAI GURU BANGSA[1]

Pengaruh Sukarno itu besar sekali. Itu karena ia lebih dekat pada rakyatnya sendiri daripada para pemimpin yang didikan Eropa.

Pramoedya Ananta Toer (2001)

KALAU kita ikuti kembali rangkaian ceramah Bung Karno tentang Pancasila di seputar 1958-1959, kita akan mendapat kesan bahwa dia adalah seorang penceramah yang amat menguasai dan menghayati bidangnya.[2] Ibarat seorang guru yang cakap terasa sekali bahwa Sang Proklamator Kemerdekaan RI itu begitu "hidup", cerdas, kaya pengetahuan, penuh imajinasi, komunikatif, dan seperti biasa: mempesona. Topik bahasan yang sebenarnya begitu berat dan serius, yakni Pancasila, di tangannya menjadi mudah diikuti dan dipahami. Bertolak dari besarnya kemauan serta kemampuan untuk menyampaikan uraian-uraian itu, berikut perjuangannya sejak muda bagi negeri yang ia cintai ini, tak dapat diragukan lagi bahwa Bung Karno patas mendapatkan julukan sebagai Guru Bangsa sejati.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pada saat yang sama, berkaitan dengan ini ada sebuah pertanyaan yang tetap mengganjal: Mengapa justru setelah Sang Guru Bangsa dengan mantap menguraikan sila-sila yang merupakan dasar dan pandangan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia itu pada 1958-1959 suasana politik Indonesia justru makin panas dan menegangkan, untuk kemudian disusul dengan brutalnya pembantaian massal pada tahun 1965-66? Bahkan dalam posisinya sebagai Guru Bangsa yang amat disegani itu Bung Karno menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya dengan menyedihkan: Ia wafat sebagai seorang tahanan politik yang miskin, ditinggalkan oleh sebagian besar orang yang dulu tampak dengan sepenuh hati mendukungnya.

Pencetusan Pancasila

Dalam pidato 1 Juni 1945, yang kini dikenang sebagai hari lahirnya Pancasila, Bung Karno terasa gamblang dalam uraiannya mengenai lima sila yang ia usulkan sebagai dasar negara sekaligus *weltanschauung* atau pandangan-hidup Indonesia merdeka. Dengan bahasa yang santun—mungkin karena berada di bawah pelototan mata tentara Jepang—tetapi tegas dan menantang ia mendesakkan kepada para peserta sidang pentingnya sila-sila itu. Pada kesempatan yang sama ia juga rela membagikan pengalaman pribadinya sebagai latar belakang proses pencarian serta perumusan sila-sila itu. Ia katakan bahwa kelima sila yang ia tawarkan (yakni Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Demokrasi, Kesejahteraan Sosial dan Ketuhanan)[3] merupakan buah dari pengalaman dalam perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk menggambarkan kaitan antara perjuangan pribadinya dan penggalian sila-sila Pancasila itu Sukarno mengatakan bahwa sila-

www.facebook.com/indonesiapustaka

sila itu ia temukan setelah ia "berjuang sejak tahun 1918 sampai 1945 sekarang". Ia lantas menambahkan bahwa setiap nilai yang baik dan berguna bagi Indonesia merdeka harus merupakan buah dari perjuangan. "Tidak ada satu *weltanschauung* dapat menjadi kenyataan, menjadi *realiteit*," katanya, "jika tidak ada perjuangan!"[4]

Dijelaskan pula bahwa dalam usahanya untuk merumuskan Pancasila itu ia juga "berkonsultasi" dengan gagasan-gagasan yang berasal dari sumber-sumber di luar Indonesia, termasuk *San Min Chu I*-nya Sun Yat Sen, *Declaration of Independence*-nya Thomas Jefferson, dan *Communist Manifesto*-nya Marx-Engels.[5] Ketika mengacu pada buku *San Min Chu I* ia menyatakan ketertarikannya pada tiga prinsip kerakyatan yang ditawarkan, yakni Mintsu (nasionalisme), Minchuan (demokrasi) dan Min Sheng (sosialisme). Tak terlalu mengejutkan kiranya jika ketiga prinsip itu juga tercermin di dalam sila-sila Pancasila. Dengan itu Bung Karno ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya merupakan realitas sosial-politik pada dirinya sendiri, melainkan juga merupakan bagian dari komunitas internasional, baik komunitas fisik-geografis maupun komunitas pemikiran. "[T]anah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia! Ingatlah itu!" kata Sukarno.[6] Tak lupa dikatakan bahwa betapa pun tinggi kepercayaan Bung Karno atas kelima sila itu sebagai dasar negara ia juga mengakui bahwa ia bukan pencipta Pancasila, melainkan "sekadar salah seorang penggali dari Pancasila itu."[7]

Kuliah Pancasila

Menarik bahwa lebih dari sepuluh tahun setelah ia untuk pertama kalinya secara publik mencetuskan ide tentang

www.facebook.com/indonesiapustaka

kelima sila itu ia tetap ingat pada gagasan yang mendasari masing-masing sila, dan bersedia untuk kembali memberikan uraian tentang latar belakang pemikirannya. Secara berkala, pada tahun 1958-59 ia meluangkan waktu untuk memberikan rangkaian kuliah guna kembali menjelaskan sila demi sila dari Dasar Negara itu, masing-masing satu sila dalam satu kesempatan tatap muka. Pada tanggal 26 Mei 1958 ia memulai rangkaian itu dengan memberikan kuliah mengenai pengertian umum Pancasila. Setelah memberi penjelasan tentang berbagai bentuk kapitalisme dan perlawanan terhadapnya, Bung Karno menekankan bahwa Pancasila bukan hanya merupakan pandangan-hidup, melainkan juga merupakan alat pemersatu bangsa. "[H]anya Pancasilalah yang dapat tetap mengutuhkan negara kita, tetap dapat menyelamatkan negara kita," katanya.[8] Kuliah pendahuluan ini kemudian disusul dengan kuliah-kuliah lain serupa yang biasanya diadakan di Istana Negara dan disiarkan langsung melalui radio. Agak berbeda dengan pidato-pidato Bung Karno di depan massa di tempat-tempat terbuka yang biasanya berapi-api membakar semangat rakyat, kuliah-kuliah ini berjalan dengan lebih rileks, naratif dan komprehensif.

Dengan kuliah-kuliah itu sekaligus Bung Karno ingin menunjukkan bahwa Istana Negara bukan merupakan tempat *sangar* yang hanya boleh dimasuki oleh Presiden dan orang-orang mahapenting negeri ini, melainkan Istana milik rakyat, tempat masyarakat belajar mengenai banyak hal, termasuk dasar negara, Pancasila. Bung Karno ingin menjadikan Istana Negara (dan mungkin Indonesia itu sendiri) sebagai "ruang

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sukarno di masa tuanya

www.facebook.com/indonesiapustaka

kuliah" di mana terselenggara proses belajar-mengajar antara masyarakat dan pemimpinnya.

Pengetahuan yang Luas

Dari berbagai teori filsafat dan politik serta acuan-acuan historis yang digunakan dalam menguraikan sila-sila Pancasila dan Demokrasi Terpimpin itu tampak sekali betapa luas dan mendalamnya pengetahuan Sukarno. Tidak jarang dalam uraian-uraiannya itu ia menyebut berbagai pemikir yang gagasan dan buku-bukunya menjadi bahan wacana internasional waktu itu seperti Rosa Luxemburg, Karl Steuerman, K'ung Fu-tse (Confusius), Fritz Adler, Marx dan Engels. Hal ini menunjukkan bahwa Sukarno adalah orang yang suka membenamkan diri ke dalam buku-buku untuk belajar sebanyak mungkin. Meskipun sebenarnya dididik sebagai orang teknik, yakni sebagai insinyur calon pegawai pemerintah kolonial, Bung Karno sangat akrab dengan ilmu-ilmu sosial, terutama berkaitan dengan filsafat, sejarah, politik, dan agama. Ia tidak hanya gemar membaca karya-karya tulis orang Indonesia (yang kiranya belum terlalu banyak waktu itu), melainkan juga karya-karya orang asing. Hal ini juga menunjukkan bahwa ia memiliki pandangan hidup yang terbuka, mau belajar dari siapa pun asal itu berguna bagi diri dan perjuangannya. Sering ia, misalnya, menyitir berbagai pemikir Barat seperti Ernest Renan dan Otto Bauer, meskipun akhirnya ia mengkritik pendapat kedua pemikir tersebut.[9]

Berkaitan dengan luasnya pengetahuan ini, yang tak kalah mengagumkan tentu adalah keahliannya menguasai berbagai bahasa. Dalam uraian-uraiannya dengan enak ia menggunakan istilah-istilah dari macam-macam bahasa, dari bahasa

www.facebook.com/indonesiapustaka

Belanda sampai bahasa Inggris, Prancis, Jerman, kadang-kadang bahkan istilah-istilah Cina atau Hindi. Langka dan mahalnya buku-buku yang beredar waktu itu, serta tak menentunya situasi dalam dunia pergerakan karena ulah Belanda, tidak menjadi halangan baginya untuk secara pribadi mempelajari bahasa-bahasa yang ia anggap penting dan berguna.

Menjadi Mudah Dimengerti

Tidak hanya bahwa Bung Karno mampu menyebut literatur-literatur penting yang mendasari pokok-pokok pikirannya, melainkan juga mampu menyampaikan gagasan-gagasan pokok dari acuan-acuan literernya itu dengan ringkas namun jelas dan mudah dicerna. Uraian dan metafor-metafor yang ia gunakan amat membantu memahami tidak hanya ide-ide dia melainkan juga ide-ide internasional yang biasanya tak mudah dipahami, terutama oleh masyarakat umum *(general public)* baik yang hadir di ruang kuliah Istana Negara maupun yang mengikuti lewat radio.

Dengan piawai misalnya, ia menerangkan dan mengomentari Revolusi Prancis; juga kaitan antara fasisme, kapitalisme dan demokrasi liberal.[10] Tentang Revolusi Prancis antara lain ia berkomentar bahwa revolusi itu sebenarnya adalah revolusi kelas menengah yang menggunakan rakyat jelata. Ketika revolusi baru saja dimenangkan memang semua berteriak *"Liberte, Egalite, Fraternite,"* tetapi sedikit demi sedikit rakyat jelata makin ditinggalkan lagi. "Kelanjutan dari Revolusi Prancis," katanya, "rakyat jelata terpukul."[11] Berkaitan dengan sila Ketuhanan, dengan runtut Bung Karno menerangkan secara sosiologis tahap-tahap perkembangan pemahaman

www.facebook.com/indonesiapustaka

manusia tentang Tuhan.[12] Dengan enak pula ia menjelaskan keyakinannya bahwa wanitalah makhluk yang pertama kali menciptakan hukum, ilmu pertanian, kebudayaan, termasuk rumah dan pakaian.[13]

Tentang perbedaan pendapat antara Trotsky dan Stalin ia menerangkan bahwa pada dasarnya kedua tokoh komunis itu memiliki cita-cita yang sama, yakni terciptanya masyarakat adil dan makmur di Uni Soviet. Namun demikian keduanya berbeda dalam hal bagaimana mencapai masyarakat yang demikian itu. Trotsky, jelas Bung Karno, yakin bahwa masyarakat adil dan makmur di Uni Soviet hanya akan tercapai dengan cara menumbangkan kapitalisme di seluruh dunia. Sementara itu Stalin percaya bahwa pencapaian itu bisa dilakukan tidak harus dengan menumbangkan kapitalisme internasional, melainkan dengan menumbangkan kapitalisme di Uni Soviet dulu saja. Dengan menggunakan kutipan-kutipan kalimat langsung hasil rekonstruksinya, Bung Karno menjadikan perbedaan pendapat antara kedua tokoh itu menjadi hidup dan mudah diikuti.[14] Sekaligus ia menunjukkan bahwa sebagaimana dalam kubu kapitalis, dalam kubu komunis pun terdapat perbedaan pandangan yang tajam.

Dalam pidato di Kampus UGM Yogyakarta tanggal 21 Februari 1959 ia membawakan topik yang berat, yakni topik Demokrasi Terpimpin. Sebenarnya topik ini tidak hanya berat, melainkan juga kontroversial, mengingat bahwa sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa demokrasi macam ini akan membawa bangsa Indonesia ke arah kediktatoran. Tetapi dengan enak dan spontan Bung Karno mampu menje-

www.facebook.com/indonesiapustaka

laskan konsep itu di hadapan pendengarnya. Ilustrasi yang ia gunakan amat dekat di benak hadirin, karena Bung Karno dengan cerdas menggunakan orkes dan koor yang membuka acara itu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Orkes dan koor itu bisa bernyanyi dengan baik, katanya, karena para pemain musik dan penyanyi memiliki teks notasi lagu yang diacu, serta karena adanya dirigen yang memimpin orkes dan koor tersebut. Sebagaimana sebuah orkes simponi membutuhkan teks notasi dan dirigen, jelas Sukarno, demikian pula masyarakat membutuhkan *blue print* dan pemimpin dalam proses pembangunannya. Ia lantas menyatakan, Demokrasi Terpimpin akan memungkinkan terciptanya *blue print* itu.[15]

Mempertemukan "Buku" dan "Bumi"

Dalam proses "penggalian" kelima sila maupun dalam uraian atas Pancasila itu tampak bahwa Bung Karno tidak hanya menyandarkan diri pada buku-buku teori politik, melainkan juga pada "bumi" Indonesia yang ia abdi dan perjuangkan. Hal ini ia tunjukkan pada 26 Mei 1958, saat ia menyampaikan kuliah pembukaannya. Pada kesempatan itu, ia antara lain menyinggung kembali pertemuan dan dialognya dengan petani miskin Marhaen. Sebenarnya dialog itu sendiri sudah lama sekali berlangsung, akan tetapi ternyata ia masih mengingatnya nyaris kata per kata.[16] Hal ini menunjukkan bahwa Sukarno benar-benar menaruh perhatian pada perjumpaannya dengan *wong cilik* itu dan ingin menjadikannya sebagai titik tolak bagi perjuangan bersama untuk membebaskan rakyat Indonesia dari belenggu kemiskinan dan ketidakadilan. Baginya retorika memperjuangkan rakyat yang

www.facebook.com/indonesiapustaka

tidak disertai perjumpaan-perjumpaan langsung dengan rakyat adalah kosong belaka.

Dengan kata lain, sebagai seorang Guru Bangsa ia tak suka hanya berkutat di dunia teori-teori luhur, melainkan juga mau menceburkan diri ke dalam realitas kehidupan sehari-hari bangsanya. Bung Karno selalu berupaya keras untuk mempertemukan "buku" dengan "bumi", mempertemukan teori-teori kemanusiaan dengan realitas keseharian dalam masyarakat Indonesia yang sedang ia perjuangkan itu. Ia ingin menyambung kembali kaitan yang erat antara teori dan praksis, antara refleksi dan aksi. Mungkin inilah salah satu faktor yang membedakan Bung Karno dari para pemimpin yang lain, baik yang sezamannya maupun mereka yang datang setelah dia.

Dapat Diterima dan Terus Bertahan

Dengan latar belakang yang demikian kaya—baik pada tataran teori maupun praksis—tidak mengherankan bahwa butir-butir Pancasila yang ia gali dan rumuskan itu begitu mendalam, komprehensif, dan representatif terhadap nilai-nilai yang dihidupi oleh manusia Indonesia. Prof. Dr. N. Driyarkara bahkan yakin bahwa nilai-nilai yang terumuskan dalam Pancasila itu tidak hanya ada dalam kehidupan manusia Indonesia, melainkan "inheren (melekat) kepada eksistensi [setiap] manusia sebagai manusia."[17] Pantaslah kiranya jika kemudian Pancasila diterima oleh rakyat Indonesia, bahkan menjadi wacana masyarakat internasional.[18] Lebih dari itu, meskipun telah melalui berbagai tantangan, Pancasila tetap bertahan dan diakui sebagai dasar negara sampai hari ini.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Kelompok-kelompok yang menentang Bung Karno dan gagasannya tentang Pancasila tentu ada. Tetapi dengan cakap dan argumentatif Sukarno mampu menjawab tantangan-tangangan itu. Sebagai contoh, ia menyadari adanya kritik terhadap paham kebangsaan Bung Karno yang datang dari kelompok internasionalis-Marxis dan kelompok Agama. Karena kedua kelompok tersebut menekankan universalitas nilai-nilai yang mereka yakini, mereka menolak paham kebangsaan. Terhadap keberatan ini Bung Karno pertama-tama menuntut dibedakannya dengan tegas antara "keperluan negara sebagai negara" dengan "urusan agama". [19] Ia lantas mengingatkan adanya berbagai golongan di antara umat manusia, serta perlunya negara sebagai "alat" untuk mengorganisir umat manusia itu. Sebagai alat pengorganisasian, menurutnya, negara membutuhkan tidak hanya wilayah, melainkan juga pemerintahan dan rakyat yang dikelola sebagai satu bangsa, sebagai satu *volk-nation*. [20]

Perjuangan yang Tulus

Perlu ditambahkan kiranya bahwa lepas dari apakah orang setuju atau tidak dengan uraian dan gagasannya, satu hal kiranya tak dapat diragukan tentang Sukarno: Ia bukanlah seorang pejabat yang gemar berkolusi, bernepotisme atau berkorupsi-ria. Sulit dibayangkan bahwa Sukarno itu suka menduduki posisi-posisi tertentu di pemerintahan karena ia ingin mencuri uang rakyat atau menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri, keluarga atau *konco-konco*-nya. Perjuangan Sukarno adalah perjuangan yang tulus, yang disegani bahkan oleh orang-orang yang tak sepaham dengannya baik di dalam maupun di luar negeri.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Oleh karena itu, tak mengejutkan bahwa betapa pun "ruwet"nya ekonomi Indonesia di bawah pemerintahannya, tak terlihat kecenderungan umum pejabat-pejabat pemerintah di zaman itu yang dengan tidak malu-malu berkongkalikong di antara mereka sendiri atau dengan perusahaan asing untuk menjual sumber-sumber alam milik rakyat. Di sana-sini korupsi ada, tetapi sifatnya masih cukup terbatas dan biasanya menjadi bahasan umum dan terbuka di media massa. Perbedaan pendapat yang sengit di antara para pejabat atau politisi juga ada, tetapi biasanya tidak berujung pada saling menjegal dan membunuh—terutama dalam situasi-situasi di mana unsur militer tidak ikut campur. Ini semua menjadi mungkin karena Bung Karno tidak hanya mengajar bangsanya dengan kata-kata saja, melainkan juga dengan sikap dan perbuatan sehari-hari dengan perjuangan yang tulus. Sekali lagi, tak berlebihan kiranya kalau dia kita pandang sebagai seorang Guru Bangsa sejati.

Absennya Guru-guru Lain

Dalam rangka menerapkan ajaran Bung Karno tentang perlunya dihindari kecenderungan kultus individu (termasuk terhadap dirinya), perlu pula kiranya disampaikan beberapa catatan kritis terhadap Bung Karno sebagai Guru Bangsa. Dalam kapasitasnya sebagai Guru Bangsa itu, misalnya, tampak sekali bahwa Bung Karno merasa *in*, merasa pas, dengan posisinya sehingga ada kesan bahwa ia tak lagi menempatkan diri sebagai seorang pelayan masyarakat yang dipilih alias sebagai *an elected official*. Sebagai seorang Presiden seharusnya Bung Karno selalu menyadari kedudukannya sebagai seorang "pejabat" yang menduduki jabatannya *hanya*

www.facebook.com/indonesiapustaka

karena dipilih rakyat (melalui prosedur yang berlaku), dan ia pun menjabat sejauh rakyat masih menghendakinya untuk memegang jabatan itu. Untuk itu perlu diadakan mekanisme yang jelas di mana rakyat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan kehendak mereka, sehingga bisa diketahui apakah seorang pejabat masih dikehendaki untuk tetap memegang jabatannya atau tidak. Sebagai Guru Bangsa seharusnya Bung Karno juga menekankan hal ini kepada rakyat, sehingga mereka tahu bahwa dalam alam demokrasi—yang Bung Karno sendiri juga ikut memromosikan itu—rakyat sadar bahwa yang namanya presiden itu lain dengan raja. Fakta bahwa sejak tahun 1945 presiden RI adalah orang yang sama seharusnya menjadi salah satu topik bahasan masyarakat luas. Rupa-rupanya sebagai Guru Bangsa Bung Karno tidak terlalu merisaukan hal ini, dan ketika pada 1963 ia "diangkat" sebagai Presiden seumur hidup ia pun tak keberatan.

Sebagai seorang guru yang memandang negerinya sebagai sebuah "ruang kuliah" yang besar dan rekan-rekan sebangsanya sebagai "murid-murid" yang taat, terkesan Bung Karno tak memerlukan adanya "guru-guru" lain di ruang kelas itu. Ia tak merasa risau bahwa ada orang-orang lain yang membantunya dalam mengajar, tetapi—sadar atau tidak—"gaya mengajar"nya mendorong tokoh-tokoh lain yang potensial untuk menjadi Guru Bangsa terpaksa menyingkir atau tersingkir. Kita semua masih ingat ketika pada 1 Desember 1956 Bung Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. "Kepergian" tokoh-tokoh lain di seputar Bung Karno—seperti Sjahrir, Amir Syarifuddin, Tan Malaka, Moh Natsir, dan sebagainya—mungkin bisa dilihat juga dari kacamata ini.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Tuntutan kelompok Permesta pada 1957-58 agar Dwifungsi Sukarno-Hatta dikembalikan justru dijawab dengan hantaman militer. Cukup ironis bahwa bersamaan dengan pemberian kuliah-kuliah tentang Pancasila itu orang-orang yang berada di lingkaran Sukarno jumlahnya makin kecil. Banyak dari mereka datang dari antara para pejabat dan pemimpin partai yang acapkali terlibat tuduhan korupsi, atau tokoh-tokoh PKI, atau orang-orang militer Angkatan Darat, seperti misalnya Jenderal Nasution.

Tepat sebagaimana yang terungkap dalam sub judul buku ini, revolusi yang diperjuangkan oleh Bung Karno berlangsung sebagai *revolusi nasional* dan bukan *revolusi sosial*. Meskipun dalam berbagai kesempatan ia menghendaki lahirnya revolusi sosial, sebagaimana yang ia katakan pada tanggal 26 Mei 1958,[21] yang terwujud dalam realitas Indonesia adalah revolusi nasional. Artinya, perjuangan revolusi yang dipimpin oleh Bung Karno berhasil mengusir penjajah asing dari bumi Indonesia, tetapi struktur-struktur sosial-politis yang muncul dalam Indonesia merdeka tetap saja mirip dengan struktur-struktur sosial-politis yang ada di zaman kolonial. Hanya para pelakunya saja yang berganti, yakni para pelaku asing (Belanda) diganti dengan pelaku pribumi Indonesia, khususnya Jawa. Elite politik yang dulu terdiri dari penguasa kolonial Belanda diganti dengan elite pribumi, sementara rakyat di tingkat bawah tidak banyak mengalami perubahan secara sosial, politik maupun ekonomi. Mungkin seperti si rakyat jelata dalam Revolusi Prancis.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Keputusan-keputusan Fatal

Sebagai Guru Bangsa terkadang Bung Karno tidak lagi kritis terhadap "murid-murid"nya, terutama mereka yang suka mendekatinya tetapi sebenarnya sudah berbekal agendanya sendiri. Ia, misalnya, tidak lagi kritis terhadap tokoh-tokoh kiri dan orang-orang Angkatan Darat di sekelilingnya. Berkaitan dengan orang-orang Angkatan Darat ini Bung Karno bahkan mengambil setidaknya tiga keputusan yang kemudian dapat dikatakan sebagai berakibat "fatal"—bagi dirinya dan juga bagi bangsa Indonesia pada umumnya. *Pertama*, keputusannya untuk mendukung diberlakukannya SOB atau Undang-Undang Darurat Keadaan Perang pada 14 Maret 1957, suatu keputusan yang sebenarnya muncul atas desakan Nasution.[22] Dengan persetujuannya memberlakukan SOB ini ia memberi keleluasaan pada Angkatan Darat untuk memperluas gerak dan pengaruh politiknya atas nama keamanan dan ketertiban negara.[23] Sebagaimana dikatakan oleh Peter Dale Scott, dosen UC-Berkeley, AS, dan pengamat Indonesia, SOB ini menandai "mulai menyusupnya militer dalam pentas politik, ekonomi dan kehidupan sosial, [yang] di belakang hari [terbukti] kebablasan [dan] sudah tak bisa diubah lagi."[24]

Kedua, keputusan untuk membiarkan Angkatan Darat mengambil alih aset perusahaan-perusahaan asing yang disita pada akhir tahun 1957. Dengan penguasaan atas aset-aset asing ini Angkatan Darat—yang sejak tahun 1952 telah berambisi untuk ikut bermain langsung dalam bidang politik—kini memiliki modal sendiri untuk mengongkosi gerakan-gerakan politiknya. Tentang ambisi politis tentara ini Indonesianis Daniel Lev menegaskan, "Pokoknya sebelum

www.facebook.com/indonesiapustaka

tahun 1956 tentara sudah merupakan semacam kelompok politik, dan bukan hanya kelompok militer profesional."[25]

Ketiga, gagasannya mengenai Demokrasi Terpimpin dan pelaksanaannya secara resmi setelah diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.[26] Di bawah Jenderal Nasution, Angkatan Darat amat mendukung Dekrit Presiden, karena dengan kembali ke UUD '45 Presiden akan memiliki kekuasaan yang lebih penuh, sementara Angkatan Darat makin yakin bahwa ia akan mampu memengaruhi Presiden.[27] Dan memang itulah yang kemudian terjadi. Oleh karena itu, tentu tidak kebetulan bahwa sejak 1959 Angkatan Darat kian sentral perannya dalam perpolitikan Indonesia, dengan puncaknya apa yang terjadi pada Bung Karno dan rakyat Indonesia pada tahun-tahun 1965-67. Bung Karno terus didesak ke pinggir, ratusan ribu rakyat Indonesia dibantai. Selama tiga puluh tahun kemudian Angkatan Darat bahkan menjadi kekuatan dahsyat yang represif, dan nyaris tak terbendung oleh rakyat atau siapa pun.

Perang Dingin

Ketika ditanya soal Bung Karno dan masa pemerintahan-nya yang sering disebut sebagai "Orde Lama" itu, dengan singkat tetapi jelas Pramoedya Ananta Toer mengatakan, "bicara soal Orde Lama tanpa menghubungkannya dengan Perang Dingin itu korup."[28] Bung Pram melihat, banyak unsur yang ikut bermain di dalam dinamika politik dalam negeri maupun luar negeri pada zaman Bung Karno ditentukan oleh pasang-surut ketegangan dan konflik kepentingan pasca-Perang Dunia II antara pihak Barat-Kapitalis yang dikomandoi oleh Amerika dan dengan pihak Timur-Komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet dan Cina. Tetapi rupa-rupanya perhatian Bung Karno

www.facebook.com/indonesiapustaka

yang begitu besar kepada dirinya sebagai Guru Bangsa membuatnya kurang memperhatikan bahwa kemenangan PKI dalam Pemilu Nasional 1955 dan Pemilu Daerah 1957 telah benar-benar memengaruhi perhatian dan kebijakan para aktor utama Perang Dingin terhadap Indonesia. Di satu pihak, Cina dan Uni Soviet menyambut kemenangan itu dengan gembira hati karena merupakan tanda semakin berakar dan meluasnya komunisme di Indonesia khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya. Di lain pihak, bagi Amerika dan sekutu-sekutunya kemenangan itu meningkatkan kekhawatiran mereka akan "hilang"-nya Indonesia dari lingkaran pengaruh *(sphere of influence)* Barat.[29] Dalam pola pikir teori domino, hilangnya Indonesia juga akan berarti terancamnya kepentingan-kepentingan Barat di Asia Tenggara.

Rupa-rupanya tanpa sepenuhnya disadari oleh Sukarno, pihak Uni Soviet dan Cina mulai mendekati PKI dan Sukarno sendiri. Caranya antara lain adalah melalui berbagai undangan dan kunjungan bilateral, termasuk kunjungan Khrushchev selama 11 hari di Indonesia pada bulan Januari 1960. Sementara itu pihak Barat (khususnya Amerika) mulai membina hubungan intensif dengan pihak Angkatan Darat, antara lain melalui bantuan dan training-training militer guna meng-*counter* perkembangan PKI yang menurut mereka didukung oleh Sukarno. Sedikit demi sedikit panggung ketegangan pun dibangun. Dan pada tahun 1965-66 panggung itu dijadikan arena pertarungan berdarah antara PKI dan Angkatan Darat yang sepenuhnya didukung Barat. Bung Karno pun terkejut tetapi terlambat. Dan akhirnya Guru Bangsa yang besar ini disingkirkan sepenuhnya dari panggung kekuasaan: Ia pun

www.facebook.com/indonesiapustaka

wafat sebagai seorang tahanan politik yang miskin, ditinggalkan oleh sebagian besar orang yang dulu tampak dengan sepenuh hati mendukungnya.[]

Catatan Akhir:

1 Versi awal dari bab ini pernah disampaikan sebagai makalah dalam rangka acara bedah buku Pamoe Rahardjo dan Islah Gusmian, (ed.). *Bung Karno dan Pancasila: Menuju Revolusi Nasional* (Yogyakarta: Galang Press, 2002) di Bentara Budaya, Yogyakarta, 28 Juni 2002; serta dalam *Kompas* 6 Juni 2003.

2 Lihat misalnya, Pamoe Rahardjo dan Islah Gusmian (ed.), *Bung Karno dan Pancasila: Menuju Revolusi Nasional* (Yogyakarta: Galang Press, 2002).

3 Rahardjo dan Gusmian, h. 30. Beberapa kali Bung Karno mengatakan bahwa sila-sila itu hanya merupakan usulan darinya. Ia terbuka terhadap usulan-usulan lain.

4 Rahardjo dan Gusmian, h. 34.

5 Tentang pengaruh ketiga dokumen itu lihat juga Pramoedya Ananta Toer, "Perlawanan dan Penindasan," dalam Baskara T. Wardaya, (ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 40.

6 Rahardjo dan Gusmian, h. 24.

7 Rahardjo dan Gusmian, h. 111.

8 Rahardjo dan Gusmian, h. 72-73.

9 Rahardjo dan Gusmian, h. 19-22.

10 Rahardjo dan Gusmian, h. 203-207.

11 Rahardjo dan Gusmian, h. 198-99.

12 Rahardjo dan Gusmian, h. 93-107; 233-244.

13 Rahardjo dan Gusmian, h. 162-63; 237-38.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[14] Rahardjo dan Gusmian, h. 167-70.

[15] Rahardjo dan Gusmian, h. 230-231.

[16] Rahardjo dan Gusmian, h. 67.

[17] Rahardjo dan Gusmian, h. 317.

[18] Lihat misalnya "Telegram from the Embassy in Indonesia to the Department of State," March 19, 1958, dalam Robert J. McMahon, Ed. *Foreign Relations of The United States, 1958-1960,* Volume XVII Indonesia (Washington: United States Government Printing Office, 1994), h. 74-80.

[19] Rahardjo dan Gusmian, h. 126.

[20] Rahardjo dan Gusmian, h. 128.

[21] Waktu itu antara lain Bung Karno mengatakan, "Revolusi Indonesia, kataku, adalah revolusi seluruh rakyat." Rahardjo dan Gusmian, h. 45.

[22] Audrey R. Kahin dan George McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia* (New York: The New Press, 1995), h. 67.

[23] Yang digunakan sebagai salah satu alasan pemberlakukan SOB adalah diumumkannya pemberontakan "Permesta" pada tanggal 5 Maret 1957, yang pada mulanya adalah problem internal di kalangan Angkatan Darat sendiri.

[24] Peter Dale Scott, "Sukarno dan Pancasila Masih Tetap Memimpin Indonesia Masakini," dalam Joesoef Isak, Ed., 100 Tahun Bung Karno (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), h. 25. Scott adalah mantan diplomat Kanada yang pernah mengadakan studi mengenai konspirasi antara CIA dengan Soeharto dalam penggulingan Sukarno. Lihat Peter Dale Scott, "Peran Amerika Serikat dalam Penggulingan Sukarno, 1965-1967," dalam Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: Hasta Mitra, 2001), h. 278-316.

[25] Daniel Lev, "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik," dalam Baskara T. Wardaya, (ed.), *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Gremedia, 2001), h. 171.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[26] Scott, h. 25.

[27] Untuk uraian lebih lengkap mengenai proses menuju diumumkannya Demokrasi Terpimpin, lihat misalnya Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962), 538, 541; juga analisis Feith, di halaman 591-608.

[28] Toer, h. 52-53.

[29] Tentang upaya-upaya Amerika untuk mencegah "hilang"-nya Indonesia itu lihat misalnya "Memorandum From the Joint-Chiefs of Staff to Secretary of Defense McNamara," September 5, 1962, dalam Edward C. Keefer, (ed.), *Foreign Relations of the United States, 1961-1963*, Volume XXII, Southeast Asia (Washington: United States Government Printing Office, 1994), h. 628-631.

www.facebook.com/indonesiapustaka

SUKARNO, SOEHARTO DAN PENGUASA TUNGGAL[1]

... Saya semakin berpikir bahwa Bung Karno agak menderita waktu itu. Karena pada akhirnya dia tidak bisa banyak mempengaruhi keadaan. Pertama, karena dia tidak mempunyai organisasi yang baik, yang efektif, yang selalu bisa dikerahkan. Kedua, saya tidak yakin Bung Karno punya suatu imajinasi politik yang sangat jauh. Seperti orang lain juga, dia sangat terikat pada ide-ide kolonial tahun 1920-30-an … Ketiga, dia memang terlalu banyak dipengaruhi oleh penjilat di sekitarnya.

Daniel Lev (1999)

SEBAGAIMANA telah kita bahas, pada masa mudanya Sukarno penuh dengan gagasan-gagasan sosial-politik yang amat egaliter penuh semangat pergerakan. Hal itu tampak dalam pandangan-pandangannya yang amat kritis tentang kolonialisme, imperialisme dan elitisme pada zamannya. Gagasan-gagasan egaliter itu pulalah yang mendasari kedudukannya sebagai Presiden pertama Republik ini. Menariknya, dalam perjalanan waktu sebagai Presiden, Sukarno cenderung bersikap otoritarian. Sukarno muda yang demokratis digeser oleh Sukarno tua yang berperilaku anti-demokrasi dan bergaya seperti seorang "penguasa tunggal"

www.facebook.com/indonesiapustaka

(*strongman*).[2] Gagasan-gagasan egaliter yang dulu amat mewarnai pandangan-pandangan serta kiprah politiknya sedikit demi sedikit berkurang, dan digantikan dengan sikap dan tindakan-tindakan satu arah yang sentralistis.

Pada saat yang sama, betapa pun tidak demokratisnya Presiden Sukarno pada "periode tua"-nya, ia masih "lumayan" dibandingkan dengan penggantinya, yakni Presiden Soeharto. Jika Sukarno memiliki sejumlah konsep politik bahkan gagasan-gagasan filosofis yang cukup jelas, Soeharto nyaris tak dikenal sebagai orang yang memiliki filosofi politik yang menonjol. Sejak awal pemerintahannya sebagai presiden pendekatan yang ia pakai murni otoritarian, bahkan militeristik. Dengan kata lain, sejak awal ia sudah bersikap sebagai "penguasa tunggal" yang cenderung anti-rakyat.

Semangat Egaliter dan Ide-Ide Universal

Jelas sekali bahwa sejak masa mudanya Sukarno muda menolak berbagai bentuk stratifikasi sosial yang bersifat diskriminatif terhadap warga masyarakat. Ia ingin melawan kecenderungan demikian dan menggantinya dengan pola-pola relasi sosial yang lebih egaliter, yang lebih demokratis. Ia pun rajin melawan sikap-sikap non-demokratis yang ada di antara para aktivis perjuangan itu sendiri. Bersama para aktivis pergerakan yang lain, misalnya, ia lebih suka disapa dengan sebutan "Bung" sebagai ungkapan sikap egaliter di kalangan pejuang kemerdekaan maupun rakyat pada umumnya.

Dalam semangat egaliter itu Sukarno muda menaruh perhatian yang besar pada rakyat kecil. Ia menolak sikap yang memandang rendah rakyat. Sebagaimana terungkap dalam gagasan Marhaenisme, Sukarno menaruh perhatian khusus

www.facebook.com/indonesiapustaka

kepada rakyat kecil yang miskin, karena merekalah yang merupakan bagian terbesar dari bangsanya yang terjajah itu. Dalam kaitan dengan hal ini kiranya dapat dikatakan bahwa pengutamaan terhadap rakyat kecil inilah yang menjadi salah satu faktor yang membedakan Sukarno muda dengan tokoh-tokoh pergerakan lain pada zamannya, khususnya mereka yang lama belajar di Eropa. Apalagi ketika kembali ke tanah air mereka yang belajar di Eropa itu jarang berkesempatan untuk bersentuhan langsung dengan rakyat banyak. Berbeda dengan Hatta dan Syahrir, misalnya, Sukarno menolak pendekatan intelektual-elitis yang bergaya Eropa. Ia lebih suka untuk bertemu dan berbicara langsung dengan massa rakyat.

Sukarno muda kaya dengan ide-ide yang sifatnya universal, misalnya perjuangan melawan kolonialisme, perlunya persatuan dalam perjuangan, serta kesediaan untuk belajar dari bangsa-bangsa lain. Sampai pada pertengahan 1921, sebenarnya Sukarno belum sepenuhnya menolak pemerintah kolonial Belanda. Saat itu ia masih berharap bahwa pemerintah kolonial Belanda mau memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Ia masih melihat pentingnya Belanda dalam membantu bangsa Indonesia sebelum ia mampu berdiri sendiri.[3] Tetapi pada 1923 Sukarno mulai meninggalkan posisi moderat itu dan mengambil langkah non-kooperasi.[4] Ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi. Oleh karena itu, mereka tak akan dengan sukarela melepaskan tanah jajahannya. Oleh karena itu ia yakin bahwa perjuangan kemerdekaan tidak dapat ditunda-tunda lagi.[5] Sebagai bagian dari perjuangan itu, pada September 1927, dalam Kongres Sarekat Islam di Pekalongan,

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sukarno mengajak kaum pergerakan untuk bersatu dan membentuk apa yang ia sebut sebagai "Front Coklat" *(Bruine Front)* guna melawan kaum kapitalis kulit putih.[6] Ia melihat semakin memburuknya hubungan antara bangsa terjajah kulit coklat dan bangsa penjajah kulit putih. Semakin kuat anta-gonisme bangsa kulit coklat ini dalam menyodorkan "anti-tesis" terhadap kolonialisme Barat, menurutnya, akan semakin jelas pula arah perjuangan bangsa terjajah.[7]

Dalam sikapnya yang bisa dikakatan *fair*, Sukarno muda tidak hanya kritis terhadap bangsa asing, tetapi juga terhadap bangsa sendiri, terutama menyangkut soal kapitalisme itu. Ia, misalnya, melihat bahwa kapitalisme tidak hanya dipraktikkan oleh bangsa asing, melainkan juga oleh bangsa sendiri. Sama seperti kapitalisme asing, menurut Sukarno muda, kapitalisme pribumi sama-sama mempermiskin rakyat. Dalam tulisannya yang berjudul "Kapitalisme Bangsa Sendiri?" ia menegaskan bahwa kapitalisme pribumi juga harus dilawan jika perlawanan terhadapnya membantu dalam menentang imperialisme pada umumnya. Kelak ketika Indonesia mampu memerintah sendiri, salah satu hal pokok yang perlu dilakukan menurutnya adalah menghapus kapitalisme. "Apa gunanya bisa memiliki pemerintahan sendiri," tanyanya, "kalau ternyata kita tetap dikuasai oleh para pendukung kapitalisme dan imperialisme?"[8]

Sukarno muda menyadari perlunya menggalang persatuan di antara para pejuang kemerdekaan. Ia berharap bahwa golongan Nasionalis, Agama (Islam) dan Komunis bersama-sama menentang kapitalisme dengan segala prinsipnya. Ia berpendapat, "Secara teoretis, nilai tambah merupakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

perampasan atas hasil kerja orang lain dan pengingkaran terhadap hak buruh atas nilai yang diperoleh dari hasil kerjanya", dan itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama.[9] Dalam *Nasionalisme, Islam dan Marxisme* Sukarno ingin menunjukkan bahwa "di negeri-negeri terjajah, konsep Nasionalisme, Islam dan Marxisme bersinggungan dalam sejumlah hal", dan oleh karena itu ketiganya harus bersatu dalam perjuangan melawan penjajah kapitalis.[10] Sukarno melihat adanya perbedaan di antara ketiganya. Nasionalisme menekankan pentingnya batas-batas dan kepentingan nasional; Islam pada dasarnya bersifat universal dan menolak batas-batas nasionalitas tetapi juga menolak materialisme ala Marx; Marxisme: bersifat universal, menolak batas-batas nasionalisme tetapi sekaligus juga menolak konsep-konsep religius Islam. Meskipun demikian, ia mengajak ketiganya untuk bersatu dan bahu-membahu.

Kecenderungan sebagai Penguasa Tunggal

Sulit kiranya menghindari kesan bahwa pada paro kedua dari masa jabatannya sebagai Presiden—khususnya sejak 1955—Bung Karno makin condong ke arah kepemimpinan yang berciri penguasa tunggal. Kesabarannya terhadap sistem parlementar makin menipis, digantikan dengan cara-cara pengambilan keputusan yang terpusat—entah oleh dirinya sendiri maupun oleh sekelompok kecil orang yang ada di sekelilingnya. Ia semakin meninggalkan dan ditinggalkan oleh teman-teman sesama aktivis pergerakan untuk kemerdekaan. Bung Hatta yang dulu adalah teman seperjuangan dan yang setelah kemerdekaan bahkan menjadi "dwitunggal" bersamanya, kini semakin berseberangan dengannya. Sebagai-

www.facebook.com/indonesiapustaka

mana diketahui pada 26 Juli 1956 Hatta mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, dan pada 1 Desember tahun itu dia benar-benar melaksanakan niat itu. Menarik bahwa pengunduran diri Hatta ini tidak mendorong Presiden Sukarno untuk menunjuk Wakil Presiden yang baru. Tampaknya ia "tak keberatan" berada di pucuk pemerintahan sendirian, melaksanakan gagasan-gagasan politiknya nyaris tanpa oposisi. Pun kini sebutan "Paduka Yang Mulia" menjadi lebih akrab dengan Sang Presiden daripada panggilan "Bung" yang egaliter dan dulu digemari oleh Sukarno muda itu.

Ketika pada November 1956 Konstituante yang telah dipilih dan ditunjuk untuk menyusun UUD baru menunjukkan tanda-tanda kemacetan, Sukarno lebih banyak melihat alotnya perdebatan dan tidak memberi perhatian yang cukup pada tema-tema yang dibicarakan dalam Konstituante itu. Sebaliknya, ia justru mendorong diakhirinya politik partai dan mulai mengusulkan apa yang ia sebut sebagai "Demokrasi Terpimpin," di mana terdapat kemungkinan besar bahwa ia sendiri akan tampil sebagai pemimpinnya.[11] Ia pun mulai mengajak untuk "menguburkan partai-partai". Sukarno yang pada masa mudanya sangat anti sikap elitis, non-demokratis, dan feodalistik itu kini bergeser menjadi pemimpin yang tidak lagi sabar dengan proses-proses demokrasi. Bersamaan dengan itu, Sukarno juga mulai menawarkan gagasan atau "konsepsi"-nya sendiri mengenai politik di Indonesia dengan harapan bahwa konsepsi itu dapat diterapkan tanpa adanya banyak kritikan. Ketika pada 21 Februari 1957 Sukarno secara formal mengumumkan konsepsinya, memang ada sejumlah

www.facebook.com/indonesiapustaka

pihak yang berusaha melawan, tetapi perlawanan itu segara dihambat oleh mereka yang mendukungnya.[12]

Pada 2 Maret 1957 di Sulawesi Letnan Kolonel Sumual mengumumkan "Piagam Perjuangan Semesta Alam" atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Permesta." Meskipun dalam piagam itu sama sekali tak ada niat untuk memisahkan diri dari pemerintah Indonesia, tanggapan Sukarno bersifat keras. Kurang dari dua pekan kemudian (14 Maret 1957) ia bahkan memberlakukan SOB *(Staat van Orloog en Beleeg)* atau Undang-undang Keadaan Perang. Selain itu Sukarno mulai memberlakukan kembali sensor terhadap media massa. Ketika pada tanggal 15 Februari 1958 di Sumatra Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) mengumumkan pemerintahan tandingan, Sukarno juga menuntut suatu tindakan militeristik untuk menghancurkan pemberontakan itu.

Pengumuman Dekrit pada 5 Juli 1959 tentu merupakan titik yang penting berkaitan dengan gaya kepemimpinan Sukarno sebagai penguasa tunggal. Dengan dekrit itu ia membubarkan Konstituante, serta memberlakukan kembali UUD '45. Ia pun membubarkan MPR dan menggantinya dengan MPRS. Sukarno menambahkan 94 anggota untuk mewakili daerah, serta 200 orang lain untuk mewakili "golongan karya". Ditambah dengan jumlah anggota MPR yang asli, yakni 281, jumlah total anggota MPR yang baru menjadi 575 orang, di mana sebagian besar adalah orang-orang pilihan Presiden. Kembalinya RI ke UUD '45 berarti juga kembalinya Indonesia ke sistem presidensial, di mana Sukarno sebagai presiden akan kembali memiliki kekuasaan

www.facebook.com/indonesiapustaka

yang jauh lebih besar. Pada saat ini banyak pejabat lokal yang juga merupakan hasil pe-nunjukan dari atas. Sukarno pun menunjuk dirinya sebagai Perdana Menteri, sementara Ir. Juanda ia angkat sebagai "Menteri Pertama". Pada bulan berikutnya, 17 Agustus 1959, Presiden Sukarno mengumumkan "Manifesto Politik" (Manipol). Sebagai sebuah ideologi, sebenarnya Manipol sendiri tidak terurai secara jelas, tetapi koran-koran yang tak mendukungnya dibungkam oleh penguasa tunggal Sukarno dan para pendukungnya.

Pada Januari 1960 Sukarno kembali menunjukkan sikap yang sama. Waktu itu DPR menolak Rencana Anggaran Belanja yang diajukan olehnya. Sebagai serangan balasan, pada bulan Maret ia membubarkan DPR dan menggantinya dengan "DPR-Gotong Royong". Banyak anggota DPR-GR ini ditunjuk oleh Presiden, termasuk personel militer.[13] Dan inilah mulainya perwira militer menjadi anggota DPR. Pembubaran Masyumi dan PSI secara sepihak pada 17 Agustus 1960 (dan kelak pembubaran Partai Murba pada tahun 1965) tentu tak dapat dilepaskan dari sikap kekuasaan bergaya penguasa tunggal ini. Demikian pula ketika pada Juni 1961 ia menegaskan haknya untuk mengirim orang yang menentangnya ke pembuangan dalam negeri. Menarik bahwa suatu cara pembungkaman politis yang dulu dipraktikkan oleh penjajah Belanda dan ditentang oleh Sukarno muda, kini justru diterapkan oleh Sukarno tua terhadap bangsanya sendiri. Penguasa tunggal Sukarno pun tidak merasa *rikuh* ketika pada Juni 1963 MPR mengangkatnya sebagai Presiden Seumur Hidup, suatu praktik yang jelas bertentangan dengan masyarakat demokratis yang ia cita-citakan.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Soeharto dan Politik Penguasa Tunggal

Kecenderungan sebagai penguasa tunggal yang ada dalam cara memerintah Sukarno pada paro kedua masa jabatannya ternyata tampak jelas dalam cara memerintah penggantinya, yakni Presiden Soeharto. Lain dengan Sukarno yang pada masa mudanya kaya dengan catatan-catatan berisi gagasan-gagasannya mengenai perjuangan dan masa depan Indonesia sebagai suatu komunitas politis, tidak banyak yang kita bisa temukan berkaitan dengan ide-ide Soeharto muda mengenai politik Indonesia. Kita hanya tahu bahwa sekolah maupun karirnya tidak terlalu lancar, sampai ia bergabung dengan KNIL yang adalah pasukan kolonial untuk melindungi kepentingan Belanda dan menekan potensi perlawanan rakyat Indonesia. Pada 1943 ia masuk PETA yang adalah bentukan Jepang, dan ketika Indonesia merdeka ia bergabung dengan TNI. Pada Desember 1956 ia memperoleh posisi yang tinggi di jajaran militer—yakni sebagai Pangdam Diponegoro—dan segera tampaklah kecenderungannya sebagai pemimpin model penguasa tunggal. Ia menyalahgunakan kedudukannya untuk korupsi. Ketika pada Agustus 1959 tim anti-korupsi yang dipimpin oleh Nasution mengadakan penyelidikan, terbuktilah bahwa Soeharto terlibat korupsi besar, dan pada bulan November tahun itu Sang Pangdam pun "diamankan" ke SESKOAD Bandung.

Pengamanan Soeharto di SESKOAD dan penunjukkannya sebagai Pangkostrad pada 1961 ternyata tidak meluruhkan hasratnya untuk menjadi penguasa tunggal. Berkaitan dengan "Gerakan 30 September" (G30S), misalnya, kini terdapat dugaan yang semakin kuat di masyarakat bahwa Soeharto,

www.facebook.com/indonesiapustaka

seandainya pun tidak terlibat, setidaknya tahu tentang rencana-rencana gerakan itu. Dugaan juga sama kuatnya bahwa sebenarnya Soeharto tahu banyak tentang rencana pembunuhan massal rakyat Indonesia—apa pun ideologi mereka—yang dimulai sejak pertengahan Oktober 1965 itu. Pada 6 Maret 1966 si calon penguasa tunggal nomor satu di Indonesia ini sudah berani "memperingatkan" Presiden Sukarno dengan mengatakan bahwa sedang berlangsung ketidakpuasan di kalangan perwira ABRI. Sebagai tanggapan atas "peringatan" itu, pada tanggal 8 Maret Sukarno balik memperingatkan para perwira ABRI bahwa ia masih menjabat sebagai Presiden RI.

Toh rupa-rupanya penguasa tunggal sipil Sukarno ini bukan tandingan kalau dihadapkan dengan penguasa tunggal militer Soeharto dan para pendukungnya yang juga sesama militer. Pada 11 Maret 1966 tiga (atau empat?) orang mayor jenderal Angkatan Darat yang pro-Soeharto mendesak Sukarno agar menandatangani sebuah "surat perintah" yang dalam praktiknya nanti akan memberikan keleluasaan bagi Soeharto untuk mengambil berbagai tindakan militer dan politik sepihak.[14] Dengan surat perintah 11 Maret itu pada hari berikutnya (12 Maret) Soeharto langsung membubarkan PKI, sebuah partai politik yang sampai waktu itu adalah partai yang legal. Pada 18 Maret ia menahan Subandrio dan sebagian besar anggota kabinet Sukarno. Bulan April ditandai dengan penangkapan para pendukung Sukarno yang ada dalam tubuh PNI, Divisi Diponegoro, maupun di DPR/MPR. Pada 21 Juni MPR bahkan "menyetujui" transfer kekuasaan dari Sukarno ke Soeharto berikut pembubaran PKI. Pada Oktober

www.facebook.com/indonesiapustaka

1966 Subandrio dijatuhi hukuman mati, meskipun tidak dieksekusi, sementara Omar Dhani mendapat hukuman serupa pada Desember, meskipun juga tak jadi dieksekusi.[15] Nasib lain menimpa Soumokil. Pada Desember itu pula bekas pemimpin Republik Maluku Selatan ini dihukum mati oleh Soeharto dan kawan-kawan. Akhirnya, pada 12 Maret 1967 MPR mencabut seluruh kekuasaan yang ada pada Sukarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Dengan demikian resmilah kedudukan Soeharto sebagai penguasa tunggal Indonesia.

Kedudukan ini pun menjadi semakin kokoh ketika pada Agustus 1967 ia menempatkan seluruh jajaran militer di bawah kontrolnya. Sebelum itu Soeharto bahkan sempat membentuk "Kopkamtib" (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang tujuan awalnya adalah untuk melacak para anggota PKI. Dalam perkembangan selanjutnya Kopkamtib ini digunakan sebagai alat politik, termasuk menekan kebebasan pers. Soeharto kemudian bahkan memperluas kerja kelompok-kelompok khusus militer dengan membentuk "Opsus" (Operasi Khusus). Satuan yang kelak akan dipimpin oleh Jenderal Ali Murtopo ini dalam praktiknya banyak digunakan oleh pemerintah Soeharto untuk melakukan operasi-operasi militer tertutup. Diduga bahwa salah satu "proyek" Opsus itu adalah penanganan terhadap Peristiwa 15 Januari 1974—demo anti-pemerintah dan anti-Jepang—yang mengakibatkan tewasnya paling tidak 11 orang.

Proyek Opsus yang jauh lebih besar tentunya adalah proyek penyerbuan Timor Timur. Pada bulan Oktober 1975

www.facebook.com/indonesiapustaka

Angkatan Darat Indonesia sudah mulai menginfiltrasi Timor Timur, wilayah di luar Indonesia yang baru saja ditinggalkan oleh penjajah Portugis. Bulan November kelompok Fretilin mengumumkan kemerdekaan Timor Timur serta menuntut ditariknya satuan-satuan militer Indonesia di wilayah itu. Jawaban yang diberikan pihak Angkatan Darat pada bulan Desember bukannya penarikan pasukan, melainkan justru invasi militer penuh ke Timor Timur. Tentara Indonesia kemudian menduduki wilayah itu serta membentuk pemerintahan baru yang pro-pemerintah Soeharto, dengan akibat jangka panjang tewasnya sekitar sepertiga penduduk wilayah itu. Pada Juli 1976 secara resmi (dan kurang-lebih sepihak) pemerintah Soeharto memasukkan Timor Timur sebagai "provinsi ke 27" RI. Perlu dicatat bahwa persiapan maupun seluruh operasi invasi wilayah asing ini tidak pernah dikonsultasikan secara terbuka dengan rakyat maupun wakil mereka di parlemen. Hanya penguasa tunggal Soeharto dan orang-orang lingkaran terdekatnya yang tahu dan dilibatkan.

Sebagai penguasa tunggal rupa-rupanya Soeharto tak mau dianggap enteng, bahkan oleh sesama militer yang dekat dengannya. Pada Februari 1976, misalnya, ketika diadakan pertemuan para pemimpin negara ASEAN di Denpasar, Bali Direktur Pertamina waktu itu, Kolonel Ibnu Sutowo, muncul dengan helikopter dan menjemput Presiden Ferdinand Marcos dari Filipina untuk main golf tetapi tanpa mengajak Soeharto. Konon Soeharto tersinggung dan tak pernah mau memaafkan "dosa" Sutowo ini. Dalam beberapa hari (3 Maret 1976) "orang kuat" di dunia perminyakan itu dicopot sebagai direktur Pertamina. Sang Kolonel sendiri sebenarnya memang

www.facebook.com/indonesiapustaka

pernah diadili karena kuatnya tuduhan korupsi di lingkungan Pertamina yang dipimpinnya. Pada 20 Mei 1975, dalam laporan kepada MPR terungkap bahwa ternyata Pertamina menanggung utang yang luar biasa jumlahnya, yakni 10 milyar dollar, di mana uang utangan itu kebanyakan digunakan untuk usaha-usaha yang *tidak* terkait dengan urusan minyak. Aneh (tetapi tidak bin ajaib), pada Juli 1978 Kolonel Ibnu dibebaskan dari tuduhan korupsi di Pertamina. Banyak orang menduga bahwa jika Kolonel Ibnu dijebloskan ke penjara, ia akan "bernyanyi," antara lain dengan berkisah tentang "orang-orang terhormat" lain yang juga menikmati uang rakyat yang bocor (tepatnya: dibocorkan) lewat pipa-pipa minyak Pertamina. Tidak kecil kemungkinan bahwa di antara orang-orang terhormat itu ada yang dekat dengan si Penguasa tunggal RI waktu itu.

Cara memimpin yang berciri penguasa tunggal membuat Soeharto dan para pengikutnya tidak tahan kritik, apalagi jika ada indikasi bahwa kritik itu benar. Hal ini tampak, umpamanya, ketika pada 18 Januari 1978 Senat Mahasiswa ITB menerbitkan "Buku Putih" yang berisi kritik terhadap pemerintahan Soeharto dan tuntutan supaya Soeharto mundur. Kritik itu ditanggapi dengan dikirimnya tentara pro-Soeharto ke kampus ITB dan menduduki kampus tersebut. Selain itu tentara juga menangkapi sejumlah aktivis mahasiswa di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta dan Medan. Sejumlah koran dibreidel selama seminggu.

Soeharto tidak hanya berusaha menepis kritik yang datang dari dalam negeri. Ia juga berusaha keras mengelak dari kritik yang datang dari negara-negara lain. Contoh mengenai hal

www.facebook.com/indonesiapustaka

ini dapat dilihat dari reaksi Soeharto dan pemerintah Orde Baru terhadap artikel yang terbit di koran Australia *Sydney Morning Herald* edisi 10 April 1986 yang membeberkan korupsi yang dilakukan Soeharto beserta keluarga dan *konco-konco*nya. Terhadap artikel itu Orba menyatakan kemarahan dengan akibat memburuknya hubungan Indonesia-Australia. Pada bulan berikutnya sebuah pesawat yang berisi turis Australia disuruh balik ke negeri asalnya setelah pesawat itu mendarat di Denpasar, Bali. Sementara itu pemerintah Orba berhasil menimbulkan perasaan umum, di mana dengan dalih nasionalisme (yang telah diplintir tentu saja) banyak orang Indonesia membela penguasa tunggal Soeharto dan para pendukungnya. Dengan dalih yang sama orang juga setuju-setuju saja ketika pada April 1992 Soeharto membubarkan IGGI gara-gara banyak negara Barat (khususnya Belanda) mengkritik pelanggaran HAM di bawah pemerintah Orba.

Sebagai penguasa tunggal, Soeharto berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara. Salah satu cara yang ia tempuh adalah membina hubungan khusus dengan Golkar. Meskipun tidak secara resmi diusahakan supaya tidak disebut sebagai partai politik (sehingga memiliki ruang gerak sosial-politik yang lebih luas), dalam praktiknya Golkar merupakan partai politik dengan tujuan pokok mendukung tetap berkuasanya Soeharto bersama pemerintah Orbanya. Sejumlah besar keistimewaan politik yang diberikan oleh Orba memungkinkan Golkar untuk memenangi Pemilu secara "gemilang" dari 1971 hingga 1997. Pada gilirannya, kegemilangan dalam berbagai Pemilu itu memungkinkan Soeharto untuk "secara demokratis" terus-menerus dipilih

www.facebook.com/indonesiapustaka

Presiden Sukarno bersama Letjen. Soeharto

www.facebook.com/indonesiapustaka

menjadi Presiden sampai ke masa jabatan yang ketujuh. Setiap kali di masyarakat terdapat suara-suara untuk tidak mencalonkan lagi Soeharto sebagai presiden, aparat pemerintah Orba segera bertindak untuk "mengamankan" suara-suara itu. Ketika pada Januari 1993 para anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mendesak supaya partai itu tidak mencalonkan Soeharto lagi sebagai presiden, misalnya, pemerintah Orba pun lantas mendukung dibentuknya PDI yang lebih pro-Soeharto dan diketuai oleh Suryadi. Ketika pada permulaan 1984 Soeharto mendesak agar semua organisasi kemasyarakat menjadikan Pancasila sebagai dasarnya, banyak pihak menafsirkan desakan ini sebagai bagian dari usaha melanggengkan kekuasaan itu.

Sebagai bagian yang tak kalah penting dari usaha Soeharto dan Orba untuk mempertahankan kekuasaan tentu saja adalah strateginya untuk selalu memperoleh dukungan dari pihak militer, khususnya Angkatan Darat. Pada 27 Maret 1980 ia menganjurkan para perwira ABRI supaya mempertahankan kedudukan mereka di MPR, kalau perlu dengan kekerasan. Pada 1987 Jumlah anggota DPR pun dinaikkan. Dari 500 anggota, 100 di antaranya adalah perwira ABRI yang ditunjuk. Pada September 1988 Kopkamtib yang dulu dibentuk di sekitar Peristiwa '65 diganti dengan Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional) dan dipimpin oleh Jenderal Try Sutrisno, seorang loyalis Soeharto. Lain dengan Kopkamtib, Bakorstanas bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soeharto.

Apa boleh buat, betapa pun kerasnya usaha penguasa tunggal Soeharto dan teman-temannya untuk mempertahan-

www.facebook.com/indonesiapustaka

kan kekuasaan, ada kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar yang tidak selalu tunduk pada usaha kontrol Orba dan para pendukungnya. Ketika pada 1997 krisis moneter menghantam Thailand, krisis itu dengan cepat merembet ke Asia Tenggara termasuk Indonesia, dan memporak-porandakan ekonomi negeri ini.[16] Kerusakan ekonomi yang parah disertai kerusuhan-kerusuhan sosial-politis penuh kekerasan yang muncul di berbagai sudut negeri menunjukkan betapa rapuhnya Indonesia di bawah rezim Orde Baru dengan Soeharto sebagai penguasa tunggalnya. Pada 1997-98 berbagai upaya sipil, militer, maupun semi-militer yang brutal dan menuntut banyak korban dari kalangan rakyat tidak juga mampu menyelamatkan kekuasaan Soeharto dan Orbanya.[17] Sebagaimana kita ingat, pada 21 Mei 1998 Sang Penguasa tunggal, Soeharto, terpaksa turun takhta, disaksikan oleh jutaan pasang mata baik di negeri yang ia kuasai selama 32 tahun maupun negeri-negeri lain di dunia ini.

Berbeda

Bahwa baik Sukarno dan maupun Soeharto akhirnya cenderung menjadi semacam penguasa tunggal (atau *strongman*) pada akhir pemerintahan mereka adalah betul. Tetapi keduanya memiliki perbedaan yang esensial. Salah satu contohnya adalah bahwa sikap otoritarian Sukarno merupakan hasil proses panjang dan didorong oleh sejumlah faktor yang berkembang di luar dirinya. Sukarno pada masa muda bahkan hingga pada awal masa pemerintahannya cenderung untuk egaliter dan demokratis. Hanya pada masa tua ia mulai bergerak sebagai kepala pemerintahan yang bergaya penguasa tunggal. Soeharto berbeda. Bahkan sejak awal masa peme-

www.facebook.com/indonesiapustaka

rintahannya ia sudah menggunakan pendekatan militer. Ia naik ke tampuk kepemimpinan nasional dengan didahului oleh pertumbahan darah ratusan ribu rakyat Indonesia, di mana ia ambil peran yang amat besar. Sekaligus ia "setia" menggunakan gaya kepemimpinan penguasa tunggal yang militeristik itu sampai akhir pemerintahannya.[]

Catatan Akhir:

1 Versi awal dari tulisan ini pernah dibuat di rubrik rubrik Bentara, *Kompas,* 7 April 2004, h. 36.

2 The American Heritage Dictionary of the English Dictionary mendefinisikan *strongman* sebagai *"A powerful, influential political figure who exercises leadership and control by force."*

3 Bernhard Dahm. *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence.* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969), h. 42. Sikap demikian mungkin diambil karena pengaruh tokoh-tokoh moderat seperti Cokroaminoto dan C. Hartogh, kedua guru Sukarno muda. Dahm, h. 46.

4 Dahm, h. 49-50.

5 Dahm, h. 63.

6 Dahm, h. 81-83.

7 Dahm, h. 85.

8 *Utusan Hindia*, 6 Mei 1921, sebagaimana dikutip dalam Dahm, h. 42-43.

9 Sukarno, *Nationalism, Islam and Marxism (NIM)* (Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, 1970), h. 50.

10 Lihat Sukarno, *NIM*, h. 61.

www.facebook.com/indonesiapustaka

[11] Ada pendapat yang mengatakan bahwa istilah "Demokrasi Terpimpin" sendiri sebenarnya pertama kali dimunculkan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922.

[12] Sejumlah pengkritik Sukarno menyatakan bahwa Konsepsi adalah suatu upaya untuk memberi kekuasaan yang lebih besar kepada kelompok Komunis. Tetapi dalam praktik yang mendapatkan kekuasaan yang lebih besar melalui pelaksanaan Konsepsi itu nanti adalah Sukarno sendiri.

[13] Daniel Lev, "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik", dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 178.

[14] Nama-nama seperti M. Yusuf, Amir Machmud, M. Panggabean, dan Basuki Rachmat sering disebut-sebut dalam kaitan dengan persitiwa ini.

[15] Dr. H. Subandrio, *Kesaksianku Tentang G-30-S* (Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001).

[16] Krisis itu sendiri mulai pada Juli 1997 di Thailand, dan dengan cepat mempengaruhi Indonesia yang ekonominya tampak kuat tetapi sebenarnya rapuh. Nilai tukar rupiah merosot dari Rp 2.000,- menjadi Rp 4.000,- per satu dollar Amerika. Selanjutnya merosot terus. Pada bulan Januari 1998, ketika tersiar berita bahwa Habibie akan jadi Wapres, nilai tukar rupiah merosot menjadi Rp 17.000,- per dollar AS.

[17] Pada Februari 1998 kerusuhan terjadi di Jawa Timur, disusul dengan berbagai kerusuhan di Donggala, Sulawesi; Pasuruan, Jawa Timur; Sumbawa, Flores; sejumlah kota di Jawa Barat; Lombok; Kendari, dll. Kerusuhan di Jakarta dan Solo pada bulan April-Mei 1998 menimbulkan begitu banyak korban berjatuhan, entah terbunuh, entah diperkosa, dan sebagainya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

POLITIK PENGUASA TUNGGAL DAN MELEMAHNYA MASYARAKAT

Saya pikir, dalam suatu masyarakat yang sangat kompleks seperti Indonesia, tidak ada pilihan lain kecuali menjadi semacam negara hukum. Karena kalau tidak, maka semua akan tergantung pada paksaan, pada kekuatan, pada senjata. Tapi lama -kelamaan orang tidak akan mau menerima paksaan itu.

Daniel Lev (1999)

JELASLAH bahwa kepemimpian gaya penguasa tunggal *(strongman)* yang dipraktikkan oleh Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto sama-sama menimbulkan dampak negatif yang luas di masyarakat. Dalam kasus Bung Karno, di satu pihak kita memahami bahwa sikap-sikap penguasa tunggal yang diambil olehnya merupakan reaksi terhadap tekanan-tekanan politik dalam negeri (Angkatan Darat, PKI, dan partai-partai lain), maupun terhadap berbagai gejolak internasional, terutama berkaitan dengan Perang Dingin. Di lain pihak kita melihat bahwa pendekatan model pemimpin tunggal yang diambil itu menimbulkan akibat sosial-politis yang merugikan. Gaya kepemimpinan yang demikian rentan terhadap berbagai kelompok kepentingan yang ingin "membonceng" atau memanfaatkan Presiden

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sukarno demi mengejar kepentingan sendiri. Kelompok-kelompok yang membonceng itu misalnya Angkatan Darat, PKI, maupun partai-partai lain yang takut akan naiknya posisi politis PKI.

Politik "Pemboncengan"

Tampaknya dengan sengaja Angkatan Darat—khususnya Jenderal Nasution—mendukung Presiden Sukarno untuk tampil sebagai penguasa tunggal, karena dengan begitu militer bisa membonceng kekuasaan Sukarno demi memenuhi ambisi-ambisinya. Sebenarnya sudah sejak 1952 tentara, khususnya Angkatan Darat, berambisi untuk ikut aktif bermain dalam politik. Hal ini tampak dalam apa yang disebut sebagai Peristiwa 17 Oktober 1952, ketika Nasution dkk "menodong" Bung Karno dengan mengarahkan moncong meriam ke istana. Tetapi usaha ini gagal karena Bung Karno tidak mau tunduk pada todongan itu, dan Nasution malah sempat di-"parkir" oleh Presiden. Tetapi usaha Angkatan Darat ini mulai muncul lagi seiring dengan diaktifkannya kembali Nasution dan diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dengan pangkat Mayor Jenderal pada 27 Oktober 1955.

Karena desakan dari Nasution ini pulalah sebetulnya Bung Karno dan Kabinet Ali II memberlakukan SOB atau Undang-undang Keadaan Darurat Perang pada 1957.[1] Menurut ahli tentang 1950-an Daniel Lev, pemberlakuan SOB ini merupakan "kemenangan yang luar biasa untuk Jenderal A.H. Nasution."[2] Masih menurut Lev, sejak berlakunya SOB Angkatan Darat berkuasa di bidang politik, ekonomi, pers, dan sebagainya. Itu berarti makin banyak personel militer

www.facebook.com/indonesiapustaka

yang duduk sebagai anggota parlemen, gubernur, bupati, dan sebagainya.[3] Kampanye "Sita Modal Asing" berikut nasionalisasi aset-aset perusahaan Belanda dan Taiwan 1957-58 serta pengambilalihannya oleh Angkatan Darat lebih meningkatkan posisi politik dan ekonomi itu.[4] Merasa bahwa kedudukan tentara makin mantap, pada September 1958 Nasution mengumumkan pembekuan Masyumi di daerah-daerah yang telah mendukung PRRI dan Permesta. Pada 12 November 1958, dalam sebuah pidato di Magelang, Jawa Tengah, Nasution mengumumkan doktrin "Jalan Tengah" untuk tentara.[5] Melalui doktrin itu, ia berharap agar tentara bisa memiliki peran ganda sebagai kekuatan militer tetapi sekaligus sebagai kekuatan sosial-politik. Doktrin inilah yang kelak dikembangkan menjadi doktrin Dwi Fungsi ABRI, dengan segala dampak sosial-politiknya pada masyarakat.[6]

Kini semakin luas diakui bahwa Jenderal Nasutionlah orang yang sesungguhnya paling bertanggung jawab di balik pengumuman Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Bahkan pada Juli 1958 sebenarnya Nasution telah mengusulkan diberlakukannya kembali UUD '45. Hasrat untuk mengembalikan Indonesia ke UUD '45 itu tentunya didorong oleh kehendak supaya terjadi kembali pemusatan kekuasaan kepada Presiden. Dan berhubung ia yakin bahwa Presidennya yang bergaya penguasa tunggal itu nantinya bisa dikontrol oleh tentara, ia melihat kemungkinan terbukanya kesempatan bagi Angkatan Darat untuk tampil di tampuk pemerintahan. Gaya kepemimpinan penguasa tunggal membuat Bung Karno kurang memperhatikan motivasi Nasution ini, dan ia pun mengumumkan Dekrit tersebut.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Pada paruh kedua 1950-an di satu pihak PKI semakin percaya diri akan posisi politisnya sebagaimana tercermin dalam hasil Pemilu 1955 dan 1957. Dalam Pemilu untuk memilih anggota Parlemen, PKI tampil sebagai partai terbesar keempat setelah PNI, Masyumi dan NU. Sedang dalam Pemilu Daerah 1957 setidaknya di Jawa dan Sumatra Selatan PKI telah menjadi pemenang suara terbanyak dengan mengantongi 31% suara yang masuk.[7] Di lain pihak, PKI juga tahu bahwa rival ter-kuatnya waktu itu, Angkatan Darat, mempunyai *bedil* (senjata) sedang PKI sendiri tidak. Untuk itu ia merasa perlu mendekati dengan Bung Karno antara lain supaya mendapatkan perlindungan dari kemungkinan serangan oleh pihak Angkatan Darat. Dengan kata lain PKI pun sebenarnya juga memanfaatkan Bung Karno untuk kepentingannya sendiri.[8]

Sementara itu, naiknya posisi politis PKI tidak hanya meresahkan Angkatan Darat, melainkan juga partai-partai politik yang anti terhadap partai komunis tersebut. Kelompok anti-PKI ini tak mau ketinggalan dalam memanfaatkan Sukarno untuk melayani kepentingannya sendiri. Takut bahwa PKI akan menang, misalnya, kelompok ini bersekutu untuk "melobi" Bung Karno agar Pemilu yang rencananya akan diadakan pada 1959 ditiadakan. Lobi itu berhasil dan Pemilu 1959 memang dibatalkan.

Melemahnya Lembaga-lembaga Masyarakat

Dalam situasi politik yang penuh intrik macam itu kehidupan bernegara menjadi semakin kacau dan demokrasi yang didambakan semakin sayup-sayup terdengar. Bung Karno sendiri lantas dilihat bukan lagi sebagai pelayan masyarakat yang dipilih *(elected official)*, melainkan sebagai penguasa

www.facebook.com/indonesiapustaka

tunggal mirip raja tradisional. Tidak heran bahwa salah satu slogan yang muncul adalah*"Pejah-gesang ndherek Bung Karno"* atau hidup-mati ikut Bung Karno. Ditafsirkan secara bebas slogan itu bisa berbunyi *right or wrong my Bung Karno*, dan itu tentu bisa berbahaya. Rakyat lantas enggan untuk bersikap kritis terhadap para pemimpin mereka, khususnya Bung Karno sendiri. Keengganan bersikap kritis ini kemudian lantas bergeser menjadi ketakutan, seiring dengan meningkatnya kontrol pemerintah terhadap masyarakat. Pada bulan Juli 1958 pemerintah mengharuskan media massa untuk memiliki Surat Izin Terbit (SIT) dan menentukan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut SIT itu sewaktu-waktu. Pada bulan Januari 1963 ketentuan SIT itu disusul dengan munculnya Keppres yang mewajibkan setiap penerbit untuk menyerahkan satu kopi buku yang diterbitkan dalam waktu 48 jam setelah penerbitan. Berdasarkan Keppres ini aparat pemerintah memiliki keleluasaan untuk melarang buku dan menekan para penerbit yang dipandang tidak segaris dengan kehendak kekuasaan. Dan melalui Undang-undang Anti-Subversi yang keluar tahun 1963 pemerintah menjadi semakin bebas untuk menangkap dan menindak orang-orang kritis yang dianggap membahayakan pemerintah.

Gagal Ciptakan Sistem Politik Pluralistik-Demokratis

Akibat lebih jauh dari sistem penguasa tunggal yang didukung oleh pemerintahan penuh kontrol macam itu, Bung Karno akhirnya gagal menciptakan suatu sistem politik yang mampu menampung berbagai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dengan segala perbedaannya. Tindakannya membubarkan Masyumi dan PSI pada 17 Agustus 1960,

www.facebook.com/indonesiapustaka

misalnya, menandai semakin lemahnya semangat demokrasi dan pluralitas. Dengan bubarnya Masyumi berarti melemahnya dukungan daerah terhadap pusat, mengingat bahwa sekitar lima puluh persen pendukung Masyumi berasal dari Luar Jawa. Sementara pembubaran PSI menandai hilangnya partisipasi politik kelompok sosialis non-komunis di Indonesia. Pada gilirannya periode sejak 1960-an ditandai dengan pertentangan yang makin tajam antara Angkatan Darat di satu sisi dan PKI di sisi lain. Sementara itu Presiden Sukarno berusaha berdiri di tengah untuk mencegah konflik frontal antara keduanya sambil menjaga posisinya sendiri sebagai penguasa tunggal. Tetapi justru dalam posisi ini ia sedikit demi sedikit menjadi terjepit, untuk nanti akhirnya dijatuhkan dari kursi kekuasaan.

Melemahnya Partisipasi Politik Rakyat

Berbeda dengan penguasa tunggal Sukarno yang secara tidak sadar dijepit dan kemudian dijatuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, penguasa tunggal Soeharto berusaha lebih dulu menjepit dan menjatuhkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang ia duga akan menjepit dan menjatuhkannya. Di bawah pemerintahannya kontrol oleh kekuasaan pusat—yang tak jarang menggunakan uang dan senjata—menjadi lebih ketat, dengan akibat ruang partisipasi politis rakyat menjadi semakin sempit.

Tak lama setelah Soeharto resmi diangkat menjadi Presiden, pada Juli 1967, Orde Baru memutuskan bahwa pemerintah berhak memilih sampai sepertiga anggota MPR. Dua tahun kemudian, Juli 1969, Orba membuka Pulau Buru di Maluku untuk mengasingkan ribuan orang yang dituduh

www.facebook.com/indonesiapustaka

terkait dengan PKI tetapi "tidak sempat terbunuh" pada 1965-66 —kebanyakan tanpa proses pengadilan yang semestinya. Dan ketika pada 22 Januari 1970 para mahasiswa mulai mengadakan demonstrasi menentang korupsi para pejabat, pemerintah Orba melarang segala bentuk demonstrasi.

Pada saat yang sama, penguasa tunggal Soeharto terus-menerus berusaha menghimpun elemen-elemen masyarakat yang potensial untuk mendukung kekuasaannya. Hal ini antara lain ia lakukan melalui Golkar. Pada Februari 1970 pegawai pemerintah diwajibkan untuk secara resmi loyal pada pemerintah dan Golkar. Mereka juga diwajibkan untuk menghindari kegiatan dan organisasi-organisasi politik—kecuali kalau kegiatan dan organisasi-organisasi itu diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam kampanye-kampanye pemilu Golkar juga mendapat dukungan dan perlakuan yang khusus dari pemerintah. Jika terjadi perselisihan antara Golkar dengan partai politik lain, pemerintah—didukung oleh militer di belakangnya—akan selalu membela Golkar. Ketika pada April 1982 terjadi bentrokan antara para pendukung Golkar dan PPP, misalnya, tentara segera diturunkan dan menembak para pendukung PPP, menewaskan tujuh orang. Ketika sekelompok warga PDI mulai secara berani menunjukkan ketidaktaatannya pada Soeharto dan Orba, pada 27 Juli 1996 markas PDI anti-Soeharto di Jl. Diponegoro Jakarta diserbu oleh tentara dan polisi. Akibatnya Jakarta menjadi kacau, dan dalam kekacauan itu puluhan orang dibunuh atau hilang tak tentu rimbanya. Dengan dukungan yang amat kuat dari pemerintah dan militer macam itu tidak mengherankan jika dalam pemilu-pemilu dari 1971 hingga 1997 Golkar selalu

www.facebook.com/indonesiapustaka

"menang" dengan mengantongi rata-rata lebih dari 70% suara, dan penguasa tunggal Soeharto berjaya sampai 32 tahun. Tetapi selama 32 tahun itu pula rakyat Indonesia dipandang sebagai "massa mengambang" yang kebebasan sosial-politiknya terus-menerus dikekang.

Kuatnya Campurtangan Militer

Sebagaimana tercermin dalam Peristiwa 27 Juli 1996 di atas, dampak lain yang muncul dari gaya kepemimpinan penguasa tunggal Soeharto adalah terlalu seringnya penggunaan pendekatan militeristik untuk menyelenggarakan kehidupan sosial-politik dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam proses berbangsa. Soeharto dan Orba-nya mengusahakan berbagai upaya agar militer, khususnya Angkatan Darat, selalu memiliki sebesar mungkin akses untuk mengontrol ruang sosial-politik masyarakat. Hirarki teritorial militer, misalnya, dibuat sejajar dengan hirarki pemerintahan sipil, dari tingkat provinsi (Kodam—Komando Daerah Militer) sampai ke tingkat desa (Babinsa—Bintara Pembina Desa). Program ABRI masuk desa yang dimulai pada Februari 1980—untuk mendorong keterlibatan tentara dalam kehidupan sipil di tingkat bawah—disusul dengan diundang-kannya doktrin Dwifungsi ABRI pada Mei 1982. Dalam praktiknya, "Dwi-fungsi" tidak hanya berlaku bagi ABRI yang masih berkarya, melainkan juga setelah mereka pensiun sebagaimana tampak dalam banyak "dikaryakan"-nya para pensiunan ABRI di lingkungan pemerintahan sipil maupun sebagai "pelindung" atau bahkan pelaku berbagai usaha bisnis.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Bicara soal kekerasan militer yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto itu seperti bicara tentang suatu keniscayaan. Selama rezim itu berkuasa, hampir setiap kerusuhan besar selalu melibatkan unsur tentara. Perselisihan-perselisihan yang terjadi antara masyarakat dan negara hampir senantiasa didekati dengan cara-cara militer. Ketika misalnya pada 8-12 September 1984 di Tanjung Priok terjadi kerusuhan dan ketegangan antara sejumlah pemimpin keagamaan radikal dengan petugas keamaan, tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah amatlah militeristik. Puluhan orang ditembak mati dan ratusan lain ditahan. Pendekatan militeristik pula yang diambil oleh Angkatan Darat pada Februari 1989 ketika meng-hadapi pemberontakan petani di Lampung. Sebagai akibat, sekitar 100 orang tewas. Pada 12 November 1991 senjata-senjata milik Angkatan Darat kembali menyalak, kali ini di hadapan para demonstran pro-kemerdekaan di Santa Cruz, Dili, Timor Timur. Setidaknya, 200 orang mati terkapar, meskipun pihak militer berusaha keras membelokkan masalah ke arah perdebatan mengenai jumlah orang yang dibunuh.[9] Sudah bukan rahasia lagi bahwa selama dekade 1990-an tentara membantai sejumlah besar warga sipil maupun gerilyawan Aceh yang memperjuangkan entah pemisahan diri dari Indonesia atau sekadar berkurangnya kontrol dan eksploitasi Jakarta atas wilayah itu. Pembantaian juga dilakukan di Papua Barat, misalnya dengan menembak mati pemimpin OPM (Organisasi Papua Merdeka) Marthen Luther Prawar pada Mei 1993.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Yang juga nyaris "terbunuh" di bawah kuatnya campur tangan militer dalam pemerintahan Orba tentu adalah kesadaran-sejarah bangsa. Di bawah Orba orang tak hanya enggan untuk menengok ke belakang dan berefleksi atas sejarah perjalanan bersama, melainkan juga takut untuk melakukannya. Ambil saja misalnya refleksi tentang apa yang terjadi pada pada 1965-66 berkaitan dengan terbunuhnya ratusan ribu warga negeri ini, serta naiknya Angkatan Darat dalam pemerintahan yang baru. Orang tahu bahwa pada waktu itu terjadi pembunuhan massal yang kebrutalannya nyaris tak pernah tertandingi sepanjang sejarah Indonesia (bahkan dengan masa penjajahan Belanda), tetapi masyarakat takut untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, apa latar belakangnya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa-siapa saja sebenarnya yang merencanakan semua itu, serta apa yang mesti dilakukan agar Tragedi macam itu tak akan terjadi lagi. Tentang ini semua yang boleh beredar adalah versi resmi, termasuk upaya-upaya penumpulan kesadaran sejarah sebagaimana tampak dalam keharusan dari tahun ke tahun untuk menonton film "Pengkhianatan G30S/PKI" versi pemerintah itu.

Ditekannya Kebebasan Berpendapat

Gaya kepemimpinan penguasa tunggal Soeharto juga tidak memungkinkan bagi berkembangnya kebebasan berpendapat. Ketika pada 13 Mei 1980 sekelompok tokoh masyarakat yang menamakan diri "Kelompok Petisi 50" menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Soeharto, para penanda tangan kritik itu dipersulit, antara lain tidak boleh pergi ke luar negeri. H.R. Dharsono, jenderal purnawirawan mantan Pangdam

www.facebook.com/indonesiapustaka

Siliwangi yang dengan keras mengkritik tindakan pemerintah dalam Peristiwa Tanjung Priok, pada 8 November 1984 ditahan dengan tuduhan subversif dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun, meskipun kemudian dikurangi menjadi 7 tahun. Pada Agustus 1985 isu "bahaya laten PKI" yang selama itu didengung-dengungkan oleh Orba ditegaskan lagi dengan diambilnya tindakan-tindakan "bersih lingkungan" dan memecat orang-orang yang diduga ada sangkut-pautnya dengan PKI atau bekas anggota PKI dari instansi-instansi pemerintah. Pada bulan itu pula banyak tahanan bekas anggota PKI dieksekusi, hampir *20 tahun* setelah mereka ditangkap. Langkah-langkah yang diambil ini tentu saja tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum mereka yang oleh Soeharto dan para pendukungnya dianggap bersalah, melainkan juga untuk memberi "peringatan" sekaligus "pelajaran" bagi mereka yang diam-diam berniat mengkritik pemerintah.

Melemahnya Lembaga Pers

Kontrol ketat yang dilakukan oleh Soeharto dan pemerintahannya juga termasuk di bidang media massa, dengan akibat lemahnya lembaga pers dan media massa pada umumnya. Selama Orde Baru berkuasa dunia televisi dimonopoli oleh TVRI, stasiun televisi resmi milik pemerintah. Jumlah stasiun radio dibatasi dan masing-masing hanya dibolehkan menyampaikan warta berita versi pemerintah. Dalam bidang media cetak kontrol Orde Baru tampak lebih mencolok. Pada hari-hari pertama naiknya Soeharto dan kawan-kawan, yakni antara 1965-66, ada 46 koran yang dilarang terbit, sementara organisasi Persatuan Wartawan In-

www.facebook.com/indonesiapustaka

donesia (PWI) *diobok-obok*. Undang-undang Pers tahun 1966 pun lahir dan dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak pers di bawah slogan "pers yang bebas tetapi bertanggung jawab". Tentu hanya agen-agen pemerintahlah yang biasanya berhak menentukan apa arti "bebas" dan apa arti "bertanggung jawab" dalam suatu pemberitaan. Peristiwa Malari yang terjadi pada 1974 tidak hanya dijadikan alasan untuk mengadakan pelarangan atas rapat-rapat umum, melainkan juga pem-breidelan sejumlah media massa.

Pada September 1982 ketentuan Surat Izin Terbit diganti dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP ini jauh lebih keras daripada SIT. SIT memberi ketentuan bahwa kalau ada koran atau majalah yang memuat berita yang membuat pemerintah tak berkenan, maka yang dicabut izinnya adalah hanya suratkabar atau majalah yang bersangkutan. Sementara SIUPP menuntut bahwa jika hal serupa terjadi, yang dikenai sanksi pencabutan adalah seluruh perusahaan penerbit suratkabar atau majalah ini dengan akibat tertutupnya pula penerbitan-penerbitan lain yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut. Berdasarkan senjata-senjata "legal" yang dimiliki, Orba berhasil "mengamankan" koran atau majalah-majalah yang dianggap kritis terhadapnya. Korban pun berjatuhan, termasuk koran *Sinar Harapan* yang ditutup pada 1986 serta majalah berita mingguan *Tempo* yang tak diperkenankan terbit sejak 1994.[10]

Dijarahnya Kekayaan Tanah Air

Satu hal yang sulit dipungkiri sebagai akibat lain dari berkuasanya Soeharto sebagai penguasa tunggal adalah bahwa dalam masa tiga dekade kepemimpinannya terjadi penjarahan secara

www.facebook.com/indonesiapustaka

besar-besaran atas kekayaan tanah air, baik oleh perusahaan-perusahaan asing maupun oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri yang direstui oleh para pejabat pemerintah. Termasuk di dalamnya adalah usaha-usaha bisnis milik Presiden dan keluarganya. Hanya beberapa saat setelah Soeharto dkk memegang kendali politik Indonesia, pada April 1967, perusahaan asing Freeport sudah mulai beroperasi (dengan kontrak puluhan tahun) di Papua Barat. Walaupun di permukaan perusahaan ini resminya hanya menambang tembaga, tetapi yang jauh lebih menguntungkan baginya adalah penambangan emas di wilayah yang dikatakan sebagai *"one of the largest gold deposits in the world"* ini. Meskipun perusahaan itu dalam melaksanakan bisnisnya amat me-rugikan masyarakat sekitar, pemerintah didukung militer mati-matian membela perusahaan tersebut, bahkan kalau harus mengorbankan rakyat sendiri. Dilaporkan bahwa antara akhir 1994 dan awal 1995 saja ada sekitar 37 orang yang dibunuh oleh tentara Indonesia karena memprotes perusahaan Freeport ini.

Pada Agustus 1968 semua perusahaan minyak yang berada di bawah kontrol militer (hasil sitaan perusahaan-perusahaan asing tahun 1957-58) disatukan dalam wadah yang baru, Pertamina, dengan Kolonel Ibnu Sutowo sebagai ketuanya. Pertamina lantas diberi hak monopoli atas seluruh industri perminyakan di Indonesia, tetapi dalam pelaksanaannya banyak dikontrakkan pada perusahaan-perusahaan asing, dan sebagaimana telah kita lihat Pertamina lantas menjadi ajang korupsi yang berskala luar biasa. Sementara itu orang-orang yang dekat dengan Soeharto, seperti Probosutejo dan Liem Sioe Liong, mulai mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto

www.facebook.com/indonesiapustaka

dalam hal bisnis, antara lain dengan memberikan hak monopoli impor cengkeh. Pada Agustus 1970 Ny. Tien Soeharto dan Liem bersama-sama mendirikan pabrik tepung PT Bogasari.

Sebagaimana kita semua tahu, bisnis dengan perlakuan istimewa yang melibatkan keluarga Soeharto dan teman-temannya ini akan berlangsung terus sepanjang Orde Baru berkuasa. Bisnis jenis ini tidak hanya menyangkut istri, anak dan menantu Soeharto, melainkan juga cucu-cucunya. Pada Februari 1996, misalnya, seorang cucu Soeharto yang bernama Ari Sigit bermaksud menarik pajak dari setiap botol bir yang terjual di Bali, setelah ia secara istimewa mendapat lisensi untuk melakukan hal tersebut. Hanya setelah para pemilik hotel dan restoran di Pulau Dewata itu menolak untuk membeli bir akhirnya rencana penarikan pajak tersebut dibatalkan.

Amat mencolok bahwa selama Soeharto berkuasa banyak sekali kekayaan alam negeri yang dijual kepada perusahaan-perusahaan asing maupun dalam negeri yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Akibatnya banyaklah sumber-sumber kekayaan alam yang selama itu direbut dari tangan rakyat dan dieksploitasi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Banyak di antara sumber-sumber alam itu kini telah mengalami kerusakan yang parah atau bahkan permanen. Hal ini terjadi pada hutan-hutan yang ada di Sumatra, Kalimantan, Papua Barat, dll. Pada sisi lain, ketidakadilan dan penghisapan yang dilakukan secara terus-menerus terhadap daerah oleh pusat-pusat kekuasaan Orde Baru waktu itu kini menimbulkan reaksi balik di mana masing-masing daerah semakin ingin

www.facebook.com/indonesiapustaka

www.facebook.com/indonesiapustaka

menguasai sumber-sumber alamnya demi kepentingan sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan nasional yang lebih luas.

Secara umum dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan penguasa tunggal Soeharto mengakibatkan munculnya gaya kepemimpinan yang sama pada tingkat bawah. Di masa rezim Soeharto banyak sekali orang-orang di lapisan bawah pemerintahan yang juga menggunakan model penguasa tunggal itu, baik dalam bidang politik maupun bisnis, di mana iming-iming uang dan ancaman senjata juga memainkan peranan yang dominan.

Menuju Masyarakat Kuat

Dari pengamatan sekilas atas model memerintah Presiden Sukarno maupun Presiden Soeharto di atas tampak sekali bahwa bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan oleh model penguasa yang bergaya penguasa tunggal menimbulkan akibat melemahnya partisipasi sosial-politis masyarakat. Semakin kuat dan sentralistis kontrol yang dilakukan oleh penguasa, semakin lemah masyarakatnya. Lemahnya masyarakat sebagai akibat dari gaya penguasa tunggal yang dipraktikkan oleh Bung Karno menjadi semakin parah ketika Soeharto tampil ke pucuk pimpinan nasional, di mana dalam praktiknya sebagai penguasa tunggal ia banyak menggunakan kekuatan militer dan uang. Dengan penggunaan uang dan senjata itu pemerintah Orba tidak hanya mampu "membeli" orang atau kelompok-kelompok tertentu untuk mendukungnya, melainkan juga menyingkirkan untuk selama-lamanya elemen-elemen dalam masyarakat yang diduga akan mengancam kelanggengan kekuasaannya.

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sekarang ini masa di mana model kepemimpinan politis sebagaimana dilakukan oleh dua presiden pertama itu sudah lewat. Berbekal pengalaman dan pelajaran dari masa tersebut kini kita dipanggil untuk membangun kembali masyarakat dan menjadikannya semakin kuat. Diperlukan kesediaan dan kerja keras untuk memberdayakan masyarakat demi terciptanya suatu tata kehidupan sosial-politis yang pluralistik dan semakin demokratis. Meskipun demikian, pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dalam negara modern demokrasi yang sempurna—dalam arti semua warga secara sejajar dan merata ikut mengambil keputusan—hampir mustahil. Dengan kata lain, cita-cita untuk mewujudkan demokrasi yang sempurna tidak mungkin. Yang mungkin dilakukan adalah menjadikan demokrasi sebagai standar dalam usaha bersama untuk membangun sebuah republik yang sehat dan kuat.

Dalam usaha bersama membangun republik yang sehat dan kuat itu dibutuhkan adanya lembaga-lembaga republik yang sehat dan kuat pula. Lembaga-lembaga republik itu menyangkut lembaga-lembaga negara (seperti lembaga hukum, pengadilan, kepresidenan, perwakilan rakyat, dan sebagainya), serta lembaga-lembaga masyarakat (seperti lembaga pers, lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, sosial, partai-partai politik, dan sebagainya). Berbeda dengan apa yang terjadi pada paro kedua masa jabatan Sukarno sebagai Presiden dan seluruh masa pemerintahan Soeharto—di mana lembaga-lembaga negara amat dominan—kini dibutuhkan adanya keseimbangan antara lembaga-lembaga

www.facebook.com/indonesiapustaka

negara itu dengan lembaga-lembaga masyarakat, serta kontrol terhadap mereka.

Lembaga-lembaga Negara yang Kuat

Di tingkat pemerintahan pusat maupun di daerah-daerah, diperlukan adanya lembaga legislatif yang representatif, yang semaksimal mungkin mencerminkan kehendak dan dinamika masyarakat. Semakin lama semakin dirasakan mendesak bahwa lembaga ini dibebaskan dari kesan sebagai sarang korupsi. Mereka yang duduk di dalamnya juga perlu membebaskannya dari pendapat umum bahwa ia adalah ajang perjuangan kepentingan pribadi atau kelompok berkedok legalitas, tanpa menghargai kepentingan nasional yang lebih luas. Sementara itu lembaga yudikatif—di tingkat mana pun—perlu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa di republik ini semua orang sederajat di depan hukum. Mereka yang duduk di lembaga ini perlu menunjukkan bahwa ia bukan lembaga pendukung mafia-mafia peradilan, dan bukan panggung sandiwara dengan tiket mahal. Perlu dibuktikan bahwa di sini yang menjadi "panglima" adalah hukum dan keadilan, bukan duit dan intimidasi. Lembaga ini perlu pula membuktikan bahwa ejekan lama KUHP yang berarti Kasih Uang Habis Perkara sudah tak lagi berlaku. Lembaga yudikatif yang kuat akan membantu terwujudnya masyarakat yang kuat, sebaliknya lembaga yudikatif yang lemah akan membuat rakyat tertawa mengejek dan tidak lagi mempercayai hukum dan pemerintah. Padahal, sebagaimana dikatakan oleh Lev, "Tanpa tegaknya hukum semua bidang akan terus merosot."[11]

www.facebook.com/indonesiapustaka

Sangat perlulah bahwa lembaga eksekutif menjadi kuat, tetapi hendaknya tidak hanya tergantung pada satu orang saja. Indonesia adalah sebuah republik modern, bukan sebuah monarki feodalistik terselubung. Oleh karena itu, perlu bahwa presiden dipilih secara demokratis sungguhan, bukan demokrasi pura-pura, bukan demokrasi yang melulu ritualistik. Presiden perlu bekerja dalam sebuat *team*, dan tidak lagi bertindak sebagai penguasa tunggal atau *"strongman"*. Perlu dihindari bahwa presiden hanya dikelilingi oleh para loyalis yang hanya mau mendukungnya. Sebagaimana tampak dalam pemerintahan Sukarno maupun Soeharto, dalam jangka panjang hal ini bisa berbahaya. Selain itu presiden perlu memiliki pemerintahan yang transparan, yang selalu siap untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusannya pada rakyat. Bersama *team*-nya itu presiden perlu mempunyai akses langsung yang memadai ke rakyat. Pada saat yang sama penting juga baginya untuk terus menyadari tidak hanya perkembangan dalam negeri tetapi juga apa yang sedang bergerak di komunitas internasional.

Tuntutan-tuntutan serupa perlu diterapkan juga pada lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan negara. Dan demi keseimbangan, lembaga-lembaga negara itu perlu menjaga jarak yang cukup terhadap kelompok-kelompok militer, bisnis, atau kelompok kepentingan lain (termasuk kelompok agama) yang berpotensi membelokkan lembaga-lembaga itu untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kecenderungan lembaga-lembaga itu untuk tunduk pada kepentingan-kepentingan kelompok secara tak seimbang akan merugikan tidak hanya kepentingan

www.facebook.com/indonesiapustaka

rakyat sesaat, tetapi juga akan selalu membawa dampak yang luas dalam jangka panjang.

Lembaga-Lembaga Masyarakat yang Kuat

Pertumbuhan ke arah demokrasi tentu saja juga menuntut partisipasi rakyat melalui lembaga-lembaga masyarakat yang kuat. Partai-partai politik yang ada, misalnya, diharapkan tidak mengeksploitasi sentimen primordial dan sektarian untuk memperlancar jalan elite partai guna mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan benar-benar memper-juangkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari kehidupan bersama.[12] Lembaga-lembaga pers dipanggil untuk tidak hanya menjadi kuat, melainkan juga bersikap independen sekaligus konstruktif terhadap "proyek bersama" membangun kembali negara-bangsa Indonesia. Selain itu juga diperlukan semakin terselenggaranya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat serta kebiasaan untuk berdebat secara terbuka tanpa disertai ancaman-ancaman fisik dan sebagainya.[13] Hal-hal itu perlu mendapat perhatian dan usaha yang serius demi terwujudnya masyarakat yang kuat.

Saling Kontrol

Dalam kaitan dengan upaya menciptakan masyarakat yang kuat ini perlu diingat bahwa baik dalam lembaga-lembaga negara maupun lembaga kemasyarakatan biasanya ada kelompok elite, dan dalam perjalanan waktu kelompok elite ini cenderung memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Lebih dari itu kelompok elite ini gemar bersekutu dengan kelompok-kelompok lain (termasuk tentara dan kelompok bisnis) yang diharapkan akan mendukung tercapai

www.facebook.com/indonesiapustaka

dan terjaminnya kepentingan-kepentingan tersebut. Sebagaimana juga dikatakan oleh Lev, "Sampai sekarang ini banyak elite politik, di mana pun juga, sering omong-omong tentang rakyat, keadilan sosial, dan lain-lain." Padahal, me-nurutnya, omong-omong itu sering "dipakai untuk menutupi suatu tujuan lain. Yaitu tujuan untuk tetap berkuasa." Ia lantas mengingatkan "Antara perkataan dan perbuatan elite politik ada perbedaan yang luar biasa besarnya."[14]

Itulah sebabnya penting kiranya untuk mengusahakan agar selalu ada mekanisme dalam masyarakat yang fungsinya mengontrol gerombolan elite itu. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan adanya transparansi dan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan demikian akan segera lewatlah zaman di mana masyarakat yang *politically powerless* hanya menyandarkan diri pada para penguasa tunggal yang *politically powerful*. Akan dapat dihindarkan pula harapan-harapan kosong mengenai akan lahirnya "ratu adil" yang dipercayai akan membereskan semua persoalan masyarakat dalam sekejap. Yang kini dibutuhkan adalah lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga masyarakat yang kuat, transparan dan saling mengontrol. Di dalam masyarakat yang transparan dan disertai kontrol yang ketat atas kekuasaan itu diharapkan bahwa yang akan lahir dan tumbuh nanti bukan lagi para penguasa tunggal atau "orang-orang kuat" yang mahir menekan rakyat, melainkan "orang-orang besar" seperti Hatta, Syahrir, Sultan Hamengku Buwono IX, Soegijapranata, Pramoedya Ananta Toer, Romo Mangun. Mereka ini adalah orang-orang yang cita-cita hidupnya

www.facebook.com/indonesiapustaka

terutama membebaskan rekan-rekan sebangsanya dari setiap bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dalam hal ini tentu Sukarno Muda adalah contoh yang amat konkret dan amat inspiratif.[]

Catatan Akhir:

1 SOB baru dicabut tahun 1963.

2 Daniel Lev, "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik", dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 165.

3 Lev, "Kegagalan," h. 166. Juga menurut Lev, "Pokoknya, sebelum tahun 1956 tentara sudah merupakan semacam kelompok politik, dan bukan hanya kelompok militer profesional." Lev, "Kegagalan", h. 171.

4 Lev, "Kegagalan", h. 168. Pada 13 Desember 1957, Nasution memerintahkan anakbuahnya di Angkatan Darat untuk mengambil alih aset-aset Belanda yang disita negara. Dalam peristiwa ini pulalah dulu ia "menghadiahi" Kolonel Ibnu Sutowo kedudukan sebagai direktur perusahaan minyak Permina, sebelum perusahaan itu menjadi Pertamina.

5 Lev, "Kegagalan", h. 169.

6 Ide "jalan tengah tentara" awalnya datang dari Profesor Djoko Sutono, dekan Fakultas Hukum UI, yang dikonsultasi oleh Nasution. Lihat Lev, "Kegagalan", h. 171.

7 Empat pemenang tertinggi Pemilu 1955 adalah sebagai berikut: PNI: 30.5%; NU: 25.7%; Masyumi: 19.5%; PKI: 24%. Sementara dalam Pemilu Daerah untuk menentukan Anggota DPRD bulan Juni-Juli 1957, di Jawa dan Sumatra Selatan hasilnya adalah sbb: Masyumi: 19%; PNI: 25%; NU: 25%; PKI: 31%. Prosentase

www.facebook.com/indonesiapustaka

itu merupakan pembulatan dari angka-angka yang ditunjukkan dalam Daniel Lev, "The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959" (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1966, Monograph Series), h. 97.

[8] Pada bulan Agustus 1963, misalnya, sejumlah anggota PKI mulai menekan Kelompok Manikebu karena dianggap tidak mau secara eksplisit mendukung Sukarno.

[9] Setahun kemudian, 20 November 1992, tentara Indonesia menangkap pemimpin Fretilin Xanana Gusmao dan menjatuhinya hukuman seumur hidup.

[10] Sebelumnya, pada Januari 1974 koran *Indonesia Raya* yang dipimpin oleh Mochtar Lubis dibreidel sebagai reaksi pemerintah Soeharto atas pemberitaan mengenai Peristiwa 15 Januari. Karena melaporkan insiden bentrok antara para pendukung kampanye Golkar dan PPP pada April 1982, mingguan *Tempo* ditutup oleh pemerintah selama dua bulan. Pencabutan izin terbit Majalah *Tempo* pada 1994, antara lain disebabkan oleh pembeberan ketidakberesan dalam hal keuangan yang melibat orang-orang tertentu di sekitar Presiden. *Tempo* baru bisa terbit setelah Orba *lengser*.

[11] Daniel Lev, "Lembaga, Elit dan Kontrol", dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Mencari Demokrasi* (Jakarta: ISAI, 1999), h. 142.

[12] Salah satu contoh bagaimana para wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat dapat dilihat dari topik-topik yang muncul dalam debat-debat Konstituante, seperti misalnya soal komitmen bangsa terhadap demokrasi, kehendak untuk melindungi hak-hak asasi rakyat, serta soal pembatasan kekuasaan pemerintahan, dsb. Untuk itu bisa dilihat disertasi Dr. Adnan Buyung Nasutioon, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).

[13] Lev juga mengingatkan bahwa dalam masa Bung Karno para pimpinan sipil tidak selalu setuju satu sama lain, tetapi tidak

www.facebook.com/indonesiapustaka

saling membunuh. Kecenderungan ke arah itu ada ketika tentara semakin masuk ke dalam dunia politik sipil, khususnya setelah Nasution diangkat lagi menjadi KASAD pada November 1955. Lev, "Lembaga", h. 185.

[14] Lev, "Kegagalan", h. 231-232.

www.facebook.com/indonesiapustaka

PENUTUP

Yang bisa dipelajari, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara majemuk. Usaha apa pun untuk mengurungnya ke kerangka apa pun yang ketat—entah ideologi tinggi seperti dilakukan Soeharto, atau nasionalisme seperti dilakukan Sukarno, atau partai komunis, atau negara Islam atau lainnya—akan membawa ke bencana. [Alasannya,] karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.

Clifford Geertz (1999)

SEBAGAIMANA telah kita bicarakan dalam bagian Pengantar, maksud utama dari penulisan buku ini adalah mengajak kita semua untuk melakukan penelurusan kembali atas gagasan-gagasan dan tindakan politis Bung Karno. Kita mau belajar dari bagaimana gagasan-gagasan itu diformulasikan oleh Sukarno muda, dan bagaimana kemudian gagasan-gagasan itu berkembang ketika harus berhadapan dengan realitas politik nasional maupun internasional.

Sebagaimana telah kita lihat, tidak semua gagasan dan cita-cita luhur yang dipegang teguh oleh Sukarno muda itu terwujud secara mulus tanpa hambatan. Dinamika politik dalam negeri waktu itu—seperti tetap ingin bercokolnya penjajah Belanda, Peristiwa Madiun 1948, pemberontakan

www.facebook.com/indonesiapustaka

daerah 1950-an, perkembangan PKI dan perlawanan terhadapnya—telah menjadikan Bung Karno sulit untuk merealisasikan gagasan-gagasannya begitu saja. Kesulitan menjadi bertambah ketika berbagai faktor internasional, khususnya yang berkaitan dengan Perang Dingin, masuk dan "turut bermain" di negeri ini. Ketika itu Bung Karno dan masyarakat Indonesia pada umumnya menjadi sasaran perebutan pengaruh antara Blok Kapitalis di satu pihak dengan Blok Komunis di lain pihak. Kepemimpinan Sukarno atas negeri ini pun menjadi amat diwarnai oleh persaingan yang sengit antara kedua blok tersebut. Menariknya, di tengah berbagai tekanan internasional itu, Sukarno tampak mampu untuk tetap bertahan.

Akan tetapi ironisnya, Presiden Sukarno menjadi tak mampu lagi bertahan ketika tantangan yang ia hadapi justru datang dari dalam negeri sendiri. Sebagaimana kita tahu, tantangan itu terutama berasal dari kalangan militer. Ketika Angkatan Darat kehilangan sejumlah Jenderalnya dan ada pihak yang mengaitkan peristiwa tragis itu dengan PKI untuk kemudian mendorong pembantaian massal terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota partai komunis, Bung Karno mulai bergetar. Ia tak tahan melihat bangsa yang ia perjuangkan sejak muda itu kini tercabik-cabik dan mandi darah saudaranya sendiri. Pada akhirnya ia pun tersingkir dari panggung politik Indonesia dengan cara yang tidak ia kehendaki.

Betapa pun tragis akhir dari perjuangan Sukarno, ada banyak hal yang bisa kita refleksikan dan pelajari, dan memang itulah yang coba kita lakukan di sepanjang buku

www.facebook.com/indonesiapustaka

ini. Dari apa yang ia uraikan berkaitan dengan Pancasila serta bagaimana ia memegang kekuasaan (dengan segala kelebihan dan kekurangannya) kita telah belajar banyak. Tidak hanya tentang Bung Karno saja kita telah belajar, melainkan juga tentang sejarah bangsa ini pada umumnya. Salah satunya adalah, sebagaimana dikatakan oleh Geertz dalam kutipan di atas, pentingnya kesadaran akan pluralitas dari bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, dan memang harus diperlakukan dan diperjuangkan sebagai bangsa yang majemuk. Setiap upaya untuk mengurungnya dalam sekat-sekat ideologis, politis atau agama hanya akan melahirkan malapetaka.

Semoga bangsa ini semakin mampu belajar dari masa lalunya untuk semakin mantap dalam memperjuangkan masa kini dan masa depannya.[]

www.facebook.com/indonesiapustaka

DAFTAR PUSTAKA

Ambrose, Stephen. *Eisenhower,* vol. 2, *The President* (New York: Simon and Schuster, 1984).

Ambrose, Stephen. *Ike Spies: Eisenhower and the Espionage Establishment* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1981).

Anderson, Benedict R.O'G. "Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective", *Journal of Asian Studies*, Volume 42, Issue 3 (May 1983).

Anderson Benedict and Ruth T. McVey. *A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Modern Indonesia Project, 1971).

Blum, William. *Killing Hope: U.S. Military and CIA Interventions Since World War II* (Monroe, Maine: Common Courage Press, 1995. First edition: 1986).

Challis, Roland. *Shadow of a Revolution* (Sutton Publishing, 2001).

Dahm, Bernhard. *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969).

Dake, Antonie C.A. *Sukarno File: Berkas-berkas Sukarno 1965-1967, Kronologi Suatu Keruntuhan* (Jakarta, Aksara Karunia, 2005).

Daniel S. Lev and Ruth McVey, eds., *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1996).

Eisenhower, Dwight D. *The White House Years: Waging Peace, 1956-1961* (Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1965).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1968).

Green, Marshall. *Indonesia: Crisis and Transformation, 1965-1968* (Washington, D.C.: The Compass Press, 1990).

Harvey, Barbara S. "Diplomacy and Armed Struggle in the Indonesian National Revolution: Choice and Constraint in a Comparative Perspective", dalam Daniel S. Lev and Ruth McVey, eds., *Making Indonesia: Essays on Modern Indonesia in Honor of George McT. Kahin* (Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1996).

Hasta Mitra, Redaksi. *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S 1965* (Jakarta: Hasta Mitra, 2001).

Jones, Howard P. *Indonesia: The Possible Dream* (Singapore: Mas Aju PTE, LTD, 1973).

Kadane, Kathy. "US Officials' Lists Aided Indonesian Bloodbath in '60s", *The Washington Post,* May 21, 1990.

Kahin, Audrey and George McT. Kahin, *Subversion as Foreign Policy: The Secret Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia* (New York: The New Press, 1995).

Kahin, George McTurnan. *Intervention: How America Became Involved in Vietnam* (New York: Anchor Books, Doubleday, 1986).

Keefer, Edward C., (ed.). *Foreign Relations of the United States, 1961-1963*, Volume XXII, Southeast Asia, Washington: United States Government Printing Office, 1994.

Latief, Kolonel Abdul. *Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S* (Jakarta: ISAI, 2000).

Lev, Daniel. *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, 1966, Monograph Series).

Lev, Daniel. "Kegagalan Menciptakan Sistem Politik", dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 2001).

Lev, Daniel. "Lembaga, Elit dan Kontrol," dalam Baskara T. Wardaya, Ed., *Mencari Demokrasi* (Jakarta: ISAI, 1999).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Malik, Adam, "Promise in Indonesia", *Foreign Affairs*, vol. 46 (January 1968), no. 2, h. 393.

McGehee, Ralph. "The CIA and the White Paper on El Salvador," *The Nation,* April 11, 1981, h. 423-425.

McGehee, Ralph. "The Indonesia File," *The Nation,* September 24, 1990.

McMahon, Robert J. *Colonialism and Cold War: The United States and the Struggle for Indonesian Independence, 1945-49* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1981).

McMahon, Robert J., Ed. *Foreign Relations of The United States, 1958-1960,* Volume XVII Indonesia (Washington: United States Government Printing Office, 1994).

Mc Vey, Ruth T. "Nationalism, Islam, And Marxism: The Management of Ideological Conflict in Indonesia", an Introduction to Soekarno. *Nationalism, Islam and Marxism* (Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, 1970).

Nasution, Adnan Buyung. *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992).

New York Times, May 9, May 18, 1956; May 9, 1958.

Peacock, Chris. "Indonesia: Years of Living Dangerously", *Utne Reader*, January-February 1991.

Popper, Karl. "History Has No Meaning", dalam Hans Meyerhoff, *The Philosophy of History in Our Time* (Garden City, NY: Doubleday, 1959)

Rahardjo, Pamoe, dan Islah Gusmian, Ed. *Bung Karno dan Pancasila: Menuju Revolusi Nasional* (Yogyakarta: Galang Press, 2002).

Ranelagh, John. *The Agency: The Rise and Decline of the CIA* (New York: Simon & Schuster, 1987).

Roeder, O.G. *The Smiling General: President Soeharto of Indonesia* (Jakarta, Gunung Agung Ltd: 1970-second edition).

Sasongko, HD. Haryo. dkk (ed.) *Menembus Tirai Asap: Kesaksian Tahanan Politik 1965* (Jakarta: Amanah Lontar, 2003).

www.facebook.com/indonesiapustaka

Schraeder, Peter J. (Ed), *Intervention into the 1990s: U.S. Foreign Policy in the Third World* (Boulder and London: Lynne Rienner Publishers, 1992).

Scott, Peter Dale, "Peran Amerika Serikat dalam Penggulingan Soekarno, 1965-1967", dalam Joesoef Isak (ed.), *100 Tahun Bung Karno* (Jakarta; Hasta Mitra,2001).

_____. "Sukarno dan Pancasila Masih Tetap Memimpin Indonesia

Masakini," dalam Joesoef Isak, (e)d., *100 Tahun Bung Karno* (Jakarta: Hasta Mitra, 2001).

Simbolon, Parakitri T. *Menjadi Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas, 1995).

Siregar, M.R., *Tragedi Manusia dan Kemanusiaan* (Amsterdam: TAPOl, the Indonesian Human Rights Campaign, 1995).

Smith, Joseph B. *Portrait of a Cold Warrior* (New York: G.P. Putnam's Sons, 1976).

Subandrio, Dr. H. *Kesaksianku Tentang G-30-S* (Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001).

Sukarno. *An Autobiography As Told to Cindy Adams* (New York: The Bobbs-Merill Company, Inc., 1965).

Sukarno. *Nationalism, Islam and Marxism* (Ithaca: New York, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University, 1970).

Time, February 24, March 10, March 24, March 31, April 7, April 21, April 28, May 12, June 2, June 9, June 16, 1958.

Toer, Pramoedya Ananta. "Penindasan dan Perlawanan: Pramoedya Ananta Toer tentang Sejarah, Politik, Kebudayaan dan Delapan Ekor Ayam", dalam Baskara T. Wardaya (ed.), *Menuju Demokrasi: Sejarah Indonesia dalam Perspektif Historis* (Jakarta: Gramedia, 2001).

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol. VI, 1945, The British Commonwealth and The Far East (Washington D.C.: Government Printing Office, 1969).

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol. VIII, 1946, The Far East (Washington D.C.: Government Printing Office, 1971).

www.facebook.com/indonesiapustaka

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol. VI, 1947, The Far East (Washington: Government Printing Office, 1972).

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol. VI, 1948, The Far East And Australia (Washington: Government Printing Office, 1974).

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol.VII, 1949, The Far East and Australia (Washington: Government Printing Office, 1975).

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol.VII, 1951, Asia and The Pacific (Washington: Government Printing Office, 1977).

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol. XXII, 1955-1957, Southeast Asia (Washington: Government Printing Office, 1989).

U.S. Government. *Foreign Relations of the United States*, Vol. XVII, 1958-1960, Indonesia (Washington: Government Printing Office, 1994).

Wise, Davis and Thomas Ross. *The Invisible Government* (New York: Random House, 1964).

www.facebook.com/indonesiapustaka

DOKUMEN-DOKUMEN

www.facebook.com/indonesiapustaka

SECRET/NOFORN

INDONESIAN WORKING GROUP - SITUATION REPORT

5 a.m. - October 6, 1965

(Last report 5 p.m. October 5)

DECLASSIFIED
Authority STATE 6-4-75
By MIE 6/9/75

I. Army vs. PKI:

The Army appears now to have determined to move vigorously against the PKI despite Sukarno's hands-off order of October 4. The next day according to reliable reports, Njono, Chief of the Djakarta PKI Committee and former head of SOBSI (PKI-led labor federation), was arrested by the Army along with several members of Pemuda Rakjat and Gerwani (respectively, PKI youth and women's auxiliaries) and an undetermined number of lesser PKI officials. There is less reliable information that firing squads are being formed to execute captured PKI members. Depending on the outcome of Sukarno's cabinet meeting, now in progress, these actions are subject to reversal as the Bung struggles to re-exert control of the situation.

The wife of the commander of the Jogjakarta military district, and their eight children were reportedly chopped to bits by Untung's forces when they briefly occupied Jogja.

II. Security:

Army remains in control of a quiet Djakarta. Muslim groups were gathering at the National Front for what reportedly/be anti-PKI demonstrations. In central Java, Semarang, Jogjakarta, and Solo were in the hands of troops loyal to Suharto. Surabaya and Medan are quiet.

COPY LBJ LIB

Laporan situasi Indonesia oleh Indonesian Working Group
6 Oktober 1965

www.facebook.com/indonesiapustaka

CONFIDENTIAL

EHX-953
PP RUEPWW
DE RUEHCR 629 2741738
ZNY CCCCC
P 011611Z
FM SECSTATE WASHDC
INFO RUEPWW/WHITE HOUSE ATTN MR BUNDY
RUENDA/DOD
RUEPCR/NSA
RUEPIA/CIA
RUEHIA/USIA
RUEHDT/USUN
P 011200Z
FM AMEMBASSY DJAKARTA
TO RUEHCR/SECSTATE WASHDC PRIORITY 759
INFO RUHLHQ/CINCPAC PRIORITY
STATE GRNC
BT
C O N F I D E N T I A L OCTOBER 1.

STATE
MIE

CINCPAC FOR POLAD

1. DUTCH-INDONESIAN BUSINESSMAN FRIENDLY WITH INDONESIAN ARMY LEADERS TOLD EMBOFF TODAY HE HAD GIVEN BLOOD THIS MORNING FOR MSUTION'S 6-YEAR OLD CHILD. CHILD SHOT BY GROUP OF SOLDIERS WHO ENTERED MASUTION'S HOUSE AT 4:00 AM THIS MORNING AND TRIED TO SHOOT HIM BUT MISSED HITTING CHILD. CHILD GIVEN 50/50 CHANCE LIVE.

2. ACCORDING THIS SOURCE, "REBELLION" IS FROM LEFT AND IS COUNTERACTION TO PLANNED COUP BY GENERALS COUNCIL

PAGE TWO RUMJBT 52A C O N F I D E N T I A L
SCHEDULED FOR OCTOBER 5. GENERALS COUP WAS SUPPOSED TO HAVE TAKEN PLACE LAST WEEK BUT WAS POSTPONED TO OCTOBER 5.

3. ACCORDING THIS SOURCE, TERRITORIAL COMMANDER WEST JAVA (ADJIK) IS MOVING 70,000 TROOPS INTO DJAKARTA TONIGHT FOR ACTION AGAINST REBEL GROUP. THIS SOURCE SAID THERE WOULD BE MILITARY ACTION WHICH WOULD BE OVER BY SUNDAY. HE ADVISED AMERICANS TO STAY OUT OF WAY.

4. ACCORDING SOURCE GENERALS PLAN FOR COUP WAS MASKED BY INDONESIAN CENTRAL INTELLIGENCE (BPI).

5. COMMENT: WE EVALUATE ABOVE AS PROBABLY INDICATIVE THAT SOURCE WAS TOLD THIS BY SOME PRO-MASUTION/YANI ARMY LEADERS WHO MAY BE INDULGING IN WISHFUL THINKING RATHER THAN BEING WELL INFORMED.

GP-3.
GREEN

CONFIDENTIAL

COPY 183 LIBRARY

Laporan Dubes AS Marshall Green tentang Peristiwa G30S
1 Oktober 1965

www.facebook.com/indonesiapustaka

Laporan tentang situasi Indonesia oleh Kedubes AS di Jakarta, 2 Oktober 1965

EXE918
OO RUEPCR
DE RUEHCR 1359 2751035
ZNY CCCCC
O 020943Z
FM SECSTATE WASHDC
INFO RUEPCR/NSA
RUEHIA/USIA
RUEHOT/USUN
O 020710Z
FM AMEMBASSY DJAKARTA
TO RUEHCR/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 810
RUEPCR/WHITE HOUSE IMMEDIATE UNN
RUHLHS/CINCPAC IMMEDIATE UNN
RUEPIA/CIA IMMEDIATE UNN
RUEKDA/DOD IMMEDIATE UNN
INFO RUHPAS/AMEMBASSY CANBERRA PRIORITY 59
RUHJKL/AMEMBASSY KUALA LUMPUR PRIORITY 120
RUFHOH/AMEMBASSY LONDON PRIORITY 65
RUHJRA/AMEMBASSY MANILA PRIORITY 203
RUHJCR/ARCONSUL MEDAN PRIORITY 199
RUHJSN/ARCONSUL SINGAPORE PRIORITY 96
ZEN/ARCONSUL SURABAYA
RUALOT/AMEMBASSY TOKYO PRIORITY 71
RUE R/AMEMBASSY WELLINGTON PRIORITY 31
STATE GRNC
BT
C O N F I D E N T I A L A L OCTOBER 2, 1965

CONFIDENTIAL

DECLASSIFIED
Authority STATE 6-4-75
By MIE, Nadia, Inc. 6-19-75

CINCPAC FOR POLAD

MANILA FOR FELS/RSG

JOINT SITREP NO. 6

1. UNTIL ABOUT 1000, CITY AD AIR OF NEAR NORMALCY THIS MORING WITH EXCEPTING THAT TRAFFIC ON STREETS MUCH LIGHTER THAN USUAL. TELCOMMUNICATIONS BUILDING, RADIO STATION, PALACE, AND ARMY RESIDENCES AGAIN UNDER HEAVY GUARD, AND ANTI-AIRCRAFT GUNS HAVE BEEN MOVED ONTO PLAZA IN FRONT OF EMBASSY AND OTHER OPEN SQUARES IN CITY. LATTER MAY BE IN ANTICIAPATION OF POSSIBLE AIR FORCE COUNTER ACTION. AIR

COPY LBJ LIBRARY

Laporan Dubes AS Marshall Green tentang Peristiwa G30S
2 Oktober 1965

www.facebook.com/indonesiapustaka

NO FOREIGN DISSEM

OCI No. 2330/65

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
Office of Current Intelligence
6 October 1965

INTELLIGENCE MEMORANDUM

The Upheaval in Indonesia

SUMMARY

The Indonesian army, having countered what appears to have been a leftist coup on 1 October, is for the time being firmly in control of Indonesia. It would like to use the opportunity to take strong steps against the Indonesian Communist Party (PKI) and elements allied with it. It would be reluctant to take decisive action, however, without the approval of President Sukarno. Sukarno, in the interest of national unity and probably fearing the ascendency of the army, has asserted that the present situation is a political problem that requires a political settlement and that he wishes to settle it himself. He apparently hopes to conciliate the leftists and return the Communist Party to the favorable political position it enjoyed prior to the events of 1 October.

NO FOREIGN DISSEM
SECRET

COPY LBJ LIBRARY

Ringkasan Memorandum CIA tentang G30S, 6 Oktober 1965

www.facebook.com/indonesiapustaka

EHX-950
OO RUEPWW
DE RUEHCR 594 2741615
ZNY CCCCC
O 011555Z
FM SECSTATE WASHDC
INFO RUEPWW/WHITE HOUSE ATTN MR BUNDY
RUEPIA/CIA

RUEHDT/USUN
RUEHIA/USIA
O P 011500Z
FM AMEMBASSY DJAKARTA
TO RUEHCR/SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 801
INFO RUHLHQ/CINCPAC IMMEDIATE
RUHPAG/AMEMBASSY CANBERRA PRIORITY 53
RUEKDA/DOD IMMEDIATE
RUMJKL/AMEMBASSY KUALA LUMPUR PRIORITY 114
RUMJMA/AMEMBASSY MANILA PRIORITY 193
RUMJCR/AMCONSUL MEDAN IMMEDIATE 191
RMJSN/AMCONSUL PRIORITY 90
ZEN/AMCONSUL SURABAJA IMMEDIATE 136
RUEHCR/AMEMBASSY WELLINGTON PRIORITY 25
STATE GRNC
BT
C O N F I D E N T I A L OCTOBER 1.

REFERENCE: EMBTEL 790

CINCPAC FOR POLAD

MANILA FOR FELG/RSO

JOINT SITREP NO.2.

1. CITY REMAIN OUTWARDLY CALM, WITH TRAFFIC MOVING NORMALLY IN MOST AREAS. AS OF 1900, FEWER TROOPS IN EVIDENCE IN CITY. TROOPS WITHDREW FROM EMBASSY AREA AND CENTRAL TELECOMMUNICATIONS BUILDING ROUT 1600. STREETS IN FRONT OF PALACE AND HOMES OF SENIOR ARMY OFFICERS ARE STILL CLOSED. MOST ACCESS

Authority STATE 6.4.75
By MIE 6.19.75

CONFIDENTIAL

COPY LBJ LIBRARY

Laporan lain Dubes AS Marshall Green tentang G30S, 1 Oktober 1965

www.facebook.com/indonesiapustaka

INDEX

A

A.H. Nasution 88, 95,242
Abduh 266
Abdul Latief 162, 163, 176
ABRI 230, 236, 243, 248
Achmad Yani 117,163
Adam Malik 60, 70
al-Afghani 40, 57
Ali Murtopo 231
Allen Dulles 85, 94, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 129
Amerika 7, 16, 20, 67, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 92, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 149, 150, 151, 154, 156, 160, 164, 216, 217, 219, 220, 239, 272, 286
anti-elitisme 42, 46
anti-imperialisme 39
Antonie C.A. Dake 143, 148
Arifin C. Noer 172
ASEAN 232
ateis 150, 162, 194

B

Bakorstanas 236
Barbara S. 270
Belanda 12, 28, 30, 43, 46, 49, 51, 53, 54, 56, 60, 63, 64, 66, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 94, 126, 134, 135, 179, 180, 207, 214, 223, 228, 229, 234, 243, 250, 262, 265
Berita Yudha 170
Bernhard Dahm 35, 50, 67, 69, 238
Blok Barat 16, 83, 98, 105, 132
Blok Timur 16, 84, 98

C

Cakrabirawa 161
CIA 4, 7, 16, 17, 76, 85, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 139, 146, 151, 152, 154, 155, 157, 219, 269, 270, 271, 279

www.facebook.com/indonesiapustaka

Cina 48, 56, 66, 86, 87, 132, 134, 164, 168, 207, 216, 217
Clifford Geertz 265
Conefo 67
"containment policy" 85

D

Daniel Lev 95, 125, 143, 176, 215, 219, 221, 239, 241, 242, 262, 263
Dekrit Presiden 216, 243
Demokrasi Terpimpin 31, 32, 61, 116, 206, 208, 209, 216, 220, 226, 239
Den Haag 82, 135
DPR 228, 230, 236
DPR-GR 228
Dwi Fungsi ABRI 243
Dwight D. Eisenhower 76, 139

E

elite metropolitan 57, 58, 61

F

Fikiran Rakyat 51, 55, 69
Frank Church 99
Front Coklat 224

G

G30S 143, 150, 154, 157, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 172, 174, 176, 229, 250, 270, 277, 278, 279, 280
Gerakan Tigapuluh September 17, 144, 146, 162, 167, 181
Gerwani 161, 166, 181
Gestapu 161, 170
Golkar 195, 234, 247, 263
Guru Bangsa 7, 201, 202, 210, 212, 213, 215, 217

H

Hamengku Buwono IX 261
Harry S. Truman 76, 77
Hatta 18, 27, 30, 45, 46, 56, 59, 60, 64, 80, 82, 89, 95, 213, 214, 223, 225, 226, 261
Herbert Feith 35, 176, 220
HOS Cokroaminoto 28
Howard P. Jones 110, 119, 124

I

imperialisme 14, 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 49, 53, 56, 57, 62, 66, 67, 68, 71, 194, 221
Inggris 76, 78, 80, 98, 114, 115, 120, 126, 165, 207
Irian Barat 82, 190
Islam 37, 38, 40, 42, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 66, 69, 189, 223, 224, 225, 238, 265, 271, 272
ITB 27, 28, 233

J

Jawa Barat 159, 175, 239
Jawa Tengah 144, 145, 146, 155, 159, 167, 168, 173, 190, 243
Jawa Timur 144, 145, 146, 159, 167, 168, 239
John Foster Dulles 85, 86, 94, 95, 104, 108
John M. Allison 106, 110
John Smith 103
Jong Java 43

www.facebook.com/indonesiapustaka

K

KAA 99
kapitalisme 39, 42, 46, 47, 48, 49, 56, 62, 66, 194, 204, 207, 208, 224
Karl Marx 44, 62
Kaum Marhaen 44, 46, 55
kesadaran sejarah 195, 196, 250
Klopper 27, 28, 32
KMB 82, 83
KNIL 180, 229
kolonialisme 7,14, 25, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 66, 67, 71, 76, 194, 221, 223, 224
Komisi church 99
Komunisme 77, 81, 85, 87, 89, 101, 106, 125, 131, 134, 174, 183, 217
Konferensi Asia-Afrika 98, 100, 135
Konferensi Meja Bundar 82, 135
kromo 43, 51

L

Lubang Buaya 161, 166, 170

M

Marhaen 4, 7, 16, 29, 35, 44, 46, 55, 209
Marhaenisme 43, 44, 55, 222
Marshall Green 78, 150, 152, 156, 277, 278, 280
Marxisme 37, 38, 40, 47, 48, 52, 54, 55, 58, 225, 285
Masyumi 100, 101, 228, 243, 244, 245, 246, 262
McVey 44, 51, 58, 69, 70, 157, 176, 269, 270
"Memanggang Kaki Sukarno" 101, 102
MPR 227, 228, 230, 231, 233, 236, 246

N

nasionalisme 37, 38, 40, 47, 52, 54, 58, 70, 203, 225, 234, 265
Nasution 266
ngoko 43, 51
NIP 63
non-kooperasi 38, 46, 47, 50, 52, 56, 64, 223
NU 244, 262

O

Orde Baru 7, 34, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 195, 234, 237, 246, 249, 251, 254
Orde Lama 180, 216
Otoritarianisme 195, 286

P

Pangkostrad 163, 229
Papua Barat 249, 253, 254
partai komunis 63, 146, 183, 187, 244, 265, 266
Partindo 42, 50, 56, 58
PDI 236, 247
penguasa tunggal 8, 221, 222, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 256, 259, 261
Perang Dingin 14, 16, 75, 80, 97, 98, 125, 150, 160, 164, 216, 217, 241, 266, 286

www.facebook.com/indonesiapustaka

Perang Dunia II 78, 80, 127, 216
periode hipnotis kolektif 60
Peristiwa 27 Juli 1996 248
Peristiwa Madiun 81, 85, 134, 265
pesta harum bunga 161, 170
PID 30
PKI 4, 17, 61, 63, 85, 93, 95, 105, 107, 110, 115, 135, 154, 157, 159, 164, 166, 168, 170, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 228, 232, 233, 248, 249, 257, 258, 260, 262, 263, 269, 270, 286
PNI 49, 50, 51, 53, 58, 64, 71, 100, 101, 230, 244, 262
Politik Ingatan 7
PPP 247, 263
PPPKI 42
Pramoedya Ananta Toer 34, 35, 192, 201, 216, 218, 261, 272
PRRI 16, 95, 97, 113, 114, 136, 149, 227, 243

R

Radicale Concentratie 29
Romo Mangun 194, 261
RPKAD 146

S

Santa Cruz 249
Sarekat Islam 38, 63, 223
Sayuti Melik 30
SEATO 90, 98
SESKOAD 229
SI Merah 63
SI Putih 63
SOB 215, 219, 227, 242, 262
Soegijapranata 261
Soeharto 8, 18, 146, 163, 176, 180, 184, 219, 222, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 241, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 259, 263, 265, 270, 271
"soldiers of fortune" 119
sosialisme 38, 40, 44, 203
Special Group 103, 104
Subandrio 230, 231, 239, 272
Sukarni 30
Sukarno 8, 14, 16, 17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 116, 117, 124, 127, 135, 137, 138, 143, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 157, 163, 164, 166, 181, 201, 202, 203, 205, 206, 209, 211, 214, 217, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 237, 238, 239, 241, 242, 244, 246, 256, 257, 259, 262, 263, 265, 266, 269, 270, 272
Syafruddin Prawiranegara 113
Syahrir 27, 46, 60, 64, 223, 261

T

Takashi Shiraishi 63
TNI AD 170
7, 141, 143, 149

www.facebook.com/indonesiapustaka

Tragedi 7, 17, 138, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 154, 156, 159, 160, 168, 172, 173, 174, 175, 184, 186, 195, 250, 272
Try Sutrisno 236

U

Uni Soviet 16, 77, 80, 81, 122, 125, 134, 164, 208, 216, 217
Untung 144, 146, 160, 161, 162, 166, 167, 173
UUD '45 227, 243

V

van der Kroef 68

www.facebook.com/indonesiapustaka

TENTANG PENULIS

BASKARA T. WARDAYA SJ, belajar di Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, AS dari tahun 1993 hingga 2001. Dari universitas tersebut ia menerima gelar Master (1995) dan Doktor (2001), keduanya di bidang Sejarah. Kini ia mengajar dan bertugas sebagai Direktur Pasca-Sarjana di Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta. Selain mengajar di Program Pasca-Sarjana Universitas Gadjah Mada dan menjadi konsultan untuk Jesuit Refugee Service (JRS) Asia-Pasifik di Bangkok, ia juga bekerja sebagai direktur PUSdEP (Pusat Sejarah dan Etika Politik) USD. Tahun 2004-2005 ia menerima beasiswa untuk program *post-doctoral* Fulbright guna melakukan penelitian Sejarah di AS.

Buku-bukunya yang sudah diterbitkan antara lain *Indonesia dan Masalah-masalah Pembangunan* (1986, co-editor); *Riset Partisipatoris Riset Pembebasan* (1993, co-editor); *Spiritualitas Pembebasan* (1995); *Mencari Demokrasi* (1999, Editor); *Menuju Demokrasi: Politik Indonesia dalam Perspektif Sejarah* (2001, Editor); *Marx Muda: Marxisme Berwajah Manusiawi* (2003); *Pembebasan Manusia* (2004, Editor); *Bung Karno*

www.facebook.com/indonesiapustaka

Menggugat (2006); *Chicago, Chicago: Cinta, Politik dan Kemanusiaan di Negeri Paman Sam* (2006); *Cerdas dan Humanis* (2006); *Cold War Shadow: U.S. Policy Toward Indonesia, 1953-1963* (2007); *Membongkar Supersemar* (2007); *Menelusuri Akar Otoritarianisme di Indonesia* (2007, co-editor); *Sejarah yang Memihak* (2008, co-editor); *Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin 1953-1963* (2008). Dia juga menulis artikel di sejumlah jurnal, majalah, dan surat kabar di Indonesia maupun di tempat-tempat lain.

Penulis dapat dihubungi lewat: baskaramu@yahoo.com

www.facebook.com/indonesiapustaka

BUNG KARNO MENGGUGAT!

Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30S

"Comprehensive and well-researched..."
— The Jakarta Post 14/03/06

"Melalui buku ini kita tidak hanya diajak membicarakan Bung Karno, tetapi juga diundang melihat dan mendengarkan bagaimana Bung Karno berbicara (dan bertindak)."
— Kompas 26/11/06

"Mengurai hal-hal yang selama ini mungkin kurang diperhatikan namun sebenarnya punya implikasi penting."
— Republika 26/03/06

"Banyak memberi informasi baru sekaligus perspektif lain."
— Bali Post 01/10/06

Dengan melalui Bung Karno sebagai fokus sekaligus benang merah, buku Anda ini berusaha "menggugat" kembali sejumlah narasi penguasa yang telah terlanjur beredar mengenai berbagai peristiwa dan gagasan penting dalam sejarah politik sejak jaman pergerakan hingga kemerdekaan Indonesia. Hasilnya bukan hanya paparan yang berbeda dengan paparan yang biasa kita dengar, melainkan juga rangsangan untuk mengembangkan wawasan dan berpikir lebih kreatif.

Digugat kembali, misalnya, antara pemikiran-pemikiran Bung Karno muda dan Bung Karno tua; Bung Karno dalam kaitan dengan Tragedi '65; corak kepemimpinan Presiden Sukarno dibandingkan dengan model kepemimpinan Presiden Soeharto; peran asing dalam dinamika politik Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno; serta konsekuensi dari semua itu atas pemahaman sejarah Indonesia, berikut implikasi-nya terhadap apa yang sedang berlangsung sekarang ini.

Semuanya disampaikan dalam gaya bertutur yang akademik dan ilmiah, namun sekaligus intim dan memikat. Tak mengherankan jika edisi pertama hingga keenam buku ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Edisi ketujuh yang sedang Anda pegang ini tidak hanya hadir dengan penampilan yang berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, melainkan juga diperkaya dengan bahan-bahan baru yang segar dan inspiratif. Hasilnya: makin lengkap, makin menggugah!

GALANG PRESS

PENERBIT GALANGPRESS (Anggota Ikapi)
Gedung Galangpress Center
Jln. Mawar Tengah No.72 Baciro Yogyakarta 55225
Tlp: (0274) 554985, 554986 Faks: (0274) 556086
email: redaksi@galangpress.com
www.galangpress.com

Buku adalah Gizi, maka Kami Peduli

ISBN: 978-602-8174-29-9
9 786028 174299
Sejarah

www.facebook.com/indonesiapustaka